



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(R K P D)

KABUPATEN BELU
TAHUN 2022



**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Belu**

Tahun 2021



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Belu Tahun 2022.
- Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB VII : Penutup.

- (3) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belu.
- (2) RKPD mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2022 sampai Desember 2022.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal Juni 2021

BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua
pada tanggal Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

FRANS MANAFE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi | i |
| Daftar Tabel | ii |
| Daftar Gambar | ii |
| BAB I Pendahuluan | I. 1 |
| 1.1 Latar Belakang | I. 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I. 3 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I. 7 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I. 9 |
| 1.5 Sistematikan Penulisan | I. 10 |
| BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah | II. 1 |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi | II. 1 |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II. 48 |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum | II. 83 |
| 2.4 Aspek Daya Saing Daerah | II. 172 |
| BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan | III. 1 |
| 3.1 Kerangka Ekonomi Daerah | III. 1 |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III. 18 |
| BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah | IV. 1 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Daerah | IV. 1 |
| 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022..... | IV. 7 |
| BAB V Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2021 | V. 1 |
| BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | VI. 1 |
| BAB VII Penutup | VII. 1 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------|
| Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Belu | II 2 |
| Tabel 2.2 Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu | II 2 |
| Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Belu | II 6 |
| Tabel 2.4 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Belu | II 6 |
| Tabel 2.5 Bencana Alam Yang Terjadi di Kabupaten Belu..... | II 19 |
| Tabel 2.6 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 21 |
| Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu Tahun 2018 | II 8 |
| Tabel 2.5 Bencana Alam yang ditimbulkan di Kabupaten Belu Tahun 2017 | II 10 |
| Tabel 2.6 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2017..... | II 13 |
| Tabel 2.7 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2019 | II 24 |
| Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 24 |
| Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019..... | II 27 |
| Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II 28 |
| Tabel 2.11 Jenis Kriminal dan angka Kriminalis di Kabupaten Belu | II 34 |
| Tabel 2.12 Prosentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang dimiliki 2016 s/d 2018 | II 38 |
| Tabel 2.13 Prosentase Penduduk Kabupaten Belu yang memiliki Lahan Berdasarkan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Pada Tahun 2015 s/d 2019 | II 42 |
| Tabel 2.14 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belu Tahun 2018/2019 | II 46 |
| Tabel 2.15 Jumlah Gedung Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belu Tahun 2018/2019..... | II 48 |
| Tabel 2.16 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Belu Tahun 2019..... | II 49 |
| Tabel 2.17 Jumlah Presentase Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kategori di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 51 |
| Tabel 2.18 Panjang jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2018 | II 53 |
| Tabel 2.19 Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2017..... | II 53 |
| Tabel 2.20 Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2018 | II 53 |
| Tabel 2.21 Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2019 | II 54 |
| Tabel 2.22 Panjang dan Saluran Irigasi di Kabupaten Belu Tahun 2019... | II 55 |
| Tabel 2.23 Rumah Khusus dan Rumah Swadaya Terbangun di | |

| | |
|--|-------|
| Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II 56 |
| Tabel 2.24 Drainase Terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II 56 |
| Tabel 2.25 Jaringan Air Bersih Terbangun Tahun 2015 s/d 2019 | II 58 |
| Tabel 2.26 Indikator Kinerja Urusan Ketentramana, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2015s/d 2019 | II 62 |
| Tabel 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Belu Tahun 2015 dan 2019 | II 64 |
| Tabel 2.28 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019..... | II 65 |
| Tabel 2.29 Luas lahan Kristis dan Sangat di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 68 |
| Tabel 2.30 Presentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2018 | II 68 |
| Tabel 2.31 Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2019..... | II 69 |
| Tabel 2.32 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 69 |
| Tabel 2.33 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2019..... | II 70 |
| Tabel 2.34 Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 70 |
| Tabel 2.35 Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 71 |
| Tabel 2.36 Cakupan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 72 |
| Tabel 2.37 Cakupan Kegiatan Keluarga Berencana di Kabupaten Belu Tahun 2016-2019 | II 73 |
| Tabel 2.38 Rute Angkutan Umum di Kabupaten Belu Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 74 |
| Tabel 2.39 Desa Yang Memiliki Webside di Kabupaten Belu Tahun 2019 . | II 76 |
| Tabel 2.40 Potensi Pengguna Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Belu Tahun 2017-2019 | II 76 |
| Tabel 2.41 Organisasi Perangkat Daerah yang telah Memiliki Webside di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 77 |
| Tabel 2.42 Keadaan Koperasi di Kabupaten Belu Tahun 2018 | II 78 |
| Tabel 2.43 Cakupan Kegiatan Penerbitan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kabupaten Tahun 2015-2019 | II 79 |
| Tabel 2.44 Cakupan Pengeluaran Izin Berdasarkan Jenis Izin di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 | II 79 |
| Tabel 2.45 Jumlah dan Kondisi Prasarana Olahraga di Kota Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 80 |
| Tabel 2.46 Jumlah Jumlah Klup Olahraga di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 80 |
| Tabel 2.47 Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 81 |
| Tabel 2.48 Cakupan Lembaga Di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II 82 |
| Tabel 2.49 Cakupan Kegiatan Kebudayaan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2019 | II.82 |

| | |
|---|--------|
| Tabel 2.50 Cakupan Kegiatan Perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2018-2019 | II.83 |
| Tabel 2.51 Janis Dokumen Arsip Daerah Kabupaten Belu tahun 2018-2019 | II.83 |
| Tabel 2.52 Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2015-2018 | II.84 |
| Tabel 2.53 Produk Olahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.84 |
| Tabel 2.54 Nama dan Tempat Wisata di Kabupaten Belu Tahun 2019..... | II.85 |
| Tabel 2.55 Cakupan Indikator Program Pariwisata di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 | II.87 |
| Tabel 2.56 Tingkat Produksi Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Belu Tahun 2015-2018 | II.88 |
| Tabel 2.57 Tingkat Prduksi Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Belu Tahun 2015-2018 | II.89 |
| Tabel 2.58 Luas Lahan (Ha) dan Prroduksi Tanaman (Ton) Tanaman Perkebunan di Kabupaten Belu Tahun 2015-2018 | II.89 |
| Tabel 2.59 Populasi ternak di Kabupaten Belu Tahun 2015-2018 | II.90 |
| Tabel 2.60 Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2015-2018 ... | II.91 |
| Tabel 2.61 Ruas Jalan, Status Jalan Aksesting dan Panjang Sabuk Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.96 |
| Tabel 2.62 Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Bersih di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.96 |
| Tabel 2.63 Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.97 |
| Tabel 2.64 Jenis dan Jumlah Bank dan Unit Pembantu di Kabupaten Belu ahun 2017-2019 | II.100 |
| Tabel 2.65 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.100 |
| Tabel 3.1 Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2018 s/d 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 | III.11 |
| Tabel 3.2 Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2021 | III.15 |
| Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah di Kabupaten Belu Tahun 2018s/d 2019 dan Target/Proyeksi Tahun 2020 dan 2021 | III.17 |
| Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu tahun 2018 s/d 2021 | III.20 |
| Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Belu | IV. 3 |
| Tabel 4.2 Indikator Pembangunan Tahun 2021 | IV 24 |
| Tabel 4.3 Indikator Pembangunan Provinsi NTT | IV 26 |
| Tabel 4.4 Indikator Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021..... | IV 28 |
| Tabel 4.5 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Anggaran Rekapitulasi Progran/Kegiatan RKPD Tahun 2021 Pendukung Prioritas Nasional | IV 30 |
| Tabel 5.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Anggaran Rekapitulasi Progran/Kegiatan RKPD Tahun 2021 | V. 2 |

| | |
|---|------|
| Tabel 5.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012.. | V.21 |
| Tabel 6.1 Penetapan Indikator Utama (IKU) Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2021 | VI.1 |
| Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kunci (IKK) Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2021 | VI.3 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Belu | II.1 |
| Gambar 2.2 Peta Kelerengan di Kabupaten Belu | II.4 |
| Gambar 2.4 Peta Sumber Mata Air di Kabupaten Belu | II.7 |
| Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu | II.8 |
| Gambar 2.6 Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu | II.9 |
| Gambar 2.7 Peta Kesesuaian Lahan di Kabupaten Belu | II.16 |
| Gambar 2.8 Peta Pengembangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Belu 2020-2040..... | II.18 |
| Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu | II.20 |
| Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.22 |
| Gambar 2.11 Data Kelahiran, Kematian, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.23 |
| Gambar 2.13 Perbandingan Laju Insfalsi Kabupaten Belu Dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2015 s/d 2019 | II.29 |
| Gambar 2.14 Perbandingan PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2015 s/d 2019 | II.30 |
| Gambar 2.15 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2015 s/d 2019 | II.31 |
| Gambar 2.16 Perbandingan IPM Kabupaten Belu Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2015 s/d 2019 | II.32 |
| Gambarl 2.17 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Belu Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d 2018 | II.33 |
| Gambar 2.18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2015 s/d 2019 | II.33 |
| Gambar 2.19 Presentase Melek Huruf Kabupaten Belu Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2015 s/d 2019 | II.36 |
| Gambar 2.20 Perbandingan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2015 s/d 2019 | II.36 |
| Gambar 2.21 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2015 s/d 2019 | II.37 |
| Gambar 2.22 Angka Kebatian Bayi (AKB) dan Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II.39 |
| Gambar 2.23 Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu dan Indonesia Tahun 2015 s/d 2019 | II.40 |
| Gambar 2.24 Presentase BALita Gizi Buruk KAbupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II.41 |
| Gambar 2.25 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2017 s/d 2019 | II.42 |
| Gambar 2.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupetn Belu Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s/d 2019 | II.43 |
| Gambar 2.27 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.44 |

| | |
|---|-------|
| Gambar 2.28 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II.45 |
| Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2018 | II.46 |
| Gambar 2.30 Kasus HIV AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II.50 |
| Gambar 2.31 Kasus HIV AIDS Berdasarkan Umur di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II.50 |
| Gambar 2.32 Kasus HIV AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 | II.51 |
| Gambar 2.33 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Tahun 2019 | II.63 |
| Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 s/d 2021 dibandingkan Dengan Provinsi NTT..... | III.2 |
| Gambar 3.2 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 s/d 2021 dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional | III.4 |
| Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2019 dan Proyeksi 2020 s/d 2021 dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional | III.5 |
| Gambar 3.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Belu Tahun 2015 s/d 2018 dan Proyeksi 2019 s/d 2021 | III.6 |
| Gambar 3.5 Perkembangan PDRB Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 dan Proyeksi Tahun Tahun 2020 s/d 2021..... | III.8 |
| Gambar 3.6 Kontribusi Sektoral Terhadap Struktur PDRB Kabupaten Belu Tahun 2019 | III.8 |

DAFTAR SINGKATAN

1. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
4. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
5. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
6. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
7. SIMREDA : Sistem Informasi manajemen Perencanaan Daerah
8. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
10. PPAS : Penetapan Plafon Anggaran Sementara
11. RAPBD : Rencana Anggaran Pemerintah Daerah
12. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
13. RDTL : *Republic Democratic of Timor-Leste*
14. TTU : Timor Tengah Utara
15. NTT : Nusa Tenggara Timur
16. PKSNN : Pusat Kawasan Strategis Nasional
17. DAS : Daerah Aliran Sungai
18. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
19. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
20. CAT : Cakupan Air Tanah
21. CSR : *Corporate Sosial Responsibility*
22. RTH : Ruang Terbuka Hijau
23. DIBI : Data dan Informasi Bencana Indonesia
24. BPBD : Badan Penggulangan Bencana Daerah
25. HIV : *Human immunodeficiency Virus*
26. AIDS : *Acquired Immune Deficiency Syndrome*
27. SDA : Sumber Daya Alam
28. KK : Kepala Keluarga
29. KB : Keluarga Berencana
30. SDM : Sumber Daya Manusia
31. SD : Sekolah Dasar
32. TTS : Timur Tengah Selatan

33. NTB : Nusa Tenggara Barat
34. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
35. ADHb : Atas Dasar Harga Berlaku
36. ADHk : Atas Dasar Harga Konstan
37. BPS : Badan Pusat Statistik
38. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
39. BOD : *Biochemical Oxygen Demand*
40. COD : *Chemical Oxygen Demand*
41. IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42. IKA : Indeks Kualitas Air
43. IKU : Indeks Kualitas Udara
44. ITL : Indeks Tutupan Lahan
45. ITH : Indeks Tutupan Hutan
46. UKL : Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup
47. UPL : Upaya pemantauan Lingkungan hidup
48. TPS : Tempat Penampungan Sampah
49. HPL : Hak pengelolaan
50. HGB : Hal Guna Bangunan
51. AMH : Angka Melek Huruf
52. UNDP : *United Nation Development Program*
53. HLS : Harapan Lama Sekolah
54. APK : Angka Partisipasi Kasar
55. APM : Angka Partisipasi Murni
56. SD : Sekolah Dasar
57. MI : Madrasah Ibtidaiyah
58. SMP : Sekolah Menengah Pertama
59. MTs : Madrasah Tsanawiyah
60. PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
61. SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
62. SMA : Sekolah Mengengah Atas
63. TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
64. AKI : Angka Kematian Ibu
65. AKHB : Angka Kelangsungan Hidup Bayi
66. AKB : Angka Kematian Bayi

67. AKBA : Angka Kematian Balita
68. *SDGs* : *Sustainable Development Goals*
69. BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah
70. *VCT* : *Voluntary, Counseling, and Testing*
71. STBP : Survei Terpadu Biologis dan Perilaku
72. TBC : *Tuberculosis*
73. WHO : *World Health Organisation*
74. *PCR* : *Polymerase Chain Reaction*
75. TCM : Tes Cepat Molekuler
76. ODGJ : Orang Dengan Gangguan Jiwa
77. UKK : Usaha Kesehatan Kerja
78. DI : Daerah Irigasi
79. RTH : Ruang Terbuka Hijau
80. IMB : Ijin Mendirikan Bangunan
81. RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
82. KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Sederhana
83. PKSM : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
84. PSK : Pekerja Seks Komersil
85. PPH : Pola Pangan Harapan
86. AKE : Angka Kecukupan Energi
87. HM : Hak Milik
88. HGB : Hak Guna Bangunan
89. HP : Hak Pakai
90. LKPD : Laporan Kinerja Perangkat Daerah
91. IKL : Indeks Kualitas Lingkungan
92. KTP : Kartu Tanda Penduduk
93. KIA : Kesehatan Ibu Anak
94. GISA : Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
95. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
96. ADD : Alokasi Dana Desa
97. UED-SP : Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam
98. BUMDES : Badan Usaha milik Desa
99. LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
100. PKK : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

- 101. IDM : Indeks Desa Membangunan
- 102. TTG : Teknologi Tepat Guna
- 103. NKKBS : Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
- 104. PUS : Pasangan Usia Subur
- 105. LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk
- 106. TFR : *Total Fertility Rate*
- 107. BKB : Bina Keluarga Balita
- 108. BKR : Bina Keluarga Remaja
- 109. BKL : Bina Keluarga Lansia
- 110. KB : Keluarga berencana
- 111. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 112. KIM : Kelompok Informasi Masyarakat
- 113. UKM : Usaha Kecil Menengah
- 114. LEPMM : Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
- 115. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- 116. PMA : Penanaman Modal Asing
- 117. DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 118. SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan
- 119. TDU : Tanda Daftar Usaha
- 120. IUJK : Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- 121. PERDA : Peraturan Daerah
- 122. PERKADA : Peraturan Kepala Daerah
- 123. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 124. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
- 125. RB : Reformasi Birokrasi
- 126. PD : Perangkat Daerah
- 127. AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 128. LPPD : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 129. BP4D : Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 130. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- 131. PAD : Pendapatan Asli Daerah
- 132. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

133. SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah
134. Anjab : Analisis Jabatan
135. ABK : Analisis Beban Kerja
136. SPM : Standar Pelayanan Minimum
137. SPP : Standar Pelayanan Pemerintah
138. SOP : Standar Operasional Prosedur
139. LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
140. ILPPD : Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
141. LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
142. PPK : Pegawai dengan Perjanjian Kerja
143. ASN : Aparatur Sipil Negara
144. APIP : Aparat Pengawas Internal Pemerintah
145. SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
146. LKIP : Laporan kinerja instansi Pemerintah
147. OBRİK : Obyek Pemeriksaan
148. e-LHP : Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan
149. KPP : Kawasan Pengembangan Pariwisata
150. HMT : Hijauan Makanan Ternak
151. UTTP : Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya
152. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
153. DAU : Dana Alokasi Umum
154. NTP : Nilai Tukas Petani
155. ATM : Anjungan Tunai Mandiri
156. RT : Rumah Tangga
157. PLN : Perusahaan Listrik Negara
158. OSS – RBA : *Online Single Submission - Risk Based Approach*
159. IKU : Indikator Kinerja Utama
160. DBD : Demam Berdarah Dengue
161. KLB : Kejadian Luar Biasa
162. UCI : *Universal Child Immunization*
163. FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
164. STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
165. PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
166. TOGA : Taman Obat Keluarga

167. STPT : Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
168. SIPT : Surat Ijin Pengobatan Tradisional
169. PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
170. PSKS : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
171. PB : Perjanjian Bersama
172. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
173. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
174. SPPH : Sekolah Pembantu Penilik Higiene
175. KIA : Kartu Identitas Anak
176. GISA : Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
177. Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
178. Bumdes : Badan Usaha Milik Desa
179. Posyantek : Pos Pelayanan Teknis
180. LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk
181. *TFR* : *Total Fertility Rate*
182. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
183. KIM : Kelompok Informasi Masyarakat
184. IKK : Indikator Kinerja Kunci
185. PNF : Pendidikan Non Formal
186. IRB : Indeks Reformasi Birokrasi
187. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
188. TMP : Taman Makam Pahlawan
189. B3 : Bahan Beracun dan Beracun
190. MHA : Masyarakat Hukum Adat
191. KEHATI : Keanekaragaman Hayati
192. PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
193. LLAJ : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
194. KS : Keluarga Sejahtera
195. *ASFR* : *Age Specific Fertility Rate*
196. CPR : Centra Pengembangan Remaja
197. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
198. KSP : Koperasi Simpan Pinjam
199. USP : Usaha Simpan Pinjam
200. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik

- 201. SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- 202. Ekososbud : Ekonomi Sosial Budaya
- 203. HAM : Hak Asasi Manusia
- 204. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 205. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 206. FKA : Forum Kerukunan Lintas Agama
- 207. P3K : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
- 208. CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
- 209. KTI : Kawasan Timur Indonesia
- 210. ALKI : Alur Laut Kepulauan Indonesia
- 211. MEA : Masyarakat Ekonomi Asean
- 212. RI : Republik Indonesia
- 213. PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya
- 214. PRUKAB : Program Unggulan Kabupaten
- 215. Lokpri : Lokasi Prioritas
- 216. GRK : Gas Rumah Kaca
- 217. KKN : Korupsi Kolusi dan Neopotisme
- 218. Tusi : Tugas dan Fungsi
- 219. SIDa : Sitem Inovasi Daerah
- 220. R&D : *Research and Deveelopment*
- 221. YME : Yang Maha Esa

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah kabupaten Belu merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022, Pemerintah kabupaten Belu memasuki tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020, maka RPJMD kabupaten Belu Tahun 2021- 2026 baru akan disusun pada awal Tahun 2021. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal RKPD kabupaten Belu Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD kabupaten Belu tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 dan RPJMN 2020-2024.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi babak baru bagi Pemerintah kabupaten Belu dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan Sistem Informasi manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA), kini harus berganti menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan Rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai basis penyusunan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) Tahun 2022 sehingga penyusunan RKPD ini penting peranannya dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Belu.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Tahun 2010-2030; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Belu 102);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 27);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belu yang dituangkan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2022 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumen perencanaan Kabupaten Belu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pedoman penyusunan RKPD kabupaten Belu Tahun 2022 adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Pada penyusunan RKPD Tahun 2022, pemerintah kabupaten Belu sudah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilantik pada tanggal 26 April 2021. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026, meskipun belum memiliki RPJMD yang mengintegrasikan Visi, Misi, Kerangka dan Indikator Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022

akan diarahkan pada Visi, Misi, Kerangka dan Indikator Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut. Hal ini dilakukan agar terdapat keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD yang direncanakan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya pada bulan keenam setelah pelantikan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tahun 2022 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”** dengan 5 (lima) misinya yaitu:

1. meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.
2. meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
4. mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Terknologi Informasi.
5. meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Tema RKPD kabupaten Belu Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Melalui Percepatan Layanan Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi dan Jaringan Layanan Sosial”** dengan arah kebijakan meliputi:

1. pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat;
2. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan jaminan pelayanan kesehatan yang memadai;

3. peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan; dan
4. pemantapan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta peningkatan kualitas infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi sebagai pendukung utama kemapanan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2022 adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 antara DPRD Kabupaten Belu dengan Bupati Belu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah dan
4. menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2021, Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 Aspek Geografi dan Demografi

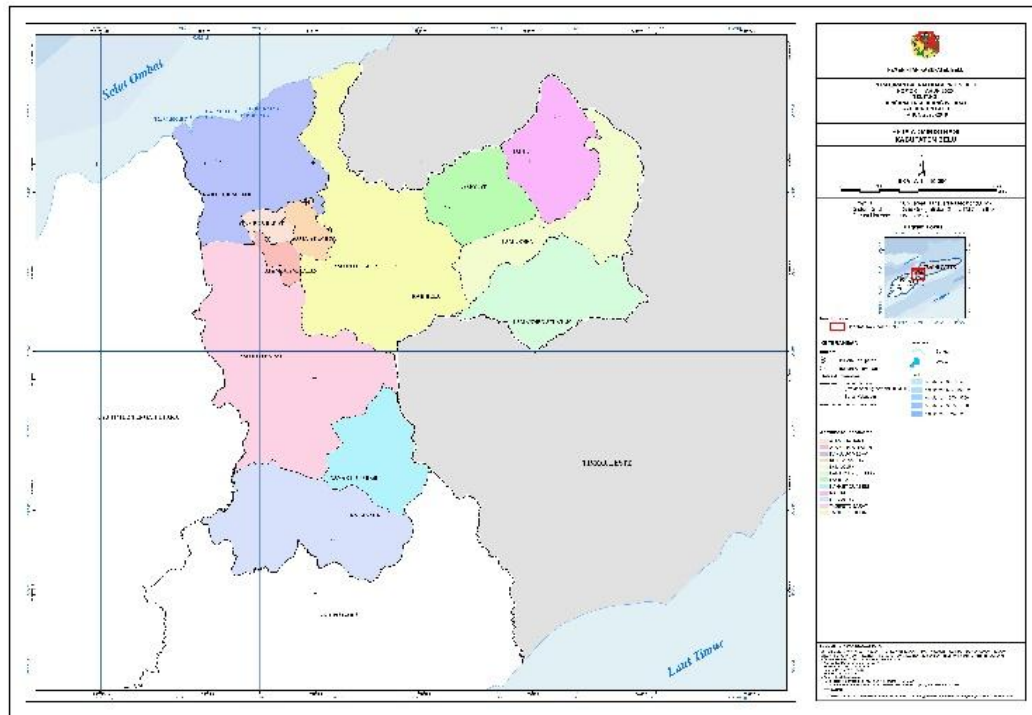
Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu lima tahun ke depan.

II.1.1 Kondisi Umum Geografis Daerah

II.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT- 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka, sebelah timur berbatasan dengan negara *Republic Democratic of Timor-Leste (RDTL)*, dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 229,914 km² atau 19,90% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Km ²) | Prosentase (%) |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Raimanuk | 9 | 129,924 | 11,55 |
| 2 | Tasifeto Barat | 8 | 223,914 | 19,50 |
| 3 | Kakuluk Mesak | 6 | 129,320 | 11,49 |
| 4 | Nanaet Duabesi | 4 | 67,818 | 6,03 |
| 5 | Kota Atambua | 4 | 16,301 | 1,45 |
| 6 | Atambua Barat | 4 | 10,994 | 0,98 |
| 7 | Atambua Selatan | 4 | 11,198 | 1,00 |

| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Km ²) | Prosentase (%) |
|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 8 | Tasifeto Timur | 12 | 209,477 | 18,62 |
| 9 | Raihat | 6 | 75,528 | 6,71 |
| 10 | Lasiolat | 7 | 61,492 | 5,47 |
| 11 | Lamaknen | 9 | 92,500 | 8,22 |
| 12 | Lamaknen Selatan | 8 | 96,674 | 8,59 |
| Total | | 81 | 1.125,14 | 100.00 |

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

II.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 149,1 km. Jumlah desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah |
|----|------------------|--|--------|
| 1 | Tasifeto Barat | Desa Lookeu | 1 |
| 2 | Nanaet Duabesi | Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoecka | 3 |
| 3 | Tasifeto Timur | Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau | 6 |
| 4 | Lasiolat | Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu | 4 |
| 5 | Raihat | Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin | 3 |
| 6 | Lamaknen | Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu | 5 |
| 7 | Lamaknen Selatan | Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberal, dan Debululik | 6 |

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kab. Belu, 2020

Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu

Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke enklave Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

II.1.1.3 Topografi

Kondisi Topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan ± 1500 m.dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu

| No | Kecamatan | Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng | | | | | | | |
|-------|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 0-2 | 2-5 | 5-8 | 8-15 | 15-22 | 22-30 | 30-45 | >45 |
| 1 | Atambua Barat | 0 | 3,830 | 5,448 | 0 | 0 | 0 | 1,717 | 0 |
| 2 | Atambua Selatan | 0 | 3,716 | 6,464 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0 |
| 3 | Kakuluk Mesak | 19,635 | 8,081 | 8,966 | 4,243 | 1,250 | 1,953 | 77,145 | 8,048 |
| 4 | Kota Atambua | 0 | 8,130 | 6,691 | 0,013 | 1,466 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lamaknen | 5,269 | 6,702 | 1,474 | 0,990 | 16,372 | 11,230 | 49,030 | 1,434 |
| 6 | Lamaknen Selatan | 0,022 | 0,125 | 0 | 0,823 | 15,735 | 17,739 | 62,231 | 0 |
| 7 | Lasiolat | 0,003 | 0,059 | 0,187 | 0,885 | 24,909 | 19,647 | 15,802 | 0 |
| 8 | Nanaet Duabesi | 0,044 | 0 | 0 | 0,495 | 6,25 | 28,525 | 7,894 | 24,61 |
| 9 | Raihat | 9,283 | 9,487 | 0,004 | 0,163 | 33,835 | 15,872 | 6,884 | 0 |
| 10 | Raimanuk | 0,004 | 21,628 | 4,805 | 34,403 | 2,230 | 41,921 | 24,934 | 0 |
| 11 | Tasifeto Barat | 0,030 | 35,757 | 29,288 | 70,298 | 25,035 | 19,352 | 6,862 | 37,292 |
| 12 | Tasifeto Timur | 84,550 | 18,386 | 99,387 | 0,003 | 7,114 | 0,022 | 0,016 | 0 |
| TOTAL | | 118,841 | 115,900 | 162,713 | 112,316 | 134,197 | 156,259 | 253,532 | 71,383 |

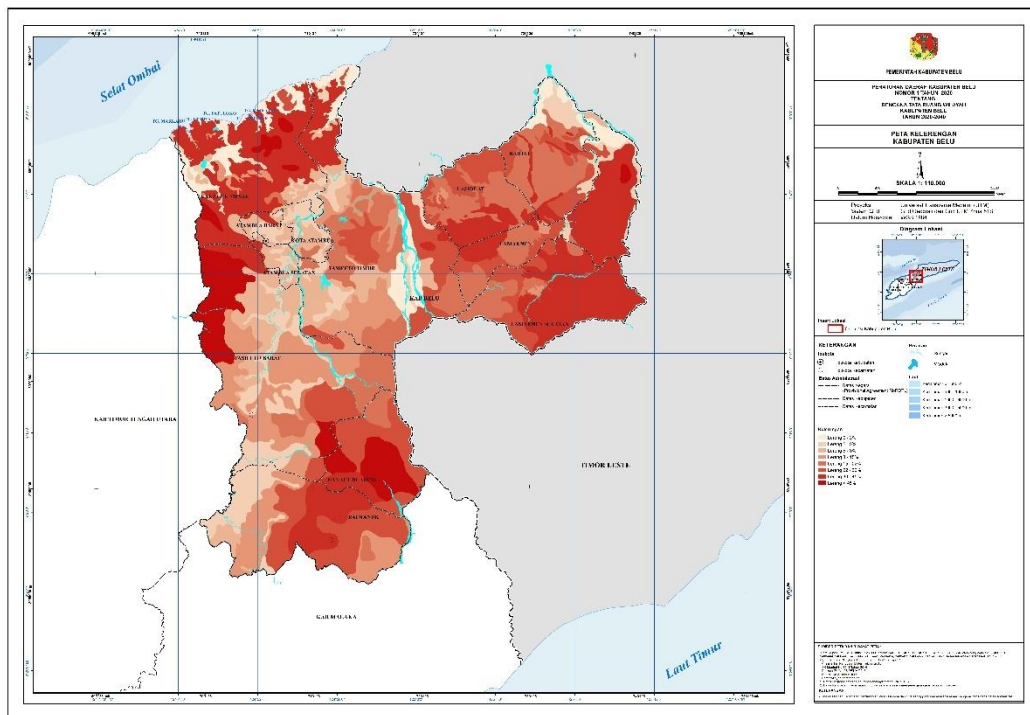
Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu akan dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelerengan 0-8 % atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.
2. Kelerengan 8-15 % atau kelerengan tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 15-25 % atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
4. Kelerengan 25-45 % atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
5. Kelerengan > 45 % atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.

Gambar 2.2.

Peta Kelerengan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020 - 2040

II.1.1.4 Geologi

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), di mana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.

e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, di mana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilsen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorall. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.

i. Alluvium

Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi

sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%, tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli

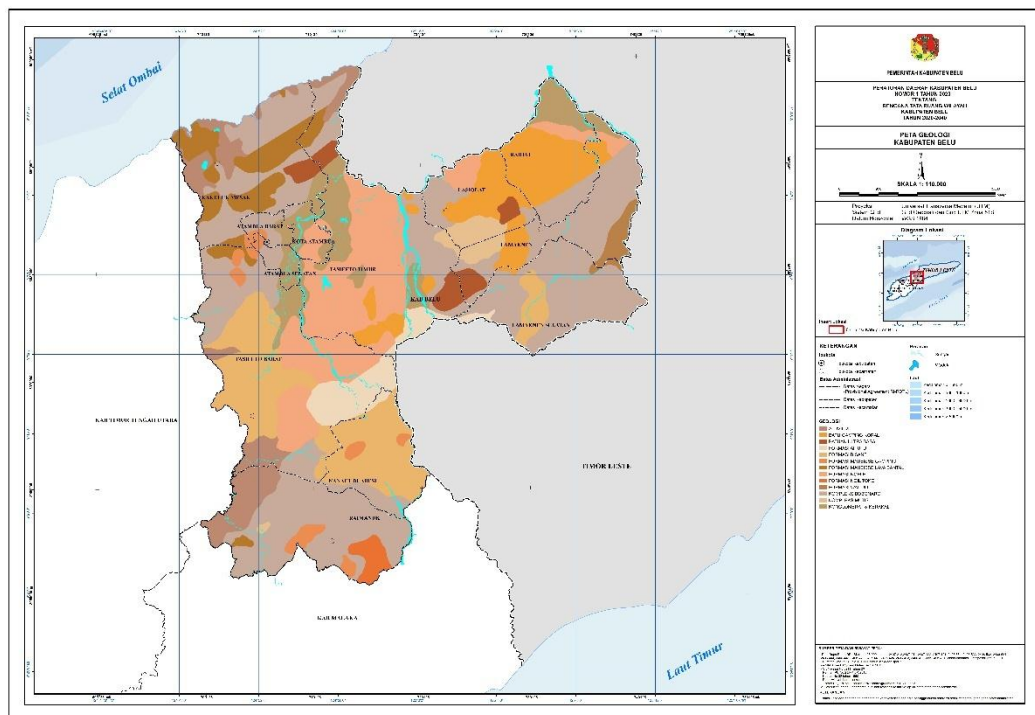
Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilitit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2 mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama.

Batu Kerakal adalah potongan batuan yang berukuran 150 – 250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.3.
Peta Geologi di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020 - 2040

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan sumber daya

mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.

b. Grumosol

Tanah grumosol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaian tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki pH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumosol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumosol ini. Jenis tanah Grumosol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm

hingga lebih dari 5 meter, tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, Tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain

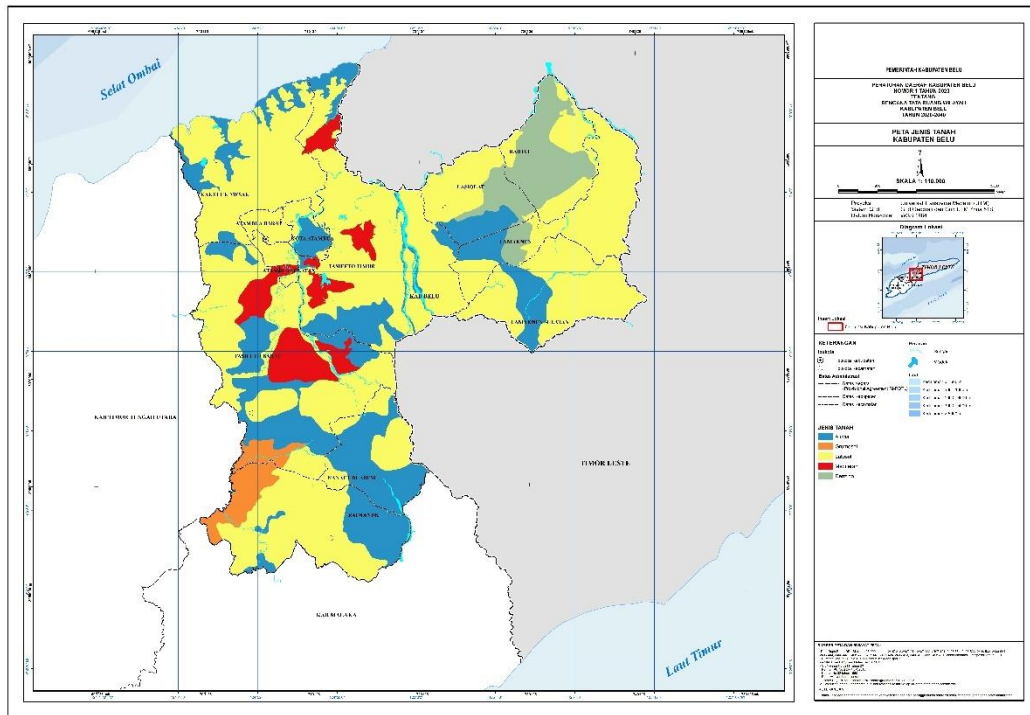
warnanya kehitaman serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik di atas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol. Tanah renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah rendzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Tabel 2.4.
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

| No | Jenis Tanah | Lokasi |
|----|-------------|---|
| 1 | Aluvial | Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk |
| 2 | Grumosol | Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat |
| 3 | Latosol | Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk |
| 4 | Mediterran | Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur |
| 5 | Renzina | Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat |

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

II.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

A. Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata – rata mata air berkisar antara 5 – 200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70 persen saat musim kemarau (September, Oktober dan November).

1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10 - 50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat horton dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (perennial), mengalir hanya pada musim hujan saja (intermiten), sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (ephemeral).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang di antaranya adalah DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.

2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Belu telah memanfaatkan 5 (lima) mata air. Berikut data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM:

Tabel 2.5
Nama Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu

| No. | Nama Sumber Air Baku | Jenis Sumber | Debit (lt/detik) | Wilayah Pelayanan |
|-----|----------------------|--------------|------------------|---|
| 1 | Lahurus | Mata air | 20 | Desa Lasiolat, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Manleten, Kelurahan Fatubenao, Kelurahan Beirafu, Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Tenukiik, Kelurahan Manumutin, Kelurahan Manuaman. |
| 2 | Wematan Tirta A | Mata air | 15 | Kelurahan Fatukbot, Kelurahan Rinbesi, Kelurahan Berdao, Kelurahan Atambua |
| 3 | Wematan Tirta C | Mata air | 12 | Kelurahan Rinbesi, Kel. Atambua, Kelurahan Berdao. |
| 4 | We Utu | Mata air | 15 | Kelurahan Manumutin, Kelurahan Tulamalae. |
| 5 | Sumur Bor Bautasik | Sumur bor | 5 | Desa Kabuna |
| 6 | We Kiar, We Banahi | Mata air | 2 | Desa Silawan |
| 7 | Sumur Bor Beilaka | Sumur bor | 5 | Desa Silawan |
| 8 | Sumur Bor Motabena | Sumur bor | 3 | Desa Silawan |

Sumber : Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu

Wilayah Kabupaten Belu memiliki sumber mata air yang tersebar di 11 wilayah kecamatan dari total 12 kecamatan. Secara kuantitas, potensi air baku dari sumber mata air berkisar antara 0.5 liter per detik sampai dengan 250 liter per detik. Secara kualitas sebagian besar sumber air yang ada cukup baik apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagian besar sumber mata air akan mengalami penurunan (defisit) jumlah debit pada saat musim kemarau di Agustus, September, Oktober dan November.

Adapun berikut ini tabel kelompok sumber mata air yang belum dimanfaatkan (belum ada jaringan atau pelayanan) secara

optimal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan guna menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu:

Tabel 2.6
Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu

| No. | Kecamatan | Desa | No | Sumber Air Baku | Debit Pengamatan (L/detik) | Debit Potensi (L/detik) | Kondisi |
|-----|----------------|---------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Tasifeto Timur | Halimodok | 1 | Mata Air Wekabaan | 3.00 | 2.10 | Reservoir distribusi dalam kondisi rusak dan saat ini sedang tidak digunakan |
| 2 | Tasifeto Barat | Derokfaturene | 2 | Mata Air Wehedafehan | 1 | 0.70 | rencana Pamsimas 2019 |
| | | | 3 | Tulatudik | 1 | 0.70 | Masih dalam tahap rencanapembangunan |
| | | Lookeu | 4 | Mata Air Likis | 11.53 | 8.07 | Masih belum ada eksistingpelayanan |
| 3 | Nanaet Duabesi | Dubesi | 5 | Mata Air Webot | 0.50 | 0.35 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masih dalam tahap pembangunan awal |
| | | Dubesi | 6 | Weuas | 1 | 0.70 | Rencana masyarakat swadaya pompa |
| | | Nanaenoe | 7 | Hutan Kopi | 1 | 0.70 | Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| | | | 8 | Dibawa Hutan Kopi | 3 | 2.10 | Masih dalam tahap rencanapembangunan |
| | | Dubesi | 9 | Tubaki | 2 | 1.40 | Masih dalam tahap rencanapembangunan |
| 4 | Raimanuk | Desa Teun | 10 | Mata Air Abatbuti 1 | 28.47 | 19.93 | Masih belum ada eksisting |
| | | Faturika | 11 | Wehanetan | 2 | 1.40 | Masih dalam tahap rencanapembangunan |
| 5 | Lasiolat | Desa Lakanmau | 12 | Mata Air Molosoan 1 | 17.60 | 12.32 | SPAM ini sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan |
| | | | 13 | Mata Air Molosoan 2/Motamoru | 40.48 | 28.34 | Masih belum ada eksisting |
| | | Desa Baudaok | 14 | Mata Air Wetihu | 246.90 | 74.07 | Belum terdapat jaringaneksisting |
| | | | 15 | Mata Air Wekaen | 2.88 | 2.02 | Masih belum ada eksisting |
| | | Desa Lasiolat | 16 | Mata Air Fafakur | 1.00 | 0.70 | Belum dimanfaatkan karena ada di bawah pemukiman |
| | | | 17 | Mata Air Fohowai | 1.00 | 0.70 | Belum dimanfaatkan karena ada di bawah pemukiman |
| | | Manaikun | 18 | Wesubaer | 2 | 1.40 | Masih dalam tahap rencanapembangunan |
| | | 6 | Raihat | Desa Maumutin | 19 | Mata Air Wesaseik | 1.08 |
| 7 | Lamaknen | Maudemu | 20 | - | 1 | 0.70 | Masih dalam tahap rencanapembangunan |

| No. | Kecamatan | Desa | No | Sumber Air Baku | Debit Pengamatan (L/detik) | Debit Potensi (L/detik) | Kondisi |
|-----|------------------|---------------|----|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 8 | Lamaknen Selatan | Desa Lakmaras | 21 | Mata Air Ilgubul | 1.94 | 1.36 | Masih belum ada eksisting pelayanan |
| | | | 22 | Mata Air Giraltui | 2.72 | 1.90 | Masih belum ada eksisting pelayanan |

Sumber : Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu

3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam di suatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.

Tabel 2.7
Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di
Kabupaten Belu Tahun 2019

| No. | Kecamatan | Lokasi | Nama Embung / Bendungan | Kondisi |
|-----|----------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | Tasifeto Timur | Desa Manleten | Embung Haekrit | Perlu diadakan pengerukan sedimen |
| | | Desa Dafala | Embung Sirani | Perlu diadakan pengerukan sedimen |
| 2 | Kakuluk Mesak | Desa Fatuketi | Bendungan Rotiklot | Kualitas air buruk, perlu dilakukan pengolahan sebelum dikonsumsi |

Sumber : Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu

a) Embung Sirani

Embung Sirani terletak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:

- 1) luas DAS : 230 Ha
- 2) panjang tanggul : 220 m
- 3) Ttinggi tanggul : 16,5 m
- 4) tampung kotor : 2.396.000 m³

Kapasitas debit terpasang Embung Sirani ± 20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari embung tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam embung terlalu tebal dan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.

b) Embung Haekrit

Embung Irigasi Haekrit adalah embung irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Embung Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Embung Haekrit sebesar 29,4 km² dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Embung Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 L/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c) Bendungan Rotiklot

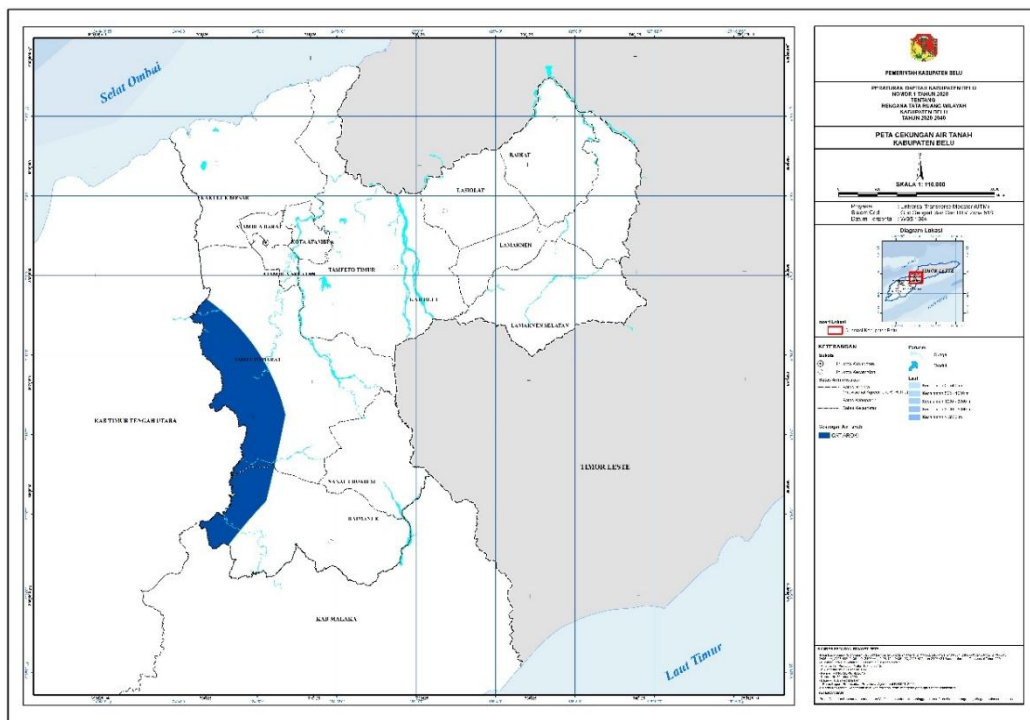
Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan perbatasan RI – RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m³ sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

B. Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Berbeda dengan air permukaan yang tidak mempunyai kapasitas penyimpanan dikarenakan air mengalir dengan cepat, air tanah mengalir lambat dan mempunyai kapasitas keseluruhan, ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.

Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air pada sumur – sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroki.

Gambar 2.5.
Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu



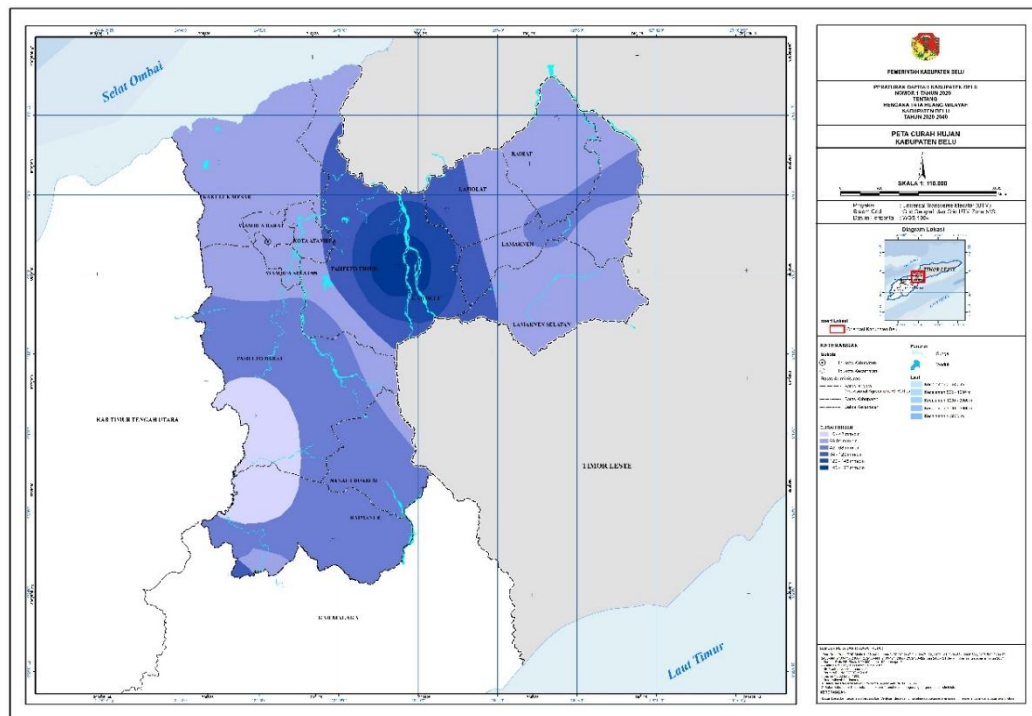
Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

II.1.1.6 Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24 - 34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei.

Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5°– 33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6.
Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

II.1.1.7 Hidro-Oceanografi

Hidro-oceanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

a) gelombang: hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah

gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30 m – 0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b) pasang surut: hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi $\pm 3,95\text{m}$ *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL) = + 1,89 m.

c) arus laut: Dalam laporan kajian aspek lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik di mana pada saat air surut arus mengarah ke timur laut dan barat laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir digitasi peta lingkungan laut NTT, 2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = - 0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena

dapat mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II- Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.

II.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pemukiman maupun fasilitas perdagangan lainnya. Penggunaan lahan ini mengindikasikan bahwa penambahan penggunaan lahan di salah satu sektor akan diikuti dengan pengurangan jenis lahan di sektor lainnya karena tidak adanya konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan berkaitan dengan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun uraian penggunaan lahan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (Km ²) | Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%) |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Air Danau/Situ | 1,37 | 0.12 |
| 2 | Air Rawa | 0,24 | 0.02 |
| 3 | Air Tawar Sungai | 19,21 | 1.71 |
| 4 | Bandara | 0,31 | 0.03 |
| 5 | Hutan Rawa | 2,85 | 0.25 |
| 6 | Hutan Rimba | 13,00 | 1.16 |
| 7 | Laut | 0,09 | 0.01 |
| 8 | Padang Rumput | 88,39 | 7.86 |
| 9 | Pasir/Bukit Pasir Darat | 0,13 | 0.01 |
| 10 | Perkebunan/Kebun | 45,80 | 4.07 |
| 11 | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 39,54 | 3.51 |
| 12 | Sawah | 40,96 | 3.64 |
| 13 | Semak Belukar/Alang-alang | 727,70 | 64.68 |

II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

II.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Kawasan Lindung di Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Kawasan Lindung | Luas (Ha) | Lokasi |
|----|----------------------------|-----------|---|
| 1. | Hutan Lindung | | |
| | Tukubesi | 272 | Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak |
| | Bifemnasi-Sonmahole | 8.536 | Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan |
| | Lakaan Mandeu | 21.712 | Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan |
| | Lakaan | 3.144 | Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen |
| | Fatukaduak | 1.700 | Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur |
| | Fatusakar | 9 | Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi. |
| 2. | Kawasan Resapan Air | 36.335 | terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi |
| 3. | Kawasan Sempadan Pantai. | 197 | sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur |
| 4. | Kawasan Sempadan Sungai | 2.255 | Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau |
| 5. | Kawasan Sekitar Bendungan | 80 | sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan |
| 6. | Kawasan Ekosistem Mangrove | 52 | hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak |

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Selain kawasan yang disebutkan di atas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

II.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 hektar;
 - b. kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
 - 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 hektar;
 - 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 hektar; dan
 - 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 hektar;
2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi :
- a. kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung;
 - c. kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah;

d. kawasan Peternakan meliputi :

- 1) kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain
- 2) kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe dan Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutolus;
- 3) kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa;
- 4) kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten;
- 5) kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus; dan
- 6) kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.

3. kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:

- a. kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;
- b. kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota

Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;

c. kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur; dan

d. sarana penunjang perikanan terdiri atas:

1) pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan

2) tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi :

a. kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;

b. kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat.; dan

c. kawasan pertambangan batuan meliputi :

1) potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;

2) potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;

- 3) potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
 - 4) potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 5) potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu
5. kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.
- Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
- a. sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - b. sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - c. sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
 - d. sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
 - e. sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan

f. sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gawang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi :

- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
- b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
- c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
- d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- e. Pantai Motaain (perbatasan RI –RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
- f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
- h. Air terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
- i. Rumah adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;
- j. Rumah adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;
- k. Rumah adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
- l. Rumah adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
- m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
- n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
- o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;

r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan; dan

s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.

8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :

a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;

b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;

c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;

d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI – RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;

e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;

f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat; dan

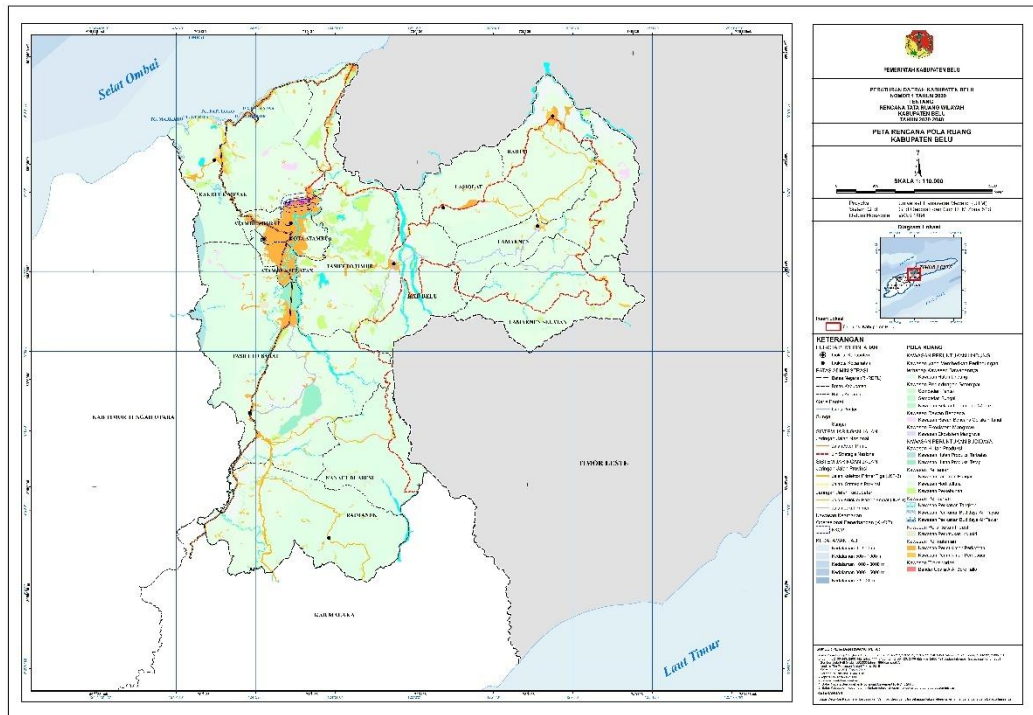
g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan

h. Pos angkatan laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha.

Gambar 2.8
Peta Pola Ruang Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

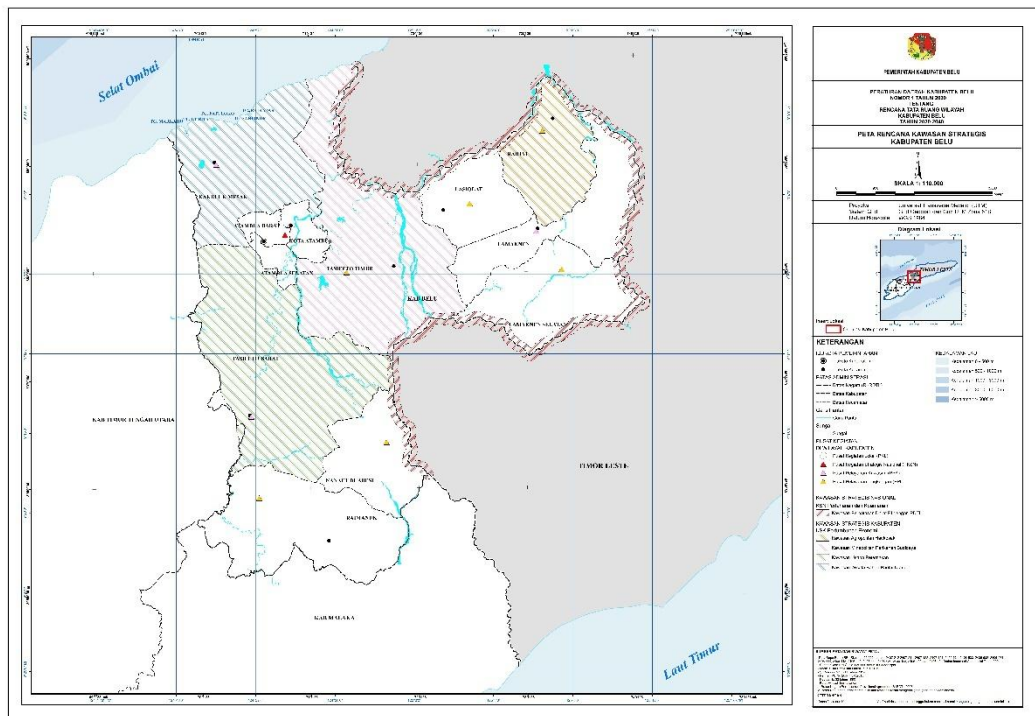
II.1.2.3 Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Raimanuk;

2. kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
4. kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.9
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

II.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca

ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem ,abrasi , epidemi dan wabah penyakit. Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. aspek geologi meliputi : gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10
Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu
Tahun 2020

| No. | Jenis Kawasan Rawan Bencana | Lokasi yang Berpotensi | |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|
| | | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
| 1 | Kawasan rawan banjir | Lamaknen | Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur |
| | | Tasifeto Timur | Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten |
| | | Raihat | Tohe, Maumutin, Asumanu |
| | | Tasifeto Barat | Naitimu, Lawalutulus, Rinbesihat, Naekasa |
| | | Kakuluk Mesak | Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna |
| | | Kota Atambua | Atambua, Fatubena, Tenukiik, Manumutin |
| | | Raimanuk | Teun, Tasain, Leuntolu, Rafae, Renrua |
| | | Lasiolat | Lasiolat |
| | | Lamaknen Selatan | Nualain, Lutarato, Lakmaras, Kewar |
| | | Atambua Barat | Umanen |
| | | Atambua Selatan | Fatukbot, Rinbesi |
| | | Nanaet Duabesi | Nanaenoe |
| 2 | | Lamaknen | Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas |
| | | Tasifeto Timur | Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, |

| No. | Jenis Kawasan Rawan Bencana | Lokasi yang Berpotensi | |
|-----|---------------------------------|------------------------|--|
| | | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
| | Kawasan rawan bencana longsor | | Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok |
| | | Raihat | Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten |
| | | Tasifeto Barat | Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutolus |
| | | Kakuluk Mesak | Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna |
| | | Kota Atambua | Atambua, Manumutin, Fatubena |
| | | Raimanuk | Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain |
| | | Lasiolat | Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok |
| | | Lamaknen Selatan | Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato |
| | | Atambua Barat | Umanen |
| | | Atambua Selatan | Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot |
| | | Nanaet Duabesi | Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe |
| 3 | Kawasan rawan bencana tsunami | Kakuluk Mesak | Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu |
| | | Tasifeto Timur | Silawan |
| 4 | Kawasan rawan bencana kebakaran | Lamaknen | Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas |
| | | Tasifeto Timur | Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok |
| | | Raihat | Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin |
| | | Tasifeto Barat | Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutolus |
| | | Kakuluk Mesak | Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna |
| | | Kota Atambua | Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik |
| | | Raimanuk | Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain |
| | | Lasiolat | Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun |

| No. | Jenis Kawasan Rawan Bencana | Lokasi yang Berpotensi | |
|-----|------------------------------|------------------------|---|
| | | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
| | | Lamaknen Selatan | Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato |
| | | Atambua Barat | Umanen, Berdao, Tulamala, Beirafu |
| | | Atambua Selatan | Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot |
| | | Nanaet Duabesi | Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe |
| | | 5 | Kawasan rawan bencana kekeringan |
| | | Tasifeto Timur | Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok |
| | | Raihat | Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin |
| | | Tasifeto Barat | Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus |
| | | Kakuluk Mesak | Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna |
| | | Kota Atambua | Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik |
| | | Raimanuk | Raifatus, Renrua Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Teun, Tasain |
| | | Lasiolat | Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun |
| | | Lamaknen Selatan | Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato |
| | | Atambua Barat | Umanen, Berdao, Tulamala, Beirafu |
| | | Atambua Selatan | Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot |
| | | Nanaet Duabesi | Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe |
| 6 | Gelombang ekstrim dan abrasi | Kakuluk Mesak | Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi |
| | | Tasifeto Timur | Silawan |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021

Untuk bencana yang disebabkan oleh Aspek biologis yang meliputi epidemi dan wabah penyakit terjadi pada waktu tertentu dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah Kabupaten Belu.

Jenis wabah penyakit yang ada meliputi malaria, demam berdarah dan *HIV AIDS*.

Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Belu. Upaya penanganan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu masyarakat yang terkena bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belu saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Belu. Selain itu, perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu juga diatur tentang sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah:

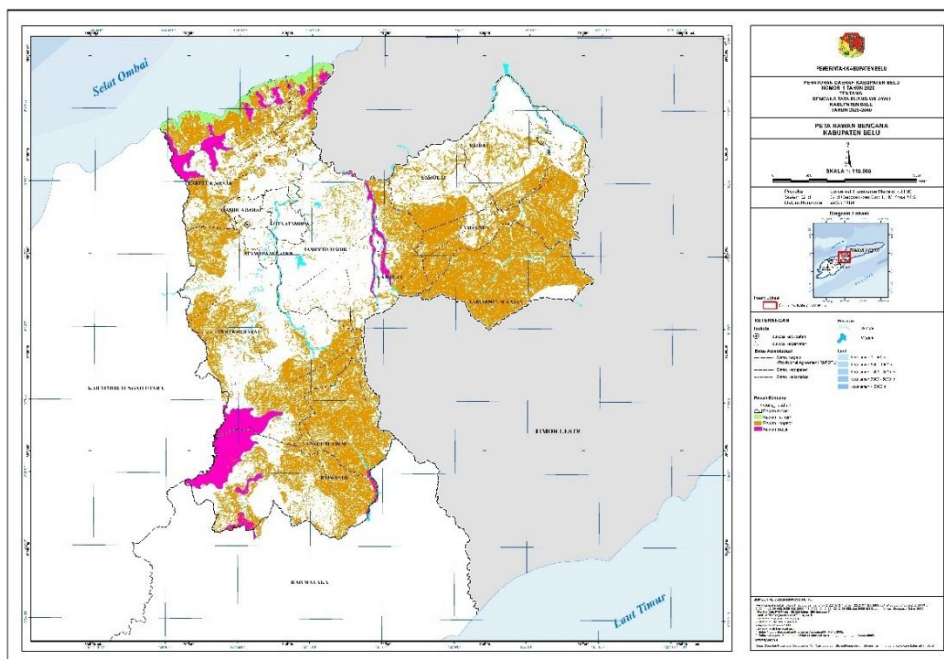
1. Jalur evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Belu menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di

ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas :

- a. Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
 - b. Kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain;
 - c. Sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan; dan
 - d. Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.
2. Ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.

Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

II.1.4 Demografi

II.1.4.1 2.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan SDA yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan penambahan SDA dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir tahun 2020 sesuai hasil registrasi sebanyak 227.097 jiwa (58.330 KK) yang terdiri dari perempuan 113.075 jiwa (49,79 %) dan laki-laki 114.022 jiwa (50,21%). Data ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,47%. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3,89 (tiga koma delapan sembilan) orang dan kepadatan penduduk 176,74 Jiwa per Km². Kepala keluarga didominasi oleh Laki-laki dengan persentase 78,45%, sedangkan keluarga yang dikepalai oleh perempuan hanya 21,55%. Mayoritas keluarga di Kabupaten Belu dikepalai oleh Kepala Keluarga (KK) yang berumur antara 35 –39 tahun (13,20%) atau berada pada kategori kelompok produktif.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada

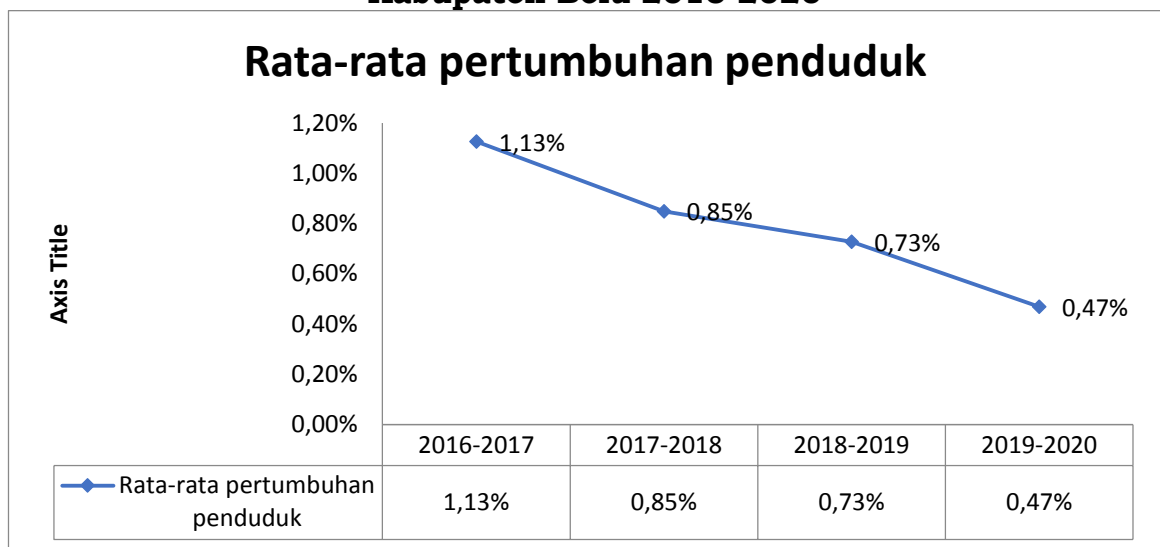
persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Kota Atambua yakni sebanyak 31.582 jiwa (13,91%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.141 jiwa (2,26 %). Sedangkan rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 101,19 artinya di setiap 100 penduduk perempuan ada atau terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Laki-laki (L) | | Perempuan (P) | | Jumlah (L+P) | |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Lamaknen | 6.663 | 5,84 | 6.802 | 6,02 | 13.465 | 5,93 |
| 2 | Tasifeto timur | 13.698 | 12,01 | 13.514 | 11,95 | 27.212 | 11,98 |
| 3 | Raihat | 7.715 | 6,77 | 7.566 | 6,69 | 15.281 | 6,73 |
| 4 | Tasifeto barat | 13.193 | 11,57 | 13.055 | 11,55 | 26.248 | 11,56 |
| 5 | Kakuluk Mesak | 11.471 | 10,06 | 11.493 | 10,16 | 22.964 | 10,11 |
| 6 | Kota Atambua | 15.724 | 13,79 | 15.858 | 14,02 | 31.582 | 13,91 |
| 7 | Rai Manuk | 8.982 | 7,88 | 8.890 | 7,86 | 17.872 | 7,87 |
| 8 | Lasiolat | 3.756 | 3,29 | 3.684 | 3,26 | 7.440 | 3,28 |
| 9 | Lamaknen Selatan | 4.542 | 3,98 | 4.517 | 3,99 | 9.059 | 3,99 |
| 10 | Atambua Barat | 12.368 | 10,85 | 12.073 | 10,68 | 24.441 | 10,76 |
| 11 | Atambua Selatan | 13.414 | 11,76 | 12.978 | 11,48 | 26.392 | 11,62 |
| 12 | Nanaet Duabesi | 2.496 | 2,19 | 2.645 | 2,34 | 5.141 | 2,26 |
| Jumlah | | 114.022 | 100,00 | 113.075 | 100,00 | 227.097 | 100,00 |

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

Grafik 2.1
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Belu 2016-2020



Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu tahun 2016-2020 dengan rata-rata 0,79%. Namun demikian tingkat pertumbuhan ini masih dianggap normal karena masih berada di bawah batas toleransi yaitu $< 2\%$. Persoalannya walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu masih dikatakan normal tetapi perlu dikendalikan dengan program Keluarga Berencana (KB), pengembangan struktur ruang kota dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja produktif.

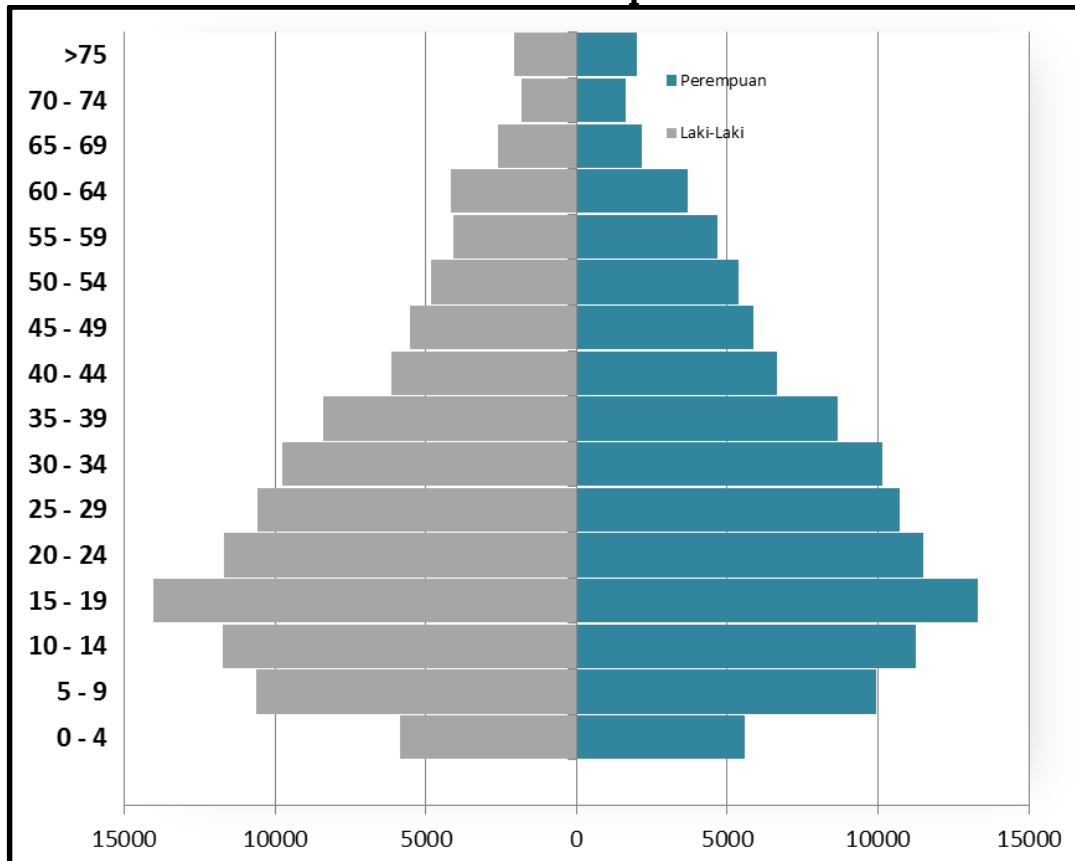
II.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan seperti pada Gambar 2.3 di bawah.

Pada gambar piramida penduduk, dapat dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 15 – 19 tahun sebesar 12,03%. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar

menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 24,22%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 5,40 %.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020



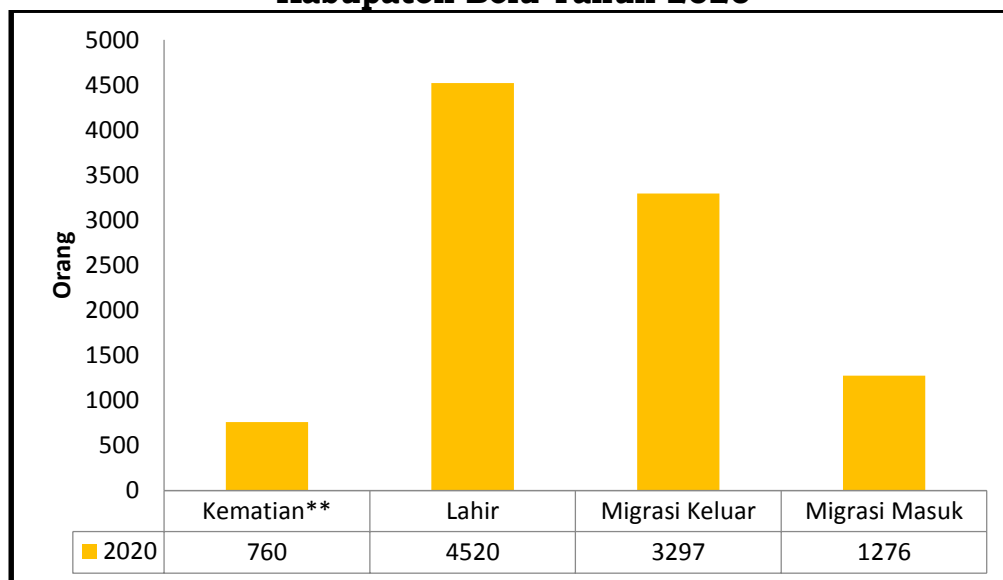
Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2019

Kondisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat dijelaskan bahwa beban tanggungan masyarakat atau penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Belu cukup tinggi, di mana pada tahun 2020 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 30 orang (29,62 %) penduduk tidak produktif.

II.1.4.3 Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi

Berdasarkan data Profil Kesehatan dan Profil Kependudukan Kabupaten Belu pada Tahun 2020, maka angka kelahiran hidup bayi adalah 4.520 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 760 orang (Grafik 2.2). Angka kematian ini mencerminkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.

Grafik 2.3
Data Kelahiran, Kematian, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2020



Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1276 orang pada Tahun 2020 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar penduduk lebih dipengaruhi oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

II.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2020 adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 32,90%.

Tabel 2.12
Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
pada Tahun 2020

| NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LK + PR | |
|---------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 33.190 | 29,11 | 32.050 | 28,34 | 65.240 | 28,73 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 9.101 | 7,98 | 8.649 | 7,65 | 17.750 | 7,82 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 37.446 | 32,84 | 36.012 | 31,85 | 73.458 | 32,35 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 11.343 | 9,95 | 12.486 | 11,04 | 23.829 | 10,49 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 18.140 | 15,91 | 17.850 | 15,79 | 35.990 | 15,85 |
| 6 | Diploma I/II | 296 | 0,26 | 523 | 0,46 | 819 | 0,36 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 881 | 0,77 | 1.604 | 1,42 | 2.485 | 1,09 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 3.484 | 3,06 | 3.833 | 3,39 | 7.317 | 3,22 |
| 9 | Strata II | 135 | 0,12 | 67 | 0,06 | 202 | 0,09 |
| 10 | Strata III | 6 | 0,005 | 1 | 0,001 | 7 | 0,003 |
| JUMLAH | | 114.022 | 100 | 113.075 | 100 | 227.097 | 100 |

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

II.1.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
di Kabupaten Belu Tahun 2020

| NO | KECAMATAN | JLH. PENDUDUK | ISLAM | | KRISTEN | | KATOLIK | | HINDU | | BUDHA | | KONGHUCU | | LAINNYA | |
|----|------------------|------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|------|----------|-------|---------|--------|
| | | | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| 1 | LAMAKNEN | 13.465 | 15 | 0,11 | 34 | 0,25 | 13.415 | 99,63 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | TASIFETO TIMUR | 27.212 | 660 | 2,43 | 706 | 2,59 | 25.709 | 94,48 | 136 | 0,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | RAIHAT | 15.281 | 39 | 0,26 | 45 | 0,29 | 15.197 | 99,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | TASIFETO BARAT | 26.248 | 541 | 2,06 | 1.135 | 4,32 | 24.561 | 93,57 | 11 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | KAKULUK MESAK | 22.964 | 745 | 3,24 | 1.610 | 7,01 | 20.606 | 89,73 | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | KOTA ATAMBUA | 31.582 | 1371 | 4,34 | 3.123 | 9,89 | 26.891 | 85,15 | 177 | 0,56 | 18 | 0,06 | 2 | 0,01 | 0 | 0 |
| 7 | RAI MANUK | 17.872 | 83 | 0,46 | 848 | 4,74 | 16.929 | 94,72 | 12 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | LASIO LAT | 7.440 | 5 | 0,07 | 32 | 0,43 | 7.402 | 99,49 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | LAMAKNEN SELATAN | 9.059 | 7 | 0,08 | 22 | 0,24 | 9.029 | 99,67 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | ATAMBUA BARAT | 24.441 | 4119 | 16,85 | 3.347 | 13,69 | 16.902 | 69,15 | 61 | 0,25 | 11 | 0,05 | 1 | 0,004 | 0 | 0,000 |
| 11 | ATAMBUA SELATAN | 26.392 | 1961 | 7,43 | 5.460 | 20,69 | 18.934 | 71,74 | 31 | 0,12 | 6 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | NANAET DUABESI | 5.141 | 1 | 0,02 | 13 | 0,25 | 5.127 | 99,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 227.097 | 9.547 | 4,20 | 16.375 | 7,21 | 200.702 | 88,38 | 433 | 0,19 | 37 | 0,02 | 3 | 0,001 | 0 | 0,0000 |

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

Berdasarkan Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2020 dengan mayoritas pemeluk agama Katolik sebanyak 88,38% sedangkan agama Kristen sebanyak 7,21 %, pemeluk agama Islam sebanyak 4,20 % dan selebihnya adalah memeluk agama lainnya.

II.1.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Dalam konteks pertumbuhan penduduk, Kabupaten Belu telah menyerap penduduk yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores dan pulau lainnya di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Belu melalui hubungan famili, kerabat, teman sekampung ataupun faktor pekerjaan dan bisnis-usaha perdagangan. Beberapa suku/etnis yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu di antaranya adalah:

- 1) Etnis Lokal yaitu : Tetun, Dawan R, Kemak, dan Bunak;

- 2) Etnis Flores seperti : Ende/Lio, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Lembata, Lamaholot, dan Sikka;
- 3) Etnis Jawa : Sunda, Jawa dan Madura;
- 4) Etnis Alor;
- 5) Etnis Bali;
- 6) Etnis Rote;
- 7) Etnis Sabu;
- 8) Etnis Sulawesi seperti: Makasar, Toraja, Bugis, Soppeng, Wajo, Buton dan Manado;
- 9) Etnis Dawan L (Atoin Meto) : TTU, TTS, Kupang;
- 10) Etnis Helong;
- 11) Etnis Timor Leste;
- 12) Etnis Sumatra : Batak dan Minang;
- 13) Etnis Ambon;
- 14) Etnis Tionghoa;
- 15) Etnis Sumba;
- 16) Etnis NTB; Bima dan Lombok.

Konsentrasi suku/etnis ini lebih banyak berada di pusat Kota Atambua, sehingga permukiman kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta dengan tingkat homogenitas identitas etnisnya. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya dapat memunculkan pola permukiman seagregatif dan pada gilirannya mengakibatkan polarisasi serta segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi permukiman yang demikian, pada akhirnya membawa dampak pada polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk.

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

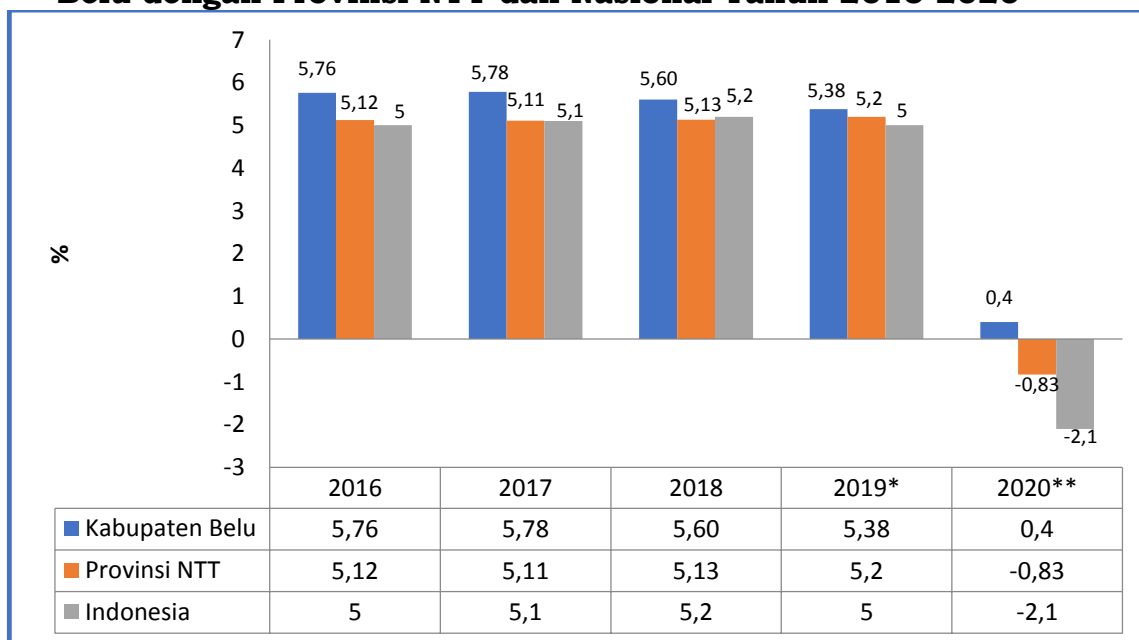
II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

II.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh produk domestik regional bruto.

Grafik 2.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Dilihat pada Grafik 2.4 di atas menggambarkan tren 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu berada di atas Provinsi NTT dan Nasional. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu dari 5,38% pada Tahun 2019 menjadi 0,4% atau terjadi penurunan sebesar -4,98%, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID yang melanda dunia.

II.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2020 berdasarkan ADHb mencapai Rp 4,551 triliun dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu:

- 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,82 % ;
- 2) sektor jasa pendidikan sebesar 16,36 % ; dan
- 3) sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,78 %.

Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belu. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Belu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada pada jalur perbatasan sebagai pintu masuk Negara RDTL yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang jasa dan perdagangan. Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB dipengaruhi oleh tingginya biaya dan belanja untuk sektor pendidikan di antaranya variabel lama tahun bersekolah dan peningkatan jumlah populasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.14
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)
di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2020

| Kategori | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019* | | 2020** | |
|----------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 790.635,2 | 22,91 | 848.308,7 | 22,41 | 918.660,1 | 22,15 | 981.332,9 | 21,89 | 993.185,8 | 21,82 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 118.948,7 | 3,45 | 120.522,7 | 3,18 | 119.044,0 | 2,87 | 116.220,6 | 2,59 | 92.327,3 | 2,03 |
| C | Industri Pengolahan | 37.778,3 | 1,09 | 41.897,1 | 1,11 | 45.890,4 | 1,11 | 49.345,2 | 1,10 | 49.453,7 | 1,09 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.046,7 | 0,06 | 2.303,0 | 0,06 | 2.678,1 | 0,06 | 2.698,3 | 0,06 | 3.151,9 | 0,07 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 857,8 | 0,02 | 891,7 | 0,02 | 968,7 | 0,02 | 1.025,2 | 0,02 | 1.088,8 | 0,02 |
| F | Konstruksi | 288.864,5 | 8,37 | 323.795,0 | 8,56 | 358.962,8 | 8,66 | 397.125,3 | 8,86 | 382.989,6 | 8,41 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 465.441,6 | 13,49 | 499.207,9 | 13,19 | 552.572,5 | 13,32 | 608.552,9 | 13,58 | 627.423,8 | 13,78 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 167.670,6 | 4,86 | 183.264,0 | 4,84 | 197.245,6 | 4,76 | 211.167,4 | 4,71 | 211.680,5 | 4,65 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12.712,5 | 0,37 | 14.851,5 | 0,39 | 16.992,4 | 0,41 | 18.438,3 | 0,41 | 16.515,5 | 0,36 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 145.524,8 | 4,22 | 156.469,3 | 4,13 | 167.539,6 | 4,04 | 177.294,5 | 3,96 | 191.707,1 | 4,21 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 196.599,3 | 5,70 | 218.316,0 | 5,77 | 234.080,9 | 5,64 | 247.200,6 | 5,52 | 269.207,0 | 5,91 |
| L | Real Estate | 90.872,1 | 2,63 | 97.049,1 | 2,56 | 103.858,8 | 2,50 | 104.290,9 | 2,33 | 103.333,2 | 2,27 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 2.405,3 | 0,07 | 2.606,2 | 0,07 | 2.793,9 | 0,07 | 2.975,7 | 0,07 | 2.554,6 | 0,06 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan | 417.984,3 | 12,11 | 475.186,3 | 12,56 | 538.552,6 | 12,99 | 593.098,6 | 13,23 | 611.824,1 | 13,44 |
| P | Jasa Pendidikan | 524.571,8 | 15,20 | 592.487,2 | 15,66 | 658.402,7 | 15,88 | 718.148,5 | 16,02 | 744.565,1 | 16,36 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 75.457,0 | 2,19 | 84.131,4 | 2,22 | 94.185,5 | 2,27 | 104.273,9 | 2,33 | 114.247,1 | 2,51 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 113.150,2 | 3,28 | 123.357,0 | 3,26 | 134.763,7 | 3,25 | 149.065,5 | 3,33 | 136.479,8 | 3,00 |
| | Produk Domestik Bruto | 3.451.520,8 | 100 | 3.784.644,2 | 100 | 4.147.192,4 | 100 | 4.482.254,4 | 100 | 4.551.735,1 | 100 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Tabel 2.15
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah)
di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2020

| Kategori | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019* | | 2020** | |
|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 579.452,9 | 3,06 | 607.653,5 | 4,87 | 634.001,2 | 4,34 | 660.906,8 | 4,24 | 663.631,0 | 0,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 91.093,3 | 4,58 | 89.521,2 | -1,73 | 87.133,4 | -2,67 | 85.088,1 | -2,35 | 61.221,4 | -28,50 |
| C | Industri Pengolahan | 27.560,8 | 4,94 | 29.448,9 | 6,58 | 30.873,6 | 4,84 | 32.282,3 | 4,56 | 32.112,9 | -0,52 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.615,4 | 11,23 | 1.638,0 | 1,40 | 1.845,9 | 12,70 | 1.858,1 | 0,66 | 2.164,0 | 16,46 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 554,8 | 4,34 | 566,5 | 2,12 | 608,8 | 7,47 | 634,8 | 4,27 | 664,5 | 4,68 |
| F | Konstruksi | 190.898,5 | 7,17 | 204.789,1 | 7,28 | 218.934,3 | 6,91 | 231.520,4 | 5,75 | 224.036,8 | -3,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 300.376,7 | 5,32 | 312.582,1 | 4,06 | 335.058,6 | 7,19 | 359.699,8 | 7,35 | 359.207,8 | -0,14 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 124.024,3 | 6,36 | 131.190,5 | 5,78 | 139.011,4 | 5,96 | 146.304,8 | 5,25 | 145.597,9 | -0,48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.151,7 | 8,19 | 10.418,5 | 13,84 | 11.698,0 | 12,28 | 12.533,3 | 7,14 | 11.296,5 | -9,87 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 120.375,3 | 2,24 | 126.962,5 | 5,47 | 133.886,7 | 5,45 | 138.834,7 | 3,70 | 150.173,1 | 8,17 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 151.085,3 | 7,48 | 161.040,9 | 6,59 | 165.593,3 | 2,83 | 170.717,7 | 3,09 | 185.952,6 | 8,92 |
| L | Real Estate | 73.382,9 | 6,20 | 76.953,6 | 4,87 | 80.731,6 | 4,91 | 80.872,4 | 0,17 | 80.177,7 | -0,86 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1.754,0 | 5,50 | 1.801,4 | 2,70 | 1.874,2 | 4,04 | 1.976,6 | 5,46 | 1.651,6 | -16,44 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan | 318.350,9 | 8,68 | 341.950,9 | 7,41 | 368.192,5 | 7,67 | 399.631,1 | 8,54 | 416.458,0 | 4,21 |
| P | Jasa Pendidikan | 382.571,9 | 7,68 | 411.929,6 | 7,67 | 435.903,7 | 5,82 | 460.001,8 | 5,53 | 465.876,9 | 1,28 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 57.605,9 | 7,80 | 62.306,8 | 8,16 | 67.652,7 | 8,58 | 73.286,8 | 8,33 | 77.513,2 | 5,77 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 82.047,7 | 5,17 | 86.295,1 | 5,18 | 92.711,5 | 7,44 | 100.374,7 | 8,27 | 90.640,0 | -9,70 |
| | Produk Domestik Bruto | 2.511.902,2 | 5,76 | 2.657.049,0 | 5,78 | 2.805.711,5 | 5,60 | 2.956.524,1 | 5,38 | 2.968.375,9 | 0,40 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

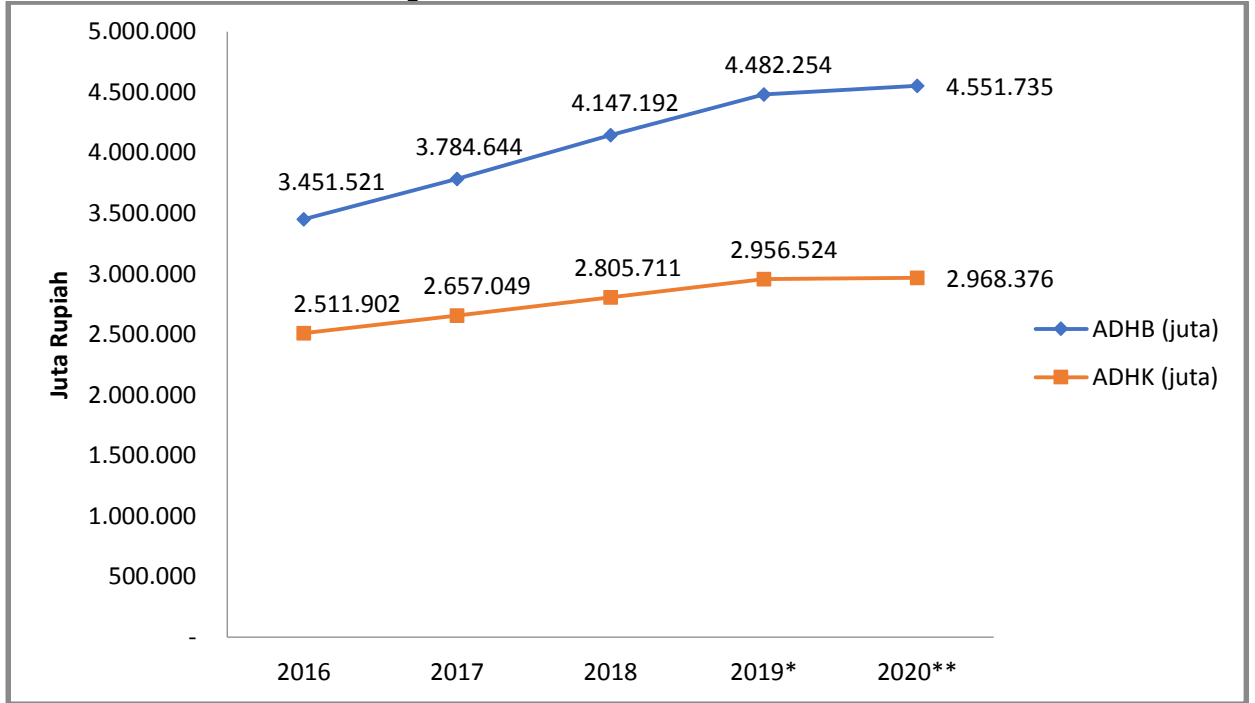
Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu

| Kategori | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019* | | 2020** | |
|----------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 22,91 | 3,06 | 22,41 | 4,87 | 22,15 | 4,34 | 21,89 | 4,24 | 21,82 | 0,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,45 | 4,58 | 3,18 | -1,73 | 2,87 | -2,67 | 2,59 | -2,35 | 2,03 | -28,50 |
| C | Industri Pengolahan | 1,09 | 4,94 | 1,11 | 6,58 | 1,11 | 4,84 | 1,10 | 4,56 | 1,09 | -0,52 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 11,23 | 0,06 | 1,40 | 0,06 | 12,70 | 0,06 | 0,66 | 0,07 | 16,46 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,02 | 4,34 | 0,02 | 2,12 | 0,02 | 7,47 | 0,02 | 4,27 | 0,02 | 4,68 |
| F | Konstruksi | 8,37 | 7,17 | 8,56 | 7,28 | 8,66 | 6,91 | 8,86 | 5,75 | 8,41 | -3,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13,49 | 5,32 | 13,19 | 4,06 | 13,32 | 7,19 | 13,58 | 7,35 | 13,78 | -0,14 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,86 | 6,36 | 4,84 | 5,78 | 4,76 | 5,96 | 4,71 | 5,25 | 4,65 | -0,48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 | 8,19 | 0,39 | 13,84 | 0,41 | 12,28 | 0,41 | 7,14 | 0,36 | -9,87 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,22 | 2,24 | 4,13 | 5,47 | 4,04 | 5,45 | 3,96 | 3,70 | 4,21 | 8,17 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,70 | 7,48 | 5,77 | 6,59 | 5,64 | 2,83 | 5,52 | 3,09 | 5,91 | 8,92 |
| L | Real Estate | 2,63 | 6,20 | 2,56 | 4,87 | 2,50 | 4,91 | 2,33 | 0,17 | 2,27 | -0,86 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,07 | 5,50 | 0,07 | 2,70 | 0,07 | 4,04 | 0,07 | 5,46 | 0,06 | -16,44 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial | 12,11 | 8,68 | 12,56 | 7,41 | 12,99 | 7,67 | 13,23 | 8,54 | 13,44 | 4,21 |
| P | Jasa Pendidikan | 15,20 | 7,68 | 15,66 | 7,67 | 15,88 | 5,82 | 16,02 | 5,53 | 16,36 | 1,28 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,19 | 7,80 | 2,22 | 8,16 | 2,27 | 8,58 | 2,33 | 8,33 | 2,51 | 5,77 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 3,28 | 5,17 | 3,26 | 5,18 | 3,25 | 7,44 | 3,33 | 8,27 | 3,00 | -9,70 |
| | PDRB | 100 | 5,76 | 100 | 5,78 | 100 | 5,60 | 100 | 5,38 | 100 | 0,40 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021,

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Grafik 2.5
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB)
Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK)
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Data pada tabel 2.15 di atas memperlihatkan bahwa lapangan usaha pertanian masih mendominasi struktur PDRB Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020. Namun demikian terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dari 4,24 % tahun 2019 menjadi 0,41 %. Sementara lapangan usaha yang lain mengalami penurunan yang sangat signifikan (berkontraksi sangat dalam) yaitu mencapai angka minus seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (-8,50%), jasa perusahaan (-16,44%), akomodasi dan makan minum (-9,87%), jasa lainnya (-9,70%), konstruksi (-3,23%), dll. Kondisi ini terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasi

mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, dapat digambarkan lebih lanjut bahwa lapangan-lapangan usaha ini sangat sensitif terhadap dampak pandemi COVID namun justru memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

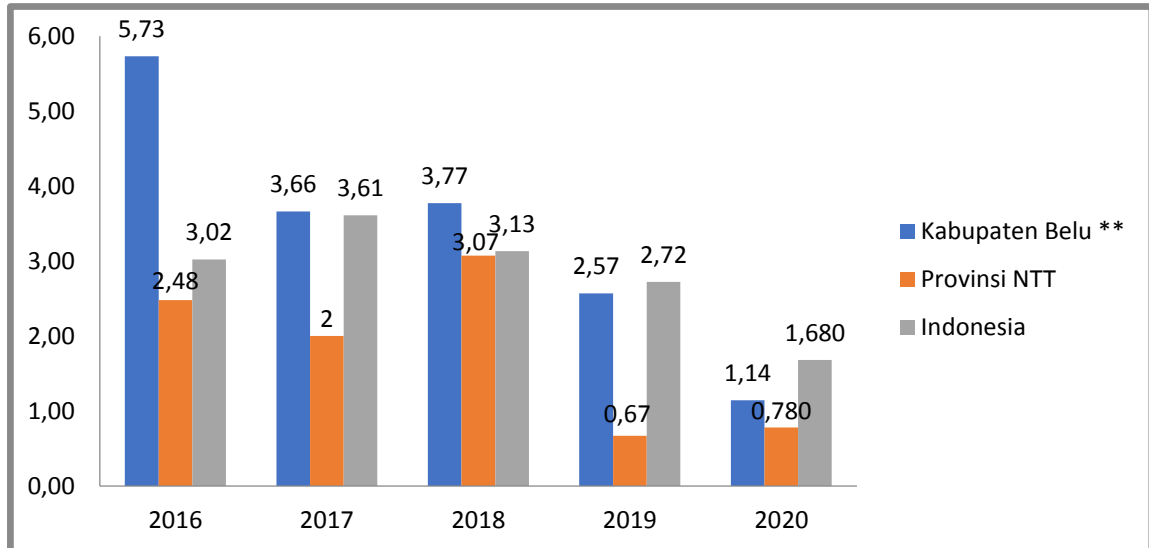
Hal ini dapat juga dilihat pada grafik 2.5 di atas yang menggambarkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Berlaku dan PDRB atas dasar Harga Konstan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami kontraksi pertumbuhan yang melambat.

II.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka untuk data inflasi tahun 2016 – 2020 dipakai data Laju Implisit PDRB dari BPS Kabupaten Belu.

Grafik 2.6
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021
 BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan 1983-2020
 BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB**

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu (3,375%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,80%) dan Nasional (2,83%).

Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, karena adanya kendala struktural perekonomian di wilayah Kabupaten Belu. Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Belu.

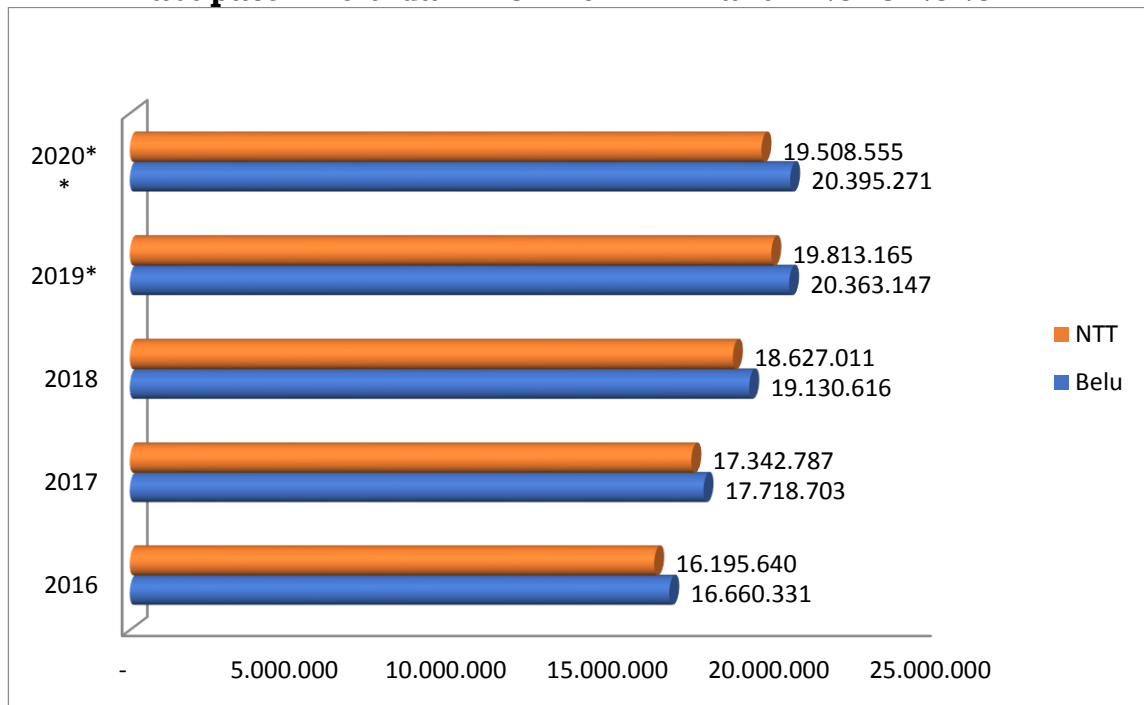
II.2.1.4 2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin

makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita sebuah daerah juga merefleksikan PDRB per kapita. Jika kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal yaitu pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Grafik 2.7
Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku
Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 PDRB per kapita ADHb Kabupaten Belu menggambarkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 16,66 juta rupiah pada Tahun 2016 menjadi 20,39 juta rupiah pada Tahun 2020. Hal ini ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan alternatif teknologi tepat guna maupun dari aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik. PDRB per kapita ADHb dari Tahun 2020 berada di atas angka Provinsi NTT sebesar 19,50 juta dan masih di bawah angka nasional sebesar 56,9 juta.

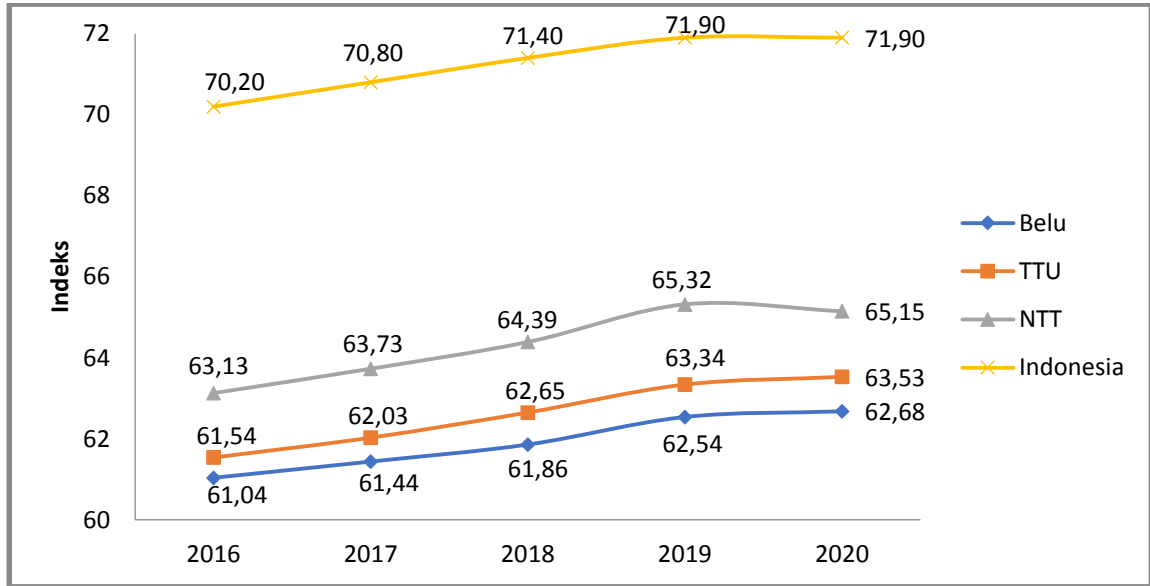
II.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari angka harapan hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yg memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Dari grafik 2.8 yang disajikan terlihat kinerja pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang meningkat. Akan tetapi capaian IPM Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Belu 5 (lima) tahun terakhir termasuk dalam klasifikasi sedang yaitu di atas angka 60.

Grafik 2.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2016-2020

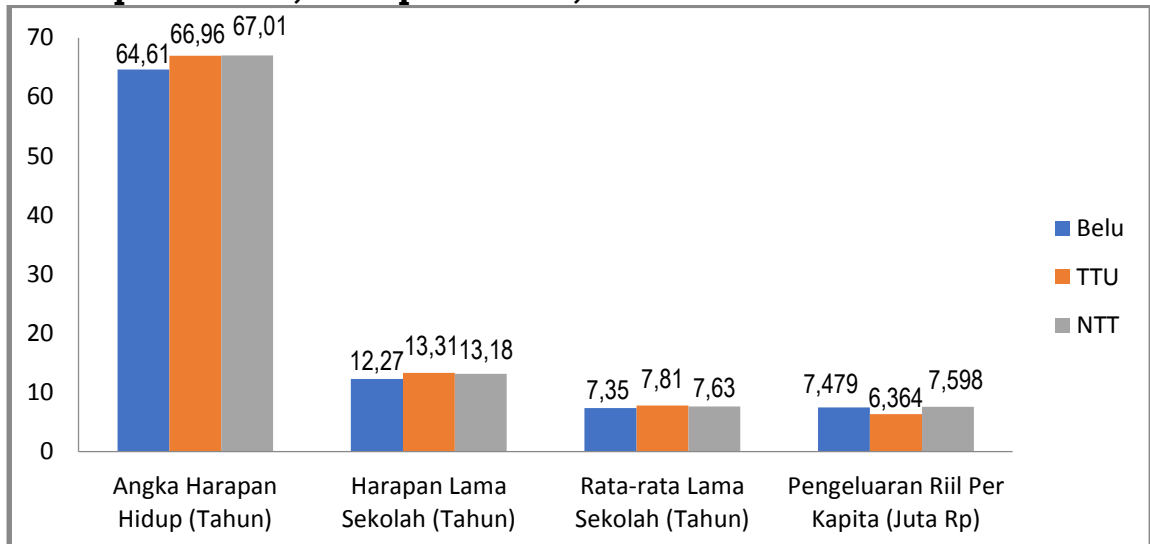


Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021

BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021

Dari grafik 2.9 terlihat perbandingan capaian komponen IPM Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2020. Capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu lebih rendah dari Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, sedang capaian pengeluaran riil per kapita Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU dan masih lebih rendah dari Provinsi NTT.

Grafik 2.9
Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Provinsi NTT Tahun 2020

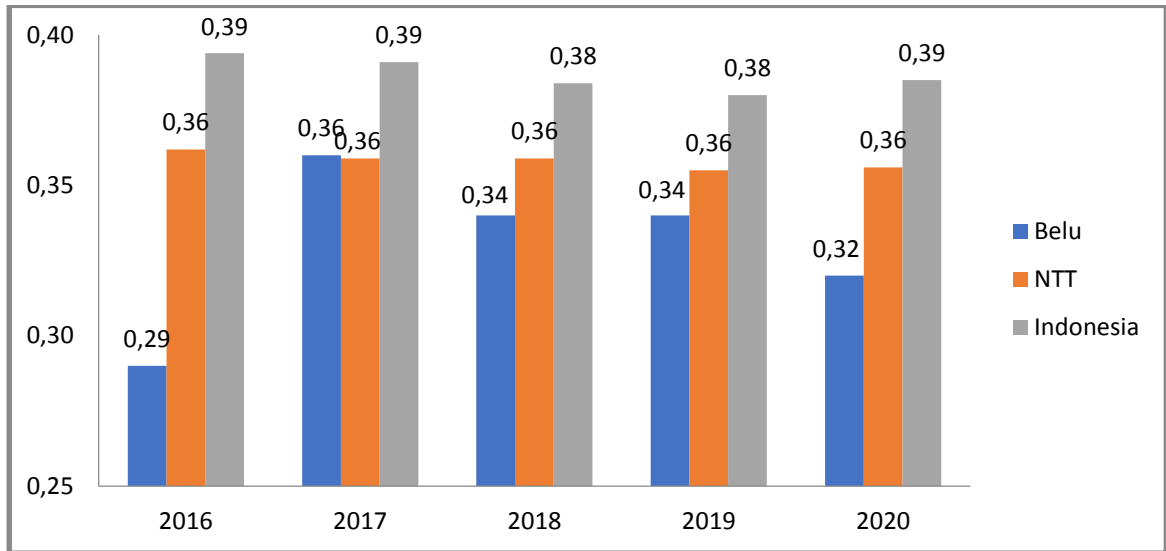


Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021

II.2.1.6 Indeks Gini

Indeks gini merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini Kabupaten Belu dari 2016 s/d 2020 mengalami fluktuatif yang menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam grafik 2.8 di bawah ini. Tahun 2016 sebesar 0,29 kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 0,36 dan mengalami penurunan menjadi 0,36 pada Tahun 2018 serta mengalami penurunan menjadi 0,32 pada Tahun 2020. Capaian Indeks gini Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan Nasional, ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu lebih baik dari pada Provinsi NTT maupun Nasional. Capaian Indeks Gini di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 lebih kecil dari 0,40 artinya berada dalam kategori ketimpangan rendah dan nilai ketimpangan ini masih di bawah nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara Nasional.

Grafik 2.9
Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



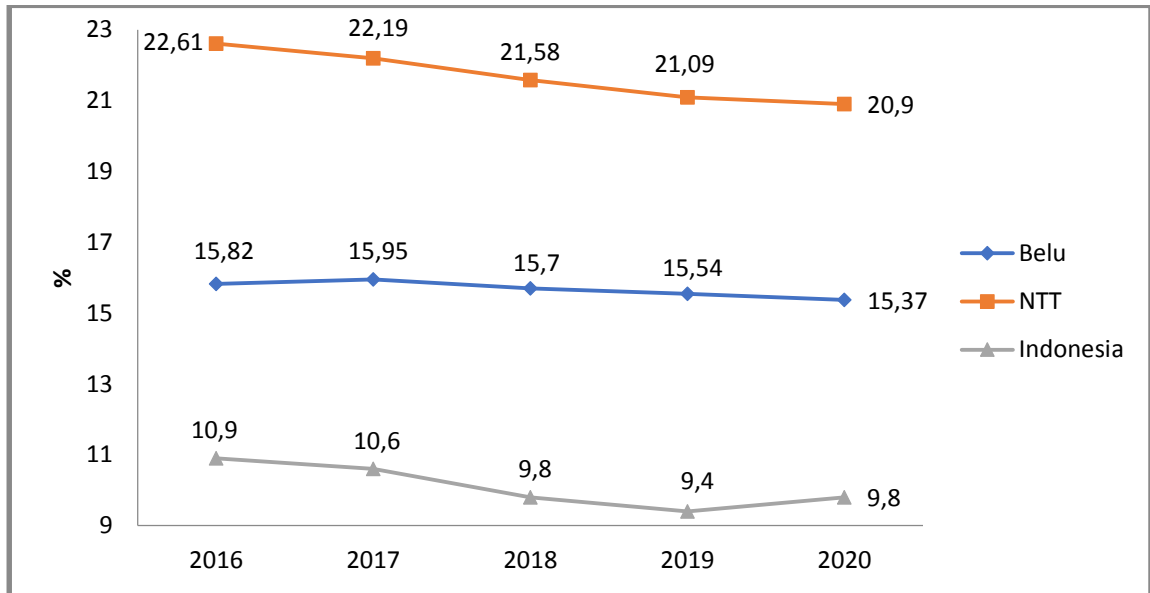
Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia 2002-2020 Belu Dalam Angka 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita Data BPS

II.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2020 berfluktuasi, tertinggi 15,95% (33,95 ribu jiwa) pada tahun 2017 dan terendah 15,37% (34,18 ribu jiwa) pada Tahun 2020, dapat dilihat pada Grafik 2.10 berikut ini.

Grafik 2.10
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021 BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

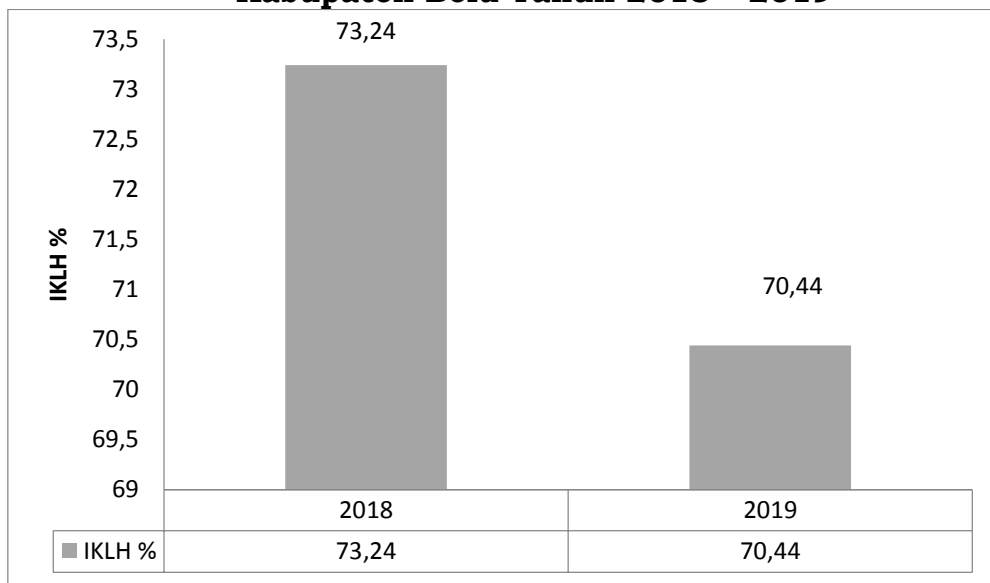
Pada Tahun 2016-2020, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu lebih rendah dari Provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Nasional secara keseluruhan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Belu Tahun 2020 sebesar 15,37%, masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu segera ditangani secara terintegrasi dan lintas program/kegiatan perangkat daerah.

II.2.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara

dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Belu. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator.

Grafik 2.11
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2019



Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2019

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 - 58

7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan lingkungan pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021. Adapun capaian IKLH Kabupaten Belu tahun 2018 adalah sebesar 73,24 (cukup), Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 70,44 (cukup).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan didukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Tabel 2.17
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019
Kabupaten Belu

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | | 78,17 | 95,41 | 95,41 | 94,12 |
| 2 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 56,67 | 66,68 | 56,67 | 55,33 | 58 |
| 3 | Indeks Tutupan Hutan (ITH) | | | | 77,61 | 62,007 |
| 4 | Pencemaran Pemantauan status mutu air | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan |
| 5 | Persentase penanganan sampah (Persentase sampah yang terangkut) | 17,25 % | 14,78 % | 15,93 % | 24,83 % | 14,17 % |
| 6 | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) | 0,226 % | 0,084 % | 0,442 % | 1,622 % | 0,046 % |
| 7 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (amdal, UKL-UPL) (%) | 180% | 60% | 156% | 283% | 196% |
| 8 | Rasio Tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) | 0,003 % | 0,007 % | 0,018 % | 0,030 % | 0,034 % |
| 9 | Penegakan hukum lingkungan (%) | 83% | 58,33 % | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Urusan Lingkungan Hidup) | 0,000 0005 | 0,000 0028 | 0,0000 028 | 0,0000 028 | 0,0000 028 |

Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup tahun 2015-2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. indeks kualitas udara mengalami fluktuasi dari Tahun 2016-2019, terendah sebesar 78,17 pada Tahun 2016, tertinggi sebesar 95,41

- pada tahun 2017-2018;
2. indeks kualitas air, mengalami fluktuasi dari Tahun 2015-2019, terendah sebesar 55,33 pada Tahun 2018, tertinggi sebesar 66,68 pada tahun 2016;
 3. indeks tutupan hutan, menurun dari Tahun 2018-2019, Tahun 2018 sebesar 77,61 menjadi 62,007 di Tahun 2019.
 4. pencemaran pemantauan status mutu air Tahun 2015-2019 Cemar Ringan;
 5. persentase Penanganan Sampah mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019, terendah sebesar 14,17% pada Tahun 2019, tertinggi sebesar 24,83% pada Tahun 2018;
 6. cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, mengalami fluktuasi dari Tahun 2015-2019, terendah pada tahun 2016 sebesar 0,084% dan tertinggi sebesar 1,622% pada Tahun 2018;
 7. cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen, mengalami fluktuasi dari Tahun 2015-2019, terendah pada Tahun 2016 sebesar 60% dan tertinggi sebesar 283% di Tahun 2018;.
 8. rasio tempat penampungan sampah persatuan penduduk, mengalami tren positif dari Tahun 2015-2019, Tahun 2015 sebesar 0,003% dan sebesar 0,034% pada Tahun 2019.
 9. penegakan hukum lingkungan, mengalami fluktuasi dari Tahun 2015-2019, terendah pada Tahun 2016 sebesar 58% dan tertinggi sebesar 100% di Tahun 2017-2019;
 10. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, mengalami kenaikan dari tahun sebesar 0,0000005 pada tahun 2015 menjadi 0,0000028 pada tahun 2016, kemudian stagnan mulai tahun 2016-2019.

II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

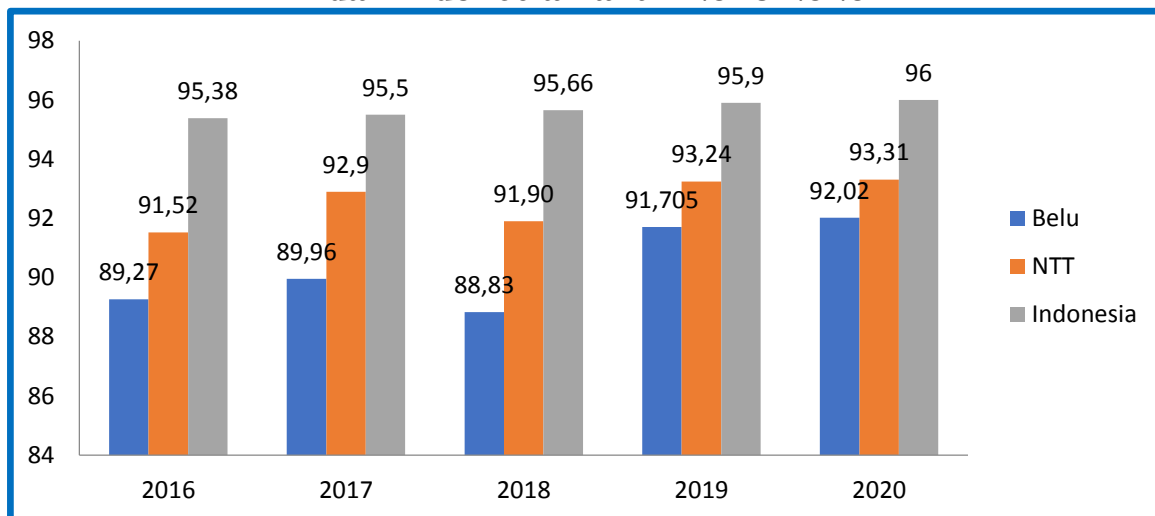
II.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang didasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca, sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Belu juga selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 namun masih berada di

bawah rata-rata angka melek huruf provinsi NTT seperti pada Grafik 2.11 di bawah ini.

Grafik 2.12
Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Provinsi BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

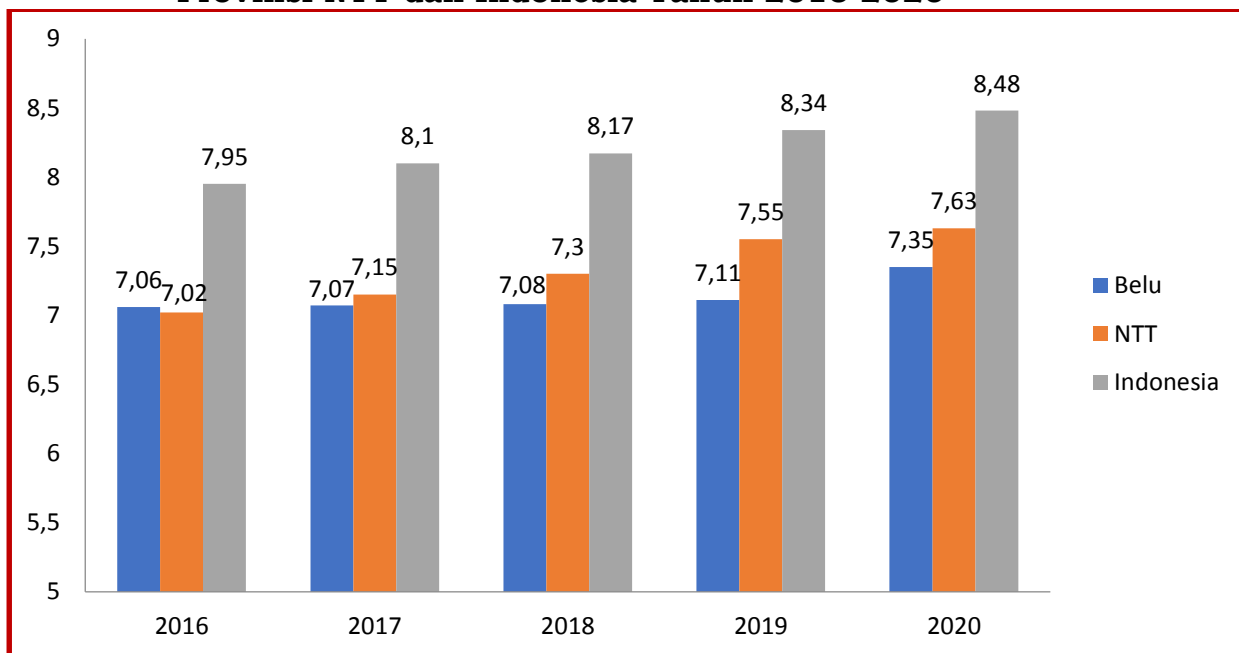
Angka melek huruf Kabupaten Belu pada Tahun 2020 sebesar 92,02% masih lebih rendah dari capaian Provinsi NTT sebesar 93,31% dan Nasional sebesar 96%.

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi

sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas dijadikan lokus. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belu pada tahun 2016 sebesar 7,06 tahun dan meningkat di tahun 2020 menjadi 7,35 tahun.

Grafik 2.13
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, (Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah 2010-2020

Terlihat pada Grafik 2.13 di atas, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu tahun 2020 sebesar 7,35 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT sebesar 7,63 Tahun dan Indonesia sebesar 8,48 tahun.

c. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)

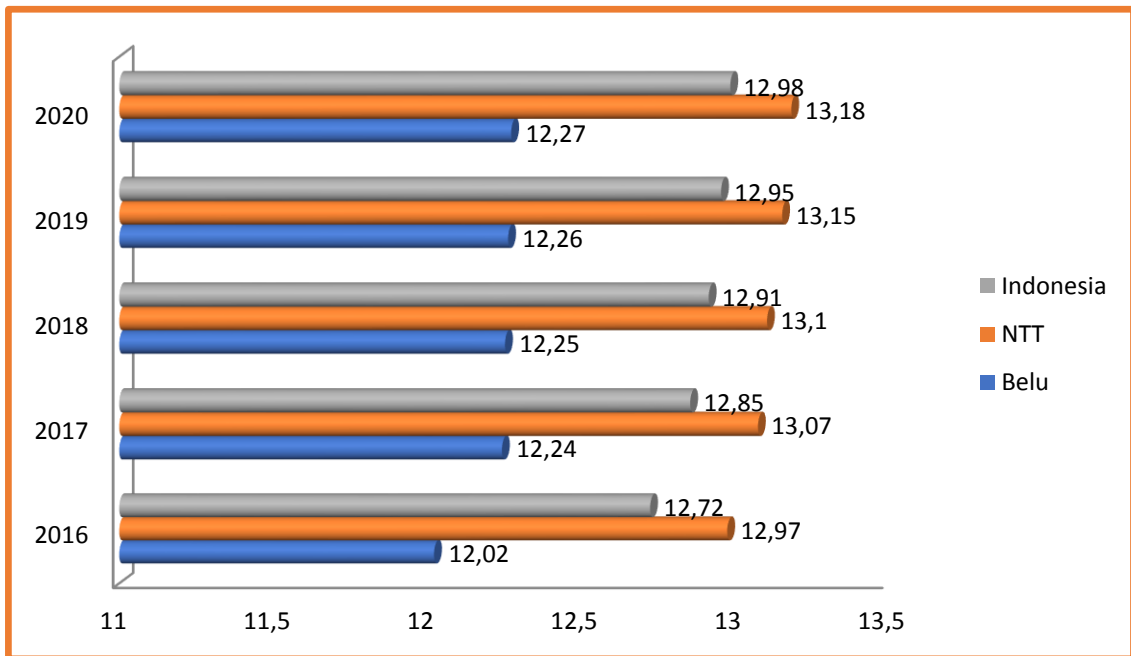
Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun. HLS tidak mengkover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. Indikator HLS digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Harapan lama sekolah Kabupaten Belu 2016-2020 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia. HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 tergambar pada Grafik 2.14 di bawah ini.

Grafik 2.14

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, (Metode Baru) Harapan Lama Sekolah 2010-2020

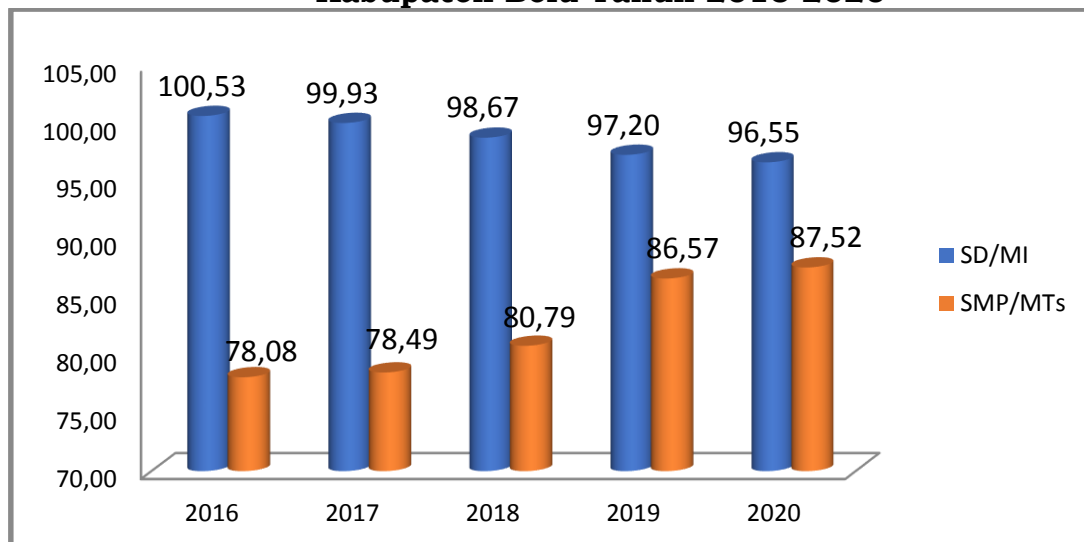
Grafik 2.14 menunjukkan capaian angka HLS Kabupaten Belu 2016-2020 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan tertentu.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Grafik 2.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

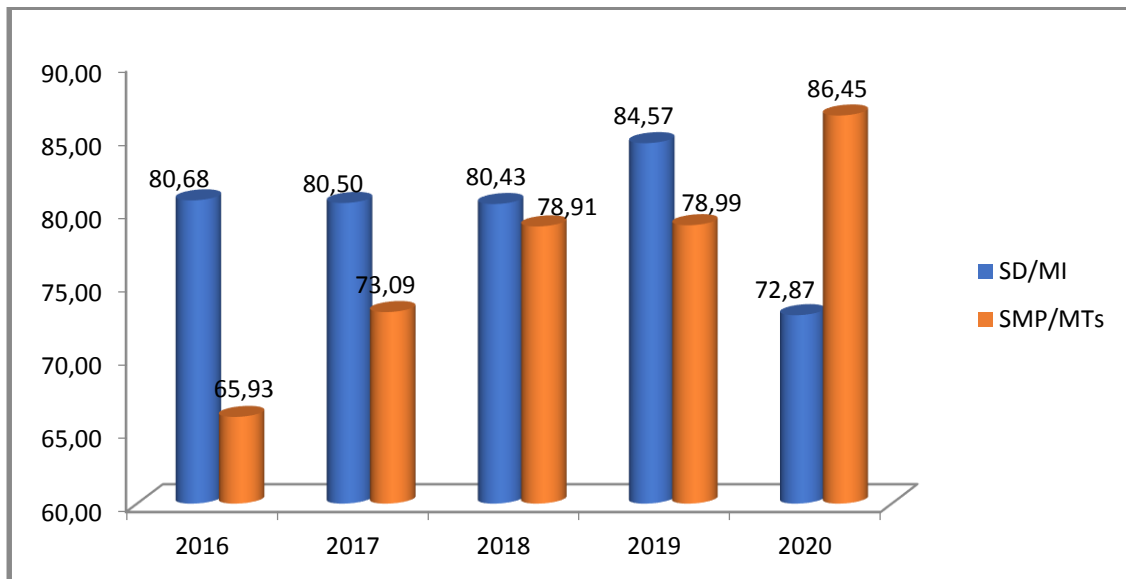


Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu 2020

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Grafik 2.16

**Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

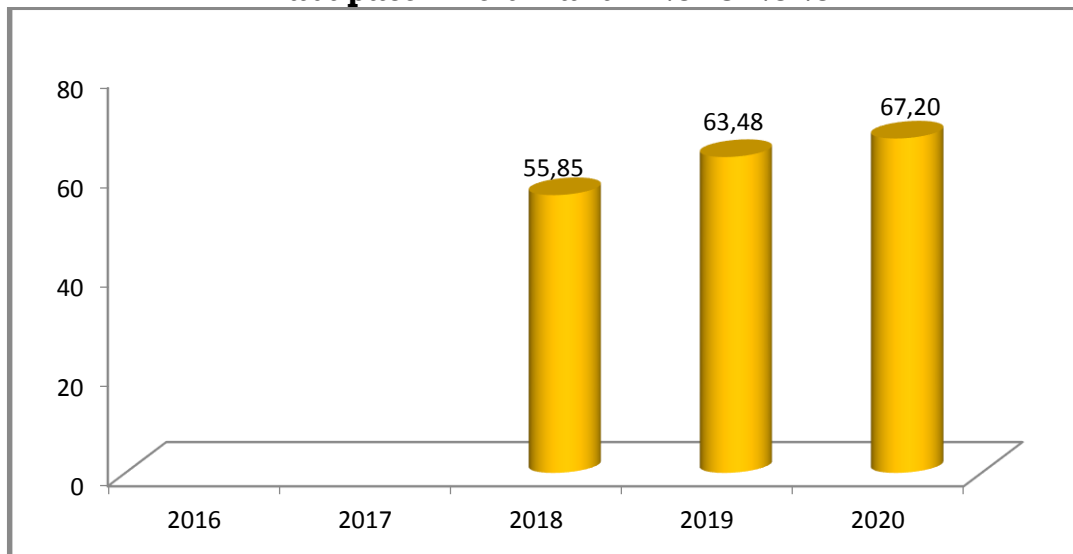


Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu 2020

Grafik 2.15 dan Grafik 2.16 di atas menggambarkan capaian APK dan APM Kabupaten Belu 2016-2020. APK SD/MI mengalami tren penurunan tertinggi 100,53% di Tahun 2016, terendah 96,55% di tahun 2020. APK SMP/MTs mengalami kenaikan terendah 78,08% di tahun 2016, tertinggi 87,52% di Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah di Kabupaten Belu yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar terutama pada jenjang SMP/MTs walaupun mengalami kenaikan. Capaian APM juga menggambarkan belum semua anak usia

sekolah pada usia kelompok tertentu (SD/MI dan SMP/MTs) yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu 2019

Pada Grafik 2.17 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 67,20% Tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD.

e. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.18 menggambarkan pada tahun 2020 sebagian besar penduduk yang berumur 10 ke atas atau sebesar 37,65% penduduk Kabupaten Belu hanya memiliki ijazah SD. Angka ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 12,21%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 18,45%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan kampanye kebijakan

pendidikan wajib belajar pendidikan 12 tahun maupun gong belajar di Kabupaten Belu.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2016–2020

| NO | PENDIDIKAN | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | |
|---------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 24.673 | 13,08% | 26.397 | 13,71% | 27.493 | 14,16% | 29.168 | 14,93% | 35.863 | 18,38% |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 19.734 | 10,46% | 19.606 | 10,19% | 19.529 | 10,06% | 21.094 | 10,80% | 15.134 | 7,76% |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 76.656 | 40,63% | 78.212 | 40,64% | 77.181 | 39,76% | 74.363 | 38,06% | 73.458 | 37,65% |
| 4 | SLTP/Sederajat | 25.069 | 13,29% | 24.298 | 12,62% | 23.746 | 12,23% | 24.161 | 12,37% | 23.829 | 12,21% |
| 5 | SLTA/Sederajat | 33.113 | 17,55% | 34.152 | 17,74% | 35.578 | 18,33% | 35.907 | 18,38% | 35.990 | 18,45% |
| 6 | Diploma I/II | 962 | 0,51% | 924 | 0,48% | 899 | 0,46% | 851 | 0,44% | 819 | 0,42% |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 2.286 | 1,21% | 2.380 | 1,24% | 2.514 | 1,29% | 2.491 | 1,28% | 2.485 | 1,27% |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 5.970 | 3,16% | 6.300 | 3,27% | 6.996 | 3,60% | 7.128 | 3,65% | 7.317 | 3,75% |
| 9 | Strata II | 193 | 0,10% | 195 | 0,10% | 198 | 0,10% | 197 | 0,10% | 202 | 0,10% |
| 10 | Strata III | 7 | 0,004% | 8 | 0,004% | 7 | 0,004% | 8 | 0,004% | 7 | 0,004% |
| JUMLAH | | 188.663 | 100% | 192.472 | 100% | 194.141 | 100% | 195.368 | 100% | 195.104 | 100% |

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

II.2.2.2 Kesehatan

Sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, indikator *outcome* kesehatan aspek dari kesejahteraan sosial dapat diukur antara lain melalui angka usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk.

a. Angka Harapan Hidup

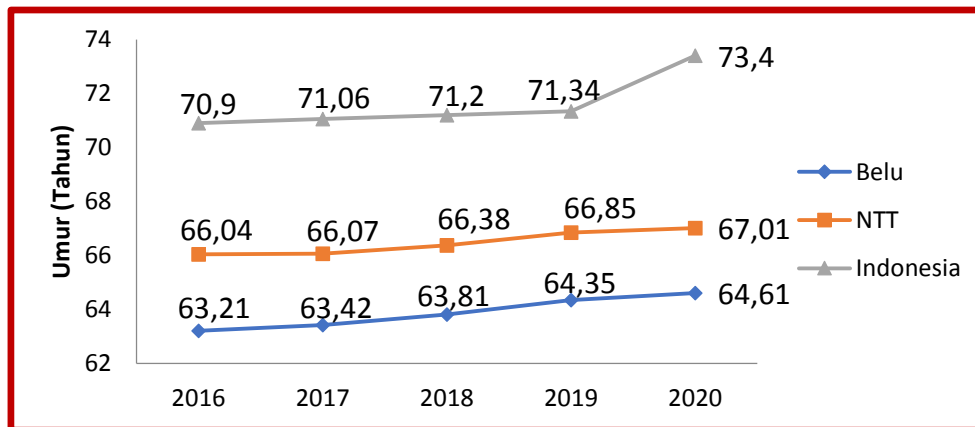
Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai

umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perbandingan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada Grafik 2.19 di bawah ini.

Grafik 2.18
Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021 BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Grafik 2.19 di atas menunjukkan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan Indonesia. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif belum baik dibandingkan Provinsi NTT dan Indonesia secara

umum.

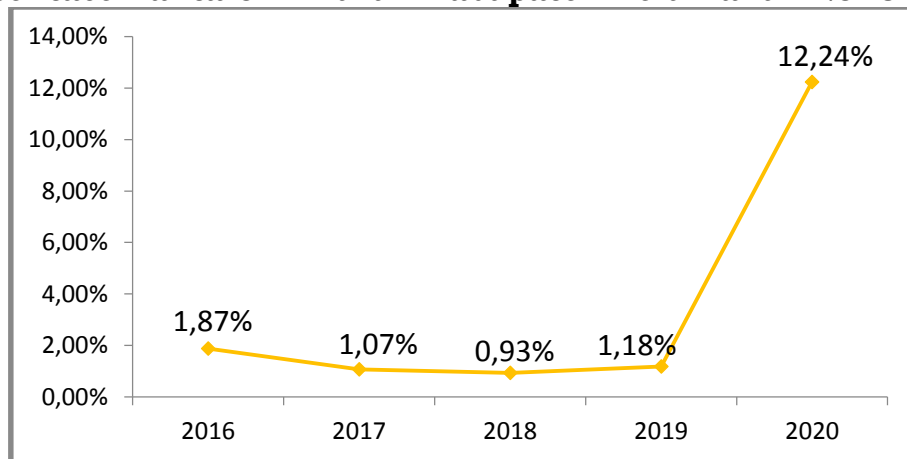
b. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwasiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi.

Penyebab paling umum gizi buruk pada Balita adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Bila orang tua tidak mengetahui jenis dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan anak, asupan nutrisi yang diberikan bisa tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga ia menjadi kurang gizi.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Belu, selain faktor di atas, juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 digambarkan pada grafik 2.20 berikut ini.

Grafik 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

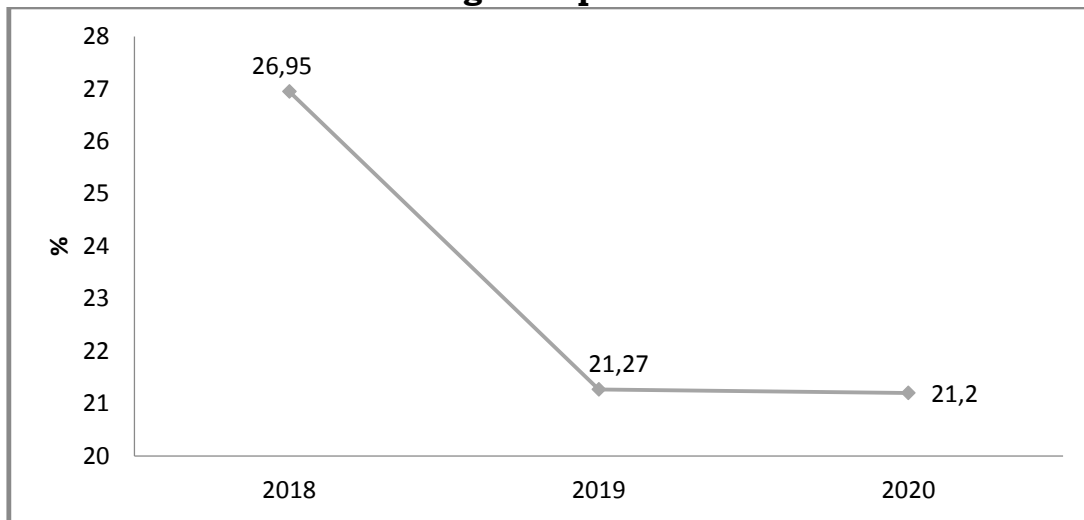
Grafik 2.20 di atas menggambarkan capaian persentase balita yang mengalami gizi buruk dari Tahun 2016-2020 berfluktuasi (turun/naik). Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun 2019 sebesar 1,18% menjadi 12,24% karena ada perubahan standar penentuan balita gizi buruk.

c. Persentase Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Persentase stunting balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 dapat dilihat Grafik 2.21 di bawah ini.

Grafik 2.20
Persentase Balita Stunting Kabupaten Belu Tahun 2018-2020



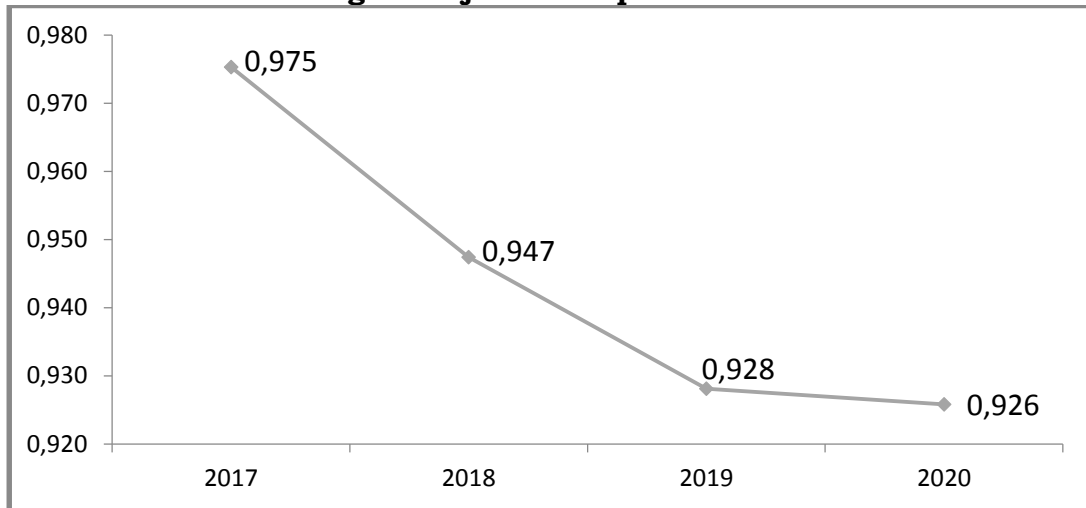
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Grafik 2.21 di atas menggambarkan capaian persentase Balita Stunting Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar 21,34%.

II.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Rasio penduduk yang bekerja dihitung berdasarkan penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja di kali dengan 100% (tertera pada Grafik 2.22).

Grafik 2.21
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2020

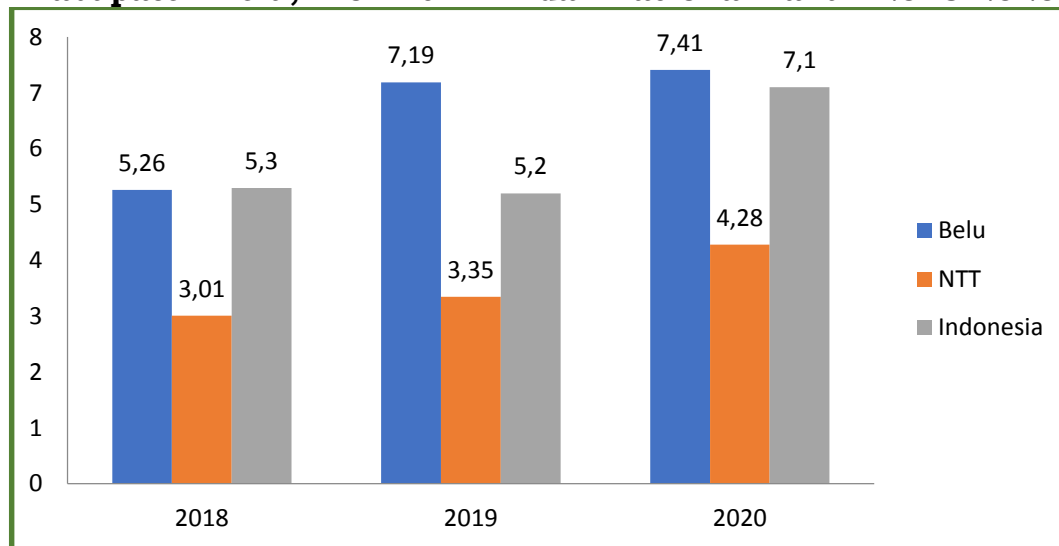


Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021, Hasil olahan BP4D Kabupaten Belu

Grafik 2.22 di atas menunjukkan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017-2020 mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja mengalami penurunan seiring dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang disebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi terutama dampak pandemi COVID pada Tahun 2020 di Kabupaten Belu.

Sejalan dengan penurunan rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun mengalami tren peningkatan (Grafik 2.23).

Grafik 2.22
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021, BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Belu secara umum lebih tinggi dari pada Provinsi NTT dan TPT Nasional. TPT di Kabupaten Belu disebabkan karena:

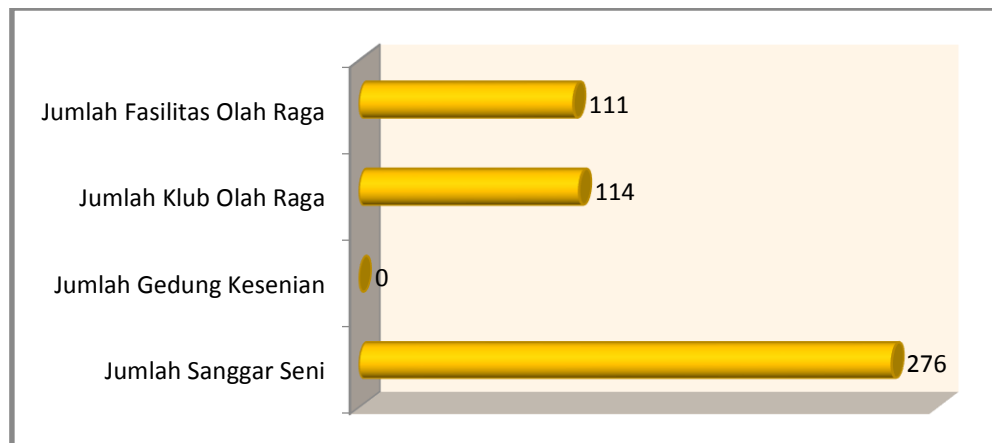
1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2020 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 tahun) sebesar 156.101 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas

- pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
 4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga / perusahaan, dan pekerja).
 5. Dampak Pandemi COVID pada Tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

II.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab serta berdaya saing menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Grafik 2.23
Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian
di Kabupaten Belu Tahun 2020



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Belu 2019

Pada gambar 2.24 menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga dan kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas,

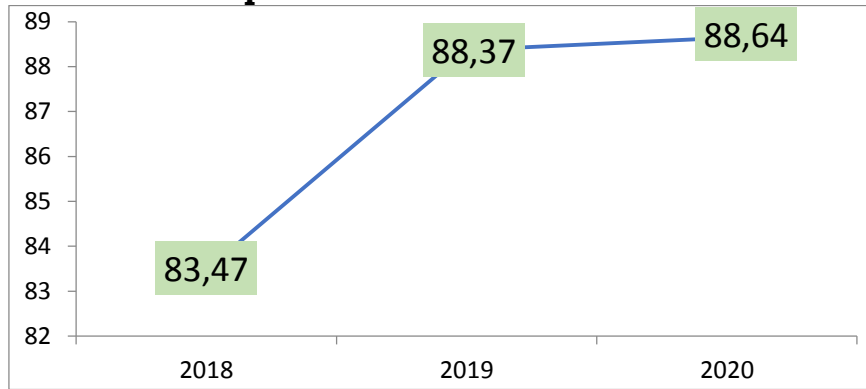
sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibiayai secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung olahraga dan gedung kesenian maupun pembinaan terhadap klub olahraga dan sanggar/grup kesenian.

II.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi dari pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap OPD pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.24
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Belu Tahun 2018-2020



Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Belu 2020

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu tahun 2018-2020 mempunyai tren positif/meningkat, dengan capaian total konversi layanan tahun 2020 sebesar 88,64 (mutu layanan A/sangat baik). Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah baik. Secara detail penilaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2018-2020 berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian
Tahun 2018 – 2020 Kabupaten Belu

| No | Unsur Layanan | Kinerja Unsur Penilaian | | | Keterangan |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan | Sangat Baik | Baik | Baik | Kategori Mutu Pelayanan : A = Sangat Baik (81,26-100) B = Baik (62,51 – 81,25) C = Kurang Baik (43,76-62,50) D = Tidak Baik (25-43,74) |
| 2 | Kemudahan prosedur pelayanan | Baik | Baik | Baik | |
| 3 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | Baik | Baik | Baik | |
| 4 | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |
| 5 | Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan | Sangat Baik | Baik | Baik | |
| 6 | Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan | Kurang Baik | Baik | Baik | |
| 7 | Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | Baik | Baik | Baik | |
| 8 | Kualitas sarana dan prasarana pelayanan | Kurang Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |
| 9 | Penanganan dan pengaduan pengguna layanan | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |
| Keseluruhan Pelayan | | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Belu 2020

II.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

II.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

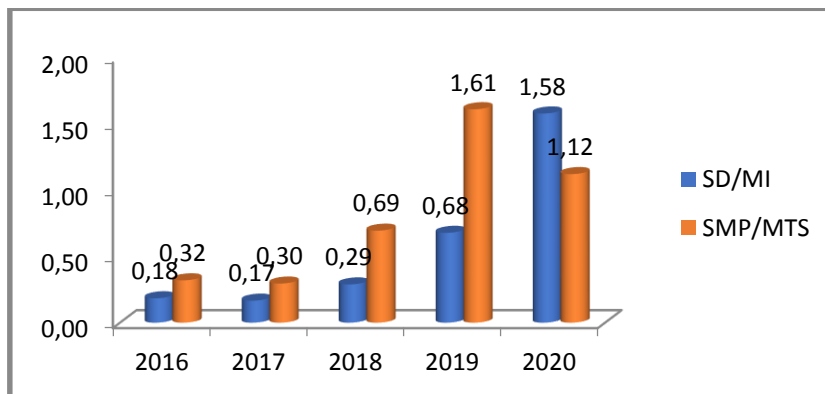
a. Pendidikan Dasar

1) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dan tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.25

Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Belu 2020

Dari grafik menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs kecuali di Tahun 2020. Angka putus sekolah berfluktuasi, Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2016 sebesar 0,18 dan SMP/MTs 0,32. Tahun 2017 berkurang menjadi 0,17 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 0,30 untuk SMP/MTs. Tahun 2018-2020 mengalami tren meningkat untuk SD/MI dan cukup signifikan dari 2019 sebesar 0,68 menjadi 1,58 di Tahun 2020, sedangkan untuk SMP/MI kenaikan cukup signifikan dari Tahun 2018 sebesar 0,69 menjadi 1,61 di Tahun 2019.

Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di kabupaten Belu. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan.

Tabel 2.20
Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

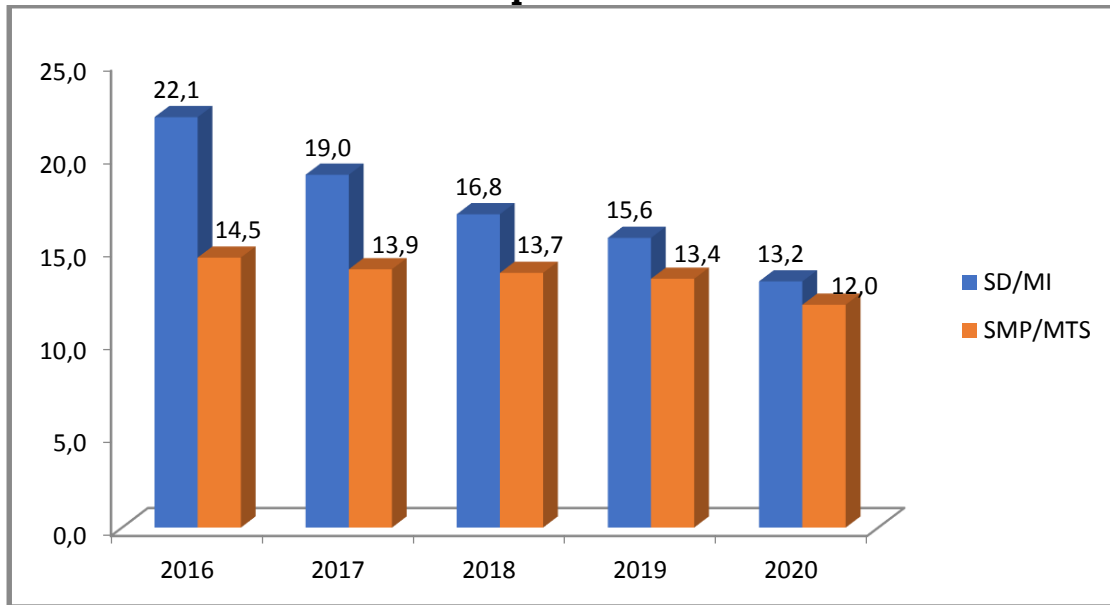
| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Angka Kelulusan SD | 99,88 | 99,3 | 97,59 | 98,55 | 99,24 |
| 2 | Angka Kelulusan SMP | 99,8 | 99,26 | 99,14 | 99,17 | 99,65 |
| 3 | Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 90,35 | 99,98 | 105,6 | 100,2 | 106,5 |
| 4 | Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs | 102,7 | 97 | 97,83 | 100,3 | 108,6 |
| 5 | Guru yang memiliki Kualifikasi S1 / D-IV | 1931 | 2148 | 2233 | 2346 | 2649 |

Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2020

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.27 menyajikan rasio guru murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk 2 jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.

Grafik 2.26
Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

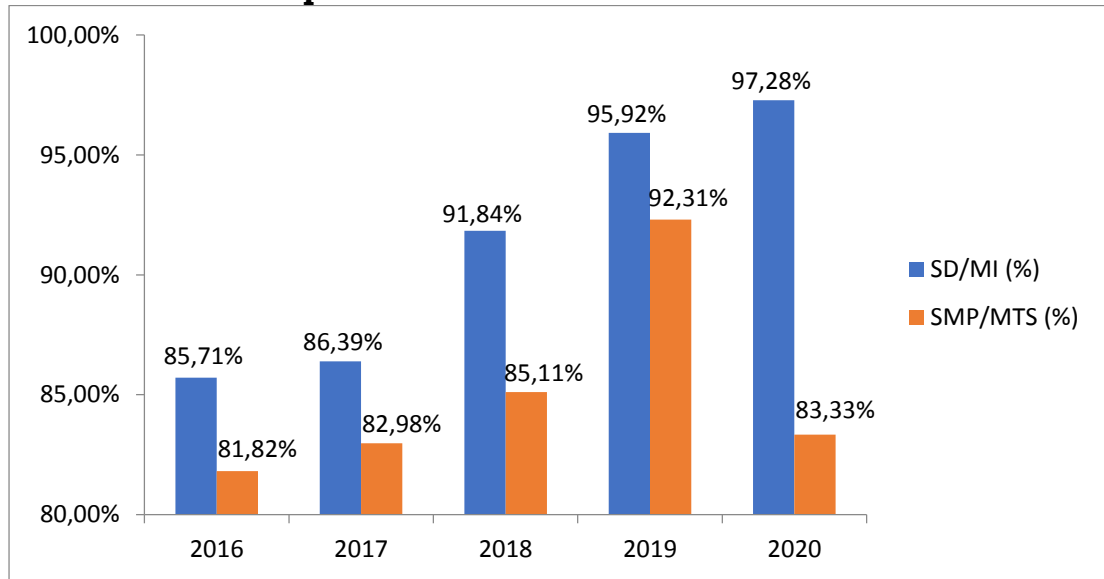


Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2020

3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Belu sebagai berikut :

Grafik 2.27
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2020

Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain – lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisi/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.

Di Tahun 2020 dari hasil analisis terhadap 147 SD/MI terdapat 21,53% ruang kelas dalam rusak ringan dan 8,13% rusak berat, ruang guru 20,82% rusak ringan dan 3,60% rusak berat. Bangunan perpustakaan 23,75% rusak ringan dan 9,58% rusak berat. bangunan KM/WC Guru 31,49% rusak berat dan 13,09% rusak ringan dan bangunan KM/WC Siswa 33,95% rusak berat dan 18,95 rusak ringan.

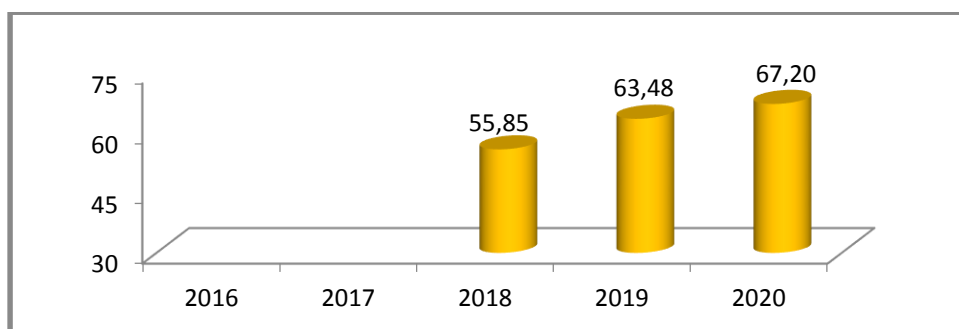
Di tahun 2020 dari hasil analisis terhadap 54 SMP/MTS terdapat 21,53% ruang kelas dalam rusak ringan dan 8,13% rusak berat, ruang guru 20,82% rusak ringan dan 3,60% rusak

berat. Bangunan perpustakaan 23,75% rusak ringan dan 9,58% rusak berat. Bangunan KM/WC Guru 31,49% rusak berat dan 13,09% rusak ringan dan bangunan KM/WC Siswa 33,95% rusak berat dan 18,95 rusak ringan.

b. Pendidikan Anak Usia Dini

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa APK PAUD Kabupaten Belu masih fluktuatif (Lihat grafik 2.29).

Grafik 2.28
APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2020

APK PAUD Kabupaten Belu menurun pada Tahun 2018 sebesar 45,14 menurun menjadi 37,93 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 67,20 pada tahun 2020. Partisipasi PAUD ini masih rendah jika dibandingkan dengan APK SD/MI pada angka di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa usia dini yang menduduki jenjang SD/MI sehingga berkontribusi terhadap capaian APK SD/MI menjadi lebih dari 100.

II.3.1.2 Kesehatan

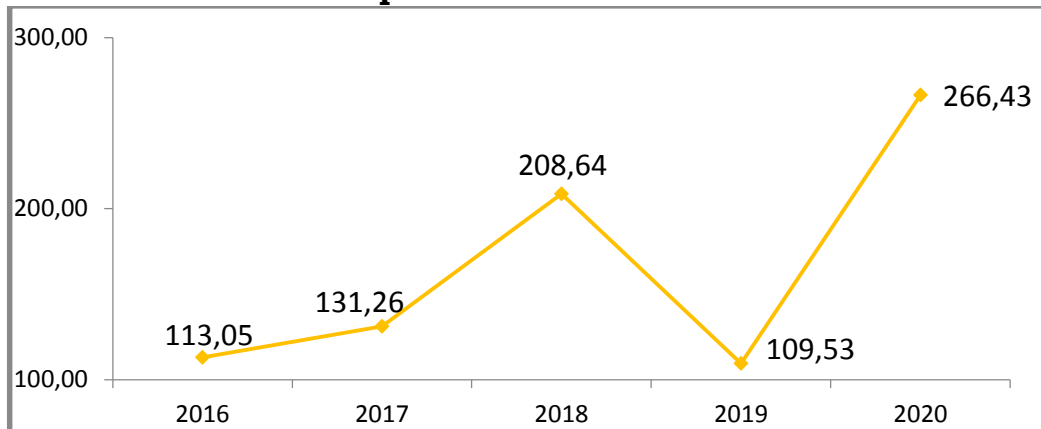
Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB),

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

Grafik 2.29
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



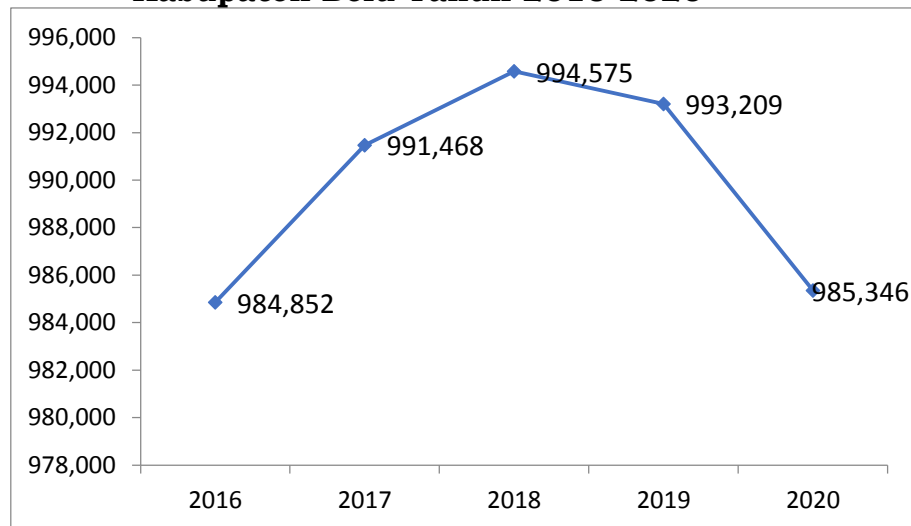
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (2020)

Dengan kondisi akhir tahun 2020 angka kematian ibu (AKI) sebesar 265,55 dari 100.000 kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa AKI masih cukup jauh dari target SDGs sebesar 70 di tahun 2030. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada tahun 2019 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu hamil risiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 tahun) dan terlalu tua (lebih dari 35 tahun). Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan, ini menunjukkan indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan.

Grafik 2.30
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

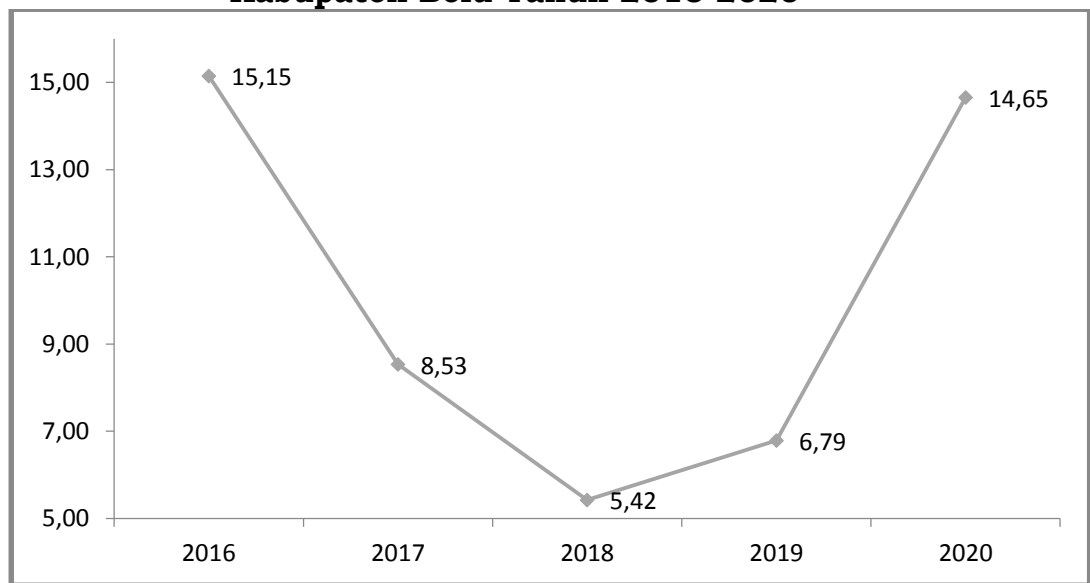


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (2020)

b. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo natal dan kematian bayi yang lain, karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Grafik 2.31
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



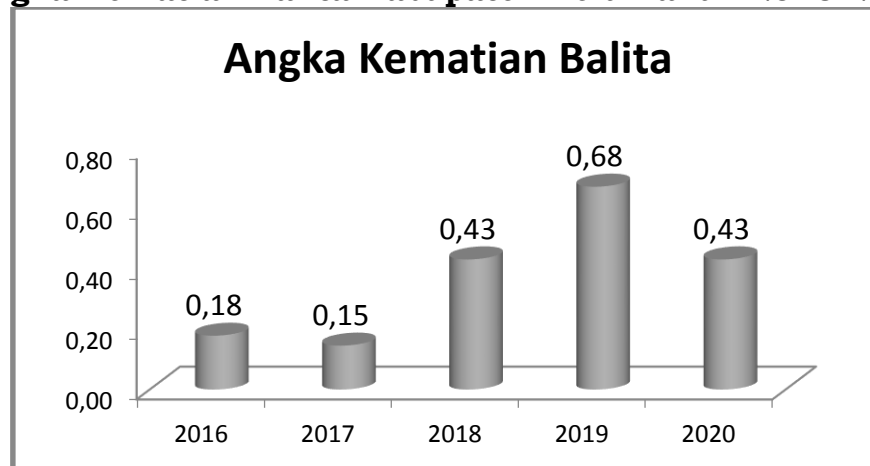
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (2020)

Dengan kondisi akhir tahun 2020 angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Belu sebesar 14,65 dari 1000 kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa AKB tergolong rendah dari standar kesehatan kabupaten yaitu > 40 . Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

c. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian Anak umur 0 – 4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.32 menunjukkan angka kematian anak balita berfluktuasi.

Grafik 2.32
Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

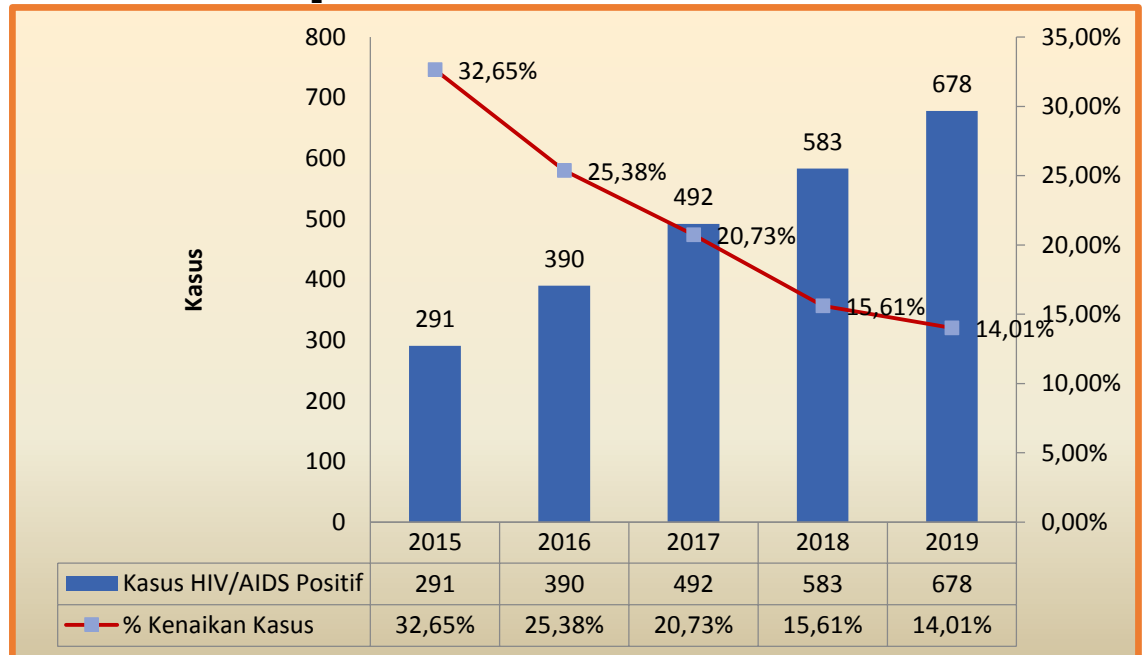


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (2020)

d. HIV dan AIDS

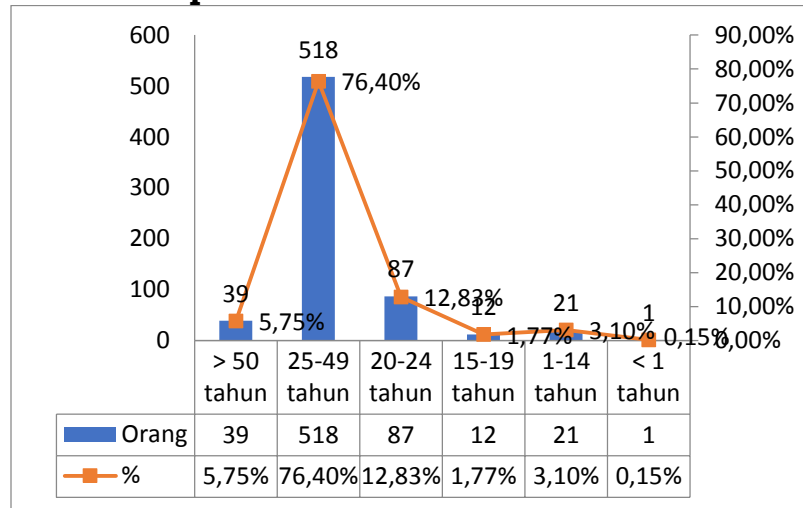
HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *human Immuno deficiency virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 (tiga) metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*, *serosurvey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kabupaten Belu dengan kondisi penemuan kasus HIV positif empat tahun terakhir dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.33
Kasus HIV/AIDS Positif di
Kabupaten Belu Tahun 2015-2019



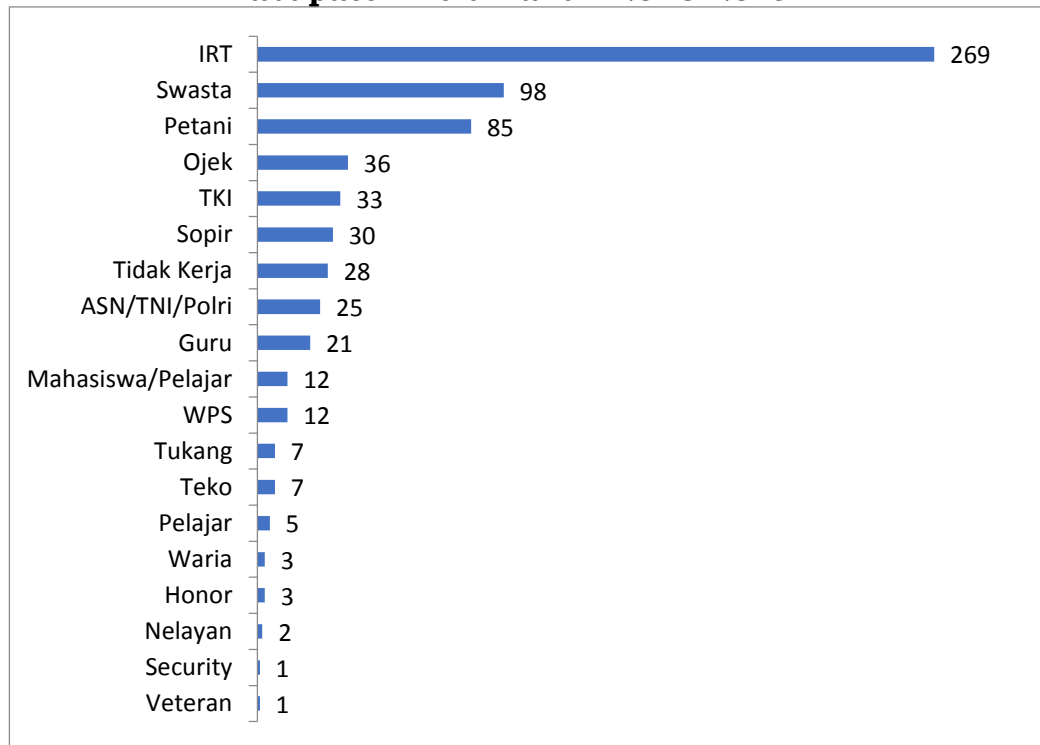
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2019

Grafik 2.34
Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Umur
di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2019

Grafik 2.35
Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di
Kabupaten Belu Tahun 2015-2019



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2019

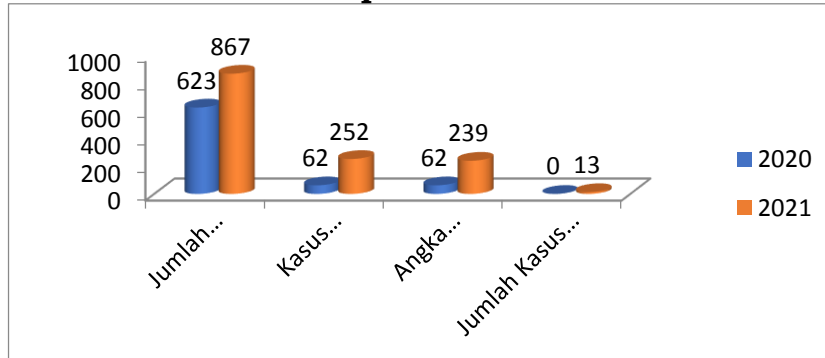
d. Tuberculosis

Jumlah kasus TBC di Kabupaten Belu sampai dengan tahun 2020 sebesar 440 kasus dengan penemuan kasus baru positif/CDR sebesar 43%. Capaian penemuan kasus baru /CDR masih di bawah target nasional yaitu 70%. Di Tahun 2020 jumlah kasus TB yang terdaftar dan diobati sebanyak 440 kasus. Angka kesembuhan pengobatan (*cure rate*) 100% (104/104) untuk kasus TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak 336 kasus. Angka keberhasilan (*succes rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 100%. Jumlah kematian akibat TB sebanyak 2 kasus.

e. COVID

COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember Tahun 2019. Berdasarkan data Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020 dan Tahun 2021 (sampai dengan bulan Juni) gambaran situasi kasus COVID dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

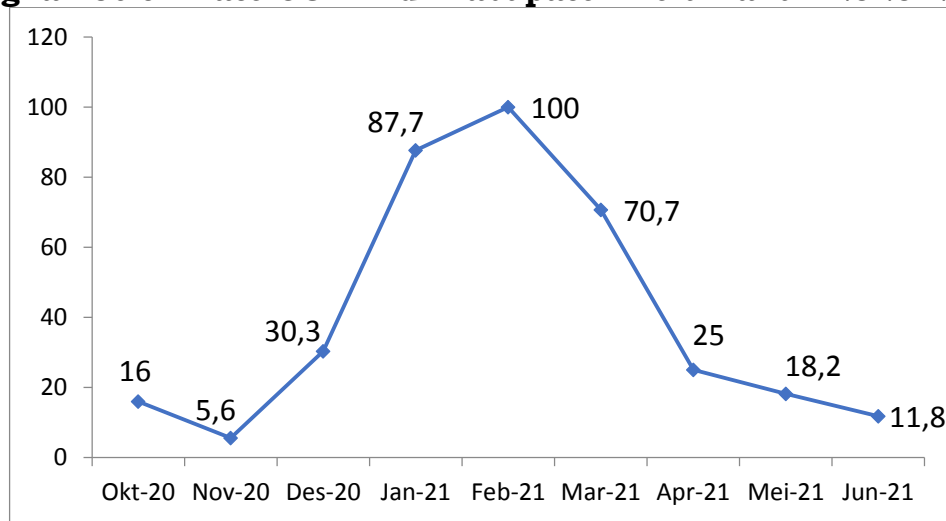
Grafik 2.36
Kasus COVID di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 62 kasus di Tahun 2020 menjadi 252 sampai dengan awal bulan Juni 2021, mengalami kenaikan sebesar 306,5%. Kasus kematian juga meningkat dari nol menjadi 13 kasus. Persentase kesembuhan mengalami penurunan dari 100% menjadi 93,16%. Rata-rata Angka Positif Rate mulai Oktober 2020 sampai dengan Juni 2021 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik di bawah ini:

Grafik 2.37
Angka Positif Rate COVID di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Grafik di atas menggambarkan Angka Positif Rate tertinggi pernah mencapai 100% di bulan Februari 2021, ini menggambarkan bahwa jumlah sampel yang diperiksa melalui PCR/TCM semuanya terkonfirmasi positif COVID.

Secara umum kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk

itu. Tabel 2.21 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Belu.

Tabel 2.21
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Uraian | Skor |
|----|---|-------|
| 1 | Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) | 56 |
| 2 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) | 76 |
| 3 | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 14 |
| 4 | Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 92 |
| 5 | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%) | 112 |
| 6 | Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%) | 96,11 |
| 7 | Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%) | 100 |
| 8 | Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%) | 100 |
| 9 | Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%) | 100 |
| 10 | Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar (%) | 17,56 |
| 11 | Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar (%) | 75,82 |
| 12 | Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar (%) | 22,22 |
| 13 | Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%) | 100 |
| 14 | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%) | 76 |
| 15 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%) | 82 |

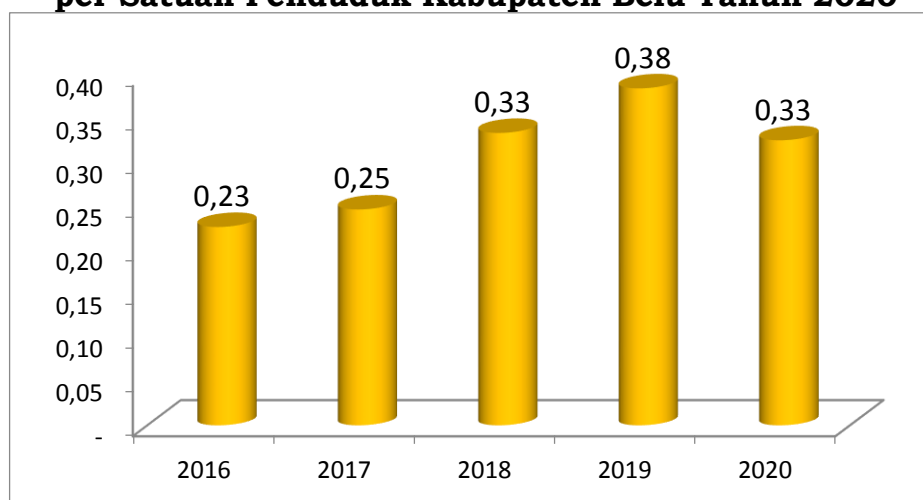
| | | |
|----|--|-------|
| 16 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%) | 94 |
| 17 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%) | 93 |
| 18 | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%) | 70,34 |
| 19 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) | 94,8 |

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2019

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belu Tahun 2020 telah dilakukan cukup baik. Dari 19 indikator hanya terdapat 5 indikator yang belum memenuhi standar.

Ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Grafik 2.37 menggambarkan Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan poskesdes terhadap jumlah penduduk Tahun 2016-2020 yang menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Grafik 2.38
Perkembangan Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Poskesdes per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020

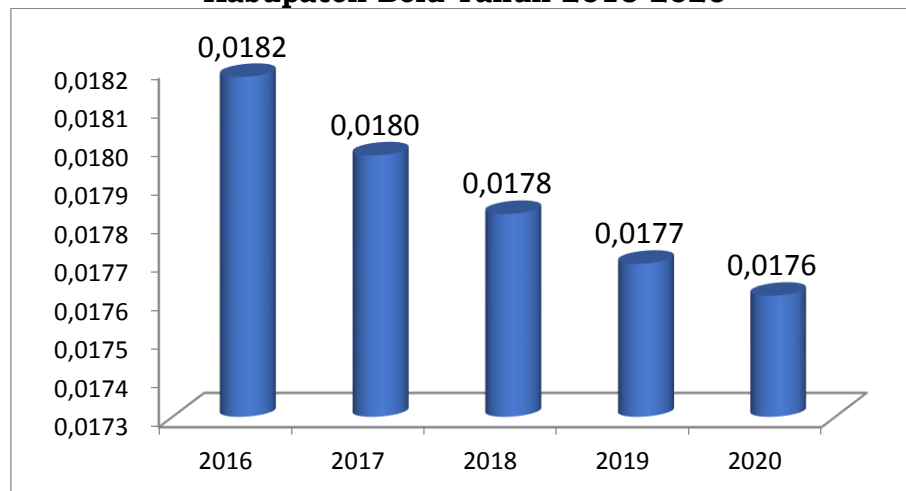


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Grafik 2.38 menggambarkan perkembangan rasio puskesmas, pustu, poliklinik dan poskesdes per satuan penduduk di Kabupaten Belu pada tahun 2020 sebesar 0,33. Khusus untuk puskesmas, sampai dengan tahun 2020 rasio puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1 : 13.359. Standar Kementerian Kesehatan yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Belu disajikan dalam grafik 2.39.

Grafik 2.39
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Grafik 2.39 menggambarkan dari Tahun 2016-2020 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk menurun dari 0,0182 pada Tahun 2016 menjadi 0,0176 pada Tahun 2020, hal ini disebabkan

jumlah penduduk bertambah sedangkan Rumah Sakit tidak bertambah. Standar idealnya 1 (satu) Rumah Sakit melayani 100.000 penduduk, Tahun 2020 kondisi di Kabupaten Belu 1 (satu) Rumah Sakit melayani 56.774 penduduk.

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Pemberi layanan kegawatdaruratan yang bersertifikat | 50,75 | 60,18 | 73 | 77,13 | 48 |
| 2 | Menurunnya kejadian infeksi pasca operasi | 2,5 | 0,13 | 0,92 | 0 | 0 |
| 3 | Menurunnya Pemberian persalinan melalui seksio cesaria | 44 | 43 | 38,92 | 10 | 62 |
| 4 | Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Indikator rasio Tenaga Medis (dokter) per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berikut standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat :

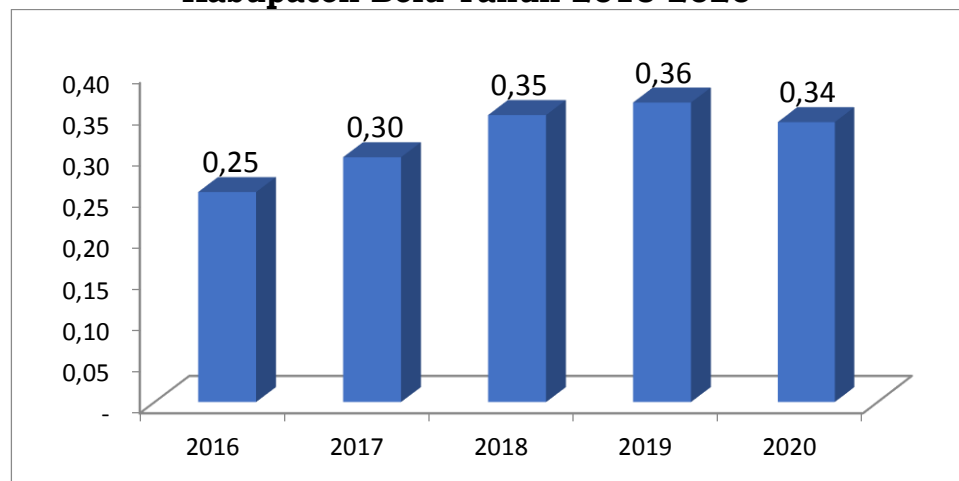
Tabel 2.22
Standar Ketenagaan Pada Puskesmas Kawasan
Perkotaan dan Pedesaan

| No. | Jenis Ketenagaan | Puskesmas Kawasan Perkotaan | | Puskesmas Kawasan Pedesaan | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Rawat Inap | Non Rawat Inap | Rawat Inap | Non Rawat Inap |
| 1 | Dokter/ Dokter Layanan Primer | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Dokter Gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Perawat | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 4 | Bidan | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tenaga Gizi | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Tenaga Kefarmasian | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tenaga Administrasi | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Pekarya | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 31 | 22 | 27 | 19 |

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Grafik 2.21 menyajikan perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Belu berfluktuasi, terendah pada Tahun 2016 sebesar 0,25 meningkat menjadi sebesar 0,36 pada tahun 2019 dan menurun pada Tahun 2020 sebesar 0,34 atau 1 (satu) dokter melayani 2.949 penduduk. Capaian ini belum mencapai standar (1 : 2.500).

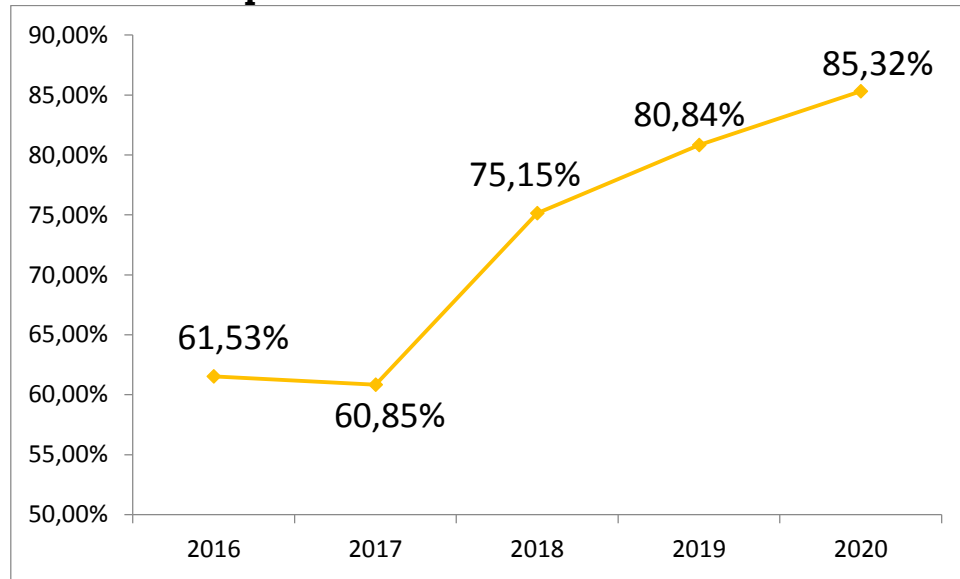
Grafik 2.40
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan.

Grafik 2.41
Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Tabel 2.23
Persentase dan Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan
Kesehatan Berdasarkan Jenis Jaminan BPJS Di
Kabupaten Belu Tahun 2019-2020

| No | Jenis Jaminan BPJS | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % |
| 1 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 79.377 | 36,07% | 79.377 | 35,67% | 91.643 | 40,84% | 100.350 | 44,39% | 99.108 | 43,64% |
| 2 | Non Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 49.515 | 22,50% | 49.515 | 22,25% | 68.027 | 30,31% | 66.562 | 29,45% | 67.647 | 29,79% |
| 3 | Jamkesda | 6.501 | 2,95% | 6.501 | 2,92% | 8.971 | 4,00% | 15.810 | 6,99% | 27.000 | 11,89% |
| 4 | Asuransi Swasta | | | | | | | | | | |
| 5 | Perusahaan Kantor | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | 135.393 | 61,53% | 135.393 | 60,85% | 168.641 | 75,15% | 182.722 | 80,84% | 193.755 | 85,32% |

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2020

Penduduk Kabupaten Belu yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan sampai dengan tahun 2020 sebesar 85,31% dari jumlah total penduduk Kabupaten Belu. Masih sekitar 14,68% penduduk Kabupaten Belu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

II.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

a. Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Belu terdiri dari jalan nasional dengan panjang 67,33 km, jalan provinsi dengan Panjang 63,42 km, jalan kabupaten dengan panjang 353,02 km, jalan desa strategis dengan panjang 85,60 km, jalan desa non strategis dengan panjang 241,84 km, dan Jalan Lingkungan dengan panjang 49,354 km. Pada Tahun 2020 panjang jalan di Kabupaten Belu secara keseluruhan sebesar 860,564 km seperti pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Status Jalan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Jalan Nasional (Km) | | | | | |
| | a. Kondisi Baik | 63,805 | 63,88 | 66,08 | 67,23 | |
| | b. Kondisi Sedang | 3,525 | 3,45 | 1,25 | 0,10 | |
| | c. Kondisi Rusak Ringan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d. Kondisi Rusak Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Panjang | 67,33 | 67,33 | 67,33 | 67,33 | |
| 2 | Jalan Provinsi (Km) | | | | | |
| | a. Kondisi Baik | 55.11 | 56.33 | 56.52 | 54.72 | |
| | b. Kondisi Sedang | 6,58 | 6,28 | 5.90 | 7.70 | |
| | c. Kondisi Rusak Ringan | 0,94 | 0,83 | 0,60 | 0,60 | |

| No | Status Jalan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | d. Kondisi Rusak Berat | 1,54 | 0,74 | 0,40 | 0,40 | |
| | Total Panjang | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | |
| 3 | Jalan Kabupaten (Km) | | | | | |
| | a. Kondisi Baik | 136,72 | 162,77 | 105,65 | 138,95 | 213,82 |
| | b. Kondisi Sedang | 43,89 | 29,39 | 63,30 | 64,37 | 36,90 |
| | c. Kondisi Rusak Ringan | 45,32 | 44,52 | 45,42 | 0 | 13,60 |
| | d. Kondisi Rusak Berat | 127,09 | 116,34 | 138,65 | 149,70 | 88,70 |
| | Total Panjang | 353,02 | 353,02 | 353,02 | 353,02 | 353,02 |
| 4 | Jalan Desa Strategis (Km) | | | | | |
| | a. Kondisi Baik | - | - | - | 6,16 | 12,51 |
| | b. Kondisi Sedang | - | - | - | - | - |
| | c. Kondisi Rusak Ringan | - | - | - | - | - |
| | d. Kondisi Rusak Berat | - | - | - | 79,44 | 73,09 |
| | Total Panjang | - | - | - | 85,60 | 85,60 |
| 5 | Jalan Desa (Km) | | | | 327,44 | |
| | a. Kondisi Baik | 12,96 | 20,71 | 20,96 | 26,29 | 29,68 |
| | b. Kondisi Sedang | 0,90 | 0,9 | 4,42 | 6,99 | 6,99 |
| | c. Kondisi Rusak Ringan | 207,43 | 208,32 | 208,32 | 202,44 | 202,44 |
| | d. Kondisi Rusak Berat | 106,15 | 97,51 | 93,74 | 6,12 | 2,73 |
| | Total Panjang | 327,44 | 327,44 | 327,44 | 241,84 | 241,84 |
| 6 | Jalan Lingkungan (Km) | | | | 49,354 | 49,354 |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Kondisi jalan Kabupaten yang merupakan indikator RPJMD 2016-2021 pada Tahun 2016 dalam kondisi baik sebesar 38,73% dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 60,57%. Secara keseluruhan jalan kabupaten lebih besar mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan jalan nasional maupun jalan provinsi. Hal ini dikarenakan bahwa pada ruas jalan kabupaten lebih banyak lalu lintas pelayanan transportasi untuk mengangkut arus barang dan orang.

Kondisi jembatan di Kabupaten Belu pada periode RPJMD 2016–2020 mengalami peningkatan panjang bentangan dari 1.038

m menjadi 1.060,8 m, sedangkan untuk jembatan pada jalan desa mengalami peningkatan dari 73 m menjadi 103,9 m. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Panjang Bentangan Jembatan Terbangun berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Status Jalan | Panjang Bentangan Jembatan Terbangun | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jalan Kabupaten (m) | 1.038 | 1.038 | 1.044 | 1.054 | 1.060,8 |
| 2 | Jalan Desa (m) | 73 | 73 | 73 | 88 | 103,9 |
| Jumlah | | 1.111 | 1.111 | 1.117 | 1.142 | 1.164,7 |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (2020)

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

b. Pembangunan Irigasi

Pembangunan layanan jaringan irigasi di Kabupaten Belu untuk menjamin pasokan kebutuhan air untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum dapat terlayannya secara optimal. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan saluran irigasi agar intensitas pertanaman tanaman pangan dan hortikultura dapat ditingkatkan. Lokasi pembangunan irigasi teknis yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat di 24 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area sebesar 1,243.18 Ha (tertera pada Tabel 2.22). Data Umum Infrastruktur pada Profil Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020, panjang total saluran irigasi teknis 19.644,01 meter, dengan

kondisi rusak berat 1.514,80 meter. Sedangkan untuk saluran irigasi non teknis total panjang 20.046,46 meter, dengan kondisi rusak berat 1.238,20 meter.

Daerah Irigasi di Kabupaten Belu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 4.815 Ha yang tersebar pada daerah irigasi Fatubesi = 1.650 Ha; Obor = 1.815 Ha dan Maubusa = 1.350 Ha serta daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdapat di Haekesak sebesar 4.400 Ha.

Tabel 2.26
Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020

| No | Nama Daerah Irigasi | Jenis Irigasi (ha) | Lokasi Bangunan Utama | | LUAS LAHAN (Ha) | |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | Kecamatan | Desa | Baku | Fungsional |
| 1. | Buitasik | permukaan | Tasifeto Barat | Bakustulama | 83.09 | 58.22 |
| 2. | Halisikun | permukaan | Tasifeto Barat | Bakustulama | 127.06 | 79.54 |
| 3. | Derok | permukaan | Raihat | Maumutin | 60.44 | 57.36 |
| 4. | Halilulik | permukaan | Tasifeto Barat | Naitimu | 71.77 | 64.61 |
| 5. | Nubelu | permukaan | tasifeto timur | Bauho-Sarabau | 119.51 | 85.91 |
| 6. | Raimetan | permukaan | Raihat | Maumutin | 115.99 | 115.99 |
| 7. | Seopasar | permukaan | Raimanuk | Leontolu | 11.78 | 3.28 |
| 8. | Taeksoruk | permukaan | Tasifeto Timur | Fatubaa | 150.26 | 132.19 |
| 9. | Teun | permukaan | Raimanuk | Teun | 48.32 | 24.92 |
| 10. | Webuni | permukaan | Tasifeto Barat | Naekasa | 13.57 | 12.30 |
| 11. | Kimbana | permukaan | Tasifeto Barat | Naekasa | 11.30 | 11.92 |
| 12. | Lalosuk | permukaan | Tasifeto Timur | Manleten | 47.81 | 9.62 |
| 13. | Wekari | permukaan | Tasifeto Barat | Naekasa | 10.09 | 5.82 |
| 14. | Hasmetan | permukaan | Tasifeto Timur | Takirin | 23.98 | 23.98 |
| 15. | Lahurus | permukaan | Lasiolat | Fatulotu | 13.70 | 13.70 |
| 16. | Dualasi Raiulun | permukaan | Lasiolat | Dualasi | 4.66 | 1.93 |
| 17. | Leowalu | permukaan | Lamaknen | Leowalu | 36.77 | 32.02 |
| 18. | Buburlaran | permukaan | Tasifeto Barat | Lawalutulus | 56.60 | 36.04 |
| 19. | Raiikun | permukaan | Tasifeto Timur | Tialai | 63.37 | 30.54 |
| 20. | Halimodok | permukaan | Tasifeto Timur | Halimodok | 29.06 | 29.06 |
| 21. | Lelowai | permukaan | Tasifeto Barat | Derokfaturene | 26.69 | 10.76 |
| 22. | Tulatudik | permukaan | Tasifeto Barat | Derokfaturene | 34.51 | 34.51 |
| 23. | Lookeu | permukaan | Tasifeto Barat | Lookeu | 41.43 | 9.76 |
| 24. | Ekin | permukaan | Lamaknen Selatan | Ekin | 41.43 | 3.01 |
| LUAS TOTAL | | | | | 1,243.18 | 886.95 |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2019

Berdasarkan indikator RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 persentase Irigasi Kabupaten Belu dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 53,87 % pada Tahun 2016 menjadi 71,35% pada Tahun 2020. Realisasi ini belum mencapai target RPJMD sebesar 75,31%. Dengan capaian target ini maka membutuhkan perhatian ke depannya.

Panjang Saluran Irigasi hingga Tahun 2020 tidak mengalami perubahan namun berdasarkan kondisinya, saluran irigasi di Kabupaten Belu mengalami perubahan yaitu untuk saluran teknis dengan kondisi baik sepanjang 12.522,85 m dan saluran non teknis dengan kondisi baik sepanjang 15.201,36 m.

Tabel 2.27

Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Belu tahun 2020

| No | Jenis Saluran dan Kondisi | Volume | Satuan |
|----|-------------------------------|------------------|--------|
| 1 | Panjang Saluran Non Teknis | | |
| | Kondisi Baik | 15.201,36 | Meter |
| | Kondisi Sedang | 183,00 | Meter |
| | Kondisi Rusak Ringan | 3.423,90 | Meter |
| | Kondisi Rusak Berat | 1.238,20 | Meter |
| | Total Panjang | 20.046,46 | Meter |
| 2 | Panjang Saluran Teknis | | |
| | Kondisi Baik | 12.522,85 | Meter |
| | Kondisi Sedang | 1.244,00 | Meter |
| | Kondisi Rusak Ringan | 4.362,36 | Meter |
| | Kondisi Rusak Berat | 1.514,80 | Meter |
| | Total Panjang | 19.644,01 | Meter |
| | Total Panjang Saluran Irigasi | 39.690,47 | Meter |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

c. Pembangunan Drainase

Berdasarkan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Tahun 2016, luas daerah genangan air di Kabupaten Belu sebesar 9,58 Ha. Selama periode 2016–2020 daerah genangan air yang sudah ditangani sebesar 4,78 Ha sedangkan yang belum ditangani sebesar 4,8 Ha. Adapun daerah genangan air di wilayah kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2020

| No | Titik Genangan di Area Permukiman | Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (ha) | Penanganan |
|----|--|---|--|
| 1 | Jl. Pemuda (Belakang PLTD Atambua - RS Sito Husada) Kelurahan Tulamalae | 1,58 | Sudah ditangani 1, 58 Ha pada tahun 2017 |
| 2 | Simpang Jl Mente - Jembatan Mota Buik (SDK Mota Buik) Kelurahan Fatukbot | 1,60 | Sudah ditangani 1, 6 Ha pada tahun 2020 |
| 3 | Jl. TN Bakel (Hutan Jati Wemata - SDI Nukfuak) Kelurahan Fatukbot | 1,70 | Belum ditangani |
| 4 | RT 3 (Simpang Jl. Hot Gol- Jl. Liku Baunleo Walu) Kelurahan Fatubenao | 1,50 | Belum ditangani |
| 5 | Cabang Haliwen-Ursulin (Jalan St. Angela) Kelurahan Manumutin (Jln. Sutami – St. Angela) | 1,60 | Belum ditangani |
| 6 | Jl. Laksda adisucipto (depan kantor bencana s/d SDLB) Kelurahan Manumutin | 1,60 | Sudah ditangani 1, 6 Ha pada tahun 2020 |
| | Total | 9,58 | Sudah ditangani : 49,90% Belum ditangani : 50,10% |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Untuk menangani daerah genangan air, dilakukan dengan pembangunan drainase. Pembangunan drainase selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Drainase terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Tahun | Nama Pekerjaan | Volume (m) |
|----------------------|-------|--|--------------|
| 1 | 2016 | Pembangunan drainase lingkungan Manuaman | 190 |
| 2 | 2016 | Pembangunan drainase lingkungan Wekatimun | 170 |
| TOTAL PANJANG | | | 360 |
| 3 | 2017 | Pembangunan drainase lingkungan Tulamalae | 328 |
| 4 | 2017 | Pembangunan drainase lingkungan Manuaman | 154 |
| 5 | 2017 | Pembangunan drainase lingkungan Tenukiik | 270 |
| 6 | 2017 | Pembangunan drainase lingkungan Umanen | 371 |
| 7 | 2017 | Pembangunan drainase lingkungan Bardao | 305 |
| TOTAL PANJANG | | | 1.428 |
| 8 | 2018 | Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatubenao RT. 26 | 200 |
| 9 | 2018 | Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatukbot (belakang Klinik Abdi Kasih) | 75 |
| TOTAL PANJANG | | | 275 |
| 10 | 2019 | Pembangunan drainase/gorong-gorong Manumutin | 306 |
| 11 | 2019 | Pembangunan drainase/gorong-gorong Tulamalae, Tenukiik, Lolowa | 895 |
| 12 | 2019 | Pengadaan bangunan pembuang saluran drainase Dusun Motamauk, Desa Mandeu | 850 |
| TOTAL PANJANG | | | 2.051 |
| 13 | 2019 | Drainase/gorong-gorong Beirafu (cor beton) | 250 |
| 14 | 2019 | Drainase/gorong-gorong Beirafu (belakang puskot lama)percast | 500 |
| 15 | 2019 | Drainase/gorong-gorong Fatubenao | 400 |
| 16 | 2019 | Drainase/gorong-gorong Tenukiik | 895 |
| TOTAL PANJANG | | | 2.045 |
| 17 | 2020 | Tidak Ada Pekerjaan | - |
| TOTAL PANJANG | | | - |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Terkait dengan pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang

lancar. Selain itu, di beberapa kawasan permukiman belum dilengkapi dengan jaringan drainase, sehingga sering kali terjadi banjir dan genangan air pada saat musim hujan. Selain itu, berdasarkan Rencana Induk Drainase Kota Atambua Tahun 2020, total luas daerah genangan berubah menjadi 31,251 Ha yang meliputi 42 daerah genangan. Hal ini disebabkan karena aktivitas pembangunan yang menyebabkan kurangnya daerah resapan.

d. Pembangunan Air Bersih

Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk telah membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belu Tahun 2020 adalah 30,20% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air bersih layak di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2.35

**Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu
Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | Cakupan Layanan Air Minum Per Tahun (Jumlah Rumah Tangga) | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | PDAM | 4,510 | 4,790 | 5,061 | 5,496 | 6,036 |
| 2 | Non PDAM (PAMSIMAS) | 1,120 | 2,045 | 3,636 | 4,386 | 5,224 |
| 3 | Non PDAM (Di Pedesaan) | 1,567 | 2,078 | 3,152 | 4,741 | 6,355 |
| 4 | Total Rumah Tangga terlayani | 7,197 | 8,913 | 11,849 | 14,623 | 17,615 |
| 5 | Total Rumah Tangga di Kab. Belu | 48,061 | 47,364 | 54,831 | 56,387 | 58,330 |
| 6 | Persentase Layanan Air Bersih (%) | 14.97 | 18.82 | 21.61 | 25.93 | 30.20 |

Sumber : SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

e. Penataan Ruang

Aspek penataan ruang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari keempat aspek tersebut, yang

cukup penting adalah aspek pelaksanaan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Selama ini yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya koordinasi dalam pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disiapkan dokumen-dokumen rencana tata ruang, antara lain rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Dokumen rencana tata ruang digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang/proses pembangunan. Dalam arahan rencana tata ruang diamanatkan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Selain itu salah satu indikator ketaatan terhadap penyelenggaraan tata ruang adalah jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari uraian di atas, terdapat 3 indikator dalam RPJMD 2016-2020 di bidang penataan ruang yaitu:

1. Jumlah rencana rinci tata ruang

Jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun periode 2016–2020 adalah sebanyak 2 dokumen rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Atambua dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Halilulik. Karena status Atambua sebagai PKSN maka saat ini penyusunannya RDTR PKSN Atambua diambil alih oleh pemerintah pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Dalam penyusunan RDTR PKSN Atambua ini pemerintah pusat masih tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Sedangkan RDTR Perkotaan Halilulik masih diperlukan beberapa perbaikan sehubungan dengan adanya regulasi-regulasi terbaru terkait penataan ruang. Selain itu RDTR Perkotaan Halilulik sampai dengan saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2. Luasan RTH publik di wilayah kota / kawasan perkotaan

Luas RTH publik di Kawasan perkotaan mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 3,96% menjadi 11,27% pada Tahun 2020. Dalam identifikasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa sampai dengan Tahun 2019 luasan RTH publik adalah 11,22% dan pada Tahun 2020 bertambah 0,05% menjadi 11,27%. Untuk mencapai target Luas RTH publik sebesar 20% sesuai RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 maka dibutuhkan penambahan RTH publik pada Kawasan perkotaan sebesar 8,73%.

Tabel 2.28
Lokasi dan Luas RTH publik Kawasan Perkotaan Atambua

| No | Lokasi RTH | Luas (Ha) |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | Stadion Haliwen | 7.87 |
| 2 | Kuburan Khatolik Nekafehan | 1.38 |
| 3 | Kuburan Umum Fatubenao | 2.00 |
| 4 | Kuburan Cina Km.4 | 2.94 |
| 5 | Kuburan Cina Fatubenao | 0.53 |
| 6 | TMP Seroja | 1.04 |
| 7 | Kawasan Hutan Mahoni – Tirta | 3.32 |
| 8 | Sempadan Sungai Talau | 35.78 |
| 9 | Sempadan Sungai Motabuik | 28.16 |
| 10 | Kawasan Hutan Lindung | 345.38 |
| 11 | Taman Kota Frontera Garden | 2.44 |
| 12 | Median Jalan Eltari | 0.25 |
| 13 | Taman Eltari I | 0.12 |
| 14 | Taman Eltari II | 0.11 |
| 15 | Median Jalan Siwabesi | 0.29 |
| 16 | Lapangan Umum Atambua | 2.263 |

| | |
|-------|--------|
| Total | 433.86 |
|-------|--------|

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 (Belum di input di SIPD)

Sementara rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Belu Tahun 2010-2013

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) | 431,86 | 431,86 | 431,86 | 431,86 | 433,86 |
| 2. | Luas wilayah (Perkotaan) | 3.849,3 | 3.849,3 | 3.849,3 | 3.849,3 | 3.849,3 |
| | Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah | 11,22% | 11,22% | 11,22% | 11,22% | 11,27% |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Belu Tahun 2021;

Hasil Evaluasi RPJMD 2016 - 2020

3. Jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Belu 2016-2020 mengalami peningkatan sebanyak 807 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Bangunan Ber IMB Tahun 2016 - 2020

| NO | TAHUN | Target RPJMD bangunan ber IMB | REALISASI bangunan ber IMB |
|----|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2016 | 128 | 182 |
| 2 | 2017 | 135 | 133 |
| 3 | 2018 | 179 | 106 |
| 4 | 2019 | 180 | 129 |
| 5 | 2020 | 183 | 257 |
| | TOTAL | 805 | 807 |

Sumber: DPMPTSP, 2020

II.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Pembangunan Perumahan

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Belu merupakan salah satu penyebab timbulnya kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dan banyaknya rumah yang tidak layak huni di pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin melalui rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peningkatan air bersih, sanitasi, serta usaha perbaikan dan lingkungan permukiman pada umumnya. Pembangunan Rumah layak huni di Kabupaten Belu pada periode 2016 - 2020 sebanyak 4.727 Unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31
Pembangunan Rumah Layak Huni di
Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | Unit |
| 1 | Rumah Khusus | 285 | - | 13 | - | 100 | 398 |
| 2 | Pembangunan Baru (PB) | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Peningkatan Kualitas (PK) | - | 852 | 1001 | 1336 | 1139 | 4328 |
| 4 | Rumah Kopel untuk Perbatasan | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Rumah Susun | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 285 | 852 | 1014 | 1337 | 1239 | 4727 |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Realisasi kinerja bidang perumahan di Kabupaten Belu periode 2016–2020 diukur dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni. Terjadi peningkatan persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 27,87% di Tahun 2016 menjadi 68,78 % di Tahun 2020. Nilai ini melebihi nilai target yang ditetapkan sebesar 30,87 %.

Tabel 2.32
Realisasi Kinerja Bidang Perumahan
di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Rumah Layak Huni (Unit) | 32380 | 0 | 0 | 0 | 36,689 |
| 2 | Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | 18136 | 0 | 0 | 0 | 16,652 |
| 3 | Total Rumah (Unit) | 50516 | 0 | 0 | 0 | 53341 |
| 4 | Penduduk (Jiwa) | 207,170 | 213,596 | 216,783 | 226,039 | 227,097 |
| 5 | Rasio Rumah Layak Huni ($\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$) | 0.16 | NA | NA | NA | 0.16 |
| 6 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni ($\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100$) | 64.10 | NA | NA | NA | 68.78 |

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

b. Persampahan

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume sampah yang cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan

mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2020, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi :

- a. Pengadaan Tong sampah 305 unit
- b. Motor sampah Roda Tiga 15 unit
- c. Dump truck sampah 1 unit
- d. Truck armroll 1 unit

Di Tahun 2020, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan dan 29 pengelola bank sampah. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Belu serta penanganan sampah skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Volume Timbunan SRT | m ³ /tahun | 207.946,89 | 214.396,99 | 217.595,94 | 221.051,85 | 224.012,91 |
| 2 | Volume Timbunan SSSRT | m ³ /tahun | 14.800,65 | 14.696,80 | 15.901,77 | 15.763,84 | 15.976,47 |
| 3 | Total Volume Timbunan sampah | m ³ /tahun | 222.747,53 | 229.093,78 | 233.497,71 | 236.815,69 | 239.989,38 |
| 4 | Total Volume sampah yang di angkut ke TPA | m ³ /tahun | 30.729,00 | 34.152,00 | 54.020,00 | 32.152,27 | 40.668,30 |
| 5 | Penanganan sampah Kabupaten Belu | % | 13,80 | 14,91 | 23,14 | 13,58 | 16,95 |

Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup 2020

Tabel 2.37
Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Volume Timbunan SRT | m ³ /tahun | 77447.34 | 83245 | 83050.28 | 84272.84 | 85338.83 |
| 2 | Volume Timbunan SSSRT | m ³ /tahun | 11524.52 | 11878.1 | 12518.55 | 12355.14 | 12506.89 |
| 3 | Total Volume Timbunan sampah | m ³ /tahun | 88971.86 | 95123.11 | 95568.83 | 96627.99 | 97845.71 |
| 4 | Total Volume sampah yang di angkut ke TPA | m ³ /tahun | 30729 | 34152 | 54020 | 32152.27 | 40668.3 |
| 5 | Penanganan sampah Kabupaten Belu | % | 34.54 | 35.9 | 56.52 | 33.27 | 41.56 |

Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup 2020

c. Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Permukiman Kumuh adalah: Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 46/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2017.

Lokasi Kawasan kumuh dimaksud tersebar di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan sebanyak 66,73 Ha yang tersebar di 12 Kelurahan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan utama lainnya seperti kondisi layanan air bersih, sanitasi dan penanganan kumuh perkotaan untuk mencapai target nasional pada tahun 2019 yaitu target strategi 100-0-100 yang artinya mencapai layanan air bersih 100 %, lingkungan kumuh 0% dan sanitasi layak 100 %.

Adapun persentase Kawasan kumuh yang tertangani pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.38
Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertangani
di Kabupaten Belu pada Periode 2016-2020

| No | Lokasi | Kecamatan | Luas | Penanganan | |
|-------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Tahun | % |
| 1 | Raimaten Fohomea | Kota Atambua | 4,31 | - | - |
| 2 | Tenukiik Saluran | Kota Atambua | 4,27 | 2017 | 100 |
| 3 | Atambua (DAS Talau) | Kota Atambua | 1,02 | - | - |
| 4 | Wehali | Atambua Barat | 2,06 | - | - |
| 5 | Toro Loardes | Atambua Barat | 0,97 | - | - |
| 6 | Nekafehan | Atambua Barat | 1,45 | - | - |
| 7 | Toro Gua Maria 1 | Atambua Barat | 2,23 | - | - |
| 8 | Toro Gua Maria 2 | Atambua Barat | 0,94 | - | - |
| 9 | Weikatimun | Atambua Barat | 6,50 | - | - |
| 10 | Onoboi | Atambua Barat | 8,89 | - | - |
| 11 | Umakulit | Kota Atambua | 12,50 | 2017 | 100 |
| 12 | Haliulun | Kota Atambua | 6,45 | 2017, 2018, 2019 | 100 |
| 13 | Nitasren Sorosikun | Kota Atambua | 1,57 | 2018, 2019 | 100 |
| 14 | Kufeu | Atambua Selatan | 1,58 | - | - |
| 15 | Kampung Jati | Atambua Barat | 0,92 | - | - |
| 16 | Kampung Baru | Atambua Barat | 0,89 | - | - |
| 17 | Fatubaun | Atambua Selatan | 1,61 | - | - |
| 18 | Weaituan Atas | Atambua Selatan | 1,93 | - | - |
| 19 | Bekorumbia Lolowa | Atambua Selatan | 1,09 | - | - |
| 20 | Lafaek Fera | Atambua Selatan | 1,09 | - | - |
| 21 | Motabuik Jembatan | Atambua Selatan | 3,26 | - | - |
| 22 | Motabuik A | Atambua Selatan | 0,49 | - | - |
| 23 | Motabuik B | Atambua Selatan | 0,71 | - | - |
| TOTAL | | | 66,73 | Total penanganan : 24,79 Ha | Persentase penanganan : 37,15 % |

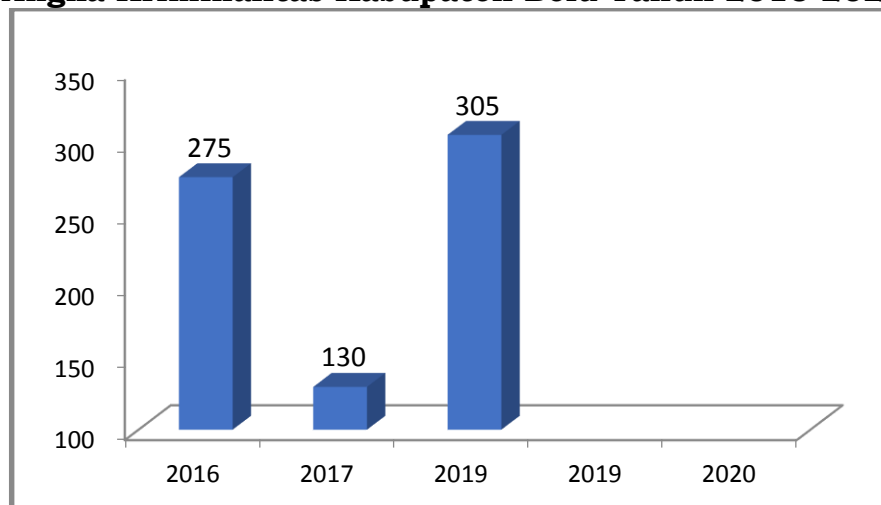
Sumber: SK Bupati Belu Nomor 46/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2017

Total persentase penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 mencapai 37,15 % sedangkan Kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 62,85% atau sebesar 41,94 Ha.

II.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum Dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Belu. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Belu dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Belu terlihat bahwa Tahun 2018 mengalami peningkatan angka kriminalitas sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.42
Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber: SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu 2020

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Belu. Dari data angka kriminalitas di Kabupaten Belu

menunjukkan bahwa kasus penganiayaan adalah yang terbesar (203 kasus) di Tahun 2016.

Untuk menurunkan angka kriminalitas perlu ditambah jumlah pamong praja dan Linmas. Tambahan petugas keamanan dan ketertiban dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Di samping itu pula pemerintah Kabupaten Belu juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran peraturan daerah pada Tahun 2020.

II.3.1.6 Sosial

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar.

Tabel 2.39
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Belu Tahun 2019

| No | Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan PMKS | Tahun | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Anak Terlantar | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 2 | Anak Yang Berhadapan dengan Hukum | 18 | 13 | 16 | 41 | 34 |
| 3 | Anak Dengan Kedisabilitas | 79 | - | - | 79 | 79 |
| 4 | Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | - | - | - | 15 | 15 |
| 5 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | - | - | - | 3 | 3 |
| 6 | Lanjut Usia terlantar | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 7 | Penyandang Disabilitas | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| 8 | Gelandangan | - | - | - | 7 | 7 |
| 9 | Orang Dengan HIV/AIDS | - | - | - | 734 | 734 |
| 10 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | - | - | 802 | - | - |
| Jumlah | | 2802 | 2718 | 3523 | 3584 | 3577 |

Sumber: SIPD, Dinas Sosial Kabupaten Belu 2020

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.40
Capaian Urusan Sosial Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 13,00% | 71,00% | 54,00% | 55,31% | 54,60% |
| 2 | Persentase PMKS yang direhabilitasi | 11% | 15,58% | 11,68% | 9,20% | 6,99% |
| 3 | Persentase PMKS yang diberdayakan | 4,10% | 11,74% | 15,56% | 18,79% | 15,26% |
| 4 | Persentase PSKS yang diberdayakan | 41% | 43,54% | 43,46% | 41,35% | 41,63% |

Sumber: SIPD, Dinas Sosial Kabupaten Belu 2020

II.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

II.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja / kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.38 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 0 | 0 | 180 | 200 | 30 |
| 2 | Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi | 0 | 0 | 50 | 73 | 38 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 71 | 309 | 260 | 266 | 95 |
| 4 | Besaran kasus yang diselesaikan bersama (PB) | 25 | 31 | 30 | 34 | 32 |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan | 1268 | 1889 | 1962 | 4916 | 5400 |

Sumber: SIPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu 2020

II.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Tabel 2.42
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | | | 96,81 | 96,88 | 97,1 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,33 |
| 3 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020

Tabel di atas menunjukkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR hasil Pemilu tahun 2019 sebesar 23,33% menurun jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 sebesar 30%, persentase angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani, tahun 2016 - 2020 semua kasus tertangani 100.

Tabel 2.43
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di
Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020

| No | Jenis Kasus | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|----|-------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | Prpn | Anak | Prpn | Anak | Prpn | Anak | Prpn | Anak | Prpn | Anak |
| 1 | Fisik | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | Psikis | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Pelecehan Seksual | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Penelantaran | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Penganiayaan | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Pemeriksaan | - | 14 | - | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| 7 | Lain-lain | 9 | 7 | 10 | 5 | 20 | 16 | 15 | 7 | 0 | 27 |
| | Jumlah | 30 | 28 | 19 | 21 | 46 | 37 | 26 | 31 | 18 | 36 |

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020

II.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keseimbangan dan keberagaman gizi konsumsi 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain. Skor PPH maksimum mencapai 100%, akan tetapi Kabupaten Belu pada tahun 2019 baru mencapai skor PPH sebesar 71,69 %.

Ketersediaan kecukupan kalori untuk setiap komponen bahan pangan tergolong tinggi yaitu 3603 Kkal/Hari; Protein 87,2 Gram/hari namun konsumsi kalori per kapita di Kabupaten Belu termasuk kategori tinggi yaitu hanya sebesar 3603 Kkal/Kapita/hari dan berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/Kapita/hari. Hal ini menunjukkan keterjangkauan/aksesibilitas pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah baik.

II.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 127 bidang dari 599 bidang tanah pemerintah. Terhadap tanah yang belum bersertifikat tersebut di antaranya merupakan tanah untuk saluran dan juga hasil dari pengakuan tanah – tanah di bawah jalan daerah, jalan perkotaan ataupun jalan lingkungan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belum dapat kita mohonkan penyertifikatannya karena menunggu peraturan yang berlaku.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%) | 16,36% | 18,20% | 20,87% | 21,04% | 21,20% |

Sumber :SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu 2020

II.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan | 57,93 | 67,79 | 73,24 | 77,28 | 80,91 |
| 2 | Indeks Kualitas Air | 36,67 | 56,67 | 66 | 75 | 80 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 64,6 | 66,6 | 68,6 | 71,6 | 75,6 |
| 4 | Indeks Kualitas Udara | 76,31 | 85,37 | 86,66 | 87,14 | 88,9 |

Sumber :SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu 2020

Tabel di atas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup Tahun 2016-2020. Indeks kualitas lingkungan (IKL) mempunyai tern meningkat dengan capaian Tahun 2020 sebesar 80,91.

II.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.46

**Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Cakupan Penerbitan KTP (%) | 81,75 | 81,54 | 86,57 | 81,9 | 84,96 |
| 2 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 tahun (%) | 40,63 | 73,66 | 78,41 | 78,41 | 79,53 |
| 3 | Cakupan Penerbitan akta nikah (%) | 21,5 | 19,22 | 23,81 | 23,81 | 26,84 |
| 4 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%) | 85,25 | 86,95 | 87,97 | 87,97 | 87,37 |
| 5 | Penerbitan Akta Kematian (dokumen) | | | | | 309 |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%) | | | | | 14,01 |
| 7 | Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%) | | | | | 2,47 |

Sumber :SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu 2020

Tabel 2.30. menunjukkan capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 2016-2020. Capaian sampai dengan Tahun 2020 cakupan Penerbitan KTP sebesar 84,96%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 tahun sebesar 79,53%, Cakupan Penerbitan Akta Nikah sebesar 26,84%, Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 87,37%, Penerbitan

Akta Kematian sebanyak 309 dokumen, Cakupan Penerbitan KIA sebesar 14,01% dan Cakupan Pengelolaan GISA Kependudukan pada Desa/Kelurahan sebesar 2,47% . Capaian-capaian ini belum maksimal terutama terhadap target nasional, hal ini disebabkan karena : keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

II.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDES, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.47
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase LPM berprestasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase PKK aktif (%) | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Posyandu Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Bumdes Aktif (%) | | 69 | 33 | 96 | 57 |
| 5 | Persentase Posyantek Aktif (%) | | | | | |
| 6 | Indeks Membangun Desa (IDM) | | | | | |
| 7 | Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang) | 138 | 294 | 483 | 245 | 182 |
| 8 | Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 9 | Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket) | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok) | 69 | 69 | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpk) | 11 | 16 | N/A | N/A | N/A |

Sumber: SIPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu 2020

Selain capaian indikator di atas, salah satu indikator yang menggambarkan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan status desa. Sampai dengan Tahun 2020 status desa di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48
Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019

| No | Status Desa | Jumlah Desa | % |
|--------------|------------------------|-------------|--------|
| 1 | Desa Sangat Tertinggal | 1 | 1,45% |
| 2 | Desa Tertinggal | 24 | 34,78% |
| 3 | Desa Berkembang | 39 | 56,52% |
| 4 | Desa Maju | 5 | 7,25% |
| Jumlah Total | | 69 | 100% |

Sumber: SIPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu 2020

II.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%).

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut :

Tabel 2.49
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) | 1,32 | 1,24 | 1,17 | 1,17 | 1,09 |
| 2 | Rasio Akseptor KB (%) | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| 3 | Total Fertility Rate (TFR) (%) | 3,31 | 3,3 | 3,29 | 3,29 | 3,28 |
| 4 | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang | 19,66 | 22,38 | 22,65 | 22,65 | 22,85 |
| 5 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 60 | 60,5 | 60,7 | 73,6 | 74,9 |
| 6 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja(BKR) ber-KB (%) | 52 | 54 | 55 | 56,5 | 50 |
| 7 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) | 50,4 | 51,7 | 53 | 54 | 52 |
| 8 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%) | 32 | 40 | 45 | 47 | 35,4 |
| 9 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%) | 4,26 | 6,38 | 10,64 | 17,02 | 19,15 |

Sumber : SIPD, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 2020

Tabel di atas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB Tahun 2016-2020. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk 1,20%, rata-rata Rasio Akseptor KB 55,60%. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebanyak 3,29.

II.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jalan, memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir terjadinya

kecelakaan lalu lintas di jalan, maka ditetapkan beberapa indikator perhubungan sebagai berikut :

Tabel 2.50
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Persentase pemasangan rambu-rambu (unit) | 198 | 323 | 398 | 398 | 430 |
| 2 | Persentase layanan angkutan darat | 5,56 | 5,56 | 5,26 | 5,00 | 4,76 |
| 3 | Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%) | 40,12 | 40,11 | 40,12 | 62,60 | 58,49 |

Sumber: SIPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu 2020

Tabel di atas menunjukkan Jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2020. Tahun 2016 sebesar 40,12% menjadi 58,49% pada Tahun 2020 Sedangkan untuk pemasangan rambu-rambu juga menunjukkan penambahan menjadi 430 rambu pada Tahun 2020, dan persentase layanan angkutan darat relatif berfluktuasi pada angka 5%. Hal menggambarkan bahwa kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Belu masih perlu mendapat perhatian karena belum maksimal.

II.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator

1. proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit);
2. jumlah pertemuan dengan media massa;
3. jumlah web site milik pemda;
4. jumlah PD yang memiliki jaringan internet;
5. jumlah website PD yang aktif;
6. diseminasi informasi kepada masyarakat; dan
7. pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses

data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerja sama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%) | 4 | 4 | 9 | 12 | 35 |
| 3 | Jumlah terbitan media cetak (kali) | 2 | 4 | 4 | 6 | |

Sumber: SIPD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu 2020

Tabel di atas menunjukkan Capaian urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016–2020. Pengelolaan *e-government* di Kabupaten Belu belum maksimal, dikarenakan kurangnya *update* aplikasi yang ada dan pengelolaan terhadap aplikasi tersebut belum berjalan dengan baik. Di samping itu aplikasi *e-government* yang dimiliki oleh Kabupaten Belu belum terintegrasi sehingga pengelolaannya masih parsial di masing-masing OPD.

II.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Belu masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Belu

terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase Koperasi Aktif | 73,29% | 71,33% | 64,67% | 65,13% | 64,94% |
| 2 | Persentase UKM Aktif | 137,98% | 137,41% | 123,71% | 131,30% | 127,12% |
| 3 | Persentase LEPMM Aktif | 101,85% | 107,56% | 107,46% | 101,34% | 96,95% |

Sumber : SIPD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

Tabel 2.25 menggambarkan capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa 2016-2020, persentase koperasi tidak aktif mengalami tren penurunan dari 73,29% di Tahun 2016 menjadi 64,94% di Tahun 2020, persentase UKM aktif dan LEPMM Aktif mengalami fluktuasi.

II.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.53
Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | N/A | N/A | 83,47 | 88,37 | 88,64 |
| 2 | Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha) | 5 | 12 | 23 | 65 | 87 |
| 3 | Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp (milyar)) | 16,835 | 47,896 | 98,616 | 242,681 | 469,032 |
| 4 | Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang) | 8,00 | 9,33 | 43,57 | 29,71 | 26,36 |

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu 2020

Grafik 2.28 di atas menunjukkan Investasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan terutama pada Tahun 2018-2019 dan Tahun 2019-2020. Ini menunjukkan iklim berinvestasi di Kabupaten Belu cukup baik sehingga menarik investor untuk berinvestasi.

Tabel 2.54
Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Jumlah Perusahaan | | | | | Jumlah Kekayaan (miliar rupiah) | | | | |
|----|---------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | SIUP skala Mikro | 137 | 90 | 85 | 134 | 89 | 3,62 | 2,63 | 2,82 | 3,58 | 2,34 |
| 2 | SIUP skala Kecil | 208 | 132 | 145 | 151 | 145 | 47,38 | 29,14 | 36,46 | 40,58 | 31,31 |
| 3 | SIUP skala Menengah | 33 | 33 | 37 | 43 | 18 | 39,92 | 37,08 | 46,41 | 66,82 | 29,57 |
| 4 | SIUP skala Besar | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32,24 | 30,00 | - | 44,32 | - |
| | Jumlah | 380 | 256 | 267 | 331 | 252 | 123,15 | 98,85 | 85,69 | 155,3 | 63,21 |

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu 2020

Jenis Perizinan tertentu yang sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belu Tahun 2020 sebanyak 117 izin. Tabel 2.45 menggambarkan Capaian Penerbitan Izin Tahun 2016-2020, dengan jumlah izin terbanyak yang diterbitkan pada tahun 2020 adalah SIUP 253, TDU Pariwisata 55 dan IUJK 54.

Tabel 2.55
Capaian Penerbitan Ijin Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah Izin Yang Diterbitkan | | Capaian % |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | |
| 1 | 2016 | 1200 | 1997 | 166% |
| 2 | 2017 | 1100 | 1018 | 93% |
| 3 | 2018 | 1000 | 786 | 79% |
| 4 | 2019 | 1200 | 1280 | 107% |
| 5 | 2020 | 1300 | 1156 | 89% |
| Total | | 5800 | 6237 | 108% |

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu 2020

II.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.56
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 0 | 0 | 5,2 | 6,5 | 7 |
| 2 | Cakupan pembinaan olahraga (%) | 0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | 0 | 0 | 7,8 | 7,8 | 8,5 |
| 4 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%) | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 5 | Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor) | 0 | 0 | 70 | 92 | 92 |

Sumber : SIPD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Belu 2020

Tabel 2.42 menggambarkan capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020, persentase organisasi pemuda yang

aktif mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, cakupan pembinaan olahraga mengalami penurunan dari Tahun 2017 ke 2018 kemudian stagnan dari Tahun 2018-2020, Cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan, Cakupan pelatih bersertifikat stagnan dari Tahun 2018-2020, Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan mengalami kenaikan dari Tahun 2018-2019 dan stagnan dari Tahun 2019-2020. Hal ini menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal.

II.3.2.14 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang andal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Tabel 2.57
Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen) | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 |

Sumber: SIPD, BP4D Kabupaten Belu tahun 2020

Indikator capaian urusan statistik Tahun 2016-2017 antara lain ketersediaan buku Kabupaten Belu Dalam Angka, Profil Kabupaten Belu dan SIPD.

II.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah, fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

II.3.2.16 Kebudayaan

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Belu terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.58
Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2017-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit) | | 25 | 1300 | 1300 | 1300 |

Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2020

Kegiatan even budaya Tahun 2020 tidak diselenggarakan disebabkan ada pembatasan mobilisasi orang dan larangan berkumpul akibat Pandemi COVID.

II.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2018-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar) | | | 6.594 | 7.137 | 7.395 |

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu 2020

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Belu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan, baik dari jumlah perpustakaan maupun jumlah koleksi buku, meskipun jumlah perpustakaan pada tahun terakhir tidak ada peningkatannya, namun jumlah koleksi buku perpustakaan terdapat peningkatan .

II.3.2.18 Kearsipan

Salah satu ukuran yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah adalah tertib tidaknya kearsipan daerah. Melalui arsip yang baik, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan akan mudah ditemukan. Karenanya, tertib arsip menjadi cermin administrasi modern. Capaian kinerja Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok) | | | 627 | 670 | 558 |

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Belu 2020

II.3.2.19 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencana Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan (BP4D) Kabupaten Belu merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Belu, dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.61
Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kecamatan (Dok) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kabupaten (Dok) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang ekonomi (Dok) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang sosial budaya (Dok) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (Dok) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Pengembangan data informasi dan Statistik | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 |

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 7 | Ketersediaan dokumen Hasil kajian penelitian dan pengembangan (Dok) | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kecamatan (%) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 9 | Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten (%) | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 10 | Tersedianya dokumen RTRW, RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (dokumen) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 12 | Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan kabupaten (dokumen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : SIPD, BP4D Kabupaten Belu 2020

Indikator Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD dan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, jumlah dokumen perencanaan pembangunan, Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD, Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah disahkan dalam status “Ada”.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecenderungan meningkat, Tahun 2016 sebanyak 2 buah dan Tahun 2020 sebanyak 6 buah. Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten meningkat dari Tahun 2016

sebesar 65% menjadi 75% di Tahun 2018, Tahun 2018-2020 tidak terjadi perubahan (stagnan).

II.3.2.20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah bahwa, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.62
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat | 723 | 871 | 394 | 65 | 73 |
| 2 | Pembinaan politik kepada masyarakat | 878 | 611 | 357 | 146 | 179 |
| 3 | Menurunnya Jumlah Kasus unjuk rasa / Demonstrasi (Kasus) | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 |

Sumber : SIPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2020

Indikator urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Belu Tahun 2016–2020 di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan politik kepada masyarakat dan menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan politik kepada masyarakat tahun 2016-2020 jumlah pesertanya berfluktuatif. Jumlah demo

berfluktuatif, tahun 2016 sebanyak 8 menjadi 5 di Tahun 2017, naik menjadi 9 di tahun 2018 dan turun menjadi 3 pada tahun 2020

II.3.2.21 Sekretariat DPRD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, mengamanatkan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Tugas Sekretariat DPRD kabupaten/kota adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;

- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota

Adapun indikator dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63

Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Belu 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Proporsi pelaksanaan rapat-rapat DPRD (kali) | 37 | 35 | 33 | 33 | 35 |
| 2 | Proporsi rencana kerja alat kelengkapan dewan (dok) | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 |

Sumber : SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2020

II.3.2.22 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah

tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Belu tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 2.64
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2020

| NO | URAIAN | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----|---|-------|-----|-------|---------|-------|-----|
| | | Nilai | (%) | Nilai | (%) | Nilai | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | PROSES | | | | | | |
| 1 | Manajemen Perubahan (5) | | | 1,26 | 25,20% | | |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan (5) | | | 1,04 | 20,80% | | |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi (6) | | | 2,41 | 40,17% | | |
| 4 | Penataan Tatalaksana (5) | | | 1,63 | 32,60% | | |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM (15) | | | 7,38 | 49,20% | | |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas (6) | | | 2 | 33,33% | | |
| 7 | Penguatan Pengawasan (12) | | | 1,48 | 12,33% | | |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) | | | 3,13 | 52,17% | | |
| | TOTAL PROSES (60) | | | 20,33 | 33,88% | | |
| II. | HASIL | | | | | | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) | | | 7,02 | 50,14% | | |
| 2 | Survei Internal Integritas Organisasi (6) | | | 3,5 | 58,33% | | |
| 3 | Survei Eksternal Persepsi Korupsi (7) | | | 6,28 | 89,71% | | |
| 4 | Opini BPK (3) | | | 3 | 100,00% | | |
| 5 | Survei Eksternal Pelayanan Publik (10) | | | 8,7 | 87,00% | | |
| | TOTAL HASIL (40) | | | 28,5 | 71,25% | | |
| | INDEKS RB (100) | | | 48,83 | | | |

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu, Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami peningkatan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2019 meningkat dengan nilai sebesar 48,83 (C = agak kurang, perlu

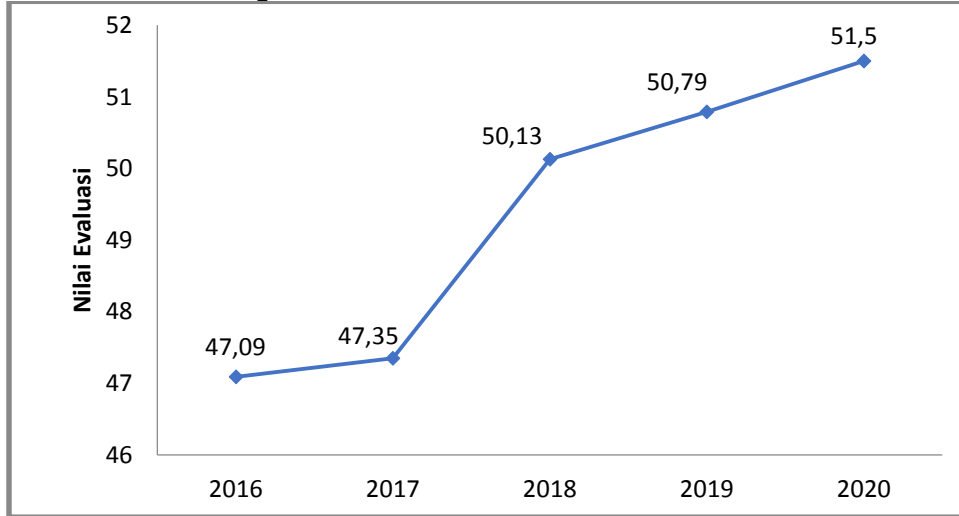
perbaikan, termasuk perubahan mendasar). Capaian ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Belu yaitu:

- a. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- b. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- c. Prioritas peningkatan pelayanan yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu
- d. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme/wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya
- e. Prioritas Perangkat Daerah (PD) yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kabupaten Belu.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahunnya. Nilai AKIP Kabupaten Belu pada Tahun 2020 mencapai 51,5 dengan kategori CC, sebagaimana yang terlihat

pada gambar berikut ini.

Grafik 2.43
Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2020



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belu, 2020

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2018 dengan nilai 2,78 dari Tahun 2017, Tingkat Akuntabilitas Kinerja juga berubah dari C menjadi CC. Capaian dari Tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal sehingga tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah belum berubah, untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain:

- a. Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis Kinerja.
- b. Masih ada Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.

- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memrasyaratkan adanya kinerja yang terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya
- d. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Sementara itu, nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Belu dari Tahun 2016-2018 berfluktuatif. Pada Tahun 2016 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 2,6561 (kategori tinggi), naik menjadi 2,6658 (kategori tinggi) dan turun menjadi 2,5439(kategori tinggi) di Tahun 2018. Nilai LPPD Kabupaten Belu pada Tahun 2016 menempati peringkat ke 328 (tiga ratus dua puluh delapan) dan Tahun 2017 menempati peringkat 304 (tiga ratus empat) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Belu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1 | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2,6561 | 2,6658 | 2,5439 | | |
| 2 | Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 328 | 304 | | | |

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu tahun 2020

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada indeks reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespons perubahan kewenangan dan urusan dalam tata

kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya 41 Perangkat Daerah yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.66
Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu

| No. | Perangkat Daerah | Tugas Pokok dan Fungsi |
|-----|--|---|
| 1. | Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian) | Fungsi penunjang untuk: a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pengoordinasian pelayan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara d. Penetapan pemantauan dan evaluasi perangkat daerah |
| 2. | Sekretariat DPRD | Fungsi penunjang pendukung kegiatan |

| No. | Perangkat Daerah | Tugas Pokok dan Fungsi |
|-----|--|--|
| | | DRPD |
| 3. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan |
| 4. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Fungsi penunjang keuangan |
| 5. | Badan Pendapatan Daerah | Fungsi penunjang keuangan |
| 6. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Fungsi penunjang kepegawaian dan diklat |
| 7. | Inspektorat | Fungsi penunjang pengawasan |
| 8. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |
| 9. | Dinas Kesehatan | Urusan pemerintahan bidang kesehatan |
| 10. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Urusan pemerintahan bidang komunikasi informasi, bidang statistik dan persandian |
| 11. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Urusan pemerintahan bidang penanaman modal |
| 14. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Urusan pemerintahan bidang pendidikan; kebudayaan |
| 15. | Dinas Perhubungan | Urusan pemerintahan bidang perhubungan |
| 16. | Dinas Pertanian dan Perikanan | Urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan. |
| 17. | Dinas Sosial | Urusan pemerintahan bidang sosial |

| No. | Perangkat Daerah | Tugas Pokok dan Fungsi |
|-----|--|--|
| 18. | Dinas Pariwisata | Urusan pemerintahan bidang pariwisata |
| 19. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga |
| 20. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan |
| 21. | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi |
| 22. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian |
| | Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro | Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 23. | Dinas Lingkungan Hidup | Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan |
| 24. | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 25. | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsi penunjang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. |
| 26. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan |
| 27. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Urusan Kebangsaan dan Politik |
| 28. | Badan Pengelola Perbatasan | Urusan pengelolaan perbatasan |
| 29. | Kecamatan (12), Kelurahan (12) | Fungsi penunjang untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum b. Pengoordinasian urusan ketenteraman dan ketertiban c. Pengoordinasian upaya |

| No. | Perangkat Daerah | Tugas Pokok dan Fungsi |
|-----|------------------|--|
| | | penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan |

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BP4D masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

II.3.2.23 Administrasi Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Belu masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tahun 2020 baru mencapai 9,11%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|--------|--------|------------|-------|
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%) | 9,16 | 10,55 | 9,57 | 8,89 | 9,11 |
| 3 | Persentase belanja publik terhadap APBD (%) | 23,02 | 26,43 | 20,5 | 21,4 6 | 18,44 |
| 4 | Persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%) | 88,72 | 118,77 | 114,11 | 116, 53 | 91,65 |
| 5 | Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset secara akuntabel (%) | 55 | 60 | 65 | 70 | 78 |
| 6 | Persentase PAD terhadap pendapatan (%) | 9,16 | 10,55 | 9,57 | 8,89 | 9,11 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu, Tahun 2020

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur *budget maximer* belum bisa dihilangkan
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.
- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting

bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Belu belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya
- b. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan
- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

II.3.2.24 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- c. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.68
Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Cakupan regulasi penataan kelembagaan | 32 | 32 | 36 | 32 | 33 |
| 2 | Persentase peningkatan kinerja OPD dan sumber daya birokrasi (Anjab dan ABK, SPM, SPP, SOP dan reformasi birokrasi) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 3 | Proporsi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 47,09 | 47,35 | 50,13 | 50,79 | 51,5 |
| 4 | Produk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten (Dok) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Produk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (Dok) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Produk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten (Dok) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jumlah Aset Tanah PEMDA yang bersertifikat (bidang) | 14 | 35 | 46 | 62 | 0 |
| 8 | Proporsi pelaksanaan pengendalian (monitoring) dan evaluasi pembangunan daerah (kali) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Proporsi penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa (%) | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 11 | Cakupan kajian produk hukum daerah yang akan ditetapkan | 432 | 379 | 294 | 340 | 253 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|-----|-----|-----|
| 12 | Rekomendasi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | 161 | 95 | 118 | 90 | 55 |
| 13 | Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Jumlah para wajib lapor penyelenggara negara | 0 | 75 | 80 | 120 | 114 |

II.3.2.25 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, secara kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Belu sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2016 tentang manajemen pegawai. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Belu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baru mencapai 35,76% bagi telah mengisi seluruh jabatan struktural yang ada, capaian urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Persentase kenaikan pangkat ASN | 24,55 | 36,7 | 53,6 | 67,49 | 76,15 |
| 2 | Persentase penetapan pejabat struktural sesuai kompetensi | 74,39 | 88 | 87,2 | 90,43 | 90,08 |
| 3 | Persentase ASN yang mendapat SK Pensiun | 19,26 | 32,39 | 53,25 | 72,02 | 84,66 |
| 4 | Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi | 38,02 | 43,96 | 56,04 | 59,85 | 67,25 |
| 5 | Persentase ASN yang mengikuti latihan dasar CPNS | 46,04 | 46,04 | 53,25 | 68,12 | 68,12 |
| 6 | Persentase ASN yang mendapat penghargaan | 43,9 | 60,52 | 70,78 | 79,09 | 87,14 |
| 7 | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN | 40,71 | 57,14 | 67,86 | 85,71 | 107,14 |
| 8 | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural | 22,56 | 23,8 | 28,61 | 30,95 | 35,76 |
| 9 | Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional | 17,71 | 18,86 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
| 10 | Persentase ASN yang mendapat ijin belajar dan tugas belajar | 16,5 | 43 | 68 | 75,5 | 80 |

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belu, Tahun 2018

II.3.2.26 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Indeks Risiko bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cakupan pelayanan informasi rawan bencana (%) | 0 | 4 | 6 | 14 | 60 |
| 3 | Proporsi simulasi dan mitigasi untuk Pengurangan Risiko Bencana (kali) | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Proporsi intervensi bantuan tanggap darurat bencana (kali) | 18 | 47 | 18 | 47 | 50 |
| 5 | Proporsi intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (kali) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu, Tahun 2020

Indikator urusan pemerintahan bidang dan bencana yaitu cakupan pelayanan informasi rawan bencana, proporsi simulasi dan mitigasi untuk pengurangan risiko bencana, proporsi intervensi bantuan tanggap darurat bencana dan proporsi intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

II.3.2.27 Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Belu sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada.

Tabel 2.71
Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|------|------------|------------|------------|
| 1 | Level Kapabilitas APIP | | | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| 2 | Maturitas SPIP | | | 2,85 | 2,85 | |
| 3 | Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen) | 108 | 108 | 110 | 120 | 130 |
| 4 | Persentase tindak lanjut temuan (%) | 73,33 | 77 | 77,66 | 79 | 88,67 |
| 5 | Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2020

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Belu belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

- a) Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan.
- b) Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRİK
- c) Penerapan SPIP belum maksimal
- d) Belum adanya aplikasi e-LHP

SPIP di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 di 6 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain

1. Inspektorat,
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Belu masih pada level 3, guna meningkatkan ke level 4 diperlukan persyaratan di antaranya sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Satuan Tugas
- 2) Menyusun Peraturan Bupati tentang pedoman penilaian risiko
- 3) Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP
- 4) Standarisasi evaluator sejumlah ± 49 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Belu masih sekitar 36,73%, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan
Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1 | Persentase Fungsional Auditor | | | | | 36,73% |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2020

II.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

II.3.3.1 Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Tabel 2.53 menyajikan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, perikanan tangkap berfluktuatif, rata-rata peningkatan sebesar 2,94%, sedangkan produksi perikanan

air tawar Tahun 2016-2020 mengalami tren penurunan, rata-rata penurunan sebesar -31,24% dengan penurunan terbesar (-33,88%) pada Tahun 2019-2020.

Tabel 2.73
Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Produksi perikanan tangkap (ton) | 1.514,70 | 1.513,70 | 1.517,28 | 1.573,80 | 1.675,52 |
| 2 | Produksi perikanan budidaya air tawar (ton) | 27,2 | 28,2 | 26,6 | 24,5 | 16,2 |
| 3 | Produksi perikanan budidaya air payau (ton) | 137,2 | 116,2 | 102,35 | 72,84 | 42,7 |
| 4 | Cakupan bina kelompok perikanan (%) | 4,45 | 6,07 | 6,88 | 15,38 | 16,35 |

Sumber : SIPD, Dinas Perikanan, Kabupaten Belu 2020

II.3.3.2 Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah kabupaten/kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yaitu ;

- a. KPP Motaain dan sekitarnya;
- b. KPP Kota Atambua dan sekitarnya
- c. KPP Fulan Fehan dan sekitarnya
- d. KPP Mandeu dan sekitarnya. Keempat KPP ini fokus pada wisata alam dan wisata minat khusus.

Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.56 di bawah ini.

Tabel. 2.74

Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Lama Kunjungan Wisata (hari) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kunjungan Wisata (%) | 85,24 | 122,02 | 60,49 | 101,71 | 23,5 |
| 4 | PAD Sektor Pariwisata (%) | 0,082 | 0,085 | 0,086 | 0,086 | 0,087 |

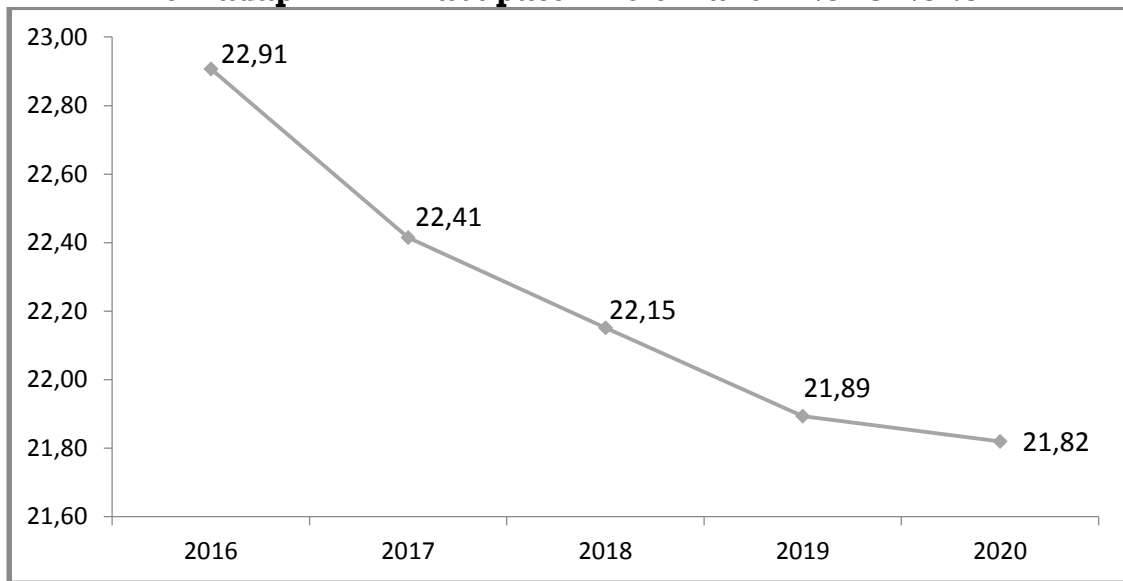
Sumber : SIPD, Dinas Pariwisata, Kabupaten Belu 2020

Tabel 2.56 menyajikan perkembangan urusan pariwisata antara lain persentase kunjungan wisata yang berfluktuatif dengan capaian tertinggi sebesar 122,02% di Tahun 2017 dan terendah di Tahun 2020 sebesar 23,5%. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID. Lama kunjungan wisata stagnan selama 5 (lima) tahun terakhir, oleh karena itu diperlukan program-program inovatif di bidang pariwisata agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama.

II.3.3.3 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bina kelompok tani. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.44
Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.67 menyajikan capaian Indikator Pertanian Tahun 2016-2020.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ ha) | 3,64 | 3,65 | 3,73 | 3,65 | 3,56 |
| 2 | Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ ha) | 1,44 | 1,59 | 1,6 | 1,59 | 1,28 |
| 3 | Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ ha) | 0,72 | 0,78 | 0,87 | 0,87 | 0,68 |
| 4 | Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ ha) | 2,67 | 2,96 | 3,3 | 3,02 | 2,91 |
| 5 | Proporsi luas tanam tanaman Maek Bako (ha) | 0 | 150 | 77 | 5,58 | 0 |
| 6 | Proporsi luas tanam tanaman Jambu Mete (ha) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Proporsi luas tanam tanaman Kopi (ha) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 8 | Proporsi produktivitas tanaman Cabai (ton/ ha) | 1,93 | 1,95 | 2,26 | 2,42 | 2,35 |
| 9 | Proporsi produktivitas tanaman Bawang Merah (ton/ ha) | 3,16 | 3,65 | 3,65 | 3,79 | 3,7 |
| 10 | Proporsi produktivitas tanaman Bawang putih (ton/ ha) | 3,21 | 3,66 | 4,04 | 3,95 | 3,86 |
| 11 | Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ ha) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Sumber: SIPD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2020

Perkembangan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif (data pada tabel 2.57). Fluktuatifnya produktivitas komoditas pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu akibat *el nino* maupun *la nina*, kemampuan inovasi adopsi teknologi oleh petani yang masih lemah, di samping modal usaha yang terbatas, luas lahan garapan yang kecil (hanya 0,6 Ha per KK tani) serta angkatan kerja produktif yang kurang berminat dalam sektor pertanian tanaman pangan.

II.3.3.4 Peternakan

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional, karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih profesional demi meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

Tabel 2.76
Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Populasi ternak sapi (ekor) | 68529 | 69621 | 70667 | 71731 | 72806 |
| 2 | Populasi ternak babi (ekor) | 55901 | 56712 | 57682 | 58666 | 52256 |
| 3 | Proporsi luas lahan pengembangan HMT (ha) | 10 | 30 | 20 | 32 | 15 |
| 4 | Mempertahankan Persentase vaksinasi ternak (%) | 61,82 | 59 | 70,81 | 71,24 | 69,48 |

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020

Tabel 2.76 di atas menyajikan capaian bidang peternakan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020. Populasi ternak sapi meningkat, 68.529 ekor di Tahun 2016 menjadi 72.806 ekor di tahun 2020. Populasi ternak sapi mengalami tren positif dari Tahun 2016-2019, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh penyakit Flu Babi (*African Swine Fever*) yang merebak di Pulau Timor. Proporsi luas lahan pengembangan Hiajuan Makanan Ternak (HMT) setiap tahun bertambah dengan capaian tertinggi 32 ha di Tahun 2019 dan terendah 15 ha di Tahun 2020. Capaian persentase vaksinasi berfluktuatif dengan capaian tertinggi 71,24% di Tahun 2019 dan terendah 59% di Tahun 2017.

Tabel 2.77, perkembangan jumlah ternak yang diantarpulaukan/dimutasi keluar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. **Tabel 2.77**

Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu tahun 2016-2020

| No | Tahun | Jenis Ternak | | | | |
|----|-------|--------------|--------|------|---------|------|
| | | Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Babi |
| 1 | 2016 | 4.200 | 8 | 100 | 532 | 41 |
| 2 | 2017 | 4.611 | 51 | 40 | 320 | 59 |
| 3 | 2018 | 4.804 | 50 | 42 | 22 | 107 |
| 4 | 2019 | 4.804 | 50 | 30 | 351 | 22 |
| 5 | 2020 | 4.407 | 20 | 10 | 0 | 7 |

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020

II.3.3.5 Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator

- i. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten;
- ii. Jumlah Pembangunan Pasar;
- iii. Ekspor Bersih Perdagangan (%);
- iv. Jumlah jasa pelayanan terhadap UTTP.

Perdagangan di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam daerah dengan pangsa pasar yang ada di Kabupaten Belu sendiri seperti pasar desa/pasar perbatasan berupa pasar harian dan pasar mingguan. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 0,43 persen, yang berarti bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan darat langsung dengan negara RDTL merupakan potensi untuk pengembangan ekspor komoditi terutama komoditas unggulan.

II.3.3.6 Perindustrian

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator

- i. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten
- ii. Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri (%);
- iii. Jumlah Event Promosi Produk Unggulan Daerah.

Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.78
Capaian Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,1 | 1,09 |
| 2 | Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%) | | | | | |
| 3 | Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali) | | | | | |

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan Perdagangan dan Industri 2020

Industri di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan, sebagian besar pangsa pasarnya di wilayah Kabupaten Belu dan khusus untuk meubeler sebagian diekspor ke negara RDTL. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan sebesar 1,1 persen menandakan bahwa sektor industri belum berkembang.

II.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah sistem pengembangan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk pelaksanaan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi di Kabupaten Belu dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat. Indikator urusan transmigrasi yaitu tersusunnya dokumen perencanaan transmigrasi.

Tabel 2.79
Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Sumber: SIPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2020

Intervensi dari Kabupaten masih di bidang pemberdayaan, sedangkan bidang pembangunan transmigrasi masih sebatas perencanaan.

II.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

II.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.80
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita | 345.947 | 361.662 | 262.708 | 413.017 | 426.449 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita | 258.750 | 258.509 | 670.364 | 741.934 | 772.546 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

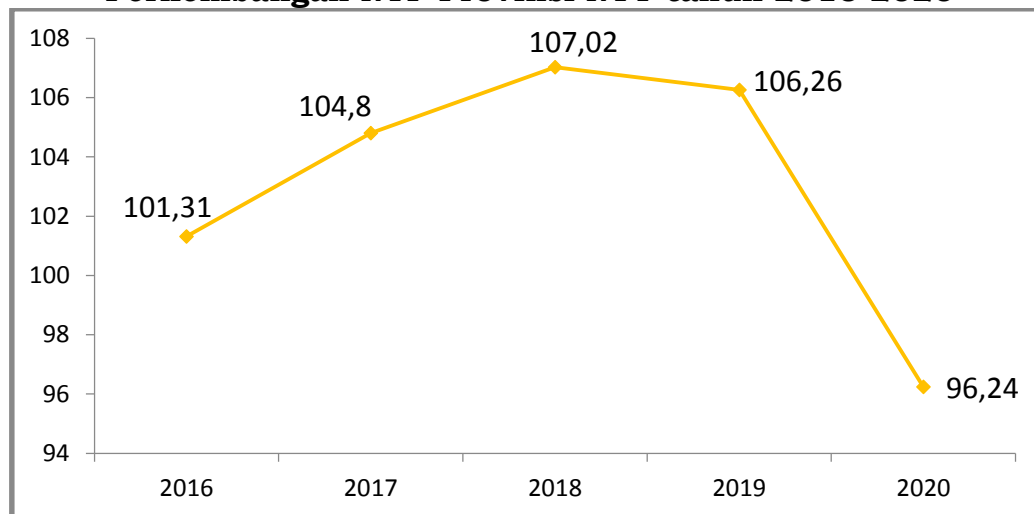
II.4.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melakukan optimalisasi retribusi daerah, mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, perolehan DAU, lain-lain pendapatan yang sah, serta bagi hasil pengelolaan aset pusat di daerah. Gambaran tentang kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Bab III.

II.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembandingan dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.

Grafik 2.45
Perkembangan NTP Provinsi NTT tahun 2016-2020



Data pada grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

II.4.2 Fokus Fasilitas Daerah/Infrastruktur

II.4.2.1 Perhubungan

Fungsi sektor perhubungan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor perhubungan tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia tetapi juga mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dan membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Sektor Perhubungan berfungsi sebagai penunjang pembangunan (*the promotion sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Adapun capaian dari Urusan Perhubungan Kabupaten Belu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.81
Capaian Urusan Perhubungan
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| 1 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,022 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 |
| 2 | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | 894.240 | 635.040 | 526.680 | 489.600 | 506.520 |
| 3 | Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah orang melalui Bandara per tahun | 69.458 | 81.468 | 58.927 | 82.843 | 39.284 |
| 5 | Jumlah orang melalui Pelabuhan per tahun | 1.366 | 970 | 960 | 1.327 | 1.327 |
| 6 | Jumlah Barang melalui Pelabuhan per tahun (ton/m3) | 31.999 | 42.757,5 | 40.054 | 65.816 | 65.816 |

Sumber : SIPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu 2020

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa arus masuk dan keluar orang dan barang di Kabupaten Belu masih termasuk lancar, dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan volumenya seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Belu.

II.4.2.2 Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten.

Tabel 2.82
Capaian Urusan Penataan Ruang Kabupaten Belu 2016-2020

| No | Uraian | 2020 |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Jumlah produk hukum pemanfaatan ruang | 1 |
| 2 | Luas wilayah produktif (Ha) | 23.153,7 |
| 3 | Luas wilayah industri (Ha) | 79,95 |
| 4 | Luas wilayah banjir (Ha) | 6.452,39 |
| 5 | Luas wilayah kekeringan (Ha) | 94.962,70 |
| 6 | Luas wilayah perkotaan (Ha) | 3.849,30 |

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Data di atas memberikan gambaran bahwa di Kabupaten Belu masih terdapat potensi pengembangan wilayah untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan industri sebagaimana luasan yang tertera dalam tabel.

II.4.2.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan yang mendukung fokus fasilitas wilayah dan juga mendukung aspek daya saing adalah indikator jumlah bank dan jumlah hotel/penginapan yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.83
Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di
Kabupaten Belu Tahun 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, KCP, Unit) | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 2 | Jumlah Hotel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

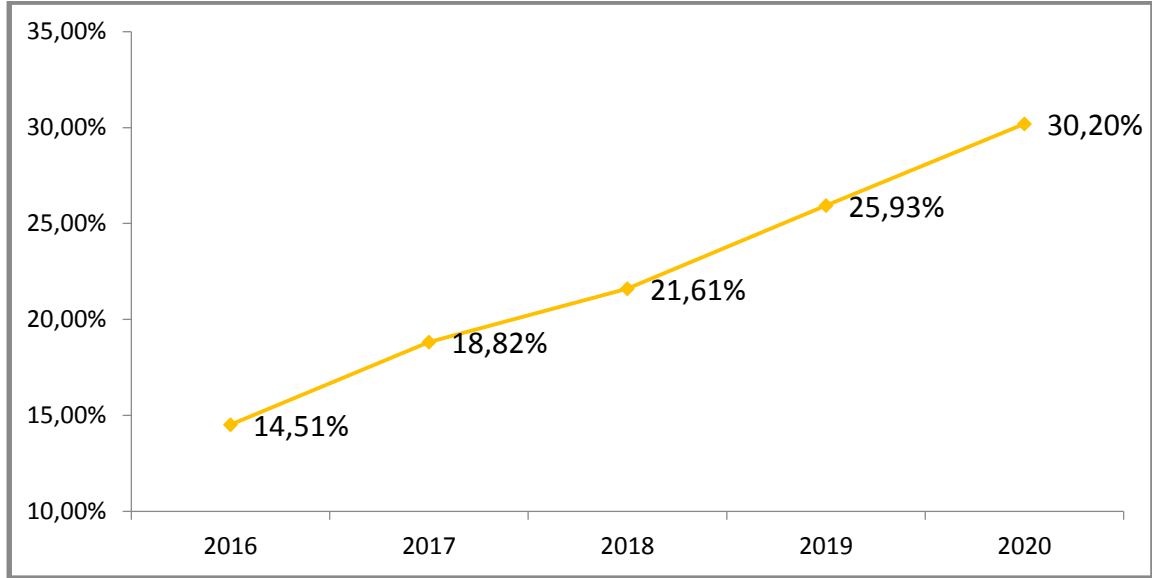
Sumber : BP4D Kabupaten Belu 2020

Sampai dengan Tahun 2020 lembaga perbankan yang berkembang di Kabupaten Belu sebanyak 27 Bank, dengan perincian 2 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Unit, yang didukung dengan ketersediaan ATM sebanyak 39 unit. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau orang yang berkunjung ke Kabupaten Belu baik untuk urusan keluarga, wisata maupun bisnis atau pekerjaan, didukung dengan ketersediaan hotel/penginapan sebanyak 12 hotel kelas melati dan juga fasilitas amenities lainnya seperti rumah makan, restoran, dll. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari aspek daya saing daerah, Kabupaten Belu sangat memiliki potensi yang memadai.

II.4.2.4 Rumah Tangga menggunakan Air Bersih

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan seperti tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.46
Capaian Rumah Tangga Berakses Air Bersih di
Kabupaten Belu
Tahun 2016-2020



Sumber: SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu 2020

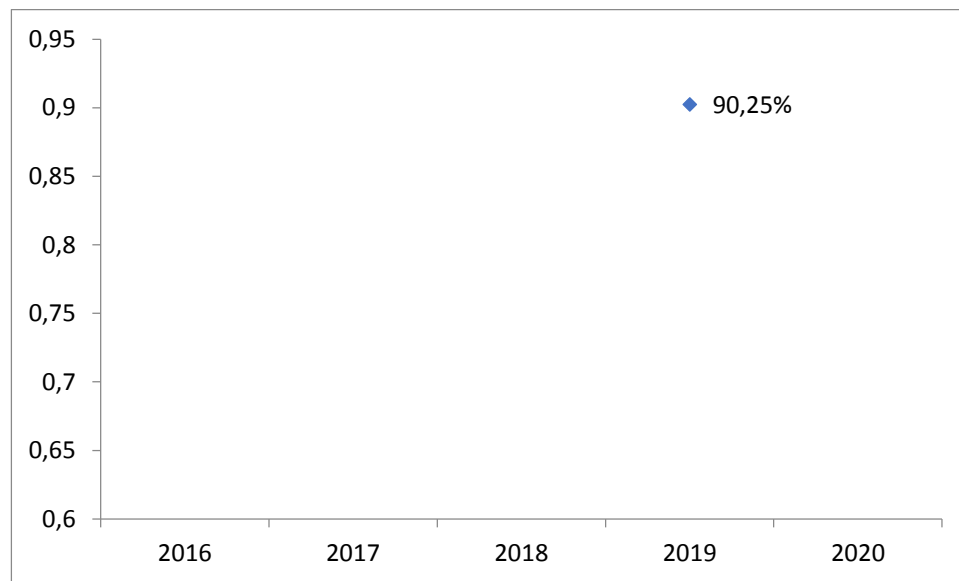
Grafik 2.64 menggambarkan capaian Persentase Rumah Tangga menggunakan air bersih Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 menunjukkan tren positif, dengan capaian Tahun 2020 sebesar 30,20%. Capaian ini belum termasuk Rumah Tangga yang menggunakan sumur gali.

II.4.2.5 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Capaian Rasio Elektrifikasi Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.47
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



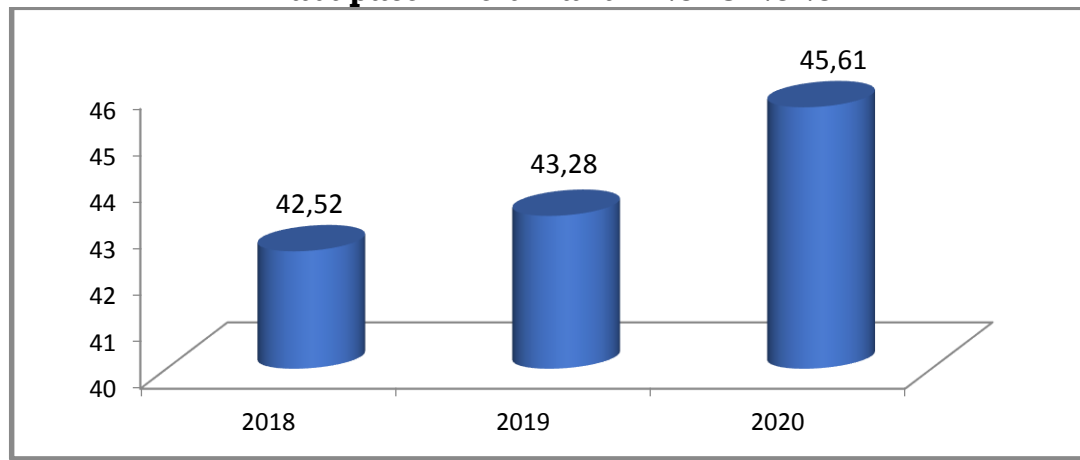
Sumber: PLN (Persero) ULP Atambua

Rasio elektrifikasi di Kabupaten Belu tergambar pada Grafik 2.45, di mana sampai dengan Tahun 2019 rasio elektrifikasinya sebesar 90,25%.

II.4.2.6 Penduduk Menggunakan HP

Perkembangan TIK mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang menggunakan Handphone (HP). Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2018-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.48
Persentase Penduduk Menggunakan HP di
Kabupaten Belu Tahun 2018-2020



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021

II.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

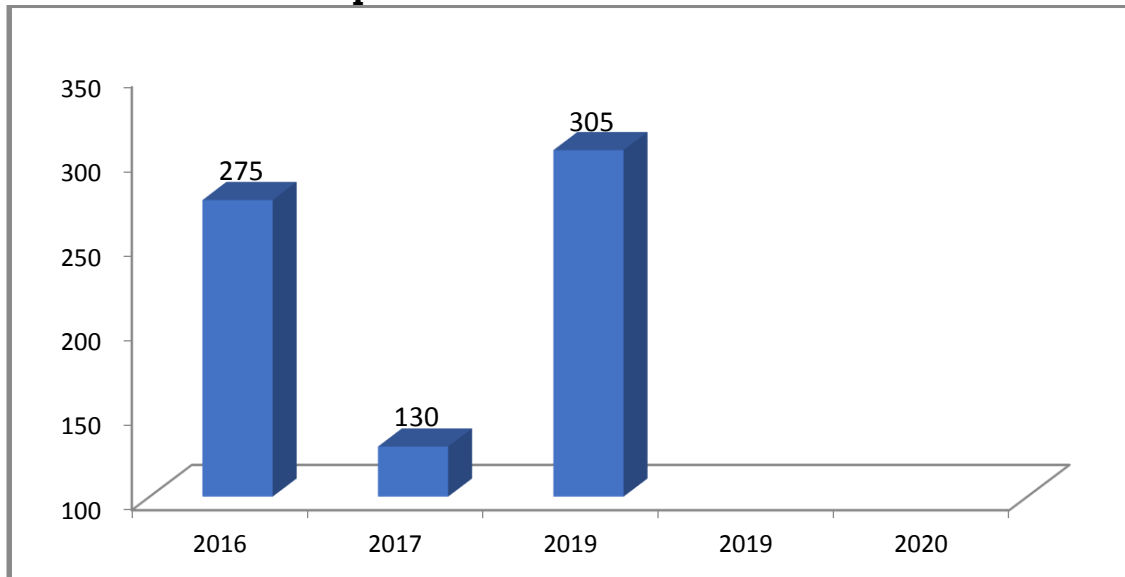
Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap beberapa indikator di bawah ini.

II.4.3.1 Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Perkembangan Angka

Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 tergambar pada Grafik 2.47 berikut ini.

Grafik 2.49
Jenis Kriminal dan Angka Kriminalitas di
Kabupaten Belu Tahun 2015- 2018



Sumber : BPS, Belu Dalam Angka 2019

Berdasarkan pada angka kriminalitas dan jenis kasus kriminalitas yang ada menggambarkan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan perlu terus untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian lewat forum komunikasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan agar tumbuh perubahan sikap/perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan ketahanan sosial.

II.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Tabel 2.84
Jumlah Demonstrasi menurut Bidang di
Kabupaten Belu Tahun 2016– 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Unjuk Rasa/Demonstrasi | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 |

Sumber: SIPD, Badan Kesbangpol Kabupaten Belu 2020

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Belu relatif aman dan terkendali, karena frekuensi demonstrasi yang relatif kurang di Kabupaten Belu. Kondisi ini tentunya sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Belu.

II.4.3.3 Lama Proses Perijinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Durasi waktu pengurusan izin berusaha dan Izin Usaha di Kabupaten Belu adalah minimal 1 (satu) hari selama jam dinas, apabila pelaku usaha/investor mengurus Izin Usaha dengan bantuan petugas *Front Office* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Belu. Namun sesuai dengan regulasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan diberlakukannya *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA)* bahwa pelaku usaha/investor berkewajiban mengurus perizinan berusahanya secara mandiri (*online*) melalui sistem *OSS-RBA* tersebut.

II.4.3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belu Tahun 2020 yaitu:

Tabel 2.85
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

| No | Jenis/Macam | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Pajak Daerah | 10 |
| | 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. PBB - P2 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | |
| 2 | Retribusi Daerah | 3 |
| | 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu | |

Sumber : Bapenda Kab. Belu, 2020

II.4.3.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha;

Untuk mendukung pengembangan iklim investasi dan usaha di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah

menetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Ketiga;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Kedua;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kelima;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

II.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

II.4.4.1 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari

- a. rasio lulusan S1/S2/S3; dan
- b. rasio ketergantungan.

Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada Grafik di bawah ini.

Tabel 2.86
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Ketergantungan di
Kabupaten Belu Tahun 2016- 2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 2,80% | 2,92% | 3,21% | 3,24% | 3,31% |
| 2 | Rasio Ketergantungan | 22,99% | 22,74% | 23,19% | 42,10% | 42,09% |

Sumber : Hasil olah data BP4D

Data ketenagakerjaan Kabupaten Belu diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dari Tahun 2016-2020 meningkat, sedangkan rasio ketergantungan cenderung berfluktuasi. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada tahun 2020 sebesar 3,3% dan paling rendah pada Tahun 2016 sebesar 2,8%. Rasio Ketergantungan paling tinggi di Tahun 2020 sebesar 42,10 %, terendah di Tahun 2017 sebesar 22,74 %.

II. 4.5 Capaian Pembangunan Tahun 2020

4.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan indikator kinerja utama daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Belu pada Tahun 2020 diukur berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Capaian Sasaran yang diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian sasaran IKU) per Misi dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I:

| No | Indikator Kinerja Utama | Target 2020 | Realisasi | | Ketercapaian realisasi terhadap target | Pergerakan 2019-2020 |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------|-------|--|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 61,80 | 62,54 | 62,68 | Tercapai | ▲ |

Misi 2: Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Pencapaian misi 2 diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran.

Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Utama | Target 2020 | Realisasi | | Ketercapaian realisasi terhadap target | Pergerakan 2019-2020 |
|----|---|-------------|-----------|-------|--|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Indeks Gini | 0,25 | 0,35 | 0,32 | Tidak Tercapai | ▲ |
| 2 | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) | 12,52 | 15,50 | 15,37 | Tidak Tercapai | ▲ |

Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah sebagai wilayah perbatasan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pencapaian misi 3 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Utama | Target 2020 | Realisasi | | Ketercapaian realisasi terhadap target | Pergerakan 2019-2020 |
|----|--|-------------|-----------|-------|--|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang | 92,94 | 85,91 | 92,94 | Tercapai | ▲ |
| 2 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam) | 51,26 | 51,65 | 60,57 | Tercapai | ▲ |
| 3 | Persentase penduduk berakses air minum (%) | 68,07 | 66,42 | 68,07 | Tercapai | ▲ |
| 4 | Persentase Kualitas Lingkungan Hidup (%) | 80,91 | 70,44 | 72,90 | Tidak Tercapai | ▲ |

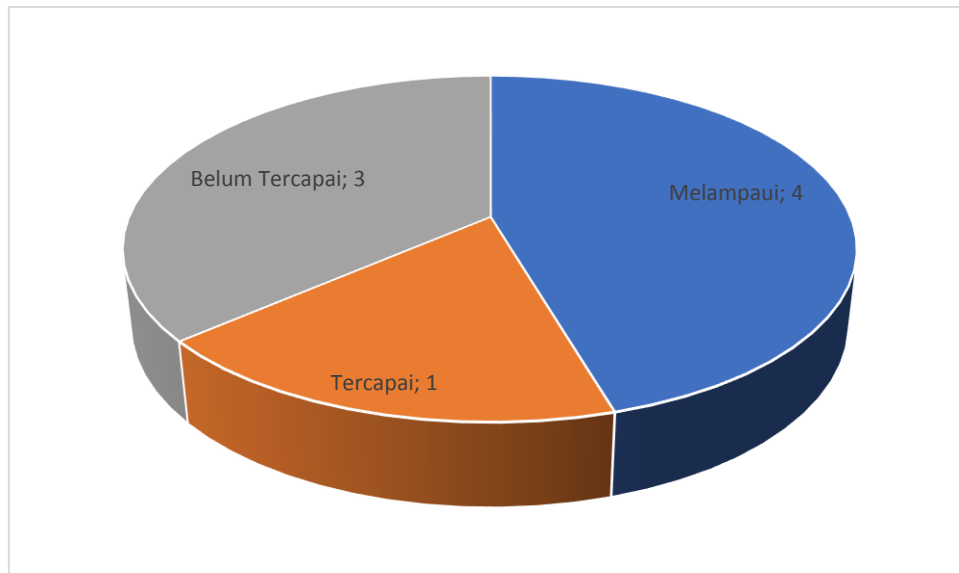
Misi 4: Meningkatkan kinerja birokrasi, penegakan hukum dan kualitas pelayanan public

Pencapaian misi 4 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Utama | Target 2020 | Realisasi | | Ketercapaian realisasi terhadap target | Pergerakan 2019-2020 |
|----|--|-------------|-----------|-------|--|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82,7 | 83,47 | 81,18 | Tidak Tercapai | ▼ |
| 2 | Opini BPK terhadap laporan keuangan (Status opini) | WTP | WTP | WTP | Tercapai | • |
| 3 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 2,39 | 2,30 | 16,9 | Tercapai | ▲ |
| 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | B | CC | CC | Tidak Tercapai | • |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020, dari 11 IKU yang mendukung 4 misi Bupati dan Wakil Bupati Belu terdapat 5 indikator (45,45%) yang melampaui target, 2 indikator (18,18%) yang mencapai target, dan 4 indikator (36,36%) yang belum tercapai. Hasil Capaian IKU tergambar di Grafik V.1 di bawah ini.

Grafik 5.1
Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020



Sumber: BP4D Kabupaten Belu, (2021).

4.5.2 Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Belu tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil di Bab VIII RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Belu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Belu Tahun 2016–2021. Terdapat 295 indikator kinerja perangkat daerah yang dielaborasi menjadi 308 indikator yang tersebar merata di 44 (empat puluh empat) dinas, badan dan bagian di Kabupaten Belu, tidak termasuk unsur kewilayahan yaitu kecamatan. Hasil evaluasi indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten Belu tertuang di dalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel 2.87
**Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 Kabupaten Belu Tahun 2020**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target Capaian Tahun 2020 | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2020; Tidak Tercapai, Tercapai, Melampaui, Tidak Ada Data. | OPD Penanggungjawab |
|----|--|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya APK: | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | PAUD | 26.68 | 67.2 | Melampaui | |
| | SD | 97.8 | 96.04 | Tidak Tercapai | |
| | SMP | 106.22 | 87.52 | Tidak Tercapai | |
| 2 | Meningkatnya APM | | | | |
| | PAUD | 53.06 | 59.59 | Melampaui | |
| | SD | 98.64 | 72.87 | Tidak Tercapai | |
| | SMP | 75.33 | 86.45 | Melampaui | |
| 3 | Angka Kelulusan (AK): | | | | |
| | SD | 99.7 | 99.21 | Tidak Tercapai | |
| | SMP | 99.75 | 99.95 | Melampaui | |
| 4 | Angka Melanjutkan (AM) | | | | |
| | SD ke SMP | 94.26 | | Tidak Ada Data | |
| 5 | Angka Melek Huruf (AMH) : Pada penduduk usia 15 - 24 tahun perempuan dan laki-laki | 97.37 | 99.02 | Melampaui | |
| 6 | Angka Putus Sekolah (APS) | | | | |
| | SD | 0.21 | 1.54 | Tidak Tercapai | |
| | SMP | 1.23 | 3.01 | Tidak Tercapai | |
| 7 | Meningkatnya Persentasi desa siaga | 89.3 | 85.18 | Tidak Tercapai | Dinas Kesehatan |
| 8 | Meningkatnya Persentasi posyandu mandiri | 26.2 | 39.31 | Melampaui | |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------|--|
| 9 | Meningkatnya Persentasi Rumah Sehat | 56.5 | 71 | Melampaui | |
| 10 | Meningkatnya Persentasi desa/keluhan Sanitasi berbasis Masyarakat (STBM) | 9.9 | 12.34 | Melampaui | |
| 11 | Meningkatnya Persentasi desa/kelurahan yang melaksanakan Pos Binaan terpadu penyakit tidak menular | 30 | 100 | Melampaui | |
| 12 | Meningkatnya Persentasi desa/kelurahan yang mengembangkan asuhan mandiri taman obat keluarga (TOGA) sesuai standar | 8.6 | 22.22 | Melampaui | |
| 13 | Persentase peningkatan keterampilan dan perlindungan ketenagakerjaan | 21.52 | | Tidak Ada Data | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 14 | Meningkatnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 3.3 | 30 | Melampaui | |
| 15 | Meningkatnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 1.2 | 38 | Melampaui | |
| 16 | Meningkatnya Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 3.3 | 95 | Melampaui | |
| 17 | Menurunnya Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 38.8 | 32 | Melampaui | |
| 18 | Meningkatnya Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan | 61 | 5400 | Melampaui | |
| 19 | Cakupan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga | 18.66 | | Tidak Ada Data | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 20 | Meningkatnya Persentase organisasi pemuda yang aktif | 6.8 | 7 | Melampaui | |
| 21 | Meningkatnya Cakupan pembinaan olahraga | 5 | 1.4 | Tidak Tercapai | |
| 22 | Meningkatnya Cakupan pembinaan atlet muda | 1.5 | 8.5 | Melampaui | |
| 23 | Meningkatnya Cakupan pelatih yang bersertifikasi | 5 | 5.8 | Melampaui | |
| 24 | Meningkatnya Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun | 15 | 92 | Melampaui | |
| 25 | Ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar (Rombel): | | | | Dinas Pendidikn dan Kebudayaan |
| | SD | 77 | 114 | Melampaui | |
| | SMP | 77.98 | 100 | Melampaui | |
| 26 | Ketersediaan ruang perpustakaan sekolah | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|----------------|--|
| | SD | 15.43 | | Tidak Ada Data | |
| | SMP | 68.75 | | Tidak Ada Data | |
| 27 | Ketersediaan ruang laboratorium IPA terhadap sekolah : | | | | |
| | SMP | 93.73 | 83 | Tidak Tercapai | |
| 28 | Ketersediaan ruang guru terhadap sekolah: | | | | |
| | SD | 44.96 | 80 | Melampaui | |
| | SMP | 50.5 | 80.76 | Melampaui | |
| 29 | Ketersediaan buku teks mata pelajaran terhadap jumlah siswa: | | | | |
| | SD | 60 | 100 | Melampaui | |
| | SMP | 70 | 100 | Melampaui | |
| 30 | Ketersediaan sanitasi sekolah : | | | | |
| | SD | 67.11 | | Tidak Ada Data | |
| | SMP | 54.16 | | Tidak Ada Data | |
| 32 | Ketersediaan alat peraga IPA terhadap sekolah pada jenjang SD/MI | 54 | | Tidak Ada Data | |
| 32 | Ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi terhadap sekolah : | | | | |
| | SD | 60 | 75 | Melampaui | |
| | SMP | 50 | 75 | Melampaui | |
| 33 | Ketersediaan guru terhadap jumlah murid di SD/MI | 99.22 | 110.24 | Melampaui | |
| 34 | Ketersediaan guru terhadap mata pelajaran di SMP/MTs | 87.35 | 87.64 | Melampaui | |
| 35 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah: | | | | |
| | SD | 01:48.8 | | Tidak Ada Data | |
| | SMP | 01:34.8 | | Tidak Ada Data | |
| 36 | Persentase sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah: | | | | |
| | SD | 90 | | Tidak Ada Data | |
| | SMP | 98 | | Tidak Ada Data | |
| 37 | Persentase penerapan kurikulum 2013 | | | | |
| | SD | 100 | 100 | Tercapai | |
| | SMP | 100 | 100 | Tercapai | |
| 38 | Cakupan pengembangan dan pelestarian budaya daerah | 88.89 | | Tidak Ada Data | |
| 39 | Meningkatnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 4 | | Tidak Ada Data | |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------|-----------------|
| 40 | Meningkatnya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi | 175 | | Tidak Ada Data | |
| 41 | Cakupan pengembangan dan pelestarian budaya daerah | 88.89 | | Tidak Ada Data | |
| 42 | Persentase pelayanan kesehatan ibu (hamil, melahirkan, nifas) dan anak | 88.73 | 81.55 | Tidak Tercapai | Dinas Kesehatan |
| 43 | Meningkatnya Persentase Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil | 80.17 | 81.6 | Melampaui | |
| 44 | Meningkatnya Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin | 89.73 | 94 | Melampaui | |
| 45 | Menurunnya jumlah kasus kematian ibu (hamil, melahirkan dan nifas) | 5 | 12 | Melampaui | |
| 46 | Menurunnya jumlah kasus kematian bayi | 37 | 66 | Melampaui | |
| 47 | Menurunnya jumlah kasus kematian balita (12 s/d 59 bulan) | 8 | 9 | Melampaui | |
| 48 | Meningkatnya Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 98.58 | 92.7 | Tidak Tercapai | |
| 49 | Mempertahankan Persentase pelayanan kesehatan peserta didik | 99.63 | 94.8 | Tidak Tercapai | |
| 50 | Meningkatnya Persentase pelayanan kesehatan balita | 82.78 | 70.3 | Tidak Tercapai | |
| 51 | Meningkatnya persentase bayi lahir hidup | 98 | 96.3 | Tidak Tercapai | |
| 52 | Persentase stunting | 25.57 | 21.2 | Tidak Tercapai | |
| 53 | Meningkatnya Persentase cakupan ASI eksklusif | 82.92 | 88.2 | Melampaui | |
| 54 | Meningkatnya Persentase cakupan balita dengan status gizi normal | 94.68 | 83.1 | Tidak Tercapai | |
| 55 | Menurunnya persentase balita gizi buruk | 1.25 | 12.2 | Tidak Tercapai | |
| 56 | Meningkatnya persentase balita gizi baik | 81.3 | 83.1 | Melampaui | |
| 57 | Persentase pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular | 68.5 | 87 | Melampaui | |
| 58 | Meningkatnya Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 63.5 | 56.4 | Tidak Tercapai | |
| 59 | Mempertahankan Persentasi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 91.1 | | Tidak Ada Data | |
| 60 | Meningkatnya Persentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 28.9 | 18.2 | Tidak Tercapai | |

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|----------------|--|
| 61 | Meningkatnya Persentasi penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 13.2 | 147.4 | Melampaui | |
| 62 | Meningkatnya Persentasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJB) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81.8 | 127 | Melampaui | |
| 63 | Menurunnya angka prevalensi kusta | 0.73 | 0.6 | Melampaui | |
| 64 | Meningkatnya Persentasi desa/kelurahan yang melaksanakan Pos Binaan terpadu penyakit tidak menular | 30 | 100 | Melampaui | |
| 65 | Meningkatnya Persentasi orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 82.5 | 100 | Melampaui | |
| 66 | Meningkatnya persentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 88.8 | 76.42 | Tidak Tercapai | |
| 67 | Meningkatnya Persentasi penderita diare yang mendapat pelayanan | 44.4 | 100 | Melampaui | |
| 68 | Menurunnya Persentasi penderita malaria yang mendapat pelayanan (Annual Parasite Incidence) | <5 | 0.23 | Melampaui | |
| 69 | Mempertahankan Jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) yang mendapat pelayanan | 30 | 820 | Melampaui | |
| 70 | Mempertahankan Persentasi desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam | 100 | 0 | Tidak Tercapai | |
| 71 | Meningkatnya Persentasi desa/kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) | 92.6 | 84 | Tidak Tercapai | |
| 72 | Persentase sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar | 63.33 | 75.82 | Melampaui | |
| 73 | Meningkatnya Persentasi sarana dan prasarana sesuai standar | 90 | 100 | Melampaui | |
| 74 | Meningkatnya Persentasi sarana kesehatan yang memiliki sumberdaya manusia sesuai standar | 47.1 | 100 | Melampaui | |
| 75 | Persentase sarana pelayanan kesehatan (FKTP) yang memiliki sumberdaya kesehatan sesuai standar | 70.58 | 165.27 | Melampaui | |
| 76 | Meningkatnya persentase sarana pelayanan TK1 yang memiliki ketersediaan alat kesehatan sesuai standar | 5.88 | 17.65 | Melampaui | |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------|--|
| 77 | Meningkatnya Persentase jumlah puskesmas yang memiliki sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar (permenkes nomor 75 tahun 2014) | 41.18 | 52.94 | Melampaui | |
| 78 | Meningkatnya persentase ketersediaan alkes sesuai kebutuhan | 47.06 | 26.92 | Tidak Tercapai | |
| 79 | Meningkatnya persentase sarana pelayanan TK1 yang memiliki ketersediaan alat kesehatan sesuai standar | 5.88 | | Tidak Ada Data | |
| 80 | Meningkatnya persentase ketersediaan obat | 75 | 77.01 | Melampaui | |
| 81 | Meningkatnya Persentasi puskesmas yang terakreditasi | 100 | 100 | Tercapai | |
| 82 | Meningkatnya Persentase puskesmas dengan gedung pelayanan dibangun sesuai dengan prototype (kemenkes) | 76.47 | 82.35 | Melampaui | |
| 83 | Meningkatnya persentase sarana dan prasarana sesuai standar (pusling/ambulance) | 100 | 100 | Tercapai | |
| 84 | Menurunnya persentase rujukan terstandar | 1.6 | 1.6 | Tercapai | |
| 85 | Meningkatnya persentase puskesmas PONED | 0 | | Tidak Tercapai | |
| 86 | Meningkatnya persentase jiwa miskin yang memiliki jaminan kesehatan | 100 | 88 | Tidak Tercapai | |
| 87 | Meningkatnya Persentasi desa siaga | 89.3 | 35.18 | Tidak Tercapai | |
| 88 | Meningkatnya Persentasi posyandu mandiri | 26.2 | 39.31 | Melampaui | |
| 89 | Meningkatnya jumlah dusun yang melaksanakan perda kawasan tanpa rokok | 17 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 90 | Meningkatnya Persentasi Rumah Sehat | 56.5 | 71 | Melampaui | |
| 91 | Meningkatnya Persentasi desa/keluhan Sanitasi berbasis Masyarakat (STBM) | 9.9 | 12.34 | Melampaui | |
| 92 | Meningkatnya Persentasi rumah tangga berperilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) | 75.2 | 88.6 | Melampaui | |
| 93 | Meningkatnya persentase sekolah ber PHBS | 14.4 | 45.64 | Melampaui | |
| 94 | Meningkatnya Persentasi desa/kelurahan yang mengembangkan asuhan mandiri taman obat keluarga (TOGA) sesuai standar | 8.6 | 22.22 | Melampaui | |
| 95 | Meningkatnya jumlah penyehat tradisional yang mendapatkan STPT/SIPT | 5 | 15.33 | Melampaui | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|----------------|----------------------------|
| 96 | Meningkatnya persentase jiwa miskin yang memiliki jaminan kesehatan | 100 | 88 | Tidak Tercapai | |
| 97 | Meningkatnya Persentasi upaya kesehatan kerja | 40.2 | 96.11 | Melampaui | |
| 98 | Pemberi layanan kegawat daruratan yang bersertifikat | 70 | 48 | Tidak Tercapai | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 99 | Menurunnya kejadian infeksi pasca operasi | 1.5 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 100 | Menurunnya Pemberian persalinan melalui seksio cesaria | 23 | 62 | Melampaui | |
| 101 | Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi | 98 | 100 | Melampaui | |
| 102 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) | 51.26 | 59.86 | Melampaui | Dinas PUPR |
| 103 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | 73.09 | 80.93 | Melampaui | |
| 104 | Persentase pembangunan pengaman di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | 77.78 | 77.78 | Tercapai | |
| 105 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 70.35 | 73.69 | Melampaui | |
| 106 | Cakupan rumah tangga yang berakses sanitasi | 77.2 | 76.86 | Tidak Tercapai | |
| 107 | Jumlah rencana rinci tata ruang | 0 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 108 | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 3.98 | 11.27 | Melampaui | |
| 109 | Luasan RTH privat sebesar 10% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | | | Tidak Ada Data | |
| 110 | Ratio bangunan ber-IMB per satuan bangunan | 83 | 257 | Melampaui | |
| 111 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 30.27 | 81.43 | Melampaui | |
| 112 | Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 | 7768 | Melampaui | |
| 113 | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 40.03 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 114 | Cakupan petugas perlindungan masyarakat | 4.17 | 4.17 | Tercapai | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 115 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 90.62 | 77.14 | Tidak Tercapai | |
| 116 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 33.33 | 26.5 | Tidak Tercapai | |
| 117 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) | 86.66 | 34.38 | Tidak Tercapai | |
| 118 | Persentase penegakan PERDA dan Perkada | 100 | 100 | Tercapai | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|----------------|--|
| 119 | Deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat | 96 | | Tidak Ada Data | |
| 120 | Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat | 1626 | 73 | Tidak Tercapai | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 121 | Pembinaan politik kepada masyarakat | 1400 | 179 | Tidak Tercapai | |
| 122 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 61 | 12 | Tidak Tercapai | Dinas Sosial |
| 123 | Persentase PMKS yang direhabilitasi | 26 | 22 | Tidak Tercapai | |
| 124 | Persentase PMKS yang diberdayakan | 15 | 12.14 | Tidak Tercapai | |
| 125 | Persentase PSKS yang diberdayakan | 65 | 0 | Tidak Tercapai | |
| 126 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 4.2 | 30 | Melampaui | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 127 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 1.8 | 38 | Melampaui | |
| 128 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 4 | 95 | Melampaui | |
| 129 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 35 | 32 | Tidak Tercapai | |
| 130 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan | 63 | 5400 | Melampaui | |
| 131 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 36.7 | 23.33 | Tidak Tercapai | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak |
| 132 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 20.2 | 100 | Melampaui | |
| 133 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | 2.2 | | Tidak Ada Data | |
| 134 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) | 85 | 84.8 | Tidak Tercapai | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 135 | Ketersediaan pangan utama | 85 | 55.04 | Tidak Tercapai | |
| 136 | Ketersediaan energi perkapita | 95 | 89.6 | Tidak Tercapai | |
| 137 | Ketersediaan protein perkapita | 95 | 56 | Tidak Tercapai | |
| 138 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 85 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 139 | Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 77.28 | 72.41 | Tidak Tercapai | Dinas Lingkungan Hidup |
| 140 | Indeks kualitas air | 80 | 58.33 | Tidak Tercapai | |
| 141 | Indeks kualitas tutupan lahan | 75.6 | 92.97 | Melampaui | |
| 142 | Indeks kualitas udara | 88.9 | 50.12 | Tidak Tercapai | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|----------------|--|
| 143 | Cakupan Penerbitan KTP (%) | 93.36 | 84.96 | Tidak Tercapai | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 144 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-18 Tahun (%) | 75.37 | 79.53 | Melampaui | |
| 145 | Cakupan Penerbitan akta nikah (%) | 31.59 | 26.84 | Tidak Tercapai | |
| 146 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%) | 92.61 | 87.37 | Tidak Tercapai | |
| 147 | Penerbitan akta kematian (dokumen) | 500 | 309 | Tidak Tercapai | |
| 148 | Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%) | 5 | 14.01 | Melampaui | |
| 149 | Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%) | 2.47 | 2.47 | Tercapai | |
| 150 | Persentase LPM berprestasi (%) | 15 | 100 | Melampaui | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 151 | Persentase PKK Aktif (%) | 60 | 100 | Melampaui | |
| 152 | Persentase Posyandu Aktif (%) | 70 | 100 | Melampaui | |
| 153 | Persentase Bumdes Aktif (%) | 36 | 57 | Melampaui | |
| 154 | Persentase Posyantek Aktif (%) | 24 | | Tidak Ada Data | |
| 155 | Indeks Desa Membangun (IDM) (%) | 73 | | Tidak Ada Data | |
| 156 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) | 1.02 | 1.09 | Melampaui | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 157 | Ratio Akseptor KB (%) | 58 | 57 | Tidak Tercapai | |
| 158 | Total Fertility Rate (TFR) (%) | 3.27 | 3.28 | Melampaui | |
| 159 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%) | 23 | 22.85 | Tidak Tercapai | |
| 160 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 61.5 | 74.9 | Melampaui | |
| 161 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) | 57 | 50 | Tidak Tercapai | |
| 162 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) | 54.3 | 52 | Tidak Tercapai | |
| 163 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%) | 66.6 | 35.4 | Tidak Tercapai | |
| 164 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%) | 15.56 | 19.15 | Melampaui | |
| 165 | Persentase pemasangan rambu-rambu (%) | 30 | 8.96 | Tidak Tercapai | Dinas Perhubungan |
| 166 | Persentase layanan angkutan darat (%) | 0 | 0.013 | Melampaui | |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|----------------|---|
| 167 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%) | 0 | 58.49 | Melampaui | |
| 168 | Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit) | 4 | 20.63492063 | Melampaui | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 169 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%) | 83 | 91.66666667 | Melampaui | |
| 170 | Jumlah terbitan media cetak (kali) | 6 | | Tidak Ada Data | |
| 171 | Persentase koperasi aktif (%) | 79.52 | 0 | Tidak Ada Data | Dinas Koperasi dan UKM |
| 172 | Persentase UKM aktif (%) | 89.04 | 127.2 | Melampaui | |
| 173 | Persentase LEPMM aktif (%) | 78.5 | 96.95 | Melampaui | |
| 174 | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | 82,7 | | Tidak Ada Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 175 | Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha) | 165 | | Tidak Ada Data | |
| 176 | Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp (milyar)) | 81.4 | | Tidak Ada Data | |
| 177 | Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang) | 15 | | Tidak Ada Data | |
| 178 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 7 | 7 | Tercapai | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 179 | Cakupan pembinaan olahraga (%) | 1 | 1.4 | Melampaui | |
| 180 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | 1.38 | 8.5 | Melampaui | |
| 181 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%) | 1 | 5.8 | Melampaui | |
| 182 | Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor) | 17 | 92 | Melampaui | |
| 183 | Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen) | 18 | | Tidak Ada Data | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 184 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | | | Tidak Ada Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 185 | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit) | 200 | | Tidak Ada Data | |
| 186 | Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar) | 6677 | 7394 | Melampaui | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 187 | Jumlah perpustakaan sekolah (SD-SMP) sesuai urusan (Unit/per mil) | 63 | 189 | Melampaui | |
| 188 | Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok) | 1.257 | | Tidak Ada Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 189 | Produksi perikanan tangkap (ton) | 1,593.63 | 1,675.52 | Melampaui | Dinas Perikanan |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 190 | Produksi perikanan budidaya air tawar (ton) | 14 | 16.2 | Melampaui | |
| 191 | Produksi perikanan budidaya air payau (ton) | 147 | 42.7 | Tidak Tercapai | |
| 192 | Cakupan bina kelompok perikanan (%) | 12.91 | 16.35 | Melampaui | |
| 193 | Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit) | 6 | 3 | Tidak Tercapai | Dinas Pariwisata |
| 194 | Lama Kunjungan Wisata (hari) | 1.5 | 1 | Tidak Tercapai | |
| 195 | Kunjungan Wisata (%) | 98 | 5.02 | Tidak Tercapai | |
| 196 | PAD Sektor Pariwisata (%) | 0.09 | 4.45 | Melampaui | |
| 197 | Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ ha) | 3.7 | 3.56 | Tidak Tercapai | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 198 | Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ ha) | 1.49 | 1.28 | Tidak Tercapai | |
| 199 | Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ ha) | 0.85 | 0.68 | Tidak Tercapai | |
| 200 | Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ ha) | 3.5 | 2.91 | Tidak Tercapai | |
| 201 | Proporsi luas tanam tanaman Maek Bako (ha) | 265 | 0 | Tidak Tercapai | |
| 202 | Proporsi luas tanam tanaman Jambu Mete (ha) | 2232 | 0 | Tidak Tercapai | |
| 203 | Proporsi luas tanam tanaman Kopi (ha) | 145 | 10 | Tidak Tercapai | |
| 204 | Proporsi produktivitas tanaman Cabe (ton/ ha) | 6 | 2.35 | Tidak Tercapai | |
| 205 | Proporsi produktivitas tanaman Bawang Merah (ton/ ha) | 7 | 3.7 | Tidak Tercapai | |
| 206 | Proporsi produktivitas tanaman Bawang putih (ton/ ha) | 4 | 3.86 | Tidak Tercapai | |
| 207 | Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ ha) | 125 | 10 | Tidak Tercapai | |
| 208 | Cakupan bina kelompok tani (%) | 68,14 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 209 | Populasi ternak sapi (ekor) | 61405 | 72806 | Melampaui | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 210 | Populasi ternak babi (ekor) | 59191 | 52256 | Tidak Tercapai | |
| 211 | Proporsi luas lahan pengembangan HMT (ha) | 48 | 15 | Tidak Tercapai | |
| 212 | Mempertahankan Persentase vaksinasi ternak (%) | 70 | 69.48 | Tidak Tercapai | |
| 213 | Jumlah pembangunan pasar rakyat (unit) | 16 | 0 | Tidak Tercapai | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 214 | Eksport Bersih Perdagangan (Rp (miliar)) | 10,325,000 | 238,060,956,000 | Tidak Tercapai | |
| 215 | Jumlah jasa pelayanan terhadap UTTP (unit) | 1875 | 1400 | Tidak Tercapai | |
| 216 | Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%) | 650 | 33 | Tidak Tercapai | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022

| | | | | | |
|-----|---|-------|--------|----------------|--|
| 217 | Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali) | 8 | 0 | Tidak Tercapai | |
| 218 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dokumen) | 7 | 0 | Tidak Tercapai | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 219 | Koordinasi perekonomian daerah (kali) | 7 | 5 | Tidak Tercapai | Bagian Perkonomian dan SDA SETDA Belu |
| 220 | Jumlah Pembangunan terminal tipe C (unit) | 1 | | Tidak Ada Data | Dinas Perhubungan |
| 221 | Jumlah jaringan Penerangan Jalan Umum/ PJU (titik) | 500 | 2373 | Melampaui | Dinas Perhubungan |
| 222 | Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air minum | 38.07 | 56.79 | Melampaui | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 223 | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | 82.7 | | Tidak Ada Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 224 | Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha) | 165 | | Tidak Ada Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 225 | Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp (milyar)) | 81.4 | | Tidak Ada Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 226 | Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang) | 15 | | Tidak Ada Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 227 | Menurunnya Jumlah Kasus unjuk rasa / Demonstrasi (Kasus) | 5 | 3 | Tidak Tercapai | Badan Kesbangpol |
| 228 | Kualitas Tenaga Kerja | | | | |
| 229 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) | 88 | 38 | Tidak Tercapai | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 230 | Persentase kenaikan pangkat ASN | 85.71 | 76.15 | Melampaui | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD |
| 231 | Persentase penetapan pejabat struktural sesuai kompetensi | 92.04 | 90.08 | Tidak Tercapai | |
| 232 | Persentase ASN yang mendapat SK Pensisun | 84.66 | 84.66 | Tercapai | |
| 233 | Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi | 85.35 | 67.25 | Tidak Tercapai | |
| 234 | Persentase ASN yang mengikuti latihan dasar CPNS | 84.42 | 68.12 | Tidak Tercapai | |
| 235 | Persentase ASN yang mendapat penghargaan | 90.26 | 87.14 | Tidak Tercapai | |
| 236 | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN | 89.29 | 107.14 | Melampaui | |
| 237 | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural | 34.11 | 35.76 | Melampaui | |
| 238 | Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional | 85.71 | 21.71 | Tidak Tercapai | |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022

| | | | | | |
|-----|--|-----|------|----------------|--|
| 239 | Persentase ASN yang mendapat ijin belajar dan tugas belajar | 90 | 80 | Tidak Tercapai | |
| 240 | Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara (kali) | 9 | | Tidak Ada Data | Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
| 241 | Cakupan regulasi penataan kelembagaan | 20 | 33 | Melampaui | Bagian Organisasi SETDA Belu |
| 242 | Persentase peningkatan kinerja OPD dan sumberdaya birokrasi (Anjab dan ABK, SPM, SPP, sop dan reformasi birokrasi) | 75 | 75 | Tercapai | |
| 243 | Proporsi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 50 | 51.5 | Melampaui | |
| 244 | Produk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten (Dok) | 1 | 1 | Tercapai | Bagian Pemerintahan Umum SETDA Belu |
| 245 | Produk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (Dok) | 1 | 1 | Tercapai | |
| 246 | Produk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten (Dok) | 1 | 1 | Tercapai | |
| 247 | Jumlah Aset Tanah PEMDA yang bersertifikat (bidang) | 50 | 0 | Tidak Ada Data | |
| 248 | Jumlah Penerbitan Tabloid "Warta Belu" (kali) | 18 | | Tidak Ada Data | Bagian Protokol dan Komunikasi Publik SETDA Belu |
| 249 | Peliputan Berita Kunjungan Kerja (KunKer) Pimpinan Daerah (Kali) | 972 | | Tidak Ada Data | |
| 250 | Pelayanan keprotokolanan pemerintah (kali) | 972 | | Tidak Ada Data | |
| 251 | Proporsi pelaksanaan pengendalian (monitoring) dan evaluasi pembangunan daerah (kali) | 8 | 8 | Tercapai | Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Belu |
| 252 | Proporsi penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (bulan) | 12 | | Tidak Ada Data | |
| 253 | Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa (%) | 99 | 99 | Tercapai | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Belu |
| 254 | Fasilitasi kegiatan lintas Agama (kali) | 6 | 0 | Tidak Tercapai | Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Belu |
| 255 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (kali) | 6 | 0 | Tidak Tercapai | |
| 256 | Fasilitasi kelembagaan KOMDA LANSIA (kali) | 6 | 6 | Tercapai | |
| 257 | Pelayanan Kebutuhan Bupati/Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah Staf Ahli serta Asisten SETDA (Paket) | 5 | | Tidak Ada Data | Bagian Umum SETDA Belu |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|----------------|---|
| 258 | Cakupan kajian produk hukum daerah yang akan ditetapkan | 100 | 253 | Melampaui | Bagian Hukum SETDA Belu |
| 259 | Rekomendasi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | 155 | 55 | Tidak Tercapai | |
| 260 | Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum | 5 | 5 | Tercapai | |
| 261 | Jumlah para wajib lapor penyelenggara negara | 80 | 114 | Melampaui | |
| 262 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kecamatan (Dok) | 6 | 6 | Tercapai | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 263 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kabupaten (Dok) | 6 | 6 | Tercapai | |
| 264 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang ekonomi (Dok) | 6 | 6 | Tercapai | |
| 265 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang sosial budaya (Dok) | 6 | 6 | Tercapai | |
| 266 | Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (Dok) | 6 | 6 | Tercapai | |
| 267 | Pengembangan data informasi dan Statistik | 18 | 17 | Tidak Tercapai | |
| 268 | Ketersediaan dokumen Hasil kajian penelitian dan pengembangan (Dok) | 12 | 7 | Tidak Tercapai | |
| 269 | Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kecamatan (%) | 90 | 90 | Tercapai | |
| 270 | Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten (%) | 75 | 75 | Tercapai | |
| 271 | Tersedianya dokumen RTRW, RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) | 3 | 4 | Melampaui | |
| 272 | Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (dokumen) | 12 | 12 | Tercapai | |
| 273 | Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan kabupaten (dokumen) | 18 | 5 | Tidak Tercapai | |
| 274 | Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%) | 100 | 100 | Tercapai | |
| 275 | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (hasil opini BPK) | WTP | | Tidak Ada Data | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 276 | Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%) | 9.87 | 9.11 | Tidak Tercapai | |
| 277 | Persentase belanja publik terhadap APBD (%) | 23.33 | 18.44 | Tidak Tercapai | |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|----------------|--|
| 278 | Prosentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%) | 74.09 | 91.65 | Melampaui | |
| 279 | Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah secara akuntabel (%) | 100 | 78 | Tidak Tercapai | |
| 280 | Persentase PAD terhadap pendapatan (%) | 2.39 | 16.9 | Melampaui | Badan Pendapatan Daerah |
| 281 | Proporsi pelaksanaan rapat-rapat DPRD (kali) | 59 | | Tidak Ada Data | Sekretariat Dewan |
| 282 | Proporsi rencana kerja alat kelengkapan dewan (dokumen) | 5 | | Tidak Ada Data | |
| 283 | Cakupan pelayanan informasi rawan bencana (%) | 25 | 12.42 | Tidak Tercapai | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 284 | Proporsi simulasi dan mitigasi untuk Pengurangan Resiko Bencana (kali) | 5 | 2.47 | Tidak Tercapai | |
| 285 | Proporsi intervensi bantuan tanggap darurat bencana (kali) | 70 | 58.82 | Tidak Tercapai | |
| 286 | Proporsi intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (kali) | 4 | 2 | Tidak Tercapai | |
| 287 | Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen) | 130 | 130 | Tercapai | Inspektorat |
| 288 | Persentase tindak lanjut temuan (%) | 80 | 86.68 | Melampaui | |
| 289 | Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%) | 100 | 100 | Tercapai | |
| 290 | Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%) | 1 | 100 | Melampaui | |
| 291 | Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang) | 560 | 182 | Tidak Tercapai | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 292 | Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa) | 69 | 69 | Tercapai | |
| 293 | Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket) | 1 | | Tidak Ada Data | |
| 294 | Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok) | 81 | | Tidak Ada Data | |
| 295 | Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpg) | 146 | | Tidak Ada Data | |

Sumber: BP4D Kabupaten Belu, (2021).

Capaian indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditampilkan di atas, sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Indikator kinerja program juga menjadi indikator kinerja kunci tingkat hasil di perangkat daerah. Dari 295 indikator kinerja 41 (empat puluh satu) perangkat daerah tidak termasuk Unsur kewilayahan sebagaimana dimuat pada Bab 8 RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021, yang melampaui target sebanyak 113 indikator atau 37% dari total indikator. Selanjutnya indikator yang tidak tersedia datanya sebesar 18% atau 54 indikator. Gambaran capaian kinerja masing – masing organisasi perangkat daerah bisa dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Jumlah Target dan Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

| Daftar OPD Kab. Belu! | Jumlah Indikator | Melampaui | Tercapai | Tidak Tercapai | Tidak Ada Data |
|--|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | □□ | 16 | □ | 7 | 15 |
| 2. Dinas Pemuda dan Olahraga | □ | 4 | □ | 1 | 1 |
| 3. Dinas Kesehatan | □□ | 37 | □ | 19 | 3 |
| 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan | □□ | 7 | □ | 2 | 3 |
| 5. Dinas Pariwisata | □ | 1 | □ | 3 | |
| 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3 | 2 | | | 1 |
| 7. Dinas Lingkungan Hidup | □ | 1 | □ | 3 | |
| 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | □ | 2 | □ | 4 | |
| 9. Dinas Sosial | □ | | □ | 4 | |
| 10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | □ | 5 | □ | | 1 |
| 11. Dinas Perhubungan | □ | 3 | □ | 1 | 1 |
| 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | □ | 1 | □ | 1 | 1 |
| 13. Dinas Komunikasi dan Informatika | □ | 2 | □ | | 1 |
| 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | □ | 4 | □ | 5 | |
| 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu | □ | | □ | | 7 |
| 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | □ | 2 | □ | | 1 |
| 17. Dinas Perikanan | □ | 3 | □ | 1 | |
| 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | □□ | | □ | 15 | 2 |
| 19. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | □ | 1 | □ | 3 | |
| 20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian | □ | | □ | 5 | |

| | | | | | |
|---|----|------------|---|-----------|------------|
| 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | □□ | 5 | □ | | 5 |
| 22. Badan Pengelolah Perbatasan Daerah | □ | | □ | | 1 |
| 23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | □ | | □ | 4 | |
| 24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | □ | | □ | 3 | |
| 25. Satuan Polisi Pamong Praja | □ | | □ | 3 | |
| 26. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah | □ | 1 | □ | 3 | 1 |
| 27. Badan Pendapatan Daerah | □ | 1 | □ | | |
| 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | □□ | 3 | □ | 6 | |
| 29. Inspektorat | □ | 2 | □ | | |
| 30. RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD | □ | 2 | □ | 1 | 1 |
| 31. Bagian Pemerintahan Setda Belu | □ | 3 | □ | | 1 |
| 32. Bagian Hukum Setda Belu | □ | 2 | □ | 1 | |
| 33. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu | □ | | □ | 1 | |
| 34. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Belu | □ | | □ | | 1 |
| 35. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Belu | □ | | □ | 2 | |
| 36. Bagian Organisasi Setda Belu | □ | 2 | □ | | |
| 37. Bagian Umum Setda Belu | □ | | □ | | 1 |
| 38. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu | □ | | □ | | |
| 39. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | □ | | □ | | 3 |
| 40. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | □ | | □ | | 2 |
| 41. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | □□ | 1 | □ | 3 | 1 |
| Total | | 295 | | 27 | 101 |
| | | | | | 54 |

Sumber: BP4D Kabupaten Belu, (2021).

Dalam mendukung program prioritas nasional, Kabupaten Belu berpartisipasi di beberapa program salah satunya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang dijabarkan dalam 5 (lima) program prioritas daerah yang dikelola oleh 4 (empat) organisasi perangkat daerah di Kabupaten Belu.

Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Belu juga memiliki peran bagi pencapaian pembangunan provinsi. Capaian beberapa indikator makro Kabupaten Belu Tahun 2020 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 di tingkat provinsi dapat dikatakan belum optimal. Sebagai contoh, salah satu dari indikator makro pembangunan yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 adalah 62,68 dianggap belum optimal apabila dibandingkan dengan IPM Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 65,15 dan IPM Provinsi NTT sebesar 63,53 di tahun yang sama.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 diwarnai dengan beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2020 dan hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD ini, dapat disimpulkan beberapa kendala atau masalah yang dialami oleh perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Pengisian format evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD secara manual menjadi salah satu hambatan penyajian laporan yang benar, akurat dan tepat waktu;
- b. Terdapat beberapa OPD yang tidak melaporkan realisasi IKU perangkat daerah, sehingga tidak dapat dilakukan analisis;
- c. Terkait dengan huruf b di atas, pada Perubahan RKPD Tahun 2020 tidak menyajikan indikator kinerja program, hanya menyajikan indikator kinerja kegiatan. Hal ini menyebabkan tidak dapat ditelusuri bila ada perubahan indikator kinerja program;
- d. Kurangnya koordinasi;
- e. Kurangnya SDM, sebab beban kerja yang melebihi ketersediaan sumber daya aparatur.
- f. Kurang pahamnya aparatur dalam penjadwalan kegiatan yang sudah ditetapkan pada anggaran kas per kegiatan;
- g. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran;
- h. Keterlambatan dalam pengadministrasian SPJ;

- i. Kurangnya sinkronisasi antara perceairan anggaran dengan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan;
- j. Penetapan kegiatan tahunan tidak mengacu pada perencanaan strategis;
- k. Terdapat beberapa kegiatan yang indikatornya tidak sesuai sehingga capaian indikator tidak dapat terukur;
- l. Adanya refokusing APBD sampai lima kali sebagai dampak dari pandemi global COVID;

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2020, proyeksi Tahun 2021 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2022. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

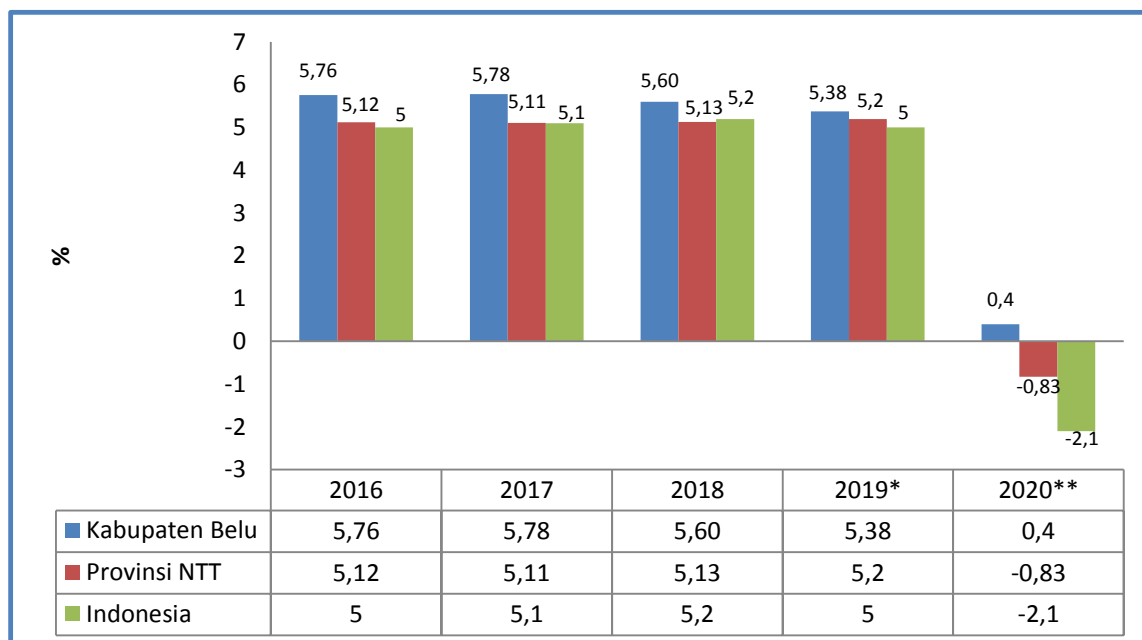
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh produk domestik regional bruto.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu
Tahun 2016-2020 dan Proyeksi 2020-2021
dibandingkan dengan Provinsi NTT



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2021 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Dilihat pada Grafik 3.1 di atas menggambarkan tren 5 Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu berada di atas Provinsi NTT dan Nasional. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu dari 5,38% pada Tahun 2019 menjadi 0,4% atau terjadi penurunan sebesar -4,98%, hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID yang melanda dunia.

2. Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada Tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2020 berdasarkan ADHb mencapai Rp 4,551 triliun dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu:

- (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,82 % ;
- (2) sektor jasa pendidikan sebesar 16,36 % ; dan
- (3) sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,78 %. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belu. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Belu sebagai Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) berada pada jalur perbatasan sebagai pintu masuk Negara RDTL yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang jasa dan perdagangan. Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB dipengaruhi oleh tingginya biaya dan belanja untuk sektor pendidikan diantaranya variabel lama Tahun bersekolah dan peningkatan jumlah populasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.1.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (*Jutaan Rupiah*)
di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2020

| Kategori | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019* | | 2020** | |
|----------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 790.635,2 | 22,91 | 848.308,7 | 22,41 | 918.660,1 | 22,15 | 981.332,9 | 21,89 | 993.185,8 | 21,82 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 118.948,7 | 3,45 | 120.522,7 | 3,18 | 119.044,0 | 2,87 | 116.220,6 | 2,59 | 92.327,3 | 2,03 |
| C | Industri Pengolahan | 37.778,3 | 1,09 | 41.897,1 | 1,11 | 45.890,4 | 1,11 | 49.345,2 | 1,10 | 49.453,7 | 1,09 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.046,7 | 0,06 | 2.303,0 | 0,06 | 2.678,1 | 0,06 | 2.698,3 | 0,06 | 3.151,9 | 0,07 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 857,8 | 0,02 | 891,7 | 0,02 | 968,7 | 0,02 | 1.025,2 | 0,02 | 1.088,8 | 0,02 |
| F | Konstruksi | 288.864,5 | 8,37 | 323.795,0 | 8,56 | 358.962,8 | 8,66 | 397.125,3 | 8,86 | 382.989,6 | 8,41 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 465.441,6 | 13,49 | 499.207,9 | 13,19 | 552.572,5 | 13,32 | 608.552,9 | 13,58 | 627.423,8 | 13,78 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 167.670,6 | 4,86 | 183.264,0 | 4,84 | 197.245,6 | 4,76 | 211.167,4 | 4,71 | 211.680,5 | 4,65 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12.712,5 | 0,37 | 14.851,5 | 0,39 | 16.992,4 | 0,41 | 18.438,3 | 0,41 | 16.515,5 | 0,36 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 145.524,8 | 4,22 | 156.469,3 | 4,13 | 167.539,6 | 4,04 | 177.294,5 | 3,96 | 191.707,1 | 4,21 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 196.599,3 | 5,70 | 218.316,0 | 5,77 | 234.080,9 | 5,64 | 247.200,6 | 5,52 | 269.207,0 | 5,91 |
| L | Real Estate | 90.872,1 | 2,63 | 97.049,1 | 2,56 | 103.858,8 | 2,50 | 104.290,9 | 2,33 | 103.333,2 | 2,27 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 2.405,3 | 0,07 | 2.606,2 | 0,07 | 2.793,9 | 0,07 | 2.975,7 | 0,07 | 2.554,6 | 0,06 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan | 417.984,3 | 12,11 | 475.186,3 | 12,56 | 538.552,6 | 12,99 | 593.098,6 | 13,23 | 611.824,1 | 13,44 |
| P | Jasa Pendidikan | 524.571,8 | 15,20 | 592.487,2 | 15,66 | 658.402,7 | 15,88 | 718.148,5 | 16,02 | 744.565,1 | 16,36 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 75.457,0 | 2,19 | 84.131,4 | 2,22 | 94.185,5 | 2,27 | 104.273,9 | 2,33 | 114.247,1 | 2,51 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 113.150,2 | 3,28 | 123.357,0 | 3,26 | 134.763,7 | 3,25 | 149.065,5 | 3,33 | 136.479,8 | 3,00 |
| | Produk Domestik Bruto | 3.451.520,8 | 100 | 3.784.644,2 | 100 | 4.147.192,4 | 100 | 4.482.254,4 | 100 | 4.551.735,1 | 100 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Tabel. 3.2
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha (*jutaan rupiah*)
di Kabupaten Belu Tahun 2016 s/d 2020

| Kategori | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019* | | 2020** | |
|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 579.452,9 | 3,06 | 607.653,5 | 4,87 | 634.001,2 | 4,34 | 660.906,8 | 4,24 | 663.631,0 | 0,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 91.093,3 | 4,58 | 89.521,2 | -1,73 | 87.133,4 | -2,67 | 85.088,1 | -2,35 | 61.221,4 | -28,50 |
| C | Industri Pengolahan | 27.560,8 | 4,94 | 29.448,9 | 6,58 | 30.873,6 | 4,84 | 32.282,3 | 4,56 | 32.112,9 | -0,52 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.615,4 | 11,23 | 1.638,0 | 1,40 | 1.845,9 | 12,70 | 1.858,1 | 0,66 | 2.164,0 | 16,46 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 554,8 | 4,34 | 566,5 | 2,12 | 608,8 | 7,47 | 634,8 | 4,27 | 664,5 | 4,68 |
| F | Konstruksi | 190.898,5 | 7,17 | 204.789,1 | 7,28 | 218.934,3 | 6,91 | 231.520,4 | 5,75 | 224.036,8 | -3,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 300.376,7 | 5,32 | 312.582,1 | 4,06 | 335.058,6 | 7,19 | 359.699,8 | 7,35 | 359.207,8 | -0,14 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 124.024,3 | 6,36 | 131.190,5 | 5,78 | 139.011,4 | 5,96 | 146.304,8 | 5,25 | 145.597,9 | -0,48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.151,7 | 8,19 | 10.418,5 | 13,84 | 11.698,0 | 12,28 | 12.533,3 | 7,14 | 11.296,5 | -9,87 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 120.375,3 | 2,24 | 126.962,5 | 5,47 | 133.886,7 | 5,45 | 138.834,7 | 3,70 | 150.173,1 | 8,17 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 151.085,3 | 7,48 | 161.040,9 | 6,59 | 165.593,3 | 2,83 | 170.717,7 | 3,09 | 185.952,6 | 8,92 |
| L | Real Estate | 73.382,9 | 6,20 | 76.953,6 | 4,87 | 80.731,6 | 4,91 | 80.872,4 | 0,17 | 80.177,7 | -0,86 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1.754,0 | 5,50 | 1.801,4 | 2,70 | 1.874,2 | 4,04 | 1.976,6 | 5,46 | 1.651,6 | -16,44 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan | 318.350,9 | 8,68 | 341.950,9 | 7,41 | 368.192,5 | 7,67 | 399.631,1 | 8,54 | 416.458,0 | 4,21 |
| P | Jasa Pendidikan | 382.571,9 | 7,68 | 411.929,6 | 7,67 | 435.903,7 | 5,82 | 460.001,8 | 5,53 | 465.876,9 | 1,28 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 57.605,9 | 7,80 | 62.306,8 | 8,16 | 67.652,7 | 8,58 | 73.286,8 | 8,33 | 77.513,2 | 5,77 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 82.047,7 | 5,17 | 86.295,1 | 5,18 | 92.711,5 | 7,44 | 100.374,7 | 8,27 | 90.640,0 | -9,70 |
| | Produk Domestik Bruto | 2.511.902,2 | 5,76 | 2.657.049,0 | 5,78 | 2.805.711,5 | 5,60 | 2.956.524,1 | 5,38 | 2.968.375,9 | 0,40 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

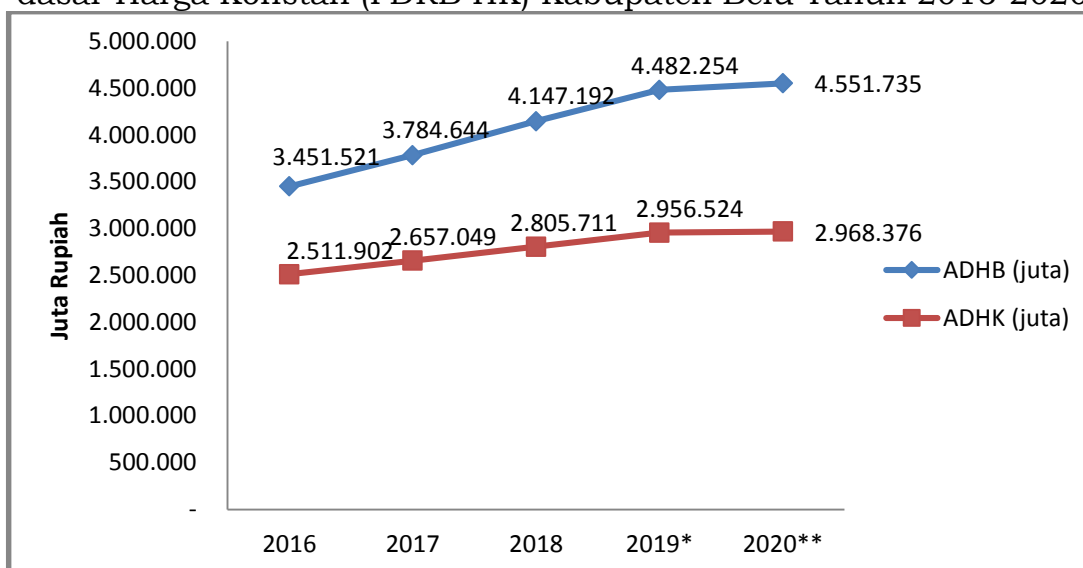
Tabel. 3.3
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 20016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu

| Kategori | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019* | | 2020** | |
|----------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 22,91 | 3,06 | 22,41 | 4,87 | 22,15 | 4,34 | 21,89 | 4,24 | 21,82 | 0,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,45 | 4,58 | 3,18 | -1,73 | 2,87 | -2,67 | 2,59 | -2,35 | 2,03 | -28,50 |
| C | Industri Pengolahan | 1,09 | 4,94 | 1,11 | 6,58 | 1,11 | 4,84 | 1,10 | 4,56 | 1,09 | -0,52 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 11,23 | 0,06 | 1,40 | 0,06 | 12,70 | 0,06 | 0,66 | 0,07 | 16,46 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur U | 0,02 | 4,34 | 0,02 | 2,12 | 0,02 | 7,47 | 0,02 | 4,27 | 0,02 | 4,68 |
| F | Konstruksi | 8,37 | 7,17 | 8,56 | 7,28 | 8,66 | 6,91 | 8,86 | 5,75 | 8,41 | -3,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepe | 13,49 | 5,32 | 13,19 | 4,06 | 13,32 | 7,19 | 13,58 | 7,35 | 13,78 | -0,14 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,86 | 6,36 | 4,84 | 5,78 | 4,76 | 5,96 | 4,71 | 5,25 | 4,65 | -0,48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 | 8,19 | 0,39 | 13,84 | 0,41 | 12,28 | 0,41 | 7,14 | 0,36 | -9,87 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,22 | 2,24 | 4,13 | 5,47 | 4,04 | 5,45 | 3,96 | 3,70 | 4,21 | 8,17 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,70 | 7,48 | 5,77 | 6,59 | 5,64 | 2,83 | 5,52 | 3,09 | 5,91 | 8,92 |
| L | Real Estate | 2,63 | 6,20 | 2,56 | 4,87 | 2,50 | 4,91 | 2,33 | 0,17 | 2,27 | -0,86 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,07 | 5,50 | 0,07 | 2,70 | 0,07 | 4,04 | 0,07 | 5,46 | 0,06 | -16,44 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan | 12,11 | 8,68 | 12,56 | 7,41 | 12,99 | 7,67 | 13,23 | 8,54 | 13,44 | 4,21 |
| P | Jasa Pendidikan | 15,20 | 7,68 | 15,66 | 7,67 | 15,88 | 5,82 | 16,02 | 5,53 | 16,36 | 1,28 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,19 | 7,80 | 2,22 | 8,16 | 2,27 | 8,58 | 2,33 | 8,33 | 2,51 | 5,77 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 3,28 | 5,17 | 3,26 | 5,18 | 3,25 | 7,44 | 3,33 | 8,27 | 3,00 | -9,70 |
| | PDRB | 100 | 5,76 | 100 | 5,78 | 100 | 5,60 | 100 | 5,38 | 100 | 0,40 |

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021,
Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Grafik 3. 2

Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Berlaku (PDRB HB) dan PDRB atas dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Data pada tabel 3.3 di atas memperlihatkan bahwa lapangan usaha pertanian masih mendominasi struktur PDRB Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020. Namun demikian terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, bahkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dari 4,24 % Tahun 2019 menjadi 0,41 %. Sementara lapangan usaha yang lain mengalami penurunan yang sangat signifikan (berkontraksi sangat dalam) yaitu mencapai angka minus seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (-28,50%), jasa perusahaan (-16,44%), akomodasi dan makan minum (-9,87%), jasa lainnya (-9,70%), konstruksi (-3,23%), dll. Kondisi ini terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat dan aktifitas ekonomi lainnya. Selain itu, dapat digambarkan lebih lanjut bahwa lapangan-lapangan usaha ini sangat sensitif terhadap dampak pandemi COVID namun justru memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Hal ini dapat juga dilihat pada grafik 3.2 di atas yang menggambarkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Berlaku dan PDRB atas

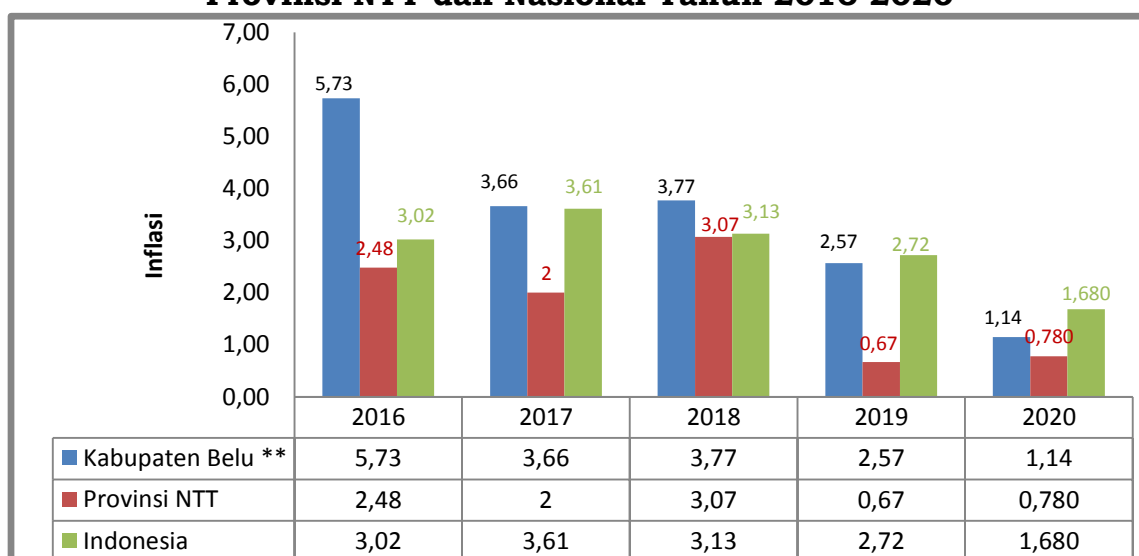
dasar Harga Konstan selama 5 (lima) Tahun terakhir cenderung mengalami kontraksi pertumbuhan yang melambat.

3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka untuk data inflasi Tahun 2016 – 2020 dipakai data Laju Implisit PDRB dari BPS Kabupaten Belu.

Grafik 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2021

BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan 1983-2020

BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu (3,375%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,80%) dan Nasional (2,83%). Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, karena adanya kendala

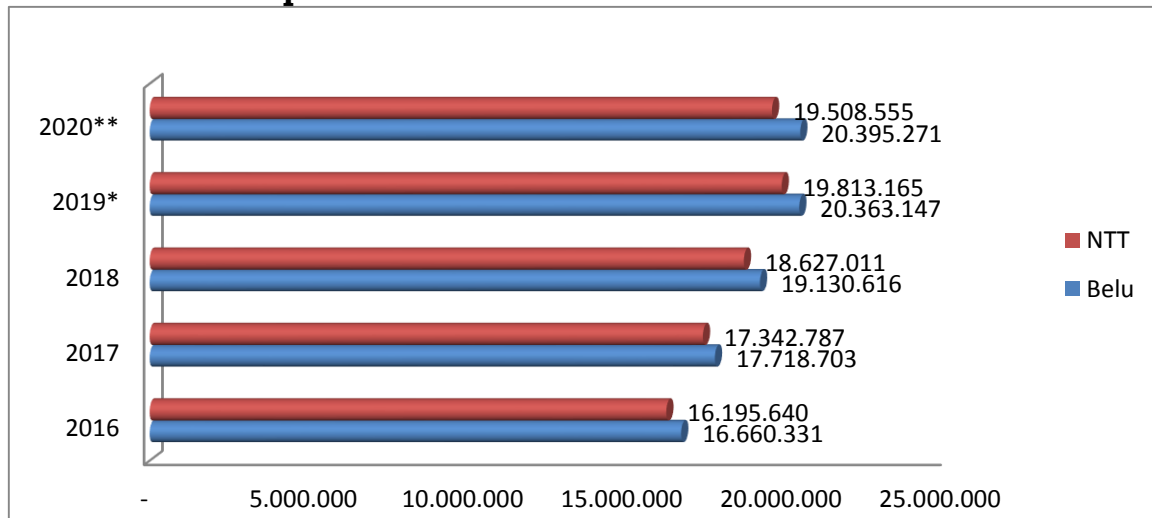
struktural perekonomian di wilayah Kabupaten Belu. Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Belu.

4. PDRB Perkapita

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita sebuah daerah juga merefleksikan PDRB per kapita. Jika kita menghitung pendapatan perkapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan perkapita nominal yaitu pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangiketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Grafik 3.4
Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku
Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 PDRB perkapita ADHb Kabupaten Belu menggambarkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 16,66 juta rupiah pada Tahun 2016 menjadi 20,39 juta rupiah pada Tahun 2020. Hal ini ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan alternatif teknologi tepat guna maupun dari aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik. PDRB perkapita ADHb dari Tahun 2020 berada di atas angka Provinsi NTT sebesar 19,50 juta dan masih di bawah angka nasional sebesar 56,9 juta.

5. Indeks Pembangunan Manusia

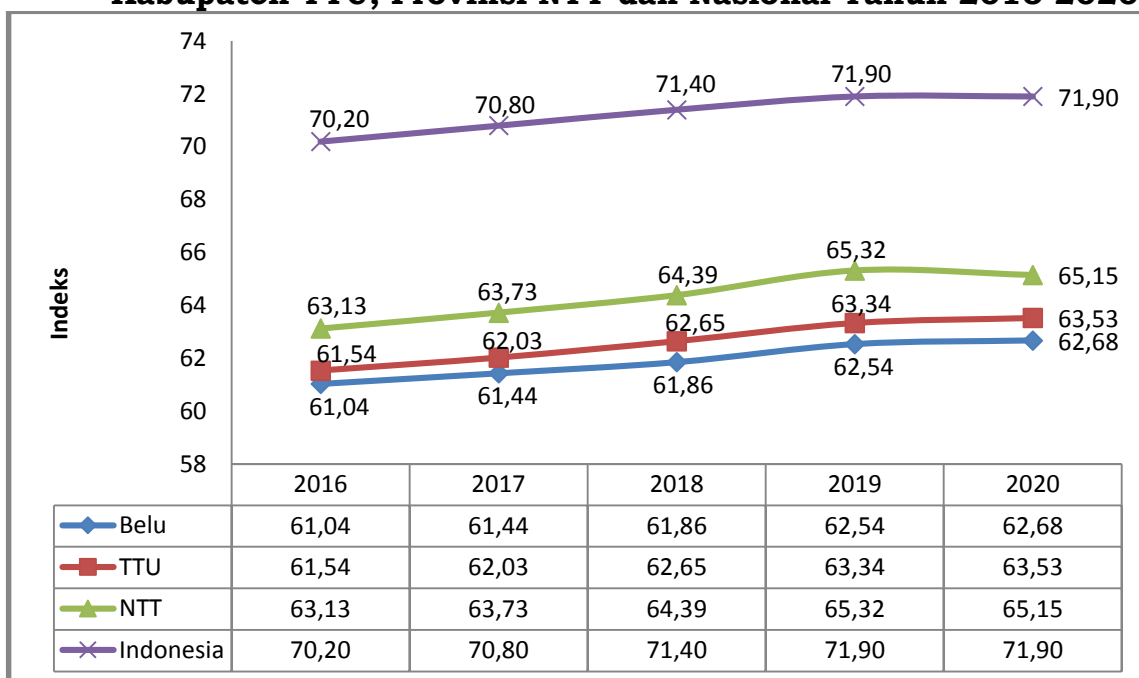
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama

sekolah dan angka harapan lama sekolah yg memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Dari grafik 2.7 yang disajikan terlihat kinerja pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 menunjukkan trend yang meningkat. Akan tetapi capaian IPM Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Belu 5 (lima) Tahun terakhir termasuk dalam klasifikasi sedang yaitu di atas angka 60.

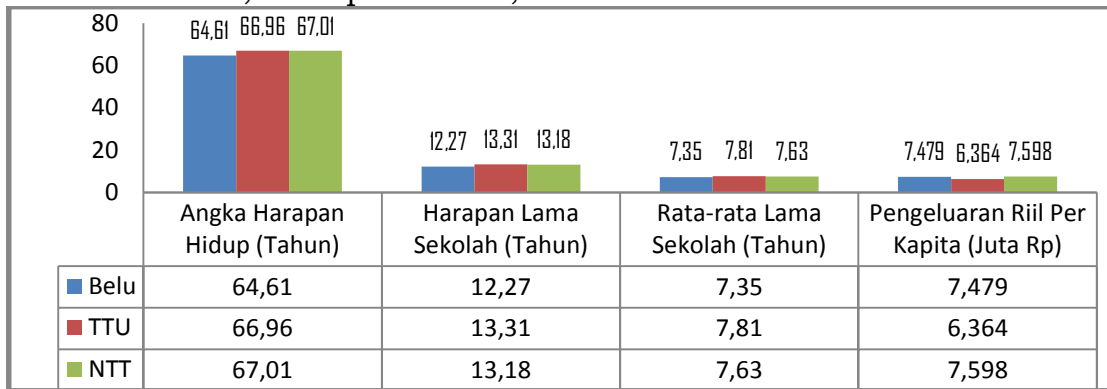
Grafik 3.5
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2021 BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021

Dari grafik 3.5 terlihat perbandingan capaian komponen IPM Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2020. Capaian Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu lebih rendah dari Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, sedang capaian Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU dan masih lebih rendah dari Provinsi NTT.

Grafik 3.6
Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Belu, Kabupaten TTU, dan Provinsi NTT Tahun 2020

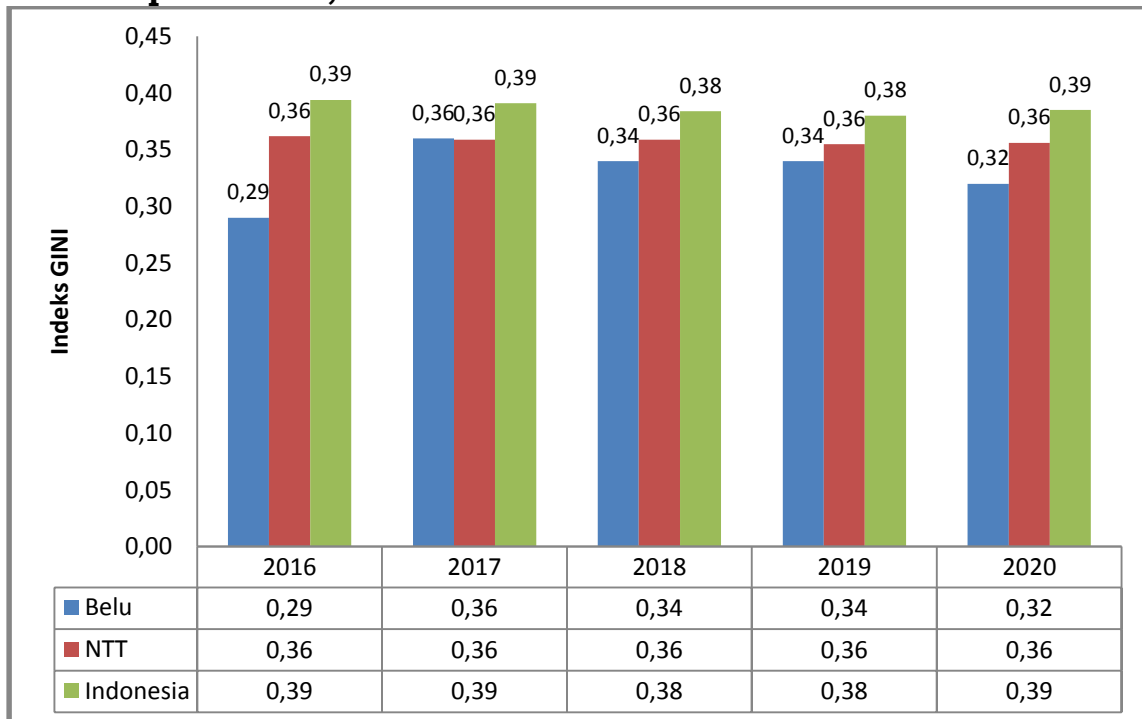


Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Belu dari 2016 s/d 2020 mengalami fluktuatif yang menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 2.8 di bawah ini. Tahun 2016 sebesar 0,29 kemudian naik pada Tahun 2017 menjadi 0,36 dan mengalami penurunan menjadi 0,36 pada Tahun 2018 serta mengalami penurunan menjadi 0,32 pada Tahun 2020. Capain Indeks GINI Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan Nasional, ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu lebih baik dari pada Provinsi NTT maupun Nasional. Capain Indeks Gini di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 lebih kecil dari 0,40 artinya berada dalam kategori ketimpangan rendah dan nilai ketimpangan ini masih di bawah nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara Nasional.

Grafik 3.7
Perbandingan Indeks GINI
Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, GINI Ratio Indonesia 2002-2020

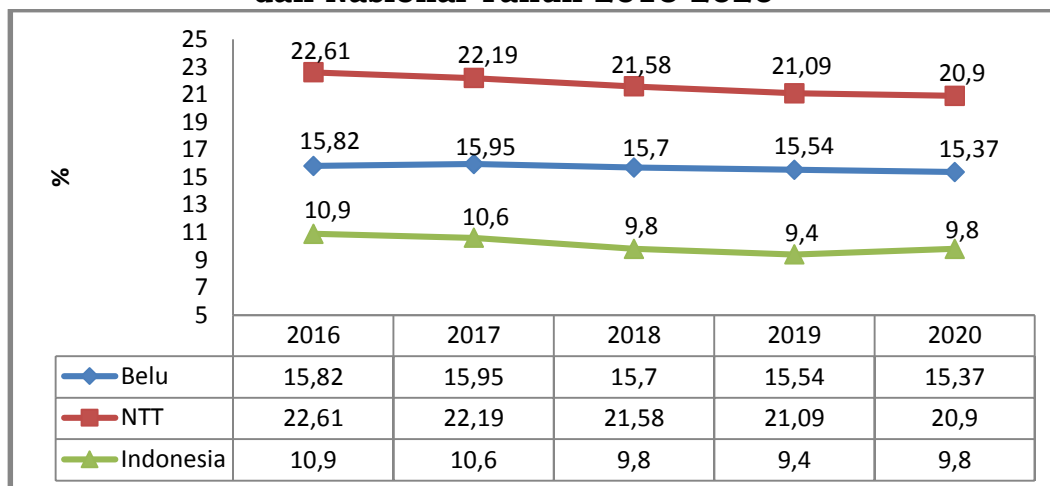
Belu Dalam Angka 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita Data BPS

7. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2020 berfluktuatif, tertinggi 15,95% (33,95 ribu jiwa) pada Tahun 2017 dan terendah 15,37% (34,18 ribu jiwa) pada Tahun 2020, dapat dilihat pada Grafik 3.8 berikut ini.

Grafik 3.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020

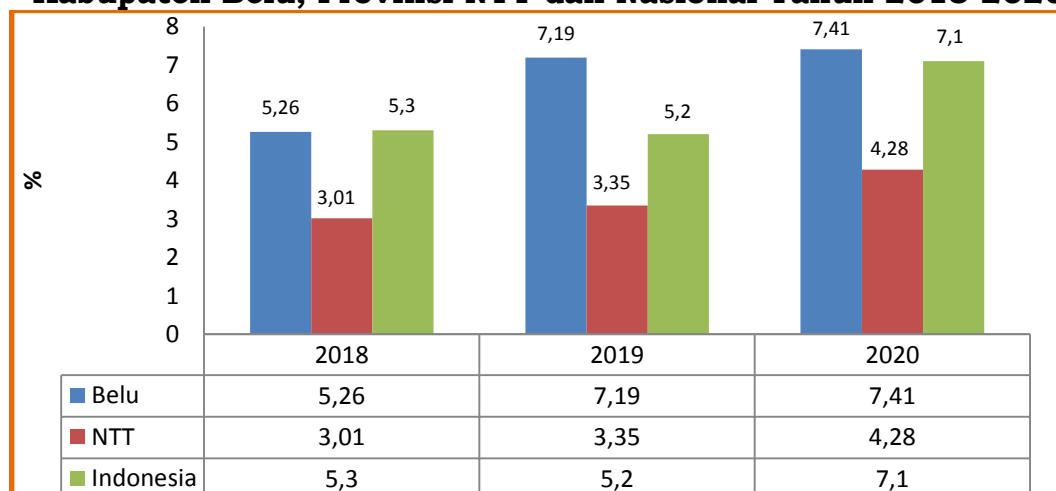


Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021 BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Pada Tahun 2016-2020, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu lebih rendah dari Provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Nasional secara keseluruhan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Belu Tahun 2020 sebesar 15,37%, masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu segera ditangani secara terintegrasi dan lintas program/kegiatan perangkat daerah.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 3.9
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2020



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2021, BPS, Provinsi NTT Dalam Angka 2021 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Belu secara umum lebih tinggi dari pada Provinsi NTT dan TPT Nasional. TPT di Kabupaten Belu disebabkan karena:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2020 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 156.101 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja).
5. Dampak Pandemi COVID pada Tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022

1. Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 pada kisaran 4,8%, namun ada beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Belu yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional hal ini juga sangat berpengaruh

- terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Belu;
- b. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
 - c. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi;
 - d. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali;
 - e. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID;
 - f. Meski letak Kabupaten Belu yang strategis sebagai wilayah yang berada di perbatasan dan juga Atambua sebagai Pusat Kawasan strategis Nasional namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua Tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Prospek

Kabupaten Belu memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumberdaya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan dan investasi menjadi faktor yang strategis untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Selain itu, posisi strategis sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara RDTL sangat potensial untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan pasar perbatasan bertaraf internasional, jasa pergudangan dan penyediaan komoditas ekspor yang berkualitas. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;

- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

3.1.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini proses penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 kabupaten Belu baru sampai tahap penyusunan Rancangan Awal, sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah

bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;
 - a. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
 - c. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.1.4 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada Tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih

mempertimbangan dampak atas COVID.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah kabupaten Belu.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan kabupaten Belu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah kabupaten Belu dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD kabupaten Belu Tahun 2022, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 Tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMD kabupaten Belu Tahun 2021-2026;
- c. Dampak ekonomi dari pandemi COVID.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah kabupaten Belu Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.1.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana Tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten

- Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
 - 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
 - 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
 - 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
 - 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
 - 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
 - 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;
 - 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
 - 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
 - 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Tabel. 3.1
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2021-2023**

| No | Uraian | Proyeksi | | |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | Pendapatan | 900,651,484,673.00 | 906,334,772,694.00 | 936,448,047,715.00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 111,490,045,000.00 | 115,765,131,922.00 | 126,756,760,219.00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak daerah | 29,419,035,210.00 | 35,154,511,090.00 | 36,033,373,867.00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 11,822,690,918.00 | 15,865,111,100.00 | 16,261,738,877.00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan | 6,691,724,012.00 | 7,500,000,000.00 | 7,687,500,000.00 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 63,556,594,860.00 | 57,245,509,732.00 | 66,774,147,475.00 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 763,457,667,973.00 | 764,865,869,072.00 | 783,987,515,796.00 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 739,512,103,000.00 | 740,321,664,975.00 | 758,829,706,597.00 |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah | 23,945,564,973.00 | 24,544,204,097.00 | 25,157,809,199.00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 25,703,771,700.00 | 25,703,771,700.00 | 25,703,771,700.00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 2,294,571,700.00 | 2,294,571,700.00 | 2,294,571,700.00 |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 23,409,200,000.00 | 23,409,200,000.00 | 23,409,200,000.00 |

Sumber: Data Olahan BPKAD Kab. Belu (2021)

a. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan berdasar proyeksi pada Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai berikut:

- a. Proyeksi belanja daerah diproyeksikan naik sebesar 2 % dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Perhitungan gaji pegawai diproyeksikan naik sebesar 2 % dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan perhitungan tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5449 Tahun 2019 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ Tahun 2019

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- c. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID;
- e. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

- f. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah kabupaten Belu Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2021 – 2023

| No | Uraian | Proyeksi | | |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.00 | Belanja | 935,651,484,673.00 | 906,334,772,694.00 | 939,393,762,000.00 |
| 5.10 | Belanja Operasi | 628,949,572,209.00 | 696,403,600,657.00 | 689,475,625,500.00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 353,983,817.748.00 | 374,760,151,369.00 | 375,000,000,000.00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 265,214,088,293.00 | 299,054,455,628.00 | 280,000,000,000.00 |
| 4.1.05 | Belanja Hibah | 9,751,666,168.00 | 8,113,368,160.00 | 20,000,000,000.00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 14,475,625,500.00 | 14,475,625,500.00 |
| 5.20 | Belanja Modal | 145,955,646,308.00 | 93,980,489,615.00 | 95,915,734,470.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23,464,791,061.00 | 14,716,987,696.00 | 16,652,232,551.00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 39,566,318,450.00 | 19,875,922,547.00 | 19,875,922,547.00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 75,704,626,797.00 | 52,255,420,372.00 | 52,255,420,372.00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap lainnya | 7,219,910,000.00 | 7,132,159,000.00 | 7,132,159,000.00 |
| 5.30 | Belanja Tidak Terduga | 22,253,976,716.00 | 2,500,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 22,253,976,716.00 | 2,500,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| 5.40 | Belanja Transfer | 136,948,179,340.00 | 139,002,402,030.00 | 139,002,402,030.00 |
| 5.4.01 | Belanja bagi Hasil | 1,705,811,840.00 | 3,404,563,800.00 | 2,208,693,194.00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 136,786,477,600.00 | 135,597,838,230.00 | 136,793,708,836.00 |

Sumber : Data Olahan Kab. Belu BPKAD (2021)

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2022. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022 di kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

Tabel. 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2023

| No | Uraian | Proyeksi | | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.00 | Pembiayaan Daerah | - | - | - |
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | 40,000,000,000.00 | 445.714,28500 | 445,714,285.00 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 39,554,285,715.00 | 0 | 0 |
| 06.01.02 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 445,714,285.00 | 445,714,285.00 | 445,714,285.00 |
| 06.02 | Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000.000.00 | 5,000,000.000.00 | 5,000,000.000.00 |
| 06.02.01 | Penyertaan Modal kepada Bank NTT | 5,000,000.000.00 | 5,000,000.000.00 | 5,000,000.000.00 |

Sumber : Data Olahan BPKAD Kab. Belu (2021)

Tabel. 3.4
**Ringkasan Realisasi dan Proyeksi Anggaran
Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian | Proyeksi | | |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 | Pendapatan | 900,651,484,673.00 | 906,334,772,694.00 | 936,448,047,715.00 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 111,490,045,000.00 | 115,765,131,922.00 | 126,756,760,219.00 |
| 4.1.01 | Pajak daerah | 29,419,035,210.00 | 35,154,511,090.00 | 36,033,373,867.00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 11,822,690,918.00 | 15,865,111,100.00 | 16,261,738,877.00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan | 6,691,724,012.00 | 7,500,000,000.00 | 7,687,500,000.00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD Yang Sah | 63,556,594,860.00 | 57,245,509,732.00 | 66,774,147,475.00 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 746,210,603,973.00 | 764,865,869,072.00 | 783,987,515,796.00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 722,265,039,000.00 | 740,321,664,975.00 | 758,829,706,597.00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23,945,564,973.00 | 24,544,204,097.00 | 25,157,809,199.00 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 25,703,771,700.00 | 25,703,771,700.00 | 25,703,771,700.00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2,294,571,700.00 | 2,294,571,700.00 | 2,294,571,700.00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 23,409,200,000.00 | 23,409,200,000.00 | 23,409,200,000.00 |
| 5 | Belanja | 918,404,420,673.00 | 906,334,772,694.00 | 939,393,762,000.00 |
| 5.1 | Belanja Operasi | 648,577,679,978.00 | 696,403,600,657.00 | 689,475,625,500.00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 345,352,926,282.00 | 374,760,151,369.00 | 375,000,000,000.00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 280,969,587,528.00 | 299,054,455,628.00 | 280,000,000,000.00 |
| 4.1.05 | Belanja Hibah | 7,993,466,168.00 | 8,113,368,160.00 | 20,000,000,000.00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 14,261,700,000.00 | 14,475,625,500.00 | 14,475,625,500.00 |

| No | Uraian | Proyeksi | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.2 | Belanja Modal | 97,517,723,761.00 | 93,980,489,615.00 | 95,915,734,470.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33,254,221,842.00 | 14,716,987,696.00 | 16,652,232,551.00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 19,875,922,547.00 | 19,875,922,547.00 | 19,875,922,547.00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 37,255,420,372.00 | 52,255,420,372.00 | 52,255,420,372.00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap lainnya | 7,132,159,000.00 | 7,132,159,000.00 | 7,132,159,000.00 |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 35,360,837,594.00 | 2,500,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 35,360,837,594.00 | 2,500,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 136,948,179,340.00 | 139,002,402,030.00 | 139,002,402,030.00 |
| 5.4.01 | Belanja bagi Hasil | 1,705,811,840.00 | 3,404,563,800.00 | 2,208,693,194.00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 135,242,367,500.00 | 135,597,838,230.00 | 136,793,708,836.00 |
| | Defisit | (35,000,000,000.00) | 0 | (2,945,714,285.00) |
| 6 | Pembiayaan Daerah | - | - | - |
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | 40,000,000,000.00 | 445,714,285.00 | 15,445,714,285.00 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 39,554,285,715.00 | 0 | 15,000,000,000.00 |
| 06.01.02 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 445,714,285.00 | 445,714,285.00 | 445,714,285.00 |
| 06.02 | Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 06.02.01 | Penyertaan Modal kepada Bank NTT | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 12,500,000,000.00 |
| | Pembiayaan Netto | 35,000,000,000.00 | (4,554,285,715.00) | 2,945,714,285.00 |

Sumber : Data Olahan BPKAD Kab. Belu (2021)

BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penyusunan RPJMD periode 2021-2026 saat ini sampai tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang selanjutnya akan disempurnakan menjadi Rancangan dan Rancangan Akhir RPJMD tahun 2021-2026. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Belu tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005 – 2025, dimana visi Kabupaten Belu 2005 – 2025 dalam rumusan RPJPD adalah **“Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahterah 2025”** yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi daerah yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat Belu yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya berdasarkan falsafah Pancasila** adalah peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila guna terciptanya kerukunan antar umat beragama yang harmonis yang pada akhirnya dapat meningkatkan interaksi social diantara budaya masyarakat majemuk.
2. **Mewujudkan masyarakat Belu yang berkualitas hidup dan berdaya saing** adalah pembangunan Sumber Daya Manusia yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas, dan daya saing masyarakat Belu.
3. **Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif, yang berbasis pada potensi local dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas.

4. **Mewujudkan masyarakat Belu yang demokratis berlandaskan hukum** adalah penegakan supremasi hukum yang adil dan bertanggungjawab, peningkatan pemahaman masyarakat akan kebebasan yang bertanggungjawab, persamaan kedudukan dalam politik dan hukum, peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat guna menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).
5. **Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa** adalah membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggungjawab, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislative dan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
6. **Mewujudkan kabupaten Belu sebagai wilayah berkeseimbangan lingkungan yang berwawasan tata ruang** adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, penegakan hukum tata ruang wilayah secara konsisten serta peningkatan pemahaman masyarakat akan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang ramah dan bertanggungjawab dengan mengedepankan pemanfaatan ruang dan kawasan yang terkendali, bertanggungjawab dan berkelanjutan sesuai arahan tata ruang wilayah.
7. **Mewujudkan wilayah kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan yang aman, nyaman, produktif dan berkembang yang didukung infrastruktur wilayah yang memadai** adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah perbatasan secara adil dan merata melalui peningkatan akselerasi pembangunan wilayah perbatasan yang komprehensif dan terpadu dalam seluruh aspek kehidupan, peningkatan pelayanan masyarakat melalui pemekaran wilayah ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten termasuk peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah guna terciptanya ketenteraman dan kenyamanan di wilayah perbatasan dalam rangka

menampilkan perbatasan sebagai “Halaman Depan NKRI” yang maju dan sejahtera.

Adapun Arah Kebijakan pembangunan daerah untuk RPJMD tahap IV (Tahun 2021 s.d Tahun 2026) dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Misi 1 - Mewujudkan masyarakat Belu yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya berdasarkan falsafah Pancasila. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Meningkatkan budaya inovatif dan berorientasi IPTEK dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti budaya gotong royong dan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif;
2. Optimalisasi Forum Dialog Lintas Agama (FKA);

II. Misi 2 - Mewujudkan masyarakat Belu yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
3. Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;
5. Peningkatan manajemen kesehatan;
6. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan penyalur tenaga kerja;
8. Peningkatan kinerja Keluarga Berencana;
9. Peningkatan Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, memperkecil angka kematian;
10. Pemberdayaan lembaga-lembaga keperempuanan;
11. Penduduk terasing dan korban bencana alam dan peningkatan pelayanan sosial;

12. Peningkatan dan pementapan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan social;
13. Peningkatan kualitas lembaga dan tenaga pelayanan sosial;
14. Pendampingan bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial.

III. Misi 3 - Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah berbasis masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pariwisata yang berdaya tarik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki kearifan lokal yang berdaya saing global;
3. Pengembangan agroindustri, jasa perdagangan dan investasi sesuai dengan komoditas unggulan daerah melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat;
4. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang terbarukan dan yang tidak terbaru secara seimbang;
5. Pengembangan jaringan komunikasi dan jaringan listrik;
6. Pembangunan rumah sehat dan layak huni pada masyarakat;
7. Peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya system dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan.

IV. Misi 4 - Mewujudkan Masyarakat Belu Yang Demokratis Berlandaskan Hukum. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Peningkatan kapasitas lembaga hukum adat;
2. Revitalisasi dan refungsionalisasi kelembagaan hukum adat.

V. Misi V - Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN), system seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan

promosi ASN secara terbuka, serta peningkatan remunirasi berdasarkan “merit system”;

2. Peningkatan sinergitas antara lembaga pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang professional.

VI. Misi VI - Mewujudkan kabupaten Belu sebagai wilayah berkeseimbangan lingkungan yang berwawasan tata ruang. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim;
2. Peningkatan dan pemantapan sistem perencanaan, ketertiban pemanfaatan dan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif sesuai dengan norma-norma perencanaan, penyediaan rencana rinci tata ruang, kelengkapan kebijakan, peraturan-peraturan serta mekanisme perijinan, dan pemasyarakatan penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

VII. Misi VII - Mewujudkan kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan yang aman, nyaman, produktif dan berkembang. Arah kebijakan Pembangunan Periode IV (2020-2024) :

1. Pengelolaan ketertiban dan keamanan dalam konteks ketahanan lokal meliputi bidang sosial budaya, politik ekonomi, hukum dan HAM serta pertahanan dan keamanan sebagai basis ketahanan nasional yang berdampak pada penguatan ideologi bangsa Indonesia;
2. Penataan pusat-pusat permukiman, peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, telekomunikasi dan listrik pedesaan;
3. Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari negara

tetangga untuk menghindari kecemburuan sosial dan kerawanan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD periode ke-3, maka RPJMD periode ke-4 merupakan puncak pembangunan daerah dengan terwujudnya visi pembangunan daerah yakni **“BELU SEBAGAI KABUPATEN PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL dan SEJAHTERA 2025”** sesuai arahan pembangunan jangka panjang kabupaten Belu 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh khususnya dikawasan perbatasan berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada RPJMD ke-4 ini, tahapan dan prioritasnya pada pemantapan pembangunan pada semua aspek sehingga pada akhir tahun RPJMD ke-4 kesejahteraan masyarakat kabupaten Belu terwujud sesuai dengan rencana.

Capaian pembangunan pada akhir tahun RPJMD ke-4 (2024) antara lain meliputi:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,77% tahun 2020 menjadi 71,90% pada tahun 2024;
2. Angka Harapan Hidup meningkat dari 68,77% tahun 2020 menjadi 70,69% pada tahun 2024;
3. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meningkat dari Rp. 19.749.794 tahun 2020 menjadi Rp. 25.186.756 pada tahun 2024;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat dari 6,86% pada tahun 2020 menjadi 7,77% pada tahun 2024;

5. Pengangguran terbuka menurun dari 2,36% pada tahun 2020 menjadi 1,81% pada tahun 2024;
6. Penduduk miskin menurun dari 10,82% pada tahun 2020 menjadi 9,13% pada tahun 2024.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Belu berada pada masa transisi, dimana RPJMD tahun 2016-2021 telah berakhir dan RPJMD yang baru dalam proses penyusunan yang mana bahwa RPJMD tahun 2021-2026 saat ini pada tahap Rancangan Awal. Namun proses pembangunan Kabupaten Belu tahun 2022 dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu tahun 2022 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020- 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Mengentaskan kemiskinan;
- g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
- d. Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta ;
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakan hukum nasional yang mantap;
- d. reformasi birokrasi dan tata kelola;

- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi:
 - a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
 - b. Inflasi sebesar 2,7%;
 - c. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
 - d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
 - e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
 - f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6-4,3%.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan pada “Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata”, dengan target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,33-6,90%
- b. PDRB per Kapita sebesar 23,25 (Rp juta);
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67.35 – 69,00 (point);
- d. Penduduk di bawah Garis Kemiskinan menurun 19,35-16,15 (%);
- e. Inflasi 3-3,2 (%);
- f. Prevelensi Stunting 16,7 (%);
- g. Indeks Gini 0,34-0,33 (Poin);
- h. Indeks Pembangunan Gender 95 (Poin);
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,5-1,9 (%);
- j. Rasio PAD 30,12 (%);
- k. Emisi Gas Rumah Kaca 17.248.829 (tCO₂eq);
- l. Kebutuhan Investasi 71,47 (Rp Triliun);
- m. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah 69 (poin).

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 sedang dalam proses penyusunan sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Belu tahun 2022 berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kabupaten Belu tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Pasca COVID, Melalui Percepatan Layanan Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi dan Jaringan Layanan Sosial”.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belu tahun 2022 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Belu tahun 2022 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;

Kemiskinan di Kabupaten Belu terjadi karena masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dengan produktivitas ekonomi yang rendah. Hal tersebut dipicu dengan sektor pertanian yang menampung tenaga kerja berkategori pengangguran terselubung cukup tinggi yaitu sekitar 30% merupakan tenaga kerja yang tidak mendapat upah. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tenaga kerja terdidik tidak ingin lagi menjadi petani. Mereka berpandangan bahwa sektor pertanian tidak akan mampu meningkatkan pendapatannya. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya adopsi-inovasi paket teknologi pertanian sehingga mengakibatkan produksi dan produktivitas semakin menurun dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan.

Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten Belu, seperti sektor UMKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah, ataupun penyalur output karena produksi pertanian yang tidak mencapai kapasitas untuk dikomersilkan atau diperdagangkan. Kondisi tersebut, berdampak pada minimnya belanja masyarakat untuk sektor jasa sehingga

memberikan dampak lanjutan terhadap sektor pariwisata menjadi tidak berkembang karena belum optimalnya pengelolaan agrowisata unggulan. Kondisi ini menimbulkan kurangnya penghasilan dan pendapatan masyarakat secara memadai dengan implikasi terhadap gangguan terhadap pembangunan kualitas manusia.

Penyebab lain dari tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Belu adalah kurangnya pemenuhan infrastruktur dasar seperti akses jalan, rumah layak huni, dan infrastruktur penunjang perekonomian seperti embung dan irigasi. Faktor pemicu utama disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, terbatasnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

Walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu cenderung menurun dalam empat tahun terakhir, yaitu sebesar 16,81% pada tahun 2015 menjadi 15,54% pada tahun 2019, namun angka ini masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu segera ditangani secara terintegrasi dan lintas program/kegiatan Perangkat Daerah. Menurut hasil analisis pembangunan daerah di Propinsi NTT, Kabupaten Belu dalam hal pengurangan kemiskinan termasuk dalam kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan berada di bawah rata-rata Propinsi NTT (*Low growth, less pro-poor*). Hal ini berarti bahwa untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan perlu meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin serta meningkatkan efektivitas maupun efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

2. Peningkatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan;

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah pengelolaan potensi SDA unggulan untuk dikembangkan, terutama pada sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) maupun sektor pariwisata (Wisata budaya, alam, dan religius) yang didukung oleh penanaman modal/investasi oleh investor. Hal lain yang dapat mendukung sektor primer untuk diminati oleh investor luar dan dalam negeri, yakni dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi, kondisi keamanan, kelistrikan dan stabilitas politik daerah serta dengan menyederhanakan regulasi. Pengembangan pada sub sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Belu telah menghasilkan produk unggulan seperti padi, jagung, kopi dan jambu mete. Begitu pula pada sub sektor peternakan telah menghasilkan produk unggulan seperti ternak sapi dan babi yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersediaan prasarana produksi (industri pengolahan hasil), pasar dan tenaga kerja yang terampil. Padahal pengembangan sektor pertanian akan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Selain itu, dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya yang menyediakan input bagi sektor pertanian, ataupun memanfaatkan produk sektor pertanian sebagai input.

Peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan, di dukung pula dengan letak Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL) sebagai Pusat Kawasan Strategi Nasional (PKSN) dapat memberikan daya dongkrak terhadap penyaluran produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun aspek distribusinya lebih terbuka peluang perdagangan antar negara, sehingga secara ekonomik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Belu jika hal ini

di dukung oleh kerjasama bilateral ekonomi maupun intensnya pelaksanaan promosi produk unggulan daerah lewat *event expo* Indonesia-Timor Leste (Indo-Tiles).

Selanjutnya peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan dengan menghasilkan berbagai produk unggulan hasil pertanian/perkebunan, hasil peternakan, hasil laut dan perikanan, dan hasil industri kerajinan untuk mendukung program “Tol Laut” sehingga kapal pengangkut dari Indonesia Bagian Barat yang singgah di pelabuhan laut Atapupu sebagai Zona Pelabuhan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dapat membawa produk-produk dimaksud ke Indonesia Bagian Barat.

3. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Kemiskinan dan rendahnya produktivitas ekonomi telah berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu karena dengan pendapatan tersebut masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang baik dan kondisi kesehatan masyarakat yang masih minim, sehingga menyebabkan SDM masyarakat masih rendah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu pada tahun 2015 sebesar 60,54% menjadi 62,54% pada tahun 2019 namun masih dikategorikan rendah bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi NTT sebesar 65,23% dan Indonesia sebesar 71,92%.

Rendahnya IPM tersebut karena rendahnya akses terhadap pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masih minimnya nuansa akademik pada setiap level pendidikan. Sedangkan aspek kesehatan berkaitan dengan kekurangan prasarana dan sarana kesehatan serta kurangnya tenaga paramedis. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh rendahnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan mutu pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan

adalah mampu menggerakkan perekonomian pada berbagai sektor, bahkan menghasilkan masyarakat yang kritis sehingga keberhasilan pembangunan menjadi lebih terwujud.

Produktivitas tenaga kerja perlu untuk ditingkatkan dengan menurunkan angka pengangguran terbuka melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan dan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui program pengembangan keahlian/keterampilan baik itu bersifat *life skill* maupun pelatihan berbasis kompetensi (IT) dan berbasis vokasi untuk kemampuan daya saing masyarakat yang lebih baik.

Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga serta minimnya penyelenggaraan *event-event* telah memberikan dampak kepada masyarakat terutama para pemuda yakni kurang optimalnya pengembangan potensi. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga serta penyelenggaraan *event-event* bila dikelola dengan tepat sekaligus akan dapat mengurangi permasalahan sosial di Kabupaten Belu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengurangan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (fisik, psikis, seksual, penelantaran, penganiayaan dan pemerkosaan) merupakan suatu kebijakan untuk meningkatkan kualitas ketahanan sosial kemasyarakatan. Revitalisasi peranan lembaga adat dan kearifan lokal yang mendukung berbagai kegiatan pembangunan pedesaan (termasuk sosial kemasyarakatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup) dengan terus untuk menghidupkan lagi peranan struktur adat (*Na'I, Kapitan, Makleat, Dato*) untuk mengatur tata kehidupan sosial yang dapat mendukung pembangunan wilayah lewat berbagai kegiatan pemberdayaan.

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakin ketat, terutama dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memberikan implikasi persaingan tenaga kerja. Kabupaten Belu sebagai kota yang berada di pintu gerbang RI dan RDTL sudah selayaknya mempersiapkan kualitas tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal melalui pendidikan, baik

formal maupun informal, serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan *benchmark* yang dimiliki. Sistem informasi pekerja yang baik juga perlu menjadi perhatian bersama karena sejatinya dengan data yang baik, perencanaan, implementasi, dan evaluasi ketenagakerjaan akan lebih mudah dijalankan.

4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;

Prasarana dan sarana transportasi antar wilayah di Kabupaten Belu belum tersedia secara memadai, sehingga akses masyarakat antar kota dengan desa atau sebaliknya kurang sinergis. Hal tersebut, berakibat pada minimnya informasi pasar produk pertanian yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, maupun sebaliknya produk-produk dari sektor industri yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Padahal *Multiplier effect* dapat ditimbulkan dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi akan dapat menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu. Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah kurang optimalnya utilitas lingkungan, seperti jaringan air bersih yang belum menjangkau seluruh rumah tangga. Selain itu, minimnya jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik secara baik. Fokus pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan dalam upaya untuk peningkatan aksesibilitas daerah antara lain:

1. Penyediaan dan perbaikan jaringan jalan strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan barang dan jasa;
2. Penyediaan ruas-ruas jalan akses ke ibukota Kecamatan;
3. Pengembangan Bandara Udara Haliwen (A.A Bere Tallo) dan Pelabuhan Laut Atapupu;
4. Memperluas cakupan infrastruktur air minum untuk pelayanan air bersih di perkotaan Atambua dan pedesaan;
5. Memperluas cakupan pelayanan listrik bagi masyarakat dengan pembiayaan PLTS atau energi baru terbarukan ;

6. Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)
7. Pengembangan Perumahan layak huni dan lingkungan sehat;
8. Peningkatan jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

5. Pembangunan Kawasan Perbatasan;

Semakin meningkatnya pelintas batas *illegal* dan rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan merupakan permasalahan tersendiri bagi Kabupaten Belu di samping permasalahan-permasalahan yang kompleks lainnya. Kualitas sumber daya manusia masyarakat di daerah perbatasan masih rendah di samping sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini yang mendorong belum berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga perekonomian wilayah masih cenderung tertinggal.

Fokus pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Belu dibagi ke dalam 5 (lima) Lokasi Prioritas (Lokpri) yaitu :

1. Pengembangan kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan: Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Nanaet Duabesi, Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur;
2. Pengembangan kawasan peruntukan budidaya hortikultura, perkebunan dan peternakan: Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
3. Pengembangan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan; Kecamatan Lamaknen (Holhara Ranu Hitu) sebagai obyek wisata unggulan;
4. Pengembangan Bandara Udara A.A. Bere Tallo-Haliwen sebagai bandara udara umum (bandar udara pengumpul) dengan skala pelayanan tersier di Kecamatan Kota Atambua; serta pelabuhan laut Atapupu sebagai pelabuhan pengumpan di Kecamatan Kakuluk Mesak;
5. Pengembangan PKS N Atambua sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri pengolahan, kerajinan dan industri pengolahan jasa hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup;

Kabupaten Belu memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Selain itu kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan tidak akan mengembalikan lingkungan seperti sedia kala karena keanekaragaman hayati akan berkurang bahkan ada yang punah. Oleh karena itu, kesanggupan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup adalah hal yang penting karena kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga diperlukan komitmen bersama untuk meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan dan bila terjadi kerusakan, maka perlu pengelolaan lingkungan yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem laut masih juga terjadi yang berakibat pada penurunan produksi ikan dan kerusakan terumbu karang seperti pemboman ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir pantai.

Dewasa ini lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat karena saat ini mulai terancam oleh berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang mulai menampilkan perubahan yang signifikan seperti perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin dan cuaca yang buruk telah mengakibatkan kekeringan dan kekurangan sumber air (terjadinya *el nino* dan *el nina*) dan fenomena pemanasan global, gangguan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim ini disebabkan antara lain: (1) Deforestasi dan Degradasi Hutan: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terjadi di sektor kehutanan sebagian besar bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti

pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) akibat *illegal logging*, kebakaran, *over cutting*, perladangan berpindah dan perambahan; (2) Emisi karbon yang berasal dari sampah: pengelolaan sampah yang tidak maksimal juga telah mengakibatkan estetika lingkungan menjadi berkurang dan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat karena sampah menjadi vektor penyakit, disamping itu dapat menyebabkan terjadinya banjir maupun pencemaran terhadap tanah, udara dan air. Oleh karena itu pencegahan degradasi lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian secara serius untuk ditangani di Kabupaten Belu.

7. Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik.

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belu, masih terus untuk ditingkatkan walaupun telah ada peningkatan yang signifikan dari aspek tingkat pendidikan aparatur namun budaya kerja dan motivasi diri belum sepenuhnya menggambarkan tingkat pelayanan publik secara maksimal karena aspek politik telah mendominasi daripada aspek taktis operasional. Pelayanan publik yang kurang optimal yang diindikasikan dengan kurang transparannya arus informasi sehingga dapat menimbulkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikasi adanya praktek tersebut terjadi pada sistim perizinan maupun sistim perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan masih ada praktek lainnya yang mengindikasikan hal dimaksud.

Pelayanan publik di Kabupaten Belu belum dilakukan secara prima yang diakibatkan oleh fungsi lembaga pemerintah yang belum berperan optimal, sehubungan dengan tumpang-tindihnya tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, masih rendahnya sumber daya aparatur mengakibatkan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Padahal *good governance* juga diindikasikan dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi (Tusi) perangkat daerah urusan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk memperkuat kebijakan pembangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai salah satu bentuk interaksi antara sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan sistem inovasi produksi sektor primer (pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan) maupun sektor industrial sebagai sumber penggerak kemajuan dan modal utama kemandirian masyarakat belum dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Oleh karena itu ke depannya perlu untuk dibentuk perangkat daerah yang memfokuskan pada bidang penelitian dan pengembangan untuk peningkatan bidang pengembangan inovasi teknologi berbasis lokal maupun rekayasa dan rancang bangun berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan budaya inovasi pelayanan publik melalui *Research and Deveelopment (R & D)*.

Prioritas pencapaian sasaran utama Kabupaten Belu tahun 2024 yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,7% tahun 2020 menjadi 71,90% pada tahun 2024;
- b. Angka harapan Hidup meningkat dari 68,77% tahun 2020 menjadi 70,69% pada tahun 2024;
- c. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga konstan (ADHk) meningkat dari Rp. 19.749.794 tahun 2020 menjadi Rp. 25.186.756 pada tahun 2024;
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat dari 6,86% pada tahun 2020 menjadi 7,77% pada tahun 2024;
- e. Pengangguran Terbuka menurun dari 2,36% pada tahun 2020 menjadi 1,81% pada tahun 2024;
- f. Penduduk miskin menurun dari 10,82% pada tahun 2020 menjadi 9,13 & pada tahun 2024.

BAB. V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2022

5.1. Program Prioritas Tahun 2022

Rencana program tahun 2022 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2022, yang mempertimbangkan RPJMN, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 5.1

Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2022

| Nomor | Urusan/Program | Indikator Kinerja Tahun 2022 |
|-------------|---|--|
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | |
| 1.01 | Pendidikan | |
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya APK SMP, APM SMP, Angka Kelulusan SMP, Angka Putus Sekolah SMP, Ratio ruang kelas kategori baik terhadap ruang kelas smp |
| 2. | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Meningkatnya lembaga PAUD yang menerapkan kurikulum muatan lokal |
| 3. | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang direkomendasikan |
| 1.02 | Kesehatan | |
| 1. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Kesehatan jiwa dan penyehatan lingkungan |
| 2. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN | Persentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar |
| 3. | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan |
| 4. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Desa/Kelurahan STBM |
| 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio jaringan irigasi |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Keluarga dengan akses terhadap air minum layak |
| 3. | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan |

| | | |
|-------------|---|--|
| 4. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Air Limbah di wilayah Kabupaten |
| 5. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Menurunnya terjadi genangan >2 kali setahun |
| 6. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) |
| 7. | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan Kab/ Kota |
| 8. | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Jumlah tenaga kerja trampil yang bersertifikat |
| 9. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Dokumen Rencana Rinci |
| 1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 1. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | cakupan ketersediaan rumah layak huni |
| 2. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | cakupan ketersediaan rumah layak huni |
| 3. | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | cakupan ketersediaan rumah layak huni |
| 1.05 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | |
| 1. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| 2. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten |
| 3. | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Desa Tangguh Bencana |
| 1.06 | Sosial | |
| 1. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Meningkatnya PMKS yang diberdayakan |
| 2. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Jumlah penanganan kasus warga nrgara migran korban tindak kekerasan |
| 3. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi |
| 4. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin |
| 5. | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial |
| 6. | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Meningkatnya kualitas TMP |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | |
| 2.07 | Tenaga Kerja | |
| 1. | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Jumlah tenaga kerja yang berkompeten |
| 2. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi |
| 3. | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan |

| | | |
|-------------|---|--|
| 4. | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan |
| 2.08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 1. | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Gender " <i>Vocal point</i> " |
| 2. | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum |
| 3. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Gender " <i>Vocal point</i> " |
| 4. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Buku profil gender dan anak |
| 5. | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Jumlah desa/kelurahan layak anak |
| 6. | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum |
| 2.09 | Pangan | |
| 1. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH |
| 2. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Ketersediaan pangan utama |
| 3. | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan |
| 2.10 | Pertanahan | |
| 1. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian kasus tanah pemerintah |
| 2. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Tersedianya tanah untuk kepentingan umum |
| 3. | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Jumlah tanah ulayat |
| 4. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Tersedia data penatagunaan tanah |
| 2.11 | Lingkungan Hidup | |
| 1. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Meningkatnya Indeks kualitas air, Meningkatkan Indeks kualitas udara, |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Indeks Kualitas Tutupan Lahan |
| 3. | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Meningkatnya Indeks kualitas air, Meningkatkan Indeks kualitas udara, |
| 4. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Meningkatnya Indeks kualitas air, Meningkatkan Indeks kualitas udara, |
| 5. | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Indeks Kualitas Tutupan Lahan |
| 6. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN | Indeks Kualitas Tutupan Lahan |

| | | |
|-------------|---|---|
| | PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| 7. | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Meningkatnya Indeks kualitas air, Meningkatkan Indeks kualitas udara, |
| 8. | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Meningkatnya Indeks kualitas air, Meningkatkan Indeks kualitas udara, |
| 9. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani |
| 2.12 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| 1. | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan penerbitan KTP (%) |
| 2. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan penerbitan akta kelahiran bagi anak berusia 0-18 tahun (%) |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Tersedianya Data Kependudukan |
| 4. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Tersedianya Data Kependudukan |
| 4. | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Tersedianya Data Kependudukan |
| 2.13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 1. | PROGRAM PENATAAN DESA | Peningkatan partisipasi masyarakat |
| 2. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase BUMDES yang aktif |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Peningkatan Strata Posyandu |
| 2.14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 1. | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR) |
| 2. | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB |
| 2.15 | Perhubungan | |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum |
| 2.16 | Komunikasi dan Informatika | |
| 1. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | SPBE |
| 2. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | SPBE |
| 2.17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| 1. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Meningkatnya persentase koperasi aktif |
| 2. | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Meningkatnya persentase koperasi aktif |
| 3. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Meningkatnya persentase koperasi aktif |

| | | |
|-------------|--|---|
| 4. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Meningkatnya persentase koperasi aktif |
| 5. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Meningkatnya persentase UMKM aktif |
| 6. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Meningkatnya persentase UMKM aktif |
| 2.18 | Penanaman Modal | |
| 1. | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) |
| 2. | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) |
| 3. | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) |
| 4. | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) |
| 5. | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) |
| 2.19 | Kepemudaan dan Olahraga | |
| 1. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Peningkatan kualitas dan daya saing pemuda |
| 2. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Peningkatan kualitas dan daya saing pemuda |
| 3. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Peningkatan kualitas dan daya saing pemuda |
| 2.20 | Statistik | |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya Statistik Sektoral |
| 2.21 | Persandian | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | % Perangkat Daerah yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah |
| 2.22 | Kebudayaan | |
| 1. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah situs, benda dan Kawasan cagar yang dilestarikan |
| 2. | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Festival Budaya yang dilaksanakan |
| 3. | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Tersedianya literasi bagi masyarakat |
| 4. | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah situs, benda dan Kawasan cagar yang dilestarikan |
| 2.23 | Perpustakaan | |
| 1. | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Jumlah bahan pustaka |
| 2. | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Meningkatnya Jumlah bahan pustaka |
| 2.24 | Kearsipan | |
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi |
| 2. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi |
| 3. | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi |
| 3 | Urusan Pemerintahan Pilihan | |
| 3.25 | Kelautan dan Perikanan | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Tersedia sarpras perikanan tangkap |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya produksi ikan air tawar, Meningkatnya produksi ikan air payau |
| 3. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Meningkatnya cakupan bina kelompok perikanan |
| 3.26 | Pariwisata | |
| 1. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Meningkatnya lama kunjungan wisata |
| 2. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Meningkatnya lama kunjungan wisata |
| 3. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah hak kekayaan intelektual |
| 4. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah usaha ekonomi kreatif |
| 3.27 | Pertanian | |
| 1. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Meningkatnya produksi tanaman padi, Meningkatnya produksi tanaman jagung |
| 2. | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Meningkatnya Populasi ternak sapi, Meningkatnya Populasi ternak babi |
| 3. | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - Meningkatkan produksi tanaman padi, Meningkatnya produksi tanaman jagung |
| 4. | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - Meningkatkan produksi tanaman padi, Meningkatnya produksi tanaman jagung |
| 3.28 | Kehutanan | |
| 3.29 | Energi dan Sumber Daya mineral | |
| 3.30 | Perdagangan | |
| 1. | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Fasilitasi perijinan dan pendaftaran perusahaan |
| 2. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Meningkatnya jumlah pembangunan pasar rakyat |
| 3. | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Meningkatnya jumlah pembangunan pasar rakyat |
| 4. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Meningkatnya ekspor bersih perdagangan |
| 5. | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase meningkatnya jasa pelayanan terhadap UTP |
| 3.31 | Perindustrian | |
| 1. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Meningkatnya Cakupan Pembangunan Industri |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Tersedianya informasi industri secara lengkap |
| 3.32 | Transmigrasi | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah kawasan transmigrasi |

| | | |
|------------|--|--|
| 2. | ROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah kawasan transmigrasi |
| 4 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | |
| 4.1 | Sekretariat Daerah | |
| 1. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai SAKIP, LPPD, Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum |
| 2. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Proporsi kesesuaian program pembangunan, Proporsi pengadaan barang dan jasa |
| 4.5 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Nilai SAKIP, LPPD, Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum |
| 5 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | |
| 5.1 | Perencanaan | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase capaian kinerja program |
| 2 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD |
| 5.2 | Keuangan | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini Atas Audit BPK |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini Atas Audit BPK |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan |
| 5.3 | Kepegawaian | |
| 1 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah |
| 5.4 | Pendidikan dan Pelatihan | |
| 1 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi |
| 5.5 | Penelitian dan Pengembangan | |
| 1. | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Government Award (IGA), Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan |
| 5.6 | Pengelolaan Perbatasan Daerah | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | Peningkatan koordinasi pengelolaan perbatasan |
| 5.7 | Pengelolaan Penghubung | |
| 6 | Unsur Pengawasan | |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Kapabilitas APIP |
| 2. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kapabilitas APIP |
| 7 | Unsur Kewilayahan | |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah Kelembagaan masyarakat yang aktif |

| | | |
|------------|--|--|
| 2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kelembagaan masyarakat yang aktif |
| 3. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Kelembagaan masyarakat yang aktif |
| 8 | Unsur Pemerintahan Umum | |
| 8.1 | Kesatuan Bangsa dan politik | |
| 1 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Peningkatan partisipasi politik masyarakat |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Peningkatan stabilitas ketahanan Ekososbud dan ormas |
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Peningkatan stabilitas ketahanan Ekososbud |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah demonstrasi/unjuk rasa |

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

| No | Program | Fokus Kegiatan |
|----|---|--|
| | Non Urusan | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. |

Selanjutnya pendanaan indikatif untuk keseluruhan rencana program dan kegiatan menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2022. Pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dengan rincian terlampir dalam buku Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belu.

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022

| Kode Urusan | Perangkat Daerah | Rencana Anggaran Tahun 2022 |
|--------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Urusan Wajib Pelayan Dasar | 521,249,797,258 |
| 1 | Pendidikan | 223,330,162,016 |
| | 01 Dinas Pendidikan dan kebudayaan | 223,330,162,016 |
| 2 | Kesehatan | 215,358,759,011 |
| | 01 Dinas Kesehatan | 108,599,190,215 |
| | 02 RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD | 106,759,568,796 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 56,888,630,346 |
| | 03 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 56,888,630,346 |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 10,642,761,676 |
| | 03 Satuan Polisi Pamong Praja | 7,199,108,928 |
| | 04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3,443,652,748 |
| 6 | Sosial | 15,029,484,209 |
| | 01 Dinas Sosial | 15,029,484,209 |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 58,241,202,462 |
| 7 | Tenaga Kerja | 4,950,245,817 |
| | 01 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 4,950,245,817 |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3,193,574,722 |
| | 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3,193,574,722 |
| 11 | Lingkungan Hidup | 11,274,815,113 |
| | 01 Dinas Lingkungan Hidup | 11,274,815,113 |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Capil | 5,610,853,537 |
| | 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 5,610,853,537 |

| Kode Urusan | Perangkat Daerah | Rencana Anggaran Tahun 2022 |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4,583,625,396 |
| | 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4,583,625,396 |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7,639,856,162 |
| | 02 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | 7,639,856,162 |
| 15 | Perhubungan | 3,746,757,894 |
| | 01 Dinas Perhubungan | 3,746,757,894 |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | 3,635,710,933 |
| | 01 Dinas Komunikasi dan Informatika | 3,635,710,933 |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3,077,188,202 |
| | 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 3,077,188,202 |
| 18 | Penanaman Modal | 4,012,282,101 |
| | 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4,012,282,101 |
| 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 3,723,829,913 |
| | 01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 3,723,829,913 |
| 23 | Perpustakaan | 2,567,462,672 |
| | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2,567,462,672 |
| 3 | Urusan Pilihan | 33,103,542,734 |
| 25 | Kelautan dan Perikanan | 3,446,610,835 |
| | 01 Dinas Perikanan | 3,446,610,835 |
| 26 | Pariwisata | 3,681,327,787 |
| | 01 Dinas Pariwisata | 3,681,327,787 |

| Kode Urusan | Perangkat Daerah | Rencana Anggaran Tahun 2022 |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 27 | Pertanian | 18,792,653,866 |
| | 01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3,377,736,412 |
| | 02 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 15,414,917,454 |
| | | |
| 30 | Perdagangan | 5,182,950,246 |
| | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 5,182,950,246 |
| 4 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | 45,010,478,286 |
| 4.1 | Sekretariat Daerah | 17,939,774,982 |
| | Sekretariat Daerah | 17,939,774,982 |
| | - Bagian Pemerintahan | 1,115,586,699 |
| | - Bagian Hukum | 1,064,421,794 |
| | - Bagian Administrasi Pembangunan | 1,007,467,063 |
| | - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1,990,379,059 |
| | - Bagian Organisasi | 1,404,065,211 |
| | - Bagian Umum | 8,082,393,801 |
| | - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 832,521,379 |
| | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1,499,462,732 |
| | - Bagian Perekonomian dan SDA | 943,477,244 |
| 4.5 | Sekretariat DPRD | 27,070,703,304 |
| | 04 Sekretariat DPRD | 27,070,703,304 |
| 5 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | 206,589,322,647 |
| 1 | Perencanaan | 5,790,841,078 |
| | 01 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 5,815,841,078 |
| 2 | Keuangan | 166,705,027,494 |
| | 05Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 161,827,116,093 |
| | 12 Badan Pendapatan Daerah | 4,877,911,401 |
| 3 | Kepegawaian | 31,718,528,683 |
| | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 31,718,528,683 |

| Kode Urusan | Perangkat Daerah | Rencana Anggaran Tahun 2022 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6 | Perbatasan Daerah | 2,374,925,392 |
| | 09 Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 2,374,925,392 |
| 6 | Pengawasan | 6,626,693,142 |
| | 01 Inspektorat | 6,626,693,142 |
| 7 | Unsur Kewilayahan | 32,089,641,608 |
| | 17 Kecamatan Kota Atambua | 5,747,258,104 |
| | 18 Kecamatan Tasifeto Barat | 1,927,825,215 |
| | 19 Kecamatan Tasifeto Timur | 1,835,150,448 |
| | 20 Kecamatan Raihat | 1,72,353,841 |
| | 21 Kecamatan Lamaknen | 1,445,247,346 |
| | 22 Kecamatan Kakuluk Mesak | 2,037,231,176 |
| | 23 Kecamatan Raimanuk | 1,909,369,324 |
| | 24 Kecamatan Lasiolat | 1,364,597,088 |
| | 25 Kecamatan Atambua Selatan | 5,838,819,689 |
| | 26 Kecamatan Atambua Barat | 5,072,046,678 |
| | 27 Kecamatan Lamaknen Selatan | 1,744,247,650 |
| | 28 Kecamatan Nanaet Duabesi | 1,446,495,049 |
| 8 | Unsur Pemerintahan Umum | 3,424,094,558 |
| 8 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 3,424,094,558 |
| | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | T O T A L | 906,334,772,694 |

BAB. VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2026. Rancangan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun keempat. Secara detail arah pembangunan pada periode terakhir RPJPD.

Berlandaskan pelaksanaan , pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 merupakan puncak pembangunan daerah dengan terwujudnya visi pembangunan daerah yakni “ **BELU SEBAGAI KABUPATEN PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA 2025**” sesuai arahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada RPJMD ke-4 ini, tahapan dan prioritasnya pada pemantapan pembangunan pada semua aspek sehingga pada akhir tahun RPJMD ke 4 kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Belu terwujud sesuai dengan rencana. Indikator kinerja daerah memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang menjadi target capaian pembangunan di daerah pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu.

Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dalam bab ini disajikan dalam table Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikelompokkan berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah untuk memenuhi kinerja pada aspek : (1) Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pelayanan Umum, dan (3) Daya Saing Daerah. Gambaran pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertera pada table berikut.

Tabel 6.1
Target dan Capaian IKU RPJMD Periode ke-4

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
|----|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | indeks | 62,68 | 63,23 | 62,68 |
| 2 | Persentase Stunting | persen | 21,2 | 21 | 21,2 |
| 3 | Jaminan Kesehatan Masyarakat | persen | 85,31817 | 95 | 85,31817 |
| 4 | Peta Mutu Pendidikan | Angka | 5,12 | 5,19 | 5,12 |
| 5 | Persentase Penduduk Miskin | persen | 15,37 | 15,28 | 15,37 |
| 6 | Nilai PDRB ADHB | Miliar Rp | 4551,7 | 4952,88 | 4551,7 |
| 7 | TPT | persen | 7,42 | 6 | 7,42 |
| 8 | Indeks GINI | indeks | 0,32 | 0,342 | 0,32 |
| 9 | Keluarga dengan akses terhadap air minum layak | persen | 30,20 | 33,76 | 30,20 |
| 10 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | indeks | 72,41 | 72,35 | 72,41 |
| 11 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | indeks | 48,83 | 50,00 | 48,83 |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 88,64 | 88,73 | 88,64 |
| 13 | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan | persen | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| 14 | Persentase Desa Berkembang | persen | 56,52 | 63,76 | 56,52 |

Sumber : RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 – 2026

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Belu

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | Target | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD |
|------------|--|---|-------|--------|--|
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | |
| A | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | |
| a | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | | | | |
| a.1 | Persentase Penduduk Miskin | <i>persen</i> | 15,37 | 15,28 | 15,28 |
| a.1.1 | Meningkatnya PMKS yang diberdayakan | <i>persen</i> | 15,26 | 15,5 | 15,5 |
| a.1.2 | Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin | <i>persen</i> | 75,78 | 76 | 76 |
| | | | | | |
| B | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | |
| a | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja | | | | |
| a.1 | <i>TPT</i> | <i>persen</i> | 7,42 | 6,00 | 6,00 |
| a.1.1 | Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | <i>persen</i> | 2,4 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | |
| b | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| b.1.2 | <i>Gender Vocal Point</i> | <i>%</i> | 0 | 20 | 20 |
| | | | | | |
| c | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | | | | |
| c.1.1 | Skor PPH | <i>angka</i> | 84,5 | 84,7 | 84,7 |
| | | | | | |
| No. | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | | |
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| d | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|-------------|-------------|------------|
| d.1 | <i>Persentase Desa Berkembang</i> | <i>persen</i> | 56,52 | 63,76 | 63,76 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| d.1.1 | Persentase BUMDES yang aktif | persen | 56,52 | 65,22 | 65,22 |
| e | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | | | | |
| e.1.1 | <i>Total Fertility Rate (Rate)</i> | <i>angka</i> | 2,98 | 2,9 | 2,9 |
| C | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | |
| a | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | |
| a.1 | <i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i> | <i>indeks</i> | 62,68 | 63,23 | 63,23 |
| a.1.1 | Pengeluaran Riil per Kapita | Juta Rp | 7,479 | 7,712 | 7,712 |
| a.2 | <i>Nilai PDRB ADHB</i> | <i>Miliar Rp</i> | 4551,70 | 4952,88 | 4952,88 |
| a.3 | <i>Indeks GINI</i> | <i>indeks</i> | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
| II | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| A | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | |
| a | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | | | | |
| a.1 | <i>Peta Mutu Pendidikan</i> | <i>angka</i> | 5,12 | 5,19 | 5,19 |
| a.1.1 | APK SMP | angka | 88,4 | 89,28 | 89,28 |
| a.1.2 | APM SMP | angka | 86,88 | 87,31 | 87,31 |
| a.1.3 | Angka Kelulusan SMP | angka | 99,7 | 99,75 | 99,75 |
| a.1.4 | Angka Putus Sekolah SMP | angka | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| a.1.5 | Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP | angka | 94,39 | 94,86 | 94,86 |
| a.1.6 | Kualifikasi Guru Pendidikan S1/D4 | % | 75,55 | 80 | 80 |
| No. | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | | |
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| a.1.7 | Rata-rata Lama Sekolah | tahun | 7,35 | 7,37 | 7,37 |
| a.1.8 | Angka Harapan Sekolah | tahun | 12,27 | 12,36 | 12,36 |
| b | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | | | | |
| b.1 | <i>Jaminan Kesehatan Masyarakat</i> | <i>persen</i> | 85,32 | 95 | 95 |
| b.2 | <i>Persentase Stunting</i> | % | 21,2 | 21 | 21 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| b.2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) | angka | 14,65 | 0 | 0 |
| b.2.2 | Angka Kematian Balita (AKABA) | angka | 1,16 | 0 | 0 |
| b.2.3 | Angka Kematian Ibu (AKI) | angka | 266,43 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| b.2.4 | Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan jiwa dan penyehatan lingkungan | persen | 82 | 83 | 83 |
| b.2.5 | Persentase ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar | persen | 52,94 | 55,94 | 55,94 |
| b.2.6 | Persentase ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | persen | 71 | 72 | 72 |
| b.2.7 | Angka Harapan Hidup | tahun | 64,61 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | |
| C | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | | | | |
| c.1.1 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | persen | 40 | 40 | 40 |
| c.1.2 | Persentase Desa Tangguh Bencana | persen | 3,7 | 7,41 | 7,41 |
| | | | | | |
| B | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | |
| A | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup | | | | |
| a.1 | <i>Indeks Kualitas Lingkungan</i> | <i>indeks</i> | <i>72,66</i> | <i>72,90</i> | <i>72,90</i> |
| No. | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | | |
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| a.1.1 | Indeks Kualitas Air | angka | 58,33 | 58,67 | 58,67 |
| a.1.2 | Indeks Kualitas Udara | angka | 92,75 | 92,88 | 92,88 |
| a.1.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | angka | 58,97 | 59,27 | 59,27 |
| a.1.4 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | persen | 17,81 | 18,23 | 18,23 |
| | | | | | |
| B | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | |
| b.1.1 | Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%) | % | 4,94 | 7,41 | 7,41 |
| C | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| c.1.1 | SPBE | angka | 0 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | |
| d | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah | | | | |
| d.1.1 | Persentase UMKM Aktif | % | 76,03 | 79,82 | 79,82 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| e | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal | | | | |
| e.1.1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Miliar Rp | 469,032 | 569,032 | 569,032 |
| e.1.2 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | Rasio | 15 | 15,19 | 15,19 |
| | | | | | |
| C | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | |
| a | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | |
| a.1 | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i> | <i>indeks</i> | 88,64 | 88,73 | 88,73 |
| No. | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | | |
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| a.2 | <i>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</i> | <i>indeks</i> | 48,83 | 50 | 50 |
| a.2.1 | Nilai SAKIP | predikat/ angka | CC/51,5 | CC/52 | CC/52 |
| a.2.2 | LPPD | angka | 2,6 | 2,6500 | 2,6500 |
| a.2.3 | Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | % | 25 | 37,5 | 37,5 |
| B | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | | | | |
| b.1.1 | Maturitas SPIP | angka | 2,85 | 2,9 | 2,9 |
| C | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan | | | | |
| c.1.1 | Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD | persen | 100 | 100 | 100 |
| c.1.2 | Persentase capaian kinerja program | persen | 100 | 100 | 100 |
| D | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan | | | | |
| d.1 | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan | persen | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| d.1.1 | Opini atas Audit BPK | Opini | WTP | WTP | WTP |
| | | | | | |
| E | Kepegawaian | | | | |
| e.1.1 | Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN | % | 35 | 37,84 | 37,84 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| f. | Penelitian dan Pengembangan | | | | |
| f.1.1 | <i>Indeks Government Award (IGA)</i> | Kategori | Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif |
| No. | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | | |
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| | | Skor | 750 | 1000 | 1000 |

| | | | | | |
|------------|--|--|-------------|-------------|---------|
| f.1.2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | persen | 0 | 20 | 20 |
| III | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | |
| A | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | |
| A | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang | | | | |
| a.1 | Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak | persen | 30,20 | 31,96 | 31,96 |
| a.1.1 | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | persen | 60,6 | 61,99 | 61,99 |
| a.1.2 | Rumah Tinggal Bersanitasi Layak | persen | 37,89 | 38,83 | 38,83 |
| a.1.4 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | persen | 68,78 | 68,96 | 68,96 |
| a.1.5 | Rasio Jaringan Irigasi | angka | 16,15 | 18,53 | 18,53 |
| a.1.6 | Persentase Dokumen Rencana Rinci | persen | 0 | 0 | 0 |
| B | Urusan Pemerintah Pilihan | | | | |
| A | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | |
| a.1.1 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | Miliar Rp | 993,19 | 1067,86 | 1067,86 |
| B | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | | | | |
| b.1.1 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | Miliar Rp | 16,52 | 19,26 | 19,26 |
| b.1.2 | Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif | angka | 90 | 115 | 115 |
| C | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | |
| c.1.1 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | Miliar Rp | 627,42 | 680,63 | 680,63 |
| No. | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | | | |
| | | Satuan | 2021 | 2022 | |
| D | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | |
| d.1.1 | Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB | Miliar Rp | 32,11 | 32,65 | 32,65 |

Sumber : RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 - 2026

BAB. VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2022 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2022 ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 guna menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belu Tahun 2022.

Selain hal tersebut, RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya sangat di pengaruhi oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022, sehingga diharapkan mampu mendukung dan melanjutkan upaya menuju Visi Pembangunan Kabupaten Belu yaitu ***“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”***

BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
LAMPIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (RP) | Ket. |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------|---|---------------|---|--------|---------------------|---------------------|------|
| | | | Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 521,249,797,258 | 519,564,094,542 | |
| 1 01 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 223,330,162,016 | 240,434,279,142 | |
| 1 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | 223,330,162,016 | 240,434,279,142 | |
| 1 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | 100% | | | | | 154,674,526,016 | 153,378,594,902 | |
| 1 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terpenuhinya Hak ASN | 100% | 154,262,056,316 | 151,958,476,102 | |
| 1 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah pegawai yang digaji | ...org | | | 153,725,740,016 | 150,838,231,002 | |
| 1 01 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah pengelola keuangan daerah | | | | 536,316,300 | 1,120,245,100 | |
| 1 01 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur | 100% | - | - | |
| 1 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | | Jumlah Diklat Formal yang diikuti | 10 orang | | | - | 30,000,000 | |
| 1 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor yang memadai | 100% | 49,462,000 | 627,914,500 | |
| 1 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan | 9 jenis | | | 1,962,000 | 5,962,000 | |
| 1 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah alat/bahan kantor yang disediakan | 25 jenis | | | 5,000,000 | 105,665,000 | |
| 1 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak yang disediakan | 225 buah | | | 30,000,000 | 57,567,500 | |
| 1 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 181375 lembar | | | 2,500,000 | 25,000,000 | |
| 1 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan luar Provinsi | | | Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah | 50 kali | | | 10,000,000 | 433,720,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|---------|-----|---|------------|-----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100% | 30,933,500 | 622,500,100 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | Jumlah Kendaraan roda dua yang diadakan | 10 Unit | | | 20,000,000 | 324,100,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | Jumlah Mebel yang diadakan | 15 buah | | | 4,933,500 | 4,933,500 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | jumlah peralatan dan mesin yang diadakan | 1 Unit | | | 1,000,000 | 50,000,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Gudang arsip yang dibangun | 1 Unit | | | 0 | 199,900,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Sarana prasarana gedung yang diadakan | 6 Unit | | | 5,000,000 | 43,566,600 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 60,404,200 | 85,204,200 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Meterai yang disediakan | 600 lembar | | | 2,900,000 | 6,900,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Rekening tagihan listrik, air dan internet yang dibayar | 5 rekening | | | 20,000,000 | 70,800,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan | 13 jenis | | | 37,504,200 | 7,504,200 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 100% | 271,670,000 | 84,500,000 | | |
| | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 23 unit | | | 264,170,000 | - | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 38 Unit | | | 2,500,000 | 9,500,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi | 2 jenis | | | 5,000,000 | 75,000,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | 67,990,636,000 | 86,455,684,240 | | |
| | | | | | | | | - Meningkatnya APK SMP, APM SMP, Angka Kelulusan SMP, Angka Putus Sekolah SMP, Ratio ruang kelas kategori baik terhadap ruang kelas smp | | | 100% | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | 100% | 40,512,025,000 | 46,095,665,690 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|--|-----|-----|---|---------------------|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | SDK Tahon, SDK Fatubena, SDI Buitalu, SDI Buitae, SDK Laktutus, SDI Mean Mane, SDI Maulakak, SDI Weteat, SDI Manulor, SDK St. Theresia Atambua II, SDN Sinar Atabusi, SDK Lafaekfera, SDK Halilulik, SDK Buitasik, SDI Knabu, SDI Kewar, SDI Loojali, SDI Aihun, SDI Halibesi, SDI Wehasan, SDK Fulan Monu, SDI Hedan Fehan, SDN Haliwen, SDK Buanurak | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun | 10 ruang | | | 1,500,000,000 | 2,522,312,100 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kab. Belu | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun | 6 Unit | | | 1,000,000,000 | 1,811,483,100 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun | 3 ruang | | | 1,716,512,000 | 752,337,600 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun | 3 ruang | | | 2,618,446,000 | 758,994,600 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah apras utilitas sekolah yang dibangun | 20 unit | | | 2,500,000,000 | 4,004,754,180 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Kab. Belu | | | Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi | 17 ruang | | | 2,941,661,000 | 4,419,860,025 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kab. Belu | | | Jumlah ruang guru/kepsek/TU yang direhabilitasi | 1 ruang | | | 500,000,000 | 105,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Kab. Belu | | | Jumkag Perpustakaan sekolah | 1 unit | | | 500,000,000 | 105,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah sapras dan utilitas sekolah yang direhab | 1 Unit | | | 250,000,000 | 105,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah mebel sekolah yang diadakan | 20 paket | | | 2,000,000,000 | 2,464,137,900 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Kab. Belu | | | Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga | 137 sekolah | | | 3,000,000,000 | 3,680,722,500 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Kab. Belu | | | Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah dan AKM | 5200 orang | | | 150,000,000 | 727,031,235 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Kab. Belu | | | Jumlah Laporan Movev jumlah sekolah terakreditasi | 50 Laporan 50 SD | | | 50,000,000 | 194,250,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Kab. Belu | | | jumlah lomba yang diselenggarakan | 6 lomba | | | 50,000,000 | 498,750,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Kab. Belu | | | Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sd | 307 guru | | | 6,387,206,000 | 6,387,206,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|-----|-----|--|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Kab. Belu | | | Jumlah dewan pendidikan yang difasilitasi Jumlah guru yang mengikuti pelaksanaan sertifikasi pendidik Jumlah Guru yang mengikuti pembuatan APE bagi guru kelas awal Jumlah guru yang mengikuti tes substansi calon kepala sekolah Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah Pembinaan KKG jumlah proktor dan teknisi | 9 orang 50 orang 296 orang 50 orang 45 Orang 25 gugus 298 orang | | | 500,000,000 | 1,913,625,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Kab. Belu | | | Tersedianya data apodidik yang benar | 201 Operator sekolah | | | 100,000,000 | 105,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Kab. Belu | | | Tersedianya dana BOS Sekolah | 110 SD | | | 12,875,200,000 | 13,064,574,450 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Kab. Belu | | | Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan BOS SD dan SMP | 201 Sekolah | | | 50,000,000 | 210,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Kab. Belu | | | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun | 23 unit | | | 500,000,000 | 2,580,312,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Kab. Belu | | | Jumlah Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 441 siswa | | | 1,323,000,000 | 1,323,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100% | 19,142,660,000 | 27,970,571,550 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Kab. Belu | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun | 7 unit | | | 1,000,000,000 | 1,738,800,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kab. Belu | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun | 1 ruang | | | 150,000,000 | 157,500,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah ruang Unit Kesehatan sekolah yang dibangun | 1 ruang | | | 110,000,000 | 115,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah ruang perpustakaan yang dibangun | 1 ruang | | | 320,000,000 | 336,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Kab. Belu | | | jumlah ruang laboratorium yang dibangun | 1 ruang | | | 320,000,000 | 336,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah rumah dinas kepek/guru/penjaga sekolah yang dibangun | 1 ruang | | | 130,000,000 | 136,500,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah sapras dan utilitas sekolah yang dibangun | 3 ruang | | | 294,000,000 | 308,700,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah ruang kelas yang direhabilitasi | 38 ruang | | | 500,000,000 | 3,772,225,800 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah ruang guru sekolah yang direhabilitasi | 1 ruang | | | 75,000,000 | 78,750,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhab | 1 ruang | | | 75,000,000 | 78,750,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----------|-----|-----|---|---|-----|-----|----------------|----------------|------|
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi | 1 ruang | | | 159,827,000 | 336,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Kab. Belu | | | jumlah ruang lab yang direhab | 1 ruang | | | 75,000,000 | 78,750,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Kab. Belu | | | rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang direhab | 1 ruang | | | 100,100,000 | 105,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah sapras dan utilitasr Sekolah yang direhab | 1 ruang | | | 75,000,000 | 78,750,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Kab. Belu | | | jumlah pengadaan mebel sekolah | 1 paket | | | 5,000,000 | 136,500,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Kab. Belu | | | Jumlh pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa | 7 Paket | | | 708,933,000 | 1,000,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Kab. Belu | | | jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah dan AKM | 7500 siswa/i | | | 50,000,000 | 551,250,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Kab. Belu | | | Jumlah Laporan Monev Jumlah sekolah terakreditasi | 53 laporan 35 Sekolah | | | 5,000,000 | 194,250,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Kab. Belu | | | Jumlah Lomba yang diselenggarakan | 6 lomba | | | 5,000,000 | 991,060,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Kab. Belu | | | Jumlah Guru Kontrak SMP | 170 Org | | | 3,654,000,000 | 3,838,800,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Kab. Belu | | | Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Calon Pengawas Sekolah Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Guru Mapel Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Penguatan Kapasitas MGMP Jumlah guru yang mengikuti Olympiade Guru Nasional Jumlah guru yang mengikuti tes substansi calon kepala sekolah Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah Proktor dan teknisi kegiatan AKM Jumlah Sertifikasi Pendidik | 15 orang 80 orang 100 Orang 20 Orang 20 Orang 15 orang 50 orang 25 orang | | | 49,000,000 | 2,988,300,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajiemn Sekolah | Kab. Belu | | | Tersedianya data dapodik yang benar | 52 Operator | | | 80,000,000 | 84,000,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Kab. Belu | | | Tersedianya dana BOS SMP | 39 Sekolah | | | 10,534,000,000 | 10,634,265,750 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | Kab. Belu | | | ruang TU yang direhabilitasi | 1 ruang | | | - | 105,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 45 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | Kab. Belu | | | Ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi | 1 ruang | | | - | 105,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 46 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | Kab. Belu | | | Jumlah Mebel yang dipelihara | 1 paket | | | - | 105,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|----|---|---|---|-----|---|-------------------------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 22 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah | Kab. Belu | | | Jumlah Personil Peserta Didik Sekolah Menengah | 159 siswa | | | 667,800,000 | 667,800,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 100% | 6,244,443,000 | 10,297,939,000 | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Tukuneno Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae | | | jumlah sapras dan utilitas PAUD yang di adakan | 1 paket | | | 426,443,000 | 747,562,200 | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Kab. Belu | | | Jumlah sarana parasarana dan utilitas PAUD yang direhabilitasi | 1 ruang | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Kab. Belu | | | Jumlah satuan Pendidikan PAUD yang memenuhi standar SNP PAUD | 215 Paud | | | 1,000,000,000 | 4,138,848,000 | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Kab. Belu | | | Jumlah Guru Kontrak Paud | 7 Orang | | | 147,000,000 | 157,978,800 | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan parenting d tingkat PKG Jumlah satuan pendidikan yang terverifikasi dan tervalidasi data daodidik | 14 PKG 215 Paud | | | 100,000,000 | 275,000,000 | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Kab. Belu | | | Jumlah Lembaga Paud penerima BOP Paud | 215 Lembaga | | | 4,371,000,000 | 4,778,550,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 100% | 2,091,508,000 | 2,091,508,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Kab. Belu, Raimanuk, Mandeu | | | Jumlah sapras dan utilitas SPNF yang dibangun | 1 ruang | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Kab. Belu | | | Jumlah sapras dan utilitas SPNF yang direhab | 2 ruang | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Kab. Belu | | | Jumlah SPNF negeri swasta yang menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan | 5 LKP 10 PKBM 1 SKB | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Kab. Belu | | | Jumlah Peserta Didik Paket A yang mendapatkan BOP Jumlah Peserta Didik Paket B yang mendapatkan BOP Jumlah Peserta Didik Paket C yang mendapatkan BOP | 469 orang 728 orang 964 orang | | | 1,591,508,000 | 1,591,508,000 | | |
| 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | Meningkatnya lembaga PAUD yang menerapkan kurikulum muatan lokal | | | | | | | 100,000,000 | 250,000,000 | |
| 1 | 01 | 03 | 2.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 100% | 100,000,000 | 250,000,000 | | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|--|------|---|--|---|------|-------------|---------------|------|
| 1 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Kab. Belu | | | Jumlah Tutor yang mampu menyusun perangkat pembelajaran (RPPH,RPPM,RPP) | 50 lembaga | | | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 1 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Kab. Belu | | | Jumlah buku teks muatan lokal PAUD | 10 Paket | | | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 1 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | Persentase satuan pendidikan yang memiliki perizinan | 100% | | | | | 100,000,000 | 350,000,000 | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | Tersedianya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 100% | 100,000,000 | 350,000,000 | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Kab. Belu | | | Jumlah Paud yang dinilai kelayakannya Jumlah PNF yang dinilai kelayakannya | 10 Lembaga 2 Lembaga | | | 50,000,000 | 200,000,000 | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Kab. Belu | | | Jumlah lembaga PAUD yang dikendalikan dan diawasi perizinannya Jumlah LKP yang dikendalikan dan diawasi perizinannya Jumlah PKBM yang dikendalikan dan diawasi perizinannya Jumlah lembaga PKBM yang menjadi sasaran | 215 lembaga 5 Lembaga 10 Lembaga | | | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 415,000,000 | 2,795,114,300 | |
| 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan | 100% | | | | | 250,000,000 | 2,037,752,750 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat | 100% | 100,000,000 | 635,252,750 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Kab. Belu | | | Jumlah Festival yang diikuti | 3 Festival | | | 100,000,000 | 635,252,750 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat | 100% | 50,000,000 | 1,100,000,000 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Kab. Belu | | | jumlah penghargaan yang diberikan | 4 paket | | | 50,000,000 | 1,100,000,000 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat | 100% | 100,000,000 | 302,500,000 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.03 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Kab. Belu | | | Jumlah Pemajuan Lembaga Adat | 2 Jenis | | | 100,000,000 | 302,500,000 | |

| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|-----------|--|---|-----------------|---|------|-----------------|-----------------|--|
| 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional | 100% | | | | 15,000,000 | 201,575,000 | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Pembinaan Kesenian Masyarakat | 100% | 15,000,000 | 201,575,000 | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Kab. Belu | | Jumlah peserta pelatihan sumber daya kesenian | 50 Orang | | | 5,000,000 | 121,330,000 | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Kab. Belu | | jumlah lembaga kesenian tradisional | 276 sanggar | | | 10,000,000 | 80,245,000 | |
| 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | Meningkatnya Pembinaan Sejarah | 100% | | | | 50,000,000 | 110,000,000 | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal | 100% | 50,000,000 | 110,000,000 | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Kab. Belu | | jumlah pengelolaan data dan informasi sejarah | 1 kegiatan | | | 50,000,000 | 110,000,000 | |
| 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 100% | | | | 150,000,000 | 445,786,550 | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | Tersedianya Cagar Budaya yang ditetapkan | 100% | 150,000,000 | 445,786,550 | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Kab. Belu | | jumlah bangunan cagar budaya yang diregistrasi | 45 situs | | | 75,000,000 | 225,247,550 | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | Kab. Belu | | Jumlah bangunan cagar budaya yang ditetapkan | 10 cagar budaya | | | 75,000,000 | 220,539,000 | |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 215,358,759,011 | 210,327,047,405 | |
| 1 | 02 | | | | DINAS KESEHATAN | | | | | | | 108,599,190,215 | 84,625,601,539 | |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 27,592,653,250 | 26,806,548,751 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 32,500,000 | 106,922,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dok | | | 10,000,000 | 23,522,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Atambua | | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12 bulan | | | 10,000,000 | 23,400,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Atambua | | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12 bulan | | | 10,000,000 | 50,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|--------------------------|-----|-----|---|-------------|-----|------|----------------|----------------|------|
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dok | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 26,945,653,250 | 25,450,088,751 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah pegawai yang digaji | ...org | | | 26,352,633,250 | 24,757,068,751 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah ASN Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | org | | | 593,020,000 | 693,020,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 59,500,000 | 82,490,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis | | | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Atambua | | | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Jenis | | | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | Jenis | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 5000 Lembar | | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 9,990,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | | | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 52,500,000 | 57,048,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | | | 2,500,000 | 7,048,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 502,500,000 | 1,110,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 500,000,000 | 1,100,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 66,555,661,373 | 42,094,128,388 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 100% | 5,162,958,408 | 4,655,100,408 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembangunan Puskesmas | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan Puskesmas | unit | | | - | - | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|-----|------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | unit | | | - | - | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Puskesmas | | | Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | unit | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Puskesmas | | | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 1 unit | | | - | 100,000,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Puskesmas | | | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 unit | | | 500,000,000 | 500,000,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Puskesmas Haekesak & Weluli | | | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 2 unit | | | 500,000,000 | 50,000,000 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Puskesmas | | | Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 17 Puskesmas | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Puskesmas Weluli & Haekesak | | | Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2 Puskesmas | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Puskesmas | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 17 unit | | | 265,100,408 | 365,100,408 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengadaan Obat | 1 Paket | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 17 Puskesmas | | | Jumlah Bahan Habis Pakai | 1 Paket | | | 387,858,000 | 100,000,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12 bulan | | | 10,000,000 | 40,000,000 | APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 100% | 61,296,402,965 | 37,095,993,680 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12 bulan | | | 500,000,000 | 500,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 12 bulan | | | 3,667,007,650 | 3,667,007,650 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 12 bulan | | | 300,000,000 | 300,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 12 bulan | | | 500,000,000 | 500,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 12 bulan | | | 200,000,000 | 200,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 12 bulan | | | 1,733,079,500 | 1,733,079,500 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 12 bulan | | | 567,007,650 | 567,007,650 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 12 bulan | | | 321,355,050 | 321,355,050 | DAK NF |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---|-----|-----|---|--------------|-----|-----|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 12 bulan | | | 321,355,050 | 321,355,050 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 12 bulan | | | 284,477,650 | 284,477,650 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 12 bulan | | | 594,007,650 | 594,007,650 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 12 bulan | | | 788,007,650 | 788,007,650 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 17 Puskesmas & TFC Haliwen | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 bulan | | | 510,000,000 | 510,000,000 | DAK NF + APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12 bulan | | | 321,800,000 | 321,800,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 bulan | | | 417,780,000 | 417,780,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 bulan | | | 693,900,000 | 693,900,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 12 bulan | | | 300,000,000 | 300,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 bulan | | | 23,776,000 | 23,776,000 | APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 12 bulan | | | 5,000,000 | 150,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 bulan | | | 19,743,151,368 | 19,743,151,368 | DAK + APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 17 Puskesmas, RSUD, RS Swasta, Klinik Swasta, Dr. Praktek Mandiri | | | Jumlah Jaminan Kesehatan Masyarakat | 67.628 Jiwa | | | 25,560,125,547 | 30,676,060,800 | APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | jumlah kasus | | | 20,842,000 | 70,842,000 | APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 17 Puskesmas | | | Jumlah Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 kali | | | 10,000,000 | 1,164,578,850 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 17 Puskesmas | | | Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 bulan | | | 2,654,040,600 | 2,654,040,600 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 1 kali | | | 1,244,689,600 | 1,244,689,600 | DAK NF |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|--|---|-----|---|-------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 17 Puskesmas | | | Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 kali | | | 5,000,000 | 30,000,000 | APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 bulan | | | 10,000,000 | 150,000,000 | DAK NF |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 100% | 10,000,000 | 84,134,300 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | | | Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola | 1 sistem | | | 10,000,000 | 84,134,300 | APBD |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 86,300,000 | 258,900,000 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 17 Puskesmas & Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) | | | Laporan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 1 dok | | | 10,000,000 | 182,600,000 | DAK |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kabupaten Belu | | | Laporan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1 dok | | | 76,300,000 | 76,300,000 | APBD |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | Persentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar | | | | | | 14,215,464,592 | 15,472,013,400 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya Rekomendasi Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 100% | 10,000,000 | 145,000,000 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Kab. Belu | | | Jumlah Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 dok | | | 5,000,000 | 45,000,000 | APBD |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Kab. Belu | | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 4 kali | | | 5,000,000 | 100,000,000 | APBD |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 100% | 14,155,464,592 | 15,227,013,400 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 17 Puskesmas | | | Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 dok/orang | | | 14,130,464,592 | 15,157,013,400 | DAK + APBD |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 17 Puskesmas | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | org | | | 20,000,000 | 20,000,000 | APBD |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 17 Puskesmas | | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 bulan | | | 5,000,000 | 50,000,000 | APBD |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|-----------|--|---|----------|---|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Puskesmas | | Jumlah SDM Kesehatan Yang memiliki sertifikat kompetensi teknis | 40 orang | Tersediannya SDM Kesehatan Yang memiliki sertifikat kompetensi teknis | 40 orang | 50,000,000 | 100,000,000 | APBD |
| 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | Persentase ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan | | | | | 232,911,000 | 232,911,000 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | Tersedianya laporan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 dok | 20,924,000 | 20,924,000 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Puskesmas | | Jumlah laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 dok | | | 20,924,000 | 20,924,000 | DAK |
| 1 | 02 | 04 | 2.02 | | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 100% | 19,300,000 | 19,300,000 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Puskesmas | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | 19,300,000 | 19,300,000 | DAK BPC |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|-----------|-----|-----|---|--|-------|------------|------------|-----------|
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | Tersedianya laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 dok | 92,687,000 | 92,687,000 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 4 kali | | 92,687,000 | 92,687,000 | DAK BPOM |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Puskesmas | | | Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 4 kali | | 50,000,000 | 50,000,000 | DAK +APBD |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | Tersedianya laporan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 1 dok | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------------------|----|----|------|----|--|-----------------|-----|------|--|----------|--|------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Atambua | | | jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 12 bulan | | | 50,000,000 | 50,000,000 | DAK BPOM |
| 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 100% | | | | | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dinas Kesehatan | | | jumlah Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 bulan | | | 2,500,000 | 20,000,000 | DAK |
| RSUD ATAMBUA | | | | | | | | | | | | | 106,759,568,796 | 125,701,445,866 | |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | 106,759,568,796 | 125,701,445,866 | |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 74,804,348,796 | 73,102,414,954 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 40,004,348,796 | 38,302,414,954 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah gaji dan tunjangan | 14 bulan | | | 39,994,348,796 | 38,258,714,954 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah pengelola keuangan APBD | orang | | | 10,000,000 | 43,700,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | Terlaksananya Peningkatan pelayanan BLUD | 100% | 34,800,000,000 | 34,800,000,000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Atambua | | | Jumlah jenis belanja | jenis | | | 34,800,000,000 | 34,800,000,000 | |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 100% | | | | | 29,468,670,000 | 29,441,677,212 | |
| | | | | | | | | 100% | Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi | | | | | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|---|----|----|------|-----|--|--|--|--|---------|--|------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD) | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar | 100% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 29,468,670,000 | 29,441,677,212 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Atambua | | Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 1 paket | | | 10,000,000,000 | 10,527,338,650 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Atambua | | Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan | 1 paket | | | 14,478,670,000 | 10,000,000,000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Atambua | | Jumlah obat dan perbekalan kesehatan | 1 paket | | | 4,990,000,000 | 8,914,338,562 | | |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek | 100% | | | | 2,486,550,000 | 23,157,353,700 | | |
| | | | | | | | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek | 100% | | | | | | | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Tersedianya Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 100% | 2,486,550,000 | 23,157,353,700 | | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Atambua | | Jumlah tenaga kesehatan yang terbayarkan | orang | | | 2,486,550,000 | 23,157,353,700 | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN | | | | | | | | | | | | 56,888,630,346 | 52,141,581,643 | | |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 51,119,050,630 | 52,141,581,643 | | |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 9,038,024,630 | 9,218,935,123 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|--------------------------|-----|---|----------|---|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dok | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dok | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8,178,213,647 | 8,341,927,920 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 6,104,213,647 | 6,256,818,988 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | | | 2,074,000,000 | 2,115,480,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | orang | | | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 101,462,801 | 103,492,057 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 paket | | | 6,991,500 | 7,131,330 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | lembar | | | 21,971,301 | 22,410,727 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 2,550,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 12,000,000 | 12,240,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | Jumlah Pengadaan Mebel | 1 paket | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | 2,000,000 | 2,040,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 79,448,200 | 81,037,164 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | | | 3,200,000 | 3,264,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | | | 70,000,000 | 71,400,000 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | | 6,248,200 | 6,373,164 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 566,899,982 | 578,237,982 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|-----|---|--|-----------|-----|-----|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | | 556,899,982 | 568,037,982 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | 5,602,291,000 | 5,714,336,820 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Rasio jaringan irigasi | | | | | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Kab. Belu | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 1 dok | | | 300,000,000 | 306,000,000 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 07 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | unit | | | 400,000,000 | 408,000,000 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Kab. Belu | | | Besaran Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | meter | | | 500,000,000 | 510,000,000 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 4,402,291,000 | 4,490,336,820 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 2 dokumen | | | 200,000,000 | 204,000,000 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Kab. Belu | | | Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | meter | | | 4,152,291,000 | 4,235,336,820 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Kab. Belu | | | Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | meter | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | Keluarga dengan akses terhadap air minum layak | | | | | 4,509,117,000 | 4,599,299,340 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 4,509,117,000 | 4,599,299,340 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Kab. Belu | | | Laporan hasil Supervisi Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 1 dokumen | | | - | - | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|-----------|-----|---|--|---------|-----|------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 1 paket | | | 2,299,117,000 | 2,345,099,340 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab. Belu | | | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1 paket | | | 1,000,000,000 | 1,020,000,000 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 1 paket | | | 300,000,000 | 306,000,000 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab. Belu | | | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1 paket | | | 300,000,000 | 306,000,000 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 1 paket | | | 300,000,000 | 306,000,000 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab. Belu | | | Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1 paket | | | 300,000,000 | 306,000,000 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Kab. Belu | | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | Kab. Belu | | | Jumlah Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | kali | | | - | - | |
| 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | | | | | 600,000,000 | 612,000,000 | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 600,000,000 | 612,000,000 | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | kali | | | - | - | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1 paket | | | - | - | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kab. Belu | | | Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1 paket | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Sarana Persampahan | Kab. Belu | | | Jumlah Sarana Persampahan | 1 paket | | | 500,000,000 | 510,000,000 | |
| 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Air Limbah Diwilayah Kabupaten | | | | | 3,820,758,000 | 3,897,173,160 | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3,820,758,000 | 3,897,173,160 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----------|--|-----|--|-----------|-----|-----|--------------------|--------------------|------|
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 dok | | | 250,000,000 | 255,000,000 | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Kab. Belu | | | Jumlah laporan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 1 laporan | | | - | - | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 03 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | 1 paket | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab. Belu | | | Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | kali | | | - | - | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab. Belu | | | Jumlah Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | kali | | | - | - | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab. Belu | | | Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | kali | | | 3,470,758,000 | 3,540,173,160 | |
| 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | Menurunnya terjadi genangan>2 kali setahun | | | | | | 900,000,000 | 918,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 900,000,000 | 918,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 1 paket | | | 250,000,000 | 255,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 06 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | 1 paket | | | 250,000,000 | 255,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 1 paket | | | 250,000,000 | 255,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 08 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Belu | | | Jumlah Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan | 1 paket | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kab. Belu | | | Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 1 paket | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 10 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Kab. Belu | | | Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | 1 paket | | | - | - | |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | Meningkatnya Bangunan Ber-IMB | | | | | | 185,000,000 | 188,700,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|---|-----------|---|-----|---|---------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|------|
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | 185,000,000 | 188,700,000 | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kab. Belu | | | Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 1 paket | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 1 dok | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 1 dok | | | - | - | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 1 paket | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 1 dok | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 10 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | | | | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 03 | 10 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | | | | | | 26,267,270,000 | 26,792,615,400 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 26,267,270,000 | 26,792,615,400 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Kab. Belu | | | Jumlah Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | meter | | | 25,200,000 | 25,704,000 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 Pembangunan Jalan | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan Jalan | Km | | | 24,742,070,000 | 25,236,911,400 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 09 Rehabilitasi Jalan | Kab. Belu | | | Jumlah Rehabilitasi Jalan | Km | | | 250,000,000 | 255,000,000 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 Pembangunan Jembatan | Kab. Belu | | | Jumlah Pembangunan Jembatan | meter | | | 1,000,000,000 | 1,020,000,000 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 18 Rehabilitasi Jembatan | Kab. Belu | | | Jumlah Rehabilitasi Jembatan | meter | | | 250,000,000 | 255,000,000 | |
| 1 | 03 | 11 | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | Tenaga kerja trampil yang bersertifikat | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---------------|--|-----|---|----------|-----|-----|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Luar Provinsi | | | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | Persentase Dokumen Rencana Rinci | | | | | | 186,590,000 | 190,321,800 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | | | 70,000,000 | 71,400,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 1 dok | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 dok | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Kab. Belu | | | Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 15,000,000 | 15,300,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.02 | 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Kab. Belu | | | Jumlah koordinasi & sinkronisasi bersama Masyarakat dalam Penataan Ruang | 12 bulan | | | 15,000,000 | 15,300,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Atambua | | | Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang | 1 sistem | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 51,590,000 | 52,621,800 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 12 bulan | | | 11,590,000 | 11,821,800 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 12 bulan | | | 15,000,000 | 15,300,000 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 12 bulan | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | 2,160,000,000 | 2,203,200,000 | |
| 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | cakupan ketersediaan rumah layak huni | | | | | | 2,060,000,000 | 2,101,200,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|-----------|---------------------------------------|--|------------|---|------|---------------|---------------|------|
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 100% | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah laporan hasil Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 laporan | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | 06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Kab. Belu | | Jumlah Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | jumlah | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.02 | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Kab. Belu | | Jumlah Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | 2,000,000,000 | 2,040,000,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Kab. Belu | | Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 1 paket | | | 1,000,000,000 | 1,020,000,000 | |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Kab. Belu | | Jumlah Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 1 paket | | | 1,000,000,000 | 1,020,000,000 | |
| 1 | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | cakupan ketersediaan rumah layak huni | | | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | | | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Kab. Belu | | Jumlah laporan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 laporan | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 04 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Kab. Belu | | Jumlah kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 1 kegiatan | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Kab. Belu | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 12 bulan | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |

| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|--|---|--|------|--|-----------|--|------|---------------|---------------|
| 1 | 04 | 06 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 25,500,000 |
| 1 | 04 | 06 | 2.01 | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | | | | | | | | 25,000,000 | 25,500,000 |
| 1 | 04 | 06 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Kab. Belu | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 12 bulan | | | 25,000,000 | 25,500,000 |
| 2 | 10 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | 3,609,579,716 | 3,681,771,310 |
| 2 | 10 | 04 | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | | | 400,000,000 | 408,000,000 |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 400,000,000 | 408,000,000 |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Jumlah Dokumen Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diadakan | 1 Dok | | | 200,000,000 | 204,000,000 |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Paket | | | 200,000,000 | 204,000,000 |
| 2 | 10 | 15 | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | | | | | 2,109,579,716 | 2,151,771,310 |
| | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersusnya Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 2,109,579,716 | 2,151,771,310 |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 01 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Tersusnya Dokumen Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | 200,000,000 | 204,000,000 |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----|-----|------|--|-----------|--|------|----------------|----------------|------|
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Paket | | | 1,909,579,716 | | |
| 2 | 10 | 07 | | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | | | | | | 500,000,000 | 1,947,771,310 | |
| 2 | 10 | 07 | 2.01 | | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersusunnya Dokumen Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 500,000,000 | 510,000,000 | |
| 2 | 10 | 07 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survey dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Jumlah Dokumen Survey dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | 500,000,000 | 510,000,000 | |
| 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | | | | 600,000,000 | 612,000,000 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersusunnya Dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 600,000,000 | 612,000,000 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah | 1 Dok | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 02 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | Jumlah Dokumen Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dok | | | 350,000,000 | 357,000,000 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 1 Paket | | | 150,000,000 | 153,000,000 | |
| 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 10,642,761,676 | 10,906,492,707 | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | 7,199,108,928 | 7,391,285,323 | |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | 4,932,468,928 | 4,664,548,223 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 200,000 | 200,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|----------------------------|-----|-----|--|----------|--|------|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Atambua | | | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 kali | | | 100,000 | 100,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Atambua | | | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 kali | | | 100,000 | 100,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 4,557,265,322 | 3,998,602,323 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 4,242,181,123 | 3,660,779,823 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | | | 315,084,199 | 337,822,500 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20,000,000 | 41,671,100 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Atambua | | | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 paket | | | 20,000,000 | 41,471,100 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Luar Provinsi | | | Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 paket | | | - | 100,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Belu | | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 kali | | | - | 100,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 69,674,606 | 143,995,200 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 1 paket | | | 20,000,000 | 35,310,300 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 14,674,606 | 21,989,900 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 10,000,000 | 10,245,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 kali | | | 25,000,000 | 76,450,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | - | 7,431,800 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | - | 7,431,800 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 51,598,500 | 55,194,500 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 paket | | | 1,500,000 | 5,096,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 paket | | | 45,100,000 | 45,100,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 paket | | | 4,998,500 | 4,998,500 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|--------------|-----|--|----------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 233,730,500 | 417,453,300 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 paket | | | 200,000,000 | 379,722,800 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | 6,500,000 | 6,500,000 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | | | 22,230,500 | 22,230,500 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit | | | 5,000,000 | 9,000,000 | | |
| 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM | | | | | 1,704,140,000 | 2,164,237,100 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1,654,140,000 | 2,092,759,100 | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 12 Kecamatan | | Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 12 bulan | | | 1,457,000,000 | 1,581,089,000 | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 12 Kecamatan | | Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | kali | | | 38,000,000 | 46,309,000 | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Kecamatan | | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | kali | | | 25,000,000 | 73,021,100 | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Kecamatan | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | kali | | | 100,000,000 | 356,850,000 | | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-------------------------------------|----|----|------|----|--|----------------------------|--|-------------|--|---------|--|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | kali | | | 10,000,000 | 11,350,000 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Belu | | | Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 paket | | | 24,140,000 | 24,140,000 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 100% | 50,000,000 | 71,478,000 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | kali | | | 50,000,000 | 71,478,000 | |
| 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 100% | | | | | 562,500,000 | 562,500,000 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 547,300,000 | 547,300,000 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Kecamatan | | | Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | kali | | | 547,300,000 | 547,300,000 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | | | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | kali | Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 100% | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | 3,443,652,748 | 3,515,207,384 | |

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|-----|-----|------|---|--|--|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 05 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | | | |
| | | | | | 100% | | | | | 2,316,398,917 | 2,365,408,477 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 30,000,000 | 30,600,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan | 104 dokumen | 30,000,000 | 30,600,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 1,932,807,817 | 1,974,145,555 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah ASN yang Digaji | 18 orang | 1,630,746,317 | 1,671,514,975 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | jumlah pengelola keuangan skpd jumlah tenaga honororer yang dibayar | 5 orang 4 orang | 302,061,500 | 308,102,730 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | - | - | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 4 orang | - | - | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 44,407,400 | 45,295,548 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan | 6 jenis | 3,747,000 | 3,821,940 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 35 jenis | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | jumlahdokumen yang digandakan jumlah dokumen yang dicetak | 16168 lembar 54 buku | 5,660,400 | 5,773,608 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | jumlah dokumen hasil rapat koordinasi yang dihasilkan | 22 dokumen | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 4 unit | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 28,224,600 | 28,789,092 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | jumlah meterai yang dibeli jumlah surat dinas yang dikirim | 375 lembar 25 kali | 2,500,000 | 2,550,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayar | 3 rek | 21,000,000 | 21,420,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------------------|----|----|------|-----|--|-----------|---|---|----------------------|-----|-----|-----------------------|----------------------|------|
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | jumlah peralatan kebersihan yang diadakan jumlah peralatan kerja yang dipelihara | 27 jenis 10 jenis | | | 4,724,600 | 4,819,092 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 270,959,100 | 276,378,282 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 24 unit | | | 268,459,100 | 273,828,282 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | jumlah perlatan kerja yang diperbaiki | 10 unit | | | 2,500,000 | 2,550,000 | |
| 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial | | | | | 1,127,253,831 | 1,149,798,908 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | 40,000,000 | 40,800,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | jumlah dokumen yang dihasilkan | 1 dok | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kab. Belu | | jumlah penyebaran informasi pencegahan dan kesiapsiagaan; jumlah sosialisasi undang - undang penanggulangan bencana; jumlah tenaga honorer yang dibayar | 1 kali | | | 30,000,000 | 30,600,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | 360,000,000 | 367,200,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah dok yang dihasilkan | 1 dok | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jum;ah simulasi pengurangan resiko bencana | 1 kali | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | jumlah makanan dan minuman yang di sediakan | 12 bulan | | | 200,000,000 | 204,000,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | jumlah sarana prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi jumlah tenaga honorer yang dibayar | 1 paket 2 orang | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | 727,253,831 | 741,798,908 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Kab. Belu | | Menurunkan resiko penularan penyakit Covid-19 | 12 Bulan | | | 500,000,000 | 510,000,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | jumlah pengadaan logistik bagi orban bencana jumlah tenaga honorer yang dibayar | 16 jenis 3 orang | | | 227,253,831 | 231,798,908 | |
| DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | 15,029,484,209 | 5,754,693,645 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | |
|-----|----|----|------|-----|--|---|---|--|-----------------------|-----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 130,000,000 | 151,806,060 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | Jumlah Mebel yang diadakan | 150 buah | | | | 5,000,000 | - | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Mesin Yang disediakan | 17 buah | | | | 25,000,000 | 151,806,060 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Yang Disediakan | 1 Unit | | | | 100,000,000 | - | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 46,500,000 | 84,137,790 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Materai Yang disediakan Jumlah Paket Pengiriman | 210 lembar 5 Paket | | | | 3,000,000 | 3,300,000 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah rekening yang Dibayar | 3 Rekening | | | | 28,500,000 | 31,350,000 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang disediakan Jumlah Tenaga Kontrak | 8 Jenis 2 Orang | | | | 15,000,000 | 49,487,790 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 156,500,000 | 220,329,670 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | 17 Unit | | | | 150,000,000 | 195,798,570 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan Kerja Yang dipelihara | 15 unit | | | | 1,500,000 | 4,125,000 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara | 2 Unit | | | | 5,000,000 | 20,406,100 | | |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | | | | | | | 95,081,500 | 498,964,950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.01 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | | | | Terlaksananya pemberdayaan Kelompok KAT | 100% | 10,000,000 | 38,920,200 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Kab. Belu, Lamaknen, Maudemu Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Nanaeoe | | Jumlah Kelompok KAT | 117 KK | | | | 10,000,000 | 38,920,200 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 5,000,000 | 20,120,100 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Kab. Belu | | Jumlah Rapat Koordinasi | 1 Kali | | | | 5,000,000 | 20,120,100 | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|---|--|------|------------------------------------|--|------|------------|-------------|-------------|--|
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 80,081,500 | 439,924,650 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Peserta Sosialisasi SLRT | 30 Orang | | 19,081,500 | 20,989,650 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Potensi TKSK | 93 Orang | | 50,000,000 | 376,308,900 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Lamaknen, Makir Kab. Belu, Tasifeto Timur, Manliten Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Debululik | | | Jumlah Pertemuan Yang dilaksanakan | 4 Kali | | 10,000,000 | 42,615,100 | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Kab. Belu | | | Jumlah Peserta Rapat | 10 Orang | | 1,000,000 | 11,000 | | |
| 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | MENINGKATNYA PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 100% | | | | 3,600,000 | 3,960,000 | | |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | | | | 100% | | 3,600,000 | 3,960,000 | |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Kab. Belu | | | jumlah migran yang di pulangkan | 12 orang | | 3,600,000 | 3,960,000 | | |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) | 100% | | | | | 238,155,700 | 359,218,750 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|-----------|---|--|--------------|--|------|----------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 100% | | 238,155,700 | 359,218,750 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan | Kab. Belu | | Jumlah Odha, Anak Terlantar dan Lansia Yang dilayani | 250 Orang | | | 110,535,000 | 121,588,500 | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Kab. Belu | | Jumlah Alat Bantu | 50 Unit | | | 10,000,000 | 62,359,000 | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kab. Belu | | Jumlah Peserta Kursus | 100 Orang | | | 77,520,700 | 131,161,250 | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Kab. Belu | | Jumlah Layanan Rujukan | 15 Orang | | | 40,100,000 | 44,110,000 | | |
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | Persentase keluarga miskin yang memperoleh layanan Jaminan Sosial | 100% | | | | 11,424,266,000 | 1,430,120,990 | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 11,424,266,000 | 1,430,120,990 | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Kegiatan Pendataan | 2 Kali | | | 100,000,000 | 434,145,350 | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi | 2 Kali | | | 50,000,000 | 478,402,760 | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Kab. Belu | | Jumlah Kelompok PKH dan JPS | 12 Kecamatan | | | 11,113,600,000 | 340,840,280 | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kab. Belu | | Jumlah Kelompok Pengembangan Ekonomi | 299 Kelompok | | | 160,666,000 | 176,732,600 | | |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) | 100% | | | | 115,000,000 | 341,069,300 | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 100% | 40,000,000 | 76,395,000 | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | Kab. Belu | | jumlah yang mendapat makanan | 500 orang | | | 20,000,000 | 26,895,000 | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | Kab. Belu | | Jumlah Sandang Yang disediakan | 200 buah | | | 20,000,000 | 49,500,000 | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 100% | 75,000,000 | 264,674,300 | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kab. Belu | | jumlah korban bencana | 200 kk | | | 75,000,000 | 264,674,300 | | |
| 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 100% | | | | 10,000,000 | 25,851,540 | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--|----|----|------|---|----------------------------|-----|-----|--|-----------|---|------|----------------|----------------|------|
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 100% | 10,000,000 | 25,851,540 | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah TMP Yang dipelihara | 1 unit | | | 10,000,000 | 25,851,540 | |
| URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | 58,241,202,462 | 70,889,007,148 | |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | 4,950,245,817 | 5,118,900,639 | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR NAKRETRANS | | | | | | | | 4,950,245,817 | 5,118,900,639 | |
| 2 | 07 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | 4,290,633,129 | 4,428,686,664 | |
| 2 | 07 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | 3,291,355,595 | 3,217,520,714 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2,942,231,696 | 2,714,400,714 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | 12 bulan | | | 2,850,491,696 | 2,622,660,714 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah pengelola keuangan OPD | 7 orang | | | 91,740,000 | 91,740,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 80,080,983 | 202,250,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah komponen instalasi listrik | 4 jenis | | | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Alat Tulis kantor dan bahan komputer yang dibeli | 32 jenis | | | 27,500,000 | 27,500,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 2 jenis | | | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 400 kotak | | | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah perjalanan dinas luar daerah | 30 kali | | | 27,830,983 | 150,000,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 24,842,916 | 56,670,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|---------|---|-------------|---|------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--|
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 1 unit | | | 24,842,916 | 37,750,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 2 unit | | | - | 18,920,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 41,250,000 | 41,250,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah materai yang dibeli dan paket pengiriman | 2 jenis | | | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | 3 rekening | | | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang diadakan | 20 jenis | | | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 202,950,000 | 202,950,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 12 unit | | | 178,200,000 | 178,200,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 3 jenis | | | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | | | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 2 | 07 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | PERSENTASE PERENCANAAN TENAGA KERJA | 100% | | | | | 89,848,000 | 89,848,000 | |
| 2 | 07 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | Terlaksananya kegiatan perencanaan tenaga kerja | 100% | 89,848,000 | 89,848,000 | |
| 2 | 07 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Atambua | | | Jumlah kegiatan perencanaan tenaga kerja | 1 jenis | | | 89,848,000 | 89,848,000 | |
| 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome) | 100% | | | | | 644,338,034 | 800,000,000 | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | Terlaksananya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi | 100% | 644,338,034 | 800,000,000 | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Atambua | | | Jumlah peserta kegiatan pelatihan berbasis kompetensi | 70 orang | | | 644,338,034 | 800,000,000 | |
| 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota (IKK Outcome) | 100% | | | | | 44,549,000 | 129,699,000 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya koordinasi penempatan tenaga kerja | 100% | 44,549,000 | 44,549,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----|---|------|--|------------|--|------|-------------|-------------|------------|
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi penempatan tenaga kerja | 4 kali | | | 44,549,000 | 44,549,000 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 03 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota (IKK Outcome) | 100% | | | | | 56,110,000 | 29,040,000 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.04 | | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya informasi pasar kerja | 100% | 56,110,000 | 56,110,000 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.04 | 01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | Jumlah kegiatan perlindungan | 4 kali | | | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.04 | 02 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | Jumlah koordinasi pelaksanaan PMI yang bermasalah | 4 kali | | | 23,110,000 | 23,110,000 | |
| 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome) | 100% | | | | | 164,432,500 | 191,618,950 | |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | 78,242,700 | 78,242,700 |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | Jumlah koordinasi kegiatan pengesahan perjanjian kerja | 24 kali | | | 29,747,850 | 29,747,850 | |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 02 | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | | | | Jumlah perjanjian kerjasama yang terdaftar di Dinas Nakertrans | 2 kali | | | 19,725,750 | 19,725,750 | |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguapahan | | | | Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial serta jaminan sosial tenaga kerja | 2 kegiatan | | | 28,769,100 | 28,769,100 | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 86,189,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,376,250 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|---|----|----|------|----|--|-----|--|------|--|------------|--|------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Jumlah kegiatan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan | 1 kali | | | 36,189,800 | 36,189,800 | | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan | 30 kasus | | | 50,000,000 | 77,186,450 | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | 659,612,688 | 690,213,975 | | |
| 3 | 32 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | MENINGKATNYA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 100% | | | | | 559,612,688 | 571,505,000 | | |
| 3 | 32 | 02 | 2.01 | | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | | | | Tersedianya dokumen RSKP | 100% | 559,612,688 | 571,505,000 | | |
| 3 | 32 | 02 | 2.01 | 01 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | | Jumlah dokumen RSKP yang diadakan | 1 dokumen | | | 559,612,688 | 571,505,000 | | |
| 3 | 32 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 100% | | | | | 100,000,000 | 118,708,975 | | |
| 3 | 32 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | | | | | | Terlaksananya penguatan kelompok transmigrasi lokal | 100% | 100,000,000 | 118,708,975 | | |
| 3 | 32 | 04 | 2.01 | 02 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | Jumlah penguatan kelompok transmigrasi lokal | 2 kelompok | | | 100,000,000 | 118,708,975 | | |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | 3,193,574,722 | 5,979,512,538 | | |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | 3,193,574,722 | 5,979,512,538 | | |
| 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | | 2,745,305,722 | 4,214,512,538 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 10,000,000 | 215,000,000 | | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|----------------------------|-----|-----|---|-------------|--|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 6 dokumen | | | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | | | | | | 5,000,000 | 200,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2,587,805,722 | 1,947,012,538 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 2,268,805,722 | 1,797,012,538 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | | Jumlah Pengelola APBD dan Tenaga Kontrak | 15 orang | | | 319,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 2,500,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Kecamatan | | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | kali | | | 2,500,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 21,500,000 | 148,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 2,500,000 | 18,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 6,500,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | | | | | 10,000,000 | 100,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 4,000,000 | 1,630,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 unit | | | - | 40,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | 1,500,000 | 80,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit | | | - | 1,500,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 paket | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 39,500,000 | 64,500,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1530 lembar | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 rek | | | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | | 12,000,000 | 12,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|--------------|--|------|--|---|------|-------------|-------------|------|
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 80,000,000 | 160,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Dinas Operasional atau Lapangan | | | 75,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender | 100% | | | | 115,638,185 | 370,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 100% | 10,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Atambua | | | Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | kali | | 5,000,000 | 100,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | kali | | 5,000,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 100% | 5,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Atambua | | | Jumlah kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 1 kali | | 5,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 100% | 100,638,185 | 195,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 90,638,185 | 125,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|----|---|-----------|--|------|---|--------|---|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | kali | | | 5,000,000 | 10,000,000 | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | kali | | | 5,000,000 | 60,000,000 | | |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 100% | | | | | 297,630,815 | 590,000,000 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | 5,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 kali | | | 5,000,000 | 150,000,000 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | 292,630,815 | 440,000,000 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan | 1 kali | | | 290,130,815 | 415,000,000 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan | 1 kali | | | 2,500,000 | 25,000,000 | | |
| 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga | 100% | | | | | | 12,500,000 | 65,000,000 | |

| | (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|-----|----|------|-----|--|-----------|--|---|-----------|--|------|------------|-------------|------|
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga | 100% | 2,500,000 | 45,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga | 1 kali | | | 2,500,000 | 45,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | 100% | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | 1 lembaga | | | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | MENINGKATNYA PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 100% | | | | 5,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Tersedianya sistem Data Gender dan Anak | 100% | | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | Jumlah sistem Data Gender dan Anak | 1 sistem | | | 5,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | Persentase kampung layak anak | 100% | | | | 10,000,000 | 500,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% | | 200,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 1 paket | | | 2,500,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak | 1 paket | | | 2,500,000 | 50,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|------------------------------|----|----|------|---|---|-----------|---|------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% | | 5,000,000 | 300,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 1 paket | | 2,500,000 | 150,000,000 | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 1 paket | | 2,500,000 | 150,000,000 | | |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani | 100% | | | | | 7,500,000 | 90,000,000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 5,000,000 | 70,000,000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak | 1 paket | | 2,500,000 | 50,000,000 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak | kali | | 2,500,000 | 20,000,000 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 100% | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | kali | | 2,500,000 | 20,000,000 | | |
| DINAS LINGKUNGAN HDUP | | | | | | | | | | | | 11,274,815,113 | 11,500,311,415 | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | 11,274,815,113 | 11,500,311,415 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|---|---|--|------|--|------------|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 2 | 11 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 6,202,800,685 | 6,326,856,699 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 159,048,440 | 162,229,409 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah dokumen yang disusun | 6 dokumen | | | 37,500,000 | 38,250,000 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Atambua | | Jumlah laporan yang disusun | 5 dokumen | | | 42,527,940 | 43,378,499 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | jumlah dokumen IKPLHD, IKLH dan DDDT yang disusun | 3 dokumen | | | 79,020,500 | 80,600,910 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 5,710,467,945 | 5,824,677,304 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 12 bulan | | | 5,040,837,945 | 5,166,858,894 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah pengelola keuangan dan jumlah tenaga kontrak | 38 orang | | | 669,630,000 | 683,022,600 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | - | - | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal | 9 orang | | | - | - | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 30,373,500 | 30,980,970 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah peralatan dan komponen listrik yang dibeli | 8 jenis | | | 5,373,500 | 5,480,970 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan | 50 kali | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 71,979,200 | 73,418,784 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | jumlah benda pos yang dibeli jumlah paket pengiriman | 412 lembar | | | 2,500,000 | 2,550,000 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah rekening yang dibayar | 5 rekening | | | 58,500,000 | 59,670,000 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah peralatan kerja diperbaiki | 22 unit | | | 5,979,200 | 6,098,784 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli | 12 jenis | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |

| | (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|-----|----|------|-----|--|-----------|-----|---|--------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|------|
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 230,931,600 | 235,550,232 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjutan | Atambua | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 18 unit | | | 150,931,600 | 153,950,232 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Atambua | | Jumlah kendaraan alat berat yang dipelihara | 2 unit | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 3 unit | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | Meningkatnya Indeks kualitas air, Meningkatkan Indeks kualitas udara, | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.03 | | Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.03 | 01 | Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | Persentase kenaikan Nilai IKLH | 100% | | | 60,000,000 | 61,200,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 30,000,000 | 30,600,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kab. Belu | | jumlah parameter yang digunakan Jumlah pemantauan yang dilakukan jumlah sampel yang digunakan | 15 parameter 2 kali 190 sampel | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah sarpras laboratorium LH yang diadakan | 11 jenis | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kab. Belu | | Jumlah kelompok masyarakat yang dibina | 6 kelompok | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 02 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kab. Belu | | Jumlah pengawasan terhadap IPAL Rumah Sakit, Puskesmas & Poliklinik | 4 kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----------------------------------|---|------|---|-------------------------|-----|-----|-------------|-------------|------|
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Kab. Belu | | | Jumlah luasan tutupan lahan mangrove yang direhabilitasi | 3 Ha | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | Presentase kenaikan luasan RTH | 100% | | | | | 134,425,000 | 137,113,500 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | 134,425,000 | 137,113,500 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab. Belu | | | Jumlah peta sempadan sungai dan RTH yang dibuat | 6 sheet | | | 15,000,000 | 15,300,000 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Tialai | | | terbangunnya sekat bakar manual dan jalur hijau | 750 meter | | | 69,425,000 | 70,813,500 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Kab. Belu | | | Jumlah anakan yang diadakan dan kelompok yang dibina | 3 kelompok 28700 anakan | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan | 100% | | | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | | | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kab. Belu | | | Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang diawasi | 12 usaha/keg | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | Presentase usaha/ kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH | 100% | | | | | 22,500,000 | 22,950,000 | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 22,500,000 | 22,950,000 | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kab. Belu | | | Jumlah identifikasi dan pendataan yang dilakukan jumlah izin lingkungan usaha/kegiatan yang diterbitkan | 12 kali 150 usaha | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kab. Belu | | | Jumlah ASN yang mengikuti diklat PPLHD dan PPNS | 3 orang | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 300 usaha | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|-----------|-----|--|--|-------------|-----|------|-------------------|-------------------|--|
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kab. Belu | | | jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 6 usaha/keg | | | 2,500,000 | 2,550,000 | |
| 2 | 11 | 07 | | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 07 | 2.02 | | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 07 | 2.02 | 01 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kab. Belu | | | Jumlah kader lingkungan/masyarakat hukum adat yang di bina | 15 orang | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup | 100% | | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Belu | | | Jumlah sosialisasi yang dilakukan | 1 kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan HUT lingkungan hidup yang dilaksanakan | 1 kegiatan | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye | 3 kegiatan | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | Persentase perolehan penghargaan bidang LH | 100% | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Belu | | | Jumlah penilaian adipura, kalpataru dan adiwiyata | 1 kegiatan | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |

| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|--|-----------|--|------|--|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 11 | 10 | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/kerusakan LH | 100% | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kasus/sengketa lingkungan yang diselesaikan | 40 kasus | | | 10,000,000 | 10,200,000 |
| 2 | 11 | 11 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Presentase pengurangan sampah yang masuk ke TPA | 100% | | | | | 4,790,089,428 | 4,885,891,217 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | | | | | 4,790,089,428 | 4,885,891,217 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah pakiaian kerja satgas kebersihan yang diadakan Jumlah satgas kebersihan | 215 pasang 132 orang | | | 4,780,089,428 | 4,875,691,217 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kab. Belu | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti bimtek | 50 orang | | | 10,000,000 | 10,200,000 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | 5,610,853,537 | 5,614,122,915 | |
| 2 | 12 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | 5,610,853,537 | 5,614,122,915 |
| 2 | 12 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 2,367,901,537 | 2,106,122,915 |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | | 2,211,237,537 | 1,752,622,915 |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 2,208,737,537 | 1,717,622,915 |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | | | 2,500,000 | 35,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | | 63,887,000 | 220,500,000 |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|----------------------------|--------------------------------|-------------|--|----------|--|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 paket | | | 1,387,000 | 3,500,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 25,000,000 | 70,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 11,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | | | 25,000,000 | 116,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 34,344,500 | 58,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | | | 2,500,000 | 6,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 rek | | | 29,344,500 | 48,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jenis | | | 2,500,000 | 4,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 58,432,500 | 75,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit | | | 53,432,500 | 54,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | 2,500,000 | 11,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | 1 unit | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | Cakupan Kepemilikan KTP | 100% | | | | | 1,223,006,500 | 1,275,000,000 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100% | 503,356,000 | 534,000,000 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 bulan | | | 103,356,000 | 104,000,000 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Atambua | | | Jumlah Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 12 bulan | | | 400,000,000 | 430,000,000 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk | 100% | 719,650,500 | 741,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|----|--|---------|---|------|---|----------|---|------|---------------|---------------|------|--|
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | 02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 719,650,500 | 741,000,000 | | |
| 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran Anak | 100% | | | | | 614,670,000 | 628,000,000 | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100% | 400,000,000 | 413,000,000 | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | 400,000,000 | 413,000,000 | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 214,670,000 | 215,000,000 | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 bulan | | | 214,670,000 | 215,000,000 | | |
| 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | Cakupan OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,305,926,000 | 1,505,000,000 | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|---|----|----|------|-----|---|-----------|--|---|-----------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | Tersedianya Data Kependudukan | 100% | | 90,836,000 | 91,000,000 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | Jumlah kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 12 bulan | | | 90,836,000 | 91,000,000 | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | | 988,056,900 | 1,186,000,000 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Belu | | Jumlah dokumen Informasi Kependudukan | 1 dokumen | | | 876,574,400 | 1,074,000,000 | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Belu | | Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 kali | | | 111,482,500 | 112,000,000 | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | | 227,033,100 | 228,000,000 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Belu | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 4 kali | | | 227,033,100 | 228,000,000 | | |
| 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | ketersediaan data kependudukan skala kabupaten | 100% | | | | | 99,349,500 | 100,000,000 | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 100% | | 99,349,500 | 100,000,000 | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah kegiatan pendataan Kependudukan | 1 kali | | | 99,349,500 | 100,000,000 | | |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | 4,583,625,396 | 6,174,973,746 | | |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | 4,583,625,396 | 6,174,973,746 | |
| 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 3,214,410,679 | 3,288,304,746 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | | 2,809,481,979 | 2,426,905,696 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|-----|-----|--|----------|--|-------|---------------|---------------|------|
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 2,509,481,979 | 2,192,344,596 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | | | 300,000,000 | 234,561,100 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 20,000,000 | 100,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 kali | | | 20,000,000 | 100,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 99,029,650 | 280,500,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 paket | | | 5,147,550 | 5,500,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 19,189,600 | 65,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 1 paket | | | 23,585,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 18,607,500 | 25,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Atambua | | | Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | | | 30,000,000 | 150,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 52,900,000 | 66,400,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 paket | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 rek | | | 26,400,000 | 26,400,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | | 24,000,000 | 35,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 212,999,050 | 264,499,050 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | | 204,499,050 | 254,499,050 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | | | 3,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | | | | | | Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 4 dok | | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 20,000,000 | 5,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---|---|------|--|---------|--|------|-------------|-------------|------|
| 2 | 13 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 4 kali | | | 20,000,000 | 26,400,000 | |
| 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | MENINGKATNYA PENATAAN DESA | 100% | | | | | 419,028,517 | 35,000,000 | |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | | Terlaksananya kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 100% | 419,028,517 | 264,499,050 | |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Kab. Belu | | | Jumlah Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | desa | | | 419,028,517 | 254,499,050 | |
| 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | | | | | 378,257,200 | 596,862,000 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 378,257,200 | 596,862,000 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 69 desa | | | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | 69 desa | | | 39,995,500 | 39,995,500 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan pembinaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | kali | | | 5,000,000 | 44,274,800 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 06 | Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 69 desa | | | 10,000,000 | 82,150,000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 69 desa | | | 153,261,700 | 153,261,700 | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 69 desa | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | desa | | | 10,000,000 | 35,000,000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 18 | Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 69 desa | | | 50,000,000 | 117,180,000 | |

| (1) | | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|----|-----|--|-----------|------|---------|--|----------|---------------|---------------|------|
| 2 | 13 | 5 | | | | Persentase kinerja kelembagaan masyarakat | 100% | | | | | 571,929,000 | 589,807,000 | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat | 100% | 571,929,000 | 589,807,000 | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan | | 412,207,000 | 412,207,000 | |
| | | | | | | | | | 69 desa | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 5 | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 69 desa | 57,122,000 | 75,000,000 | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 69 kali | 102,600,000 | 102,600,000 | |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | | | | | | | | | | | | 7,639,856,162 | 7,661,681,798 | |
| 2 | 14 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 7,639,856,162 | 7,661,681,798 | |
| 2 | 14 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | 3,205,444,112 | 2,768,694,398 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2,511,241,362 | 1,769,988,148 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan | 2,397,315,162 | 1,606,061,948 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------------------------|---|------|---|---------|---|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | orang | | | 113,926,200 | 163,926,200 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 110,000,000 | 284,720,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 kali | | | 100,000,000 | 237,000,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 kali | | | 10,000,000 | 47,720,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 45,000,000 | 168,328,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 20,000,000 | 34,408,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 kali | | | 25,000,000 | 133,920,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 154,644,250 | 158,244,250 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 kali | | | 3,000,000 | 6,600,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 rek | | | 79,560,000 | 79,560,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 paket | | | 72,084,250 | 72,084,250 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 384,558,500 | 387,414,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit | | | 353,558,500 | 353,558,500 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Atambua | | | Jumlah Pemeliharaan Mebel | unit | | | 5,000,000 | 1,000,500 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | | | 5,000,000 | 11,855,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | | | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) | 100% | | | | | 205,000,000 | 180,000,600 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 105,000,000 | 180,000,200 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------------------------|---|-------------|---|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | 1 paket | | | 25,000,000 | 100 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 dokumen | | | 55,000,000 | 180,000,000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 14 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 1 kali | | | 25,000,000 | 100 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah laporan Pengolahan Data Kependudukan | 1 laporan | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah laporan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | 1 laporan | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 10 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun | 100% | | | | | 3,134,489,550 | 3,696,954,800 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100% | | 398,073,100 | 438,073,100 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1 paket | | | 155,673,100 | 155,673,100 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 kali | | | 40,000,000 | 40,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------------------------|-----|-----|---|----------|---|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 kali | | | 202,400,000 | 242,400,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 100% | 2,045,971,050 | 2,470,709,500 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 1 kali | | | 40,432,000 | 432,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 1 paket | | | 1,285,177,500 | 1,385,177,500 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | orang | | | 194,761,550 | 559,500,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | orang | | | 525,600,000 | 525,600,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 251,676,200 | 251,676,200 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 paket | | | 45,217,200 | 45,217,200 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Tersedianya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1 paket | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 12 bulan | | | 106,459,000 | 106,459,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|-----------------------------|----------------|--|----------|---|------|------|---------------|---------------|--|
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan | 100% | | 438,769,200 | 536,496,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | Jumlah Kampung KB | desa | | | | 242,400,000 | 242,400,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | Jumlah Kampung KB | desa | | | | 196,369,200 | 294,096,000 | |
| 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | 100% | | | | | 1,094,922,500 | 1,016,032,000 | |
| | | | | | | | Unmeet need KB | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | | 982,372,500 | 903,482,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | kelompok | | | | 59,050,000 | 59,050,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 kali | | | | 428,889,500 | 349,999,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | 21,930,000 | 21,930,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----------------------------|-----|-----|--|----------|--|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 12 bulan | | | 242,400,000 | 242,400,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 kali | | | 210,770,000 | 210,770,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 1 kali | | | 19,333,000 | 19,333,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 112,550,000 | 112,550,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 11,750,000 | 11,750,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kabupaten Belu 12 Kecamatan | | | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | mitra | | | 100,800,000 | 100,800,000 | |

| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-------------------|----|----|---|---|---|-------------------------------|-----|--|-----------------------|-----|---------------|---------------|------|
| DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | 3,746,757,894 | 4,593,003,333 | |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | 3,746,757,894 | 4,593,003,333 | |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 3,359,296,690 | 4,197,792,905 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 2,925,797,940 | 3,755,624,180 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah Gaji ASN yang disediakan | 12 bulan | | 2,227,933,592 | 2,283,631,932 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | | | | 687,864,348 | 701,621,635 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan | 65 jenis | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 72,000,000 | 73,440,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan | 1 paket | | 7,000,000 | 7,140,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan | 5 unit | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | Jumlah makanan dan minuman tamu | 1 paket | | 15,000,000 | 15,300,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Atambua | | *Jumlah Buku/Dokumen yang dicetak /dijilid,Jumlah dokumen yang digandakan * | 5249 buku / lembar | | 15,000,000 | 15,300,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | Jumlah dokumen Hasil rapat koordinasi yang dihasilkan | 35 dokumen | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 1,000,000 | 1,020,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah gedung alat uji yang diadakan | 1 paket | | 1,000,000 | 1,020,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 32,638,600 | 33,291,372 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Benda Pos yang dibeli, Jumlah Paket pengiriman | 1970 lembar | | 2,200,000 | 2,244,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah rekening yang dibayar | 3 rekening | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | 5,438,600 | 5,547,372 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 317,860,150 | 324,217,353 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---------------|-----|---|--|---------|-----|-----|--------------------|--------------------|------|
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | | 312,860,150 | 319,117,353 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Terpeliharanya gedung kantor | 4 unit | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Atambua | | | Jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 4 kali | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | | | | | 387,461,204 | 395,210,428 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 286,461,204 | 292,190,428 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1 paket | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kab. Belu | | | Jumlah alat perlengkapan Jalan yang dipelihara | 1 paket | | | 256,461,204 | 261,590,428 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kab. Belu | | | Jumlah trafing Light dan Lampu hias yang dipelihara | 1 paket | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | 26,000,000 | 26,520,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Atambua | | | Jumlah alat uji kendaraan bermotor statis yang diadakan | 1 paket | | | 1,000,000 | 1,020,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Luar Provinsi | | | Jumlah ASN / PNS yang mendapat diklat | 1 paket | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Atambua | | | Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor | unit | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kab. Belu | | | Jumlah trafing Light yang diadakan | 1 zet | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Terlaksananya Pengendalian Angkutan Umum di Jalan Raya | 1 paket | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|-----|------|---|--------------|-----|-----|-------------|-------------|------|
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Yang Dipelihara | 23 Unit | | | 126,486,350 | 129,016,077 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara | 1 Unit | | | 17,000,000 | 17,340,000 | |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | SPBE | | | | | 229,780,000 | 234,375,600 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 229,780,000 | 234,375,600 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kab. Belu | | | Jumlah Liputan Yang Dikelola Dalam Media Komunikasi Publik | 25 Berita | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Kab. Belu | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Yang Diadakan | 1 Paket | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Kab. Belu | | | Jumlah Media Kerjasama Yang Diadakan | 10 Media | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Kab. Belu | | | Jumlah Kegiatan Studi Banding yang Diadakan | 2 Paket | | | 29,780,000 | 30,375,600 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kab. Belu | | | Jumlah KIM yang Dibina di Tingkat Kecamatan | 12 Kecamatan | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | SPBE | | | | | 555,987,539 | 567,107,290 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 555,987,539 | 567,107,290 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Pelatihan Jaringan TIK | 1 Kali | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Yang Diadakan | 1 Paket | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Penyelenggara Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Yang Diadakan | 1 Paket | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kab. Belu | | | Jumlah E-Surat dan E-Absen Yang Dibangun | 1 Paket | | | 200,000,000 | 204,000,000 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Yang Diadakan | 1 Paket | | | 75,000,000 | 76,500,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-------------------------------|----|----|------|----|---|-----------|--|------|--|----------|---|------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kab. Belu | | | Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Pengendalian Menara Telekomunikasi Yang Diadakan | 1 Paket | | | 80,987,539 | 82,607,290 | | |
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | 125,000,000 | 127,500,000 | | |
| 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral | 100% | | | | | 125,000,000 | 127,500,000 | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah | 100% | 125,000,000 | 127,500,000 | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kab. Belu | | | Jumlah SDM Pemerintah di Bidang Statistik | 50 Orang | | | 75,000,000 | 76,500,000 | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Infrastruktur | Kab. Belu | | | Jumlah Sistem dan Perangkat Keras Pengelolaan Statistik | 1 Paket | | | 50,000,000 | 51,000,000 | | |
| 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | 100,000,000 | 102,000,000 | | |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan | 100% | | | | | 100,000,000 | 102,000,000 | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 100% | 100,000,000 | 102,000,000 | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Komunikasi yang Diadakan | 1 Paket | | | 100,000,000 | 102,000,000 | | |
| DINAS KOPERASI DAN UKM | | | | | | | | | | | | | 3,077,188,202 | 3,237,525,763 | | |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | 3,077,188,202 | 3,237,525,763 | | |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | | 2,258,237,953 | 2,445,695,963 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | | 2,030,926,753 | 2,175,327,063 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah PNS | 22 Orang | | | 1,580,926,753 | 1,701,859,263 | | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---------|---|-------------|--|-------------|--|-----|-------------------|-------------------|------|
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | | Jumlah PNS | 25 Orang | | | 450,000,000 | 473,467,800 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Atambua | | | Jumlah Koperasi | 30 Koperasi | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah | | 62,500,000 | 97,289,700 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 jenis | | | 10,000,000 | 1,497,900 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 48 Blok | | | 25,000,000 | 15,271,800 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Atambua | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 50 kali | | | 25,000,000 | 70,520,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 22,534,200 | 28,798,200 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah benda pos | 12 bulan | | | 5,000,000 | 11,264,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah rek listrik,air dan tele | 12 bulan | | | 12,100,000 | 12,100,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 unit | | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah peralatan kebersihan kantor | 12 jenis | | | 1,934,200 | 1,934,200 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 92,277,000 | 94,281,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan | 13 unit | | | 87,277,000 | 87,277,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah gedung kantot | 1 unit | | | 5,000,000 | 7,004,000 | |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 100% | | | | | 42,399,800 | 42,399,800 | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | Lancarnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi | | 42,399,800 | 42,399,800 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---------|---|------|-----|-------------|---|-----|-------------|-------------|------|
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | | 30 Koperasi | | | 42,399,800 | 42,399,800 | |
| 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam dan KSPPS/ USPPS yang sehat dan cukup sehat | 100% | | | | | 114,332,500 | 114,332,500 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Meningkatnya pelayanan koperasi UKM dan LKM | | 114,332,500 | 114,332,500 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | | 30 Koperasi | | | 60,822,500 | 60,822,500 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | | 30 Koperasi | | | 53,510,000 | 53,510,000 | |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | Persentase capaian peningkatan kapasitas SDM Koperasi | 100% | | | | | 373,436,500 | 373,436,500 | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya koperasi yang berkualitas | | 373,436,500 | 373,436,500 | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Atambua | | | | 120 orang | | | 373,436,500 | 373,436,500 | |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Meningkatnya jumlah SDM KUKM dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota | 100% | | | | | 167,700,000 | 167,700,000 | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya peningkatan persentase koperasi aktif | | 167,700,000 | 167,700,000 | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | | 30 koperasi | | | 167,700,000 | 167,700,000 | |
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan | 100% | | | | | 68,961,000 | 68,961,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|-----|--|---------|--|---|-----------|--|-----|---------------|---------------|------|
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | Terlaksananya peningkatan persentase UKM aktif | | 68,961,000 | 68,961,000 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Atambua | | Jumlah UKM | 200 UKM | | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Atambua | | Jumlah UKM | 200 UKM | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Atambua | | Jumlah UKM | 200 UKM | | | 43,961,000 | 43,961,000 | |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha | 100% | | | | 52,120,449 | 25,000,000 | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | Terlaksananya peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil | | 52,120,449 | 25,000,000 | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Atambua | | Jumlah UKM | 200 UKM | | | 52,120,449 | 25,000,000 | |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | 4,012,282,101 | 6,127,812,766 | |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | 4,012,282,101 | 6,127,812,766 | |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 3,415,059,101 | 4,251,549,126 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Terciptanya Dokumen Perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan yang baik | | 5,000,000 | 190,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | | | 5,000,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Atambua | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | | | - | 25,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Atambua | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | | | - | 25,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Atambua | | Jumlah dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | | | - | 25,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Atambua | | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | | | - | 25,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|--------------------------|-----|-----|--|-----------|--|-----|----------------------|----------------------|------|
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Atambua | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - | 20,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - | 20,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | | 2,966,465,601 | 2,219,317,926 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 2,492,059,101 | 2,067,211,726 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | | | - | 10,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | | | 474,406,500 | 112,106,200 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Atambua | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | | | - | 10,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Atambua | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 laporan | | | - | 10,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Atambua | | | Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | - | 10,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | - | 335,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Atambua | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 paket | | | - | 35,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | orang | | | - | 300,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah | | 105,688,750 | 435,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 paket | | | 8,188,750 | 10,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 25,000,000 | 75,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 17,500,000 | 50,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | | | 30,000,000 | 250,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | - | 387,250,100 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | | Jumlah Pengadaan Mebel | 1 paket | | | - | 150,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 paket | | | - | 237,250,100 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|-----------|---|--|-----------|---|-----|-------------|-------------|------|
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 229,409,350 | 457,244,200 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | | | 4,200,000 | 96,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 rek | | | 104,400,000 | 120,180,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 5,000,000 | 10,450,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | | 115,809,350 | 230,614,200 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 108,495,400 | 227,736,900 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit | | | 93,495,400 | 197,736,900 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | Penambahan Peraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | | | | 10,000,000 | 370,000,000 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | Tersedianya peta potensi investasi Kabupaten | | 10,000,000 | 370,000,000 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Atambua | | Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | 1 dokumen | | | 5,000,000 | 300,000,000 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Atambua | | Jumlah laporan/dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 1 dokumen | | | 5,000,000 | 70,000,000 | |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | | | | 15,000,000 | 235,000,000 | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terwujudnya promosi penanaman modal Investasi | | 15,000,000 | 235,000,000 | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kab. Belu | | Jumlah dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal | 1 dokumen | | | 10,000,000 | 143,000,000 | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 kali | | | 5,000,000 | 92,000,000 | |
| 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | 100% | | | | 165,000,000 | 936,263,640 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|-----------|--|--|-------------------------------|---|-----|-------------|-------------|------|--|
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | Terciptanya pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara terpadu | | 165,000,000 | 936,263,640 | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kab. Belu | | Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1 sistem | | | 100,000,000 | 575,000,000 | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Kab. Belu | | Jumlah profil perusahaan yang di hasilkan | 20 perusahaan | | | 50,000,000 | 181,263,640 | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Kab. Belu | | Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | 1 layanan | | | 15,000,000 | 180,000,000 | | |
| 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | 392,223,000 | 185,000,000 | | |
| | | | | | | | Nilai Invetasi Baru pertahun | Rupiah | | | | | | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Lancarnya Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten | | 392,223,000 | 185,000,000 | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Belu | | Jumlah profil perusahaan yang di hasilkan | 20 perusahaan | | | 15,000,000 | 50,000,000 | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Belu | | Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap usaha yang dilakukan Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi, Bimtek dan lokakarya | 3 kegiatan 50 pelaku usaha | | | 362,223,000 | 60,000,000 | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Belu | | Jumlah profil perusahaan dan Berita Acara perusahaan | 50 perusahaan | | | 15,000,000 | 75,000,000 | | |
| 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | 100% | | | 15,000,000 | 150,000,000 | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terwujudnya Sinkronisasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan | | 15,000,000 | 150,000,000 | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kab. Belu | | Jumlah Pemutakhiran Data Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja | 20 Perusahaan | | | 15,000,000 | 150,000,000 | | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|----------------------------------|---|-------------|---|------------|---|-------------|--------------------|----------------------|------|
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | | Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat yang disediakan | 300 Dos | | | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan luar provinsi | | | Jumlah Perjalanan Dinas | 32 Kali | | | 20,000,000 | 161,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 15,000,000 | 2,048,270,800 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Mebel yang diadakan | 1 paket | | | 10,000,000 | 23,270,800 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit | | | - | 2,000,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 paket | | | 5,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 47,250,000 | 315,549,500 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Benda Pos yang dibeli | 300 Lembar | | | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon | 7 Rekening | | | 30,000,000 | 63,500,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 5,000,000 | 24,799,500 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | | 10,000,000 | 225,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 93,600,000 | 189,807,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | | 75,000,000 | 121,207,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara | 23 Unit | | | 8,600,000 | 8,600,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2 Unit | | | 10,000,000 | 60,000,000 | |
| 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina | 100% | | | | | 122,500,000 | 1,336,934,100 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 100% | 112,500,000 | 1,252,179,100 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Diklat yang dilaksanakan | 1 Kali | | | 2,500,000 | 72,888,600 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|--------------------|--|-------------|--|------------|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | 5,000,000 | 178,928,000 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah pelaksanaan kegiatan kepemudaan | 1 Kegiatan | | | 5,000,000 | 107,377,500 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 1 kali | | | 100,000,000 | 892,985,000 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | 10,000,000 | 84,755,000 |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 1 kali | | | 10,000,000 | 84,755,000 | |
| 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor | 100% | | | | | 680,261,286 | 7,122,068,447 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | 25,000,000 | 4,875,000,000 |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi yang dilakukan | | | | 25,000,000 | 75,000,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Sarana yang dibangun | | | | - | 4,800,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|----------------------------------|--|--|------------|---|------|-------------|---------------|------|
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terseleenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 55,000,000 | 778,228,447 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Provinsi dan Nasional | | Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 kali | | | 30,000,000 | 49,500,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 0 kali | | | - | 284,760,100 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Kab. Belu, Provinsi dan Nasional | | Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | partisipan | | | 25,000,000 | 443,968,347 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,261,286 | 250,000,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | Jumlah Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | 1 kali | | | 25,261,286 | 250,000,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 550,000,000 | 1,176,340,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Kab. Belu, Atambua | | Jumlah kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 1 paket | | | 500,000,000 | 1,078,000,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 03 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | Kab. Belu, Atambua | | Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | 1 kali | | | 50,000,000 | 98,340,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 42,500,000 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Kab. Belu, Atambua | | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 42,500,000 | |
| 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN | 100% | | | | 140,000,000 | 200,000,000 | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 140,000,000 | 200,000,000 | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Kab. Belu, Atambua | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | 1 paket | | | 5,000,000 | 24,672,000 | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Kab. Belu, Atambua | | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 kali | | | 125,000,000 | 51,363,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|--------------------------|-----|-----|---|----------|--|-------------|-------------------|--------------------|------|
| 2 | 23 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 kali | | | - | 36,300,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 40,500,000 | 197,308,400 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 paket | | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | 5,000,000 | 17,308,400 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 1 paket | | | - | 2,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 1 paket | | | 10,000,000 | 17,500,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1 paket | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 paket | | | - | 7,500,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan | | | 2,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | | | 10,000,000 | 125,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | - | 73,965,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | | - | 17,465,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Mebel | unit | | | - | 6,500,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | - | 50,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 22,900,000 | 47,400,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 rek | | | 18,400,000 | 38,400,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | | | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 52,250,000 | 131,047,800 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | | 50,000,000 | 123,797,800 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Mebel | 1 paket | | | - | 2,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | | | - | 3,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|--------------------|---|------|--|-----------|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | | | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) | 100% | | | | | 38,829,132 | | 366,870,000 |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 28,829,132 | 239,075,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah penyediaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 12 bulan | | | 5,000,000 | 94,575,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | unit | | | 5,829,132 | 18,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah | 1 kali | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah kegiatan Pembinaan Perpustakaan | 12 kali | | | 2,500,000 | 17,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | unit | | | 2,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan | 1 kali | | | 2,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 2,500,000 | 18,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 08 | Pengembangan Bahan Pustaka | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah Bahan Pustaka | 1 paket | | | - | 51,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 1 kali | | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu, Atambua | | | Jumlah laporan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan | 1 laporan | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terciptanya Budaya Gemar Membaca | 100% | 10,000,000 | 127,795,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 1 kali | | | - | 77,795,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----------|---|-------------|---|---------|---|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum | 1 paket | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Kab. Belu | | | Jumlah Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 1 orang | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 1 kali | | | 2,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 orang | | | 2,500,000 | 17,500,000 | |
| 2 | 23 | 03 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 100% | | | | | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.01 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 1 kali | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.01 | 02 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno | 1 kali | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.02 | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.02 | 01 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Atambua | | | Jumlah kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | 1 kali | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.02 | 02 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | 1 kali | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | 120,500,000 | 445,665,000 | |
| 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik | 100% | | | | | 66,000,000 | 317,205,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 7,500,000 | 23,500,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Atambua | | | Jumlah kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 1 kali | | | 2,500,000 | 11,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---------|--|------|---|----------|---|------|------------|-------------|------|
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 1 kali | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis | 1 kali | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 8,500,000 | 165,237,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | 01 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Atambua | | | Jumlah kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | 1 kali | | | 3,500,000 | 150,237,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Atambua | | | Jumlah kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 1 kali | | | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 100% | 50,000,000 | 128,468,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | 12 bulan | | | 25,000,000 | 80,836,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | 1 unit | | | 25,000,000 | 47,632,000 | |
| 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) | 100% | | | | | 54,500,000 | 118,460,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | | | | | | Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 100% | 19,500,000 | 19,500,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Atambua | | | jumlah kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 1 paket | | | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Atambua | | | Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | 1 paket | | | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.02 | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|-----|-----|--|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------|
| 2 | 24 | 03 | 2.02 | 01 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Kab. Belu | | | Jumlah laporan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | 1 laporan | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.02 | 02 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Kab. Belu | | | Jumlah laporan kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | 1 laporan | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | Terlaksananya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah | 100% | 12,500,000 | 58,960,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | 01 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah laporan kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah | 1 laporan | | | 5,000,000 | 35,460,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | 02 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah laporan kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah | 1 laporan | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | 03 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | Atambua | | | Jumlah Pemekaran Daerah Kecamatan | desa | | | 2,500,000 | 11,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | 04 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Atambua | | | Jumlah Pemekaran Desa/Kelurahan | desa | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.04 | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | 100% | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.04 | 01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Atambua | | | Jumlah kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 1 kali | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.04 | 02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Atambua | | | Jumlah kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 1 kali | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.05 | | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | | | | Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | 100% | 7,500,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.05 | 01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Atambua | | | Jumlah laporan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | 1 laporan | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.05 | 02 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | Atambua | | | Jumlah laporan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | 1 laporan | | | 2,500,000 | 7,500,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--|----|----|------|----|--|---------|--|------|--|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|------|
| 2 | 24 | 03 | 2.05 | 03 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Atambua | | | Jumlah laporan Daftar Pencarian Arsip (DPA) | 1 laporan | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 04 | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK | 100% | | | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 24 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | 100% | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 | 24 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Atambua | | | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 SOP | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 24 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Atambua | | | Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 kali | | | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| 3. URUSAN PILIHAN DINAS PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | 33,103,542,734 | 61,705,310,526 | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | 3,446,610,835 | 5,216,181,330 | |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | 3,446,610,835 | 5,216,181,330 | |
| 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 2,061,971,740 | 2,192,405,578 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | 100% | 1,860,830,140 | 1,612,674,428 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya | 18 orang | | | 1,516,830,140 | 1,233,924,428 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak | 20 orang | | | 344,000,000 | 378,750,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | - | 85,000,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 Kali | | | - | 85,000,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah | 100% | 63,141,600 | 210,742,100 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 Jenis | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|--|---|-------------|--|---|--|-------------|--------------------|----------------------|------|
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah ATK yang diadakan dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 22 jenis dan 1 jenis | | | 18,750,000 | 56,380,500 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 2800 Lembar | | | 11,891,600 | 14,391,600 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab.Belu | | | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu | 10 Kali | | | 2,500,000 | 15,000,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah perjalanan dinas keluar daerah | 20 kali | | | 25,000,000 | 119,970,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 5,000,000 | 20,989,400 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | | Jumlah Mebel | 5 Unit | | | 5,000,000 | 20,989,400 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 28,000,000 | 56,750,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Benda Pos Yang dibeli | 500 lembar | | | 1,500,000 | 6,000,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Terbayarnya Kamunikasi sumberdaya Air dan Listrik | 3 Rek | | | 20,000,000 | 39,500,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Perbaikan Perlengkapan kantor | 3 Unit | | | 1,500,000 | 6,250,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah peralatan kebersihan | 14 jenis | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100% | 105,000,000 | 206,249,650 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 29 unit (Kendaraan Roda 4 : 3 unit dan Kendaraan Roda 2 : 26) | | | 100,000,000 | 185,249,650 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung yang direhabilitasi | 3 unit | | | 5,000,000 | 21,000,000 | |
| 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI dan Peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI | 100% | | | | | 339,385,641 | 1,181,427,800 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Tangkap | 100% | 270,000,000 | 1,043,325,000 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur | | | Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang disediakan | 1 dokumen | | | 20,000,000 | 55,000,000 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur | | | Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang diadakan | 14 unit | | | 250,000,000 | 988,325,000 | |

| | (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|-----|----|------|-----|---|--|---|--|--|---|------|--------------------|----------------------|------|
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Lancarnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota | 100% | 69,385,641 | 138,102,800 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Kecamatan Kakuluk Mesak | | Jumlah peserta kegiatan pelatihan permesinan dan perawatan mesin | 30 orang | | | 19,385,641 | 55,000,000 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur | | Jumlah kelompok nelayan yang nilai | 25 kelompok | | | 25,000,000 | 50,702,800 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur | | Jumlah kegiatan fasilitas asuransi yang diberikan kepada nelayan | 4 kali | | | 25,000,000 | 32,400,000 | |
| 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Peningkatan produksi perikanan budidaya | | | | | 921,753,454 | 1,537,712,952 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | lancarnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan , pembudidaya ikan kecil | 100% | 797,813,000 | 1,085,525,316 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Kecamatan Kakuluk Mesak, Tasifeto Timur, Raihat dan Lasiolat | | Jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar/payau yang diadakan | 9 unit | | | 782,813,000 | 998,563,516 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Kecamatan Lasiolat, Lamaknen, Nanaet Duabesi dan Raimanuk | | Jumlah kegiatan fasilitas asuransi yang diberikan kepada pembudidaya ikan | 4 kali | | | 15,000,000 | 29,886,800 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Timur | | Jumlah peserta kegiatan pelatihan budidaya ikan air tawar dan jumlah peserta kegiatan pelatihan pembuatan pakan ikan | 20 org dan 20 org | | | - | 57,075,000 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan | 100% | 123,940,454 | 452,187,636 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Raihat dan Tasbar, Tastim , Raimanuk dan kakuk Mesak | | Jumlah data pembudidayaan ikan dan penilaian kelas kelompok | 1 dokumen | | | 5,000,000 | 60,000,000 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | BBI Teun | | Jumlah Kolam BBI yang direhabilitasi | 1 unit | | | 20,000,000 | 155,666,636 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tambak susuk, selowai, dan BBI Teun | | Jumlah pupuk dan makanan ikan, Jumlah sarana dan prasarana pembenihan ikan air tawar yang diadakan, Jumlah benih ikan unggul yang diadakan, Jumlah bahan/peralatan perikanan yang dibeli | 1.000 Kg pupuk, 7.000 Kg pakan, 2 jenis, tambak dinas: 26.000 ekor benih bandeng, Restocking : 20.840 ekor ikan air tawar, 3 jenis | | | 98,940,454 | 236,521,000 | |

| (1) | | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-------------------------|----|----|------|----|-----|--|--|------|--|--|------|---------------|----------------|------|
| 3 | 25 | 06 | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Makan Ikan | | | | | 123,500,000 | 304,635,000 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | | Lancarnya Pendampingan, Pembinaan dan penilaian kelas kelompok | 100% | 25,000,000 | 56,135,000 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | 01 | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kakuluk Mesak, Tastim, Tasbar, Kota Atambua dan Atambua Selatan | | Jumlah Data Pengolaha yang Tersedia | 15 Kelompok | | 25,000,000 | 56,135,000 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | Lancarnya Pembinaan Kelompok Perikanan | 100% | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | 01 | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | kakuluk mesak | | Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan hasil perikanan | 60 orang | | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan | 100% | 48,500,000 | 98,500,000 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 02 | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kecamatan kakuluk mesak | | jumlah fasitasi bagi pelaku perikanan yang di adakan | 6 kelompok | | 48,500,000 | 98,500,000 | |
| DINAS PARIWISATA | | | | | | | | | | | | 3,681,327,787 | 10,670,404,940 | |
| 3 | 26 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 3,681,327,787 | 10,670,404,940 | |
| 3 | 26 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | | 3,111,327,787 | 2,615,967,500 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | | | | 2,944,465,298 | 637,550,000 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Kab.Belu | | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 100% | 2,420,801,298 | 1,233,924,428 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab.Belu | | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 100% | 523,664,000 | 637,550,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|-------------|-----|---|-------------|--|------|-------------------|--------------------|------|
| 3 | 26 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | - | 75,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 Kali | | 100% | - | 75,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan administrasi umum | | 34,500,000 | 343,391,100 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 Jenis | | 100% | 2,000,000 | 3,290,600 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Unit | | 100% | 7,500,000 | 88,815,500 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 4000 Lembar | | 100% | 7,500,000 | 22,275,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab.Belu | | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu | 15 Kali | | 100% | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Luar Daerah | | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Kali | | 100% | 15,000,000 | 209,010,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | 7,500,000 | 747,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | | 100% | - | 590,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | Jumlah Pengadaan Mebel | 10 Unit | | 100% | 2,500,000 | 50,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Paket | | 100% | 2,500,000 | 11,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Paket | | 100% | 2,500,000 | 96,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | 26,500,000 | 55,276,400 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 1 Paket | | 100% | 1,500,000 | 5,850,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rekening | | 100% | 20,000,000 | 39,900,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20 Jenis | | 100% | 5,000,000 | 9,526,400 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | 98,362,489 | 757,750,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 8 unit | | | 88,362,489 | 173,500,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----|--------------------|----------------------|------|
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | | | 5,000,000 | 570,000,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara | 1 paket | | | 2,500,000 | 6,500,000 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara | 1 paket | | | 2,500,000 | 7,750,000 | |
| 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 100% | | | | | 70,000,000 | 4,232,812,540 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten | | 20,000,000 | 300,000,000 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | gurita, pasir putih | | | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | 1 kawasan | | | 20,000,000 | 300,000,000 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten | | 5,000,000 | 104,716,000 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.02 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 72 kali | | | 5,000,000 | 104,716,000 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten | | 25,000,000 | 3,773,096,540 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | 3 jenis | | | 15,000,000 | 3,640,000,000 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 63 kali | | | 5,000,000 | 77,824,740 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 07 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Jumlah objek wisata yang dikelola | 3 kali | | | 5,000,000 | 55,271,800 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Lancarnya pengawasan usaha pariwisata | | 20,000,000 | 55,000,000 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.04 | 04 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | | | | Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata | 15 kali | | | 20,000,000 | 55,000,000 | |
| 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | | | | | | 100,000,000 | 838,807,400 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya pemasaran pariwisata kabupaten | | 100,000,000 | 838,807,400 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | Jumlah video promosi | 4 unit | | | 25,000,000 | 150,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|----|---|-----|---|------|---|-------------|--|-----|----------------------|-----------------------|------|
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota | | | | Jumlah kegiatan expo dan jambore pariwisata | 6 kali | | | 25,000,000 | 259,950,000 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | Jumlah dokumen yang dihasilkan | 600 dokumen | | | 25,000,000 | 184,000,000 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | Jumlah kegiatan festival | 1 kali | | | 25,000,000 | 244,857,400 | |
| 3 | 26 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | Persentase Pelaku Pariwisata yang Terbina | 100% | | | | | 250,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 3 | 26 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya prasarana (zona kreatif) bagi insan kreatif kabupaten | | 250,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 3 | 26 | 04 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | jumlah prasarana yang dibangun | 1 jenis | | | 250,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | Persentase pelaku pariwisata yang terbina | | | | | | 150,000,000 | 982,817,500 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | Tersedianya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar | | 150,000,000 | 982,817,500 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | Jumlah pelatihan ekonomi kreatif | 3 kali | | | 25,000,000 | 125,000,000 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | | Jumlah pokdarwis dan kegiatan duta wisata/ putri pariwisata | 6 kali | | | 25,000,000 | 200,320,500 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | | | | Jumlah pelatihan pelaku ekraf | 2 kali | | | 25,000,000 | 225,000,000 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | | | | Jumlah pelaku ekraf yang bersertifikat | 1 kali | | | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | Jumlah pelaku usaha ekraf | 1 kali | | | 25,000,000 | 303,497,000 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | Jumlah pelaku usaha ekraf | 1 kali | | | 25,000,000 | 79,000,000 | |
| DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | | | | | | | 5,377,736,412 | 13,310,548,496 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|-----|-----|---|--|--|----------------------------|-----|---|--|--|---------------|-------------|
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 5,377,736,412 | 13,310,548,496 | | |
| 3 | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 4,410,673,862 | 7,830,159,896 | | |
| | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Terciptanya laporan kinerja yang baik | 5,000,000 | 70,000,000 | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 5 Dokumen | 5,000,000 | 70,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | 4,024,736,412 | 3,230,990,896 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 14 bulan | 3,999,736,412 | 3,169,812,896 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah Pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 bulan | 25,000,000 | 61,178,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 12,500,000 | 593,020,000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Atambua | | Jumlah Pakaian Dinas/Pakaian Lapangan | 100 buah | 10,000,000 | 52,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Atambua | | Jumlah Kegiatan Monev | 36 OH | 2,500,000 | 79,560,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal berdasarkan Tugas dan fungsi | 46 orang | - | 461,460,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah | 66,434,850 | 430,975,000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah komponen instalasi listrik | 12 jenis | 3,659,850 | 5,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 35 jenis | 10,000,000 | 35,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Atambua | | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 6 jenis | 5,000,000 | 75,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Jumlah Barang cetak dan Penggandaan | 45000 lembar 30 buku | 20,275,000 | 20,275,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | Jumlah makanan dan minuman | 1020 kotak | 2,500,000 | 45,700,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan luar provinsi | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 45 kali | 25,000,000 | 250,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------|---------------|------|
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | 70,000,000 | 2,986,254,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan | 13 unit | | | 20,000,000 | 907,704,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah gedung Kantor atau bangunan Lainnya | 5 unit | | | 50,000,000 | 2,078,550,000 | dak |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 42,002,600 | 65,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Paket Pengiriman Jumlah Benda Pos | 20 kg 500 lembar | | | 1,500,000 | 8,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Kebutuhan Air Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Telepon/internet | 24 tangki 2 rek 2 rek | | | 28,050,000 | 42,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan | 22 Jenis | | | 12,452,600 | 15,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 190,000,000 | 453,920,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara | 45 unit | | | 183,500,000 | 293,920,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di perbaiki | 30 unit | | | 1,500,000 | 10,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya | 6 unit | | | 5,000,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | Peningkatan produksi pangan hewani | 100% | | | | 348,900,000 | 1,711,087,500 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian | | 98,900,000 | 98,900,000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kab. Belu | | Jumlah Sarana Pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi | 16 unit | | | 98,900,000 | 98,900,000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | | 250,000,000 | 1,612,187,500 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---|---|------|---|-------------------------------|---|-----|-------------|---------------|------|
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Kecamatan Kota Atambua, Atb Selatan, Atb Barat, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Raimanuk | | | Jumlah pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | 4 jenis | | | 250,000,000 | 1,612,187,500 | |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian | 100% | | | | | 60,000,000 | 1,213,410,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | Tersedianya prasarana pertanian yang memadai | | 10,000,000 | 450,000,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kab. Belu | | | jumlah Embung | 2 buah | | | 10,000,000 | 450,000,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | Meningkatnya minat masyarakat untuk memelihara ternak | | 50,000,000 | 763,410,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.03 | 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Kab. Belu | | | Jumlah N2 Cair, Semen Beku, dan Peternak/petugas IB Jumlah Ternak Peserta kontes Jumlah Ternak Peserta Pameran IB | 3 Jenis 72 ekor 12 ekor | | | 50,000,000 | 763,410,000 | |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100% | | | | | 535,903,916 | 2,268,256,600 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Meningkatnya derajat kesehatan hewan | | 500,903,916 | 1,931,502,700 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kab. Belu | | | Jumlah ternak yang divaksin | 95000 ekor/dosis | | | 500,903,916 | 1,931,502,700 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Meningkatnya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | | 25,000,000 | 119,005,700 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Kab. Belu | | | Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran hewan dan Produk Hewan | 12 kali | | | 25,000,000 | 119,005,700 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | Meningkatnya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | | 10,000,000 | 217,748,200 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | 03 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Kab. Belu | | | Jumlah Pengawasan penerapan teknis | 12 kali | | | 10,000,000 | 217,748,200 | |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | Persentase peningkatan kelas kelompok tani per tahun | 100% | | | | | 22,258,634 | 287,634,500 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | Meningkatnya kelembagaan petani/status kelas kelompok di kecamatan/desa | | 22,258,634 | 287,634,500 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|----|--|-----------|-----|-----|--|---------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|------|
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kab. Belu | | | Jumlah Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | 12 kali | | | 17,258,634 | 85,000,000 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kab. Belu | | | Jumlah Pengembangan kapasitas kelembagaan petani | 12 kelompok | | | 5,000,000 | 202,634,500 | |
| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | | | | 15,414,917,454 | 14,871,589,896 | |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | 59,000,000 | 165,893,400 | |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Paket | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 34,000,000 | 114,393,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | 10,000,000 | 87,393,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Atambua | | | Jumlah Dokumen Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Dokumen | | | - | 9,993,400 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kab.Belu | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 5 Kali | | | 5,000,000 | 51,200,000 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kab.Belu | | | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 1 Kelembagaan | | | 5,000,000 | 26,200,000 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Kab.Belu | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 5 Kali | | | 22,000,000 | 22,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|----------------------------|--|---|----------|--|------|----------------|----------------|------|
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | Tersedianya data dan informasi pola konsumsi masyarakat | 100% | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Atambua | | Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 1 Dok | | | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan | 100% | | | | 10,000,000 | 33,500,000 | |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | Tersedianya data dan informasi kerentanan ketahanan pangan | 100% | 5,000,000 | 13,500,000 | |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Atambua | | Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 1 Dok | | | 5,000,000 | 13,500,000 | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | Terwujudnya penanganan kerawanan pangan | 100% | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Provinsi dan Luar Provinsi | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 10 Kali | | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/ Kota | 100% | | | | 10,000,000 | 13,000,000 | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Terciptanya keamanan pangan segar | 100% | 10,000,000 | 13,000,000 | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kab Belu | | Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Mutu Keamanan Pangan | 5 Pasar | | | 10,000,000 | 13,000,000 | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 15,355,917,454 | 14,705,696,496 | |
| 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 9,868,339,426 | 8,118,606,296 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | 100% | 9,507,770,126 | 7,126,605,596 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Belu | | Jumlah ASN | 95 Orang | | | 8,600,770,126 | 6,698,005,596 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Belu | | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD dan Tenaga Kontrak Daerah | 26 Orang | | | 907,000,000 | 428,600,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah | 100% | 76,069,300 | 268,360,300 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-------------|---|--------|--|-------------------------|--|------|----------------------|----------------------|--------|
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Belu | | | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 jenis | | | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Belu | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | 17 unit | | | 5,000,000 | 22,500,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Belu | | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | 27 Jenis | | | 20,000,000 | 60,791,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab Belu | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1250 buku dan 43731 lbr | | | 20,969,300 | 20,969,300 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab Belu | | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 2 jenis | | | 2,500,000 | 11,500,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Luar Daerah | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 50 kali | | | 25,000,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 29,500,000 | 109,850,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Belu | | | Jumlah rekening listrik telp dan air | 2 rek | | | 25,000,000 | 96,600,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Belu | | | Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki | 45 unit | | | 2,500,000 | 11,250,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Belu | | | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan | 8 jenis | | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 255,000,000 | 613,790,400 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Belu | | | Jumlah kendaraan dinas alat operasional yang dipelihara | 160 unit | | | 250,000,000 | 589,250,000 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Belu | | | Jumlah kantor gedung yang dipelihara | 1 unit | | | 5,000,000 | 24,540,400 | |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | Produktivitas padi per tahun | Ton/Ha | | | | | 2,304,571,700 | 2,330,828,700 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | Terwujudnya pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian | 100% | 2,304,571,700 | 2,330,828,700 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kab Belu | | | Jumlah pengawasan sarana pendukung pertanian, | 1 kali | | | 10,000,000 | 36,257,000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kab Belu | | | Jumlah desa yang difasilitasi pendampingan penggunaan sarana pertanian | 20 desa | | | 2,294,571,700 | 2,294,571,700 | readsi |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian | 100% | | | | | 3,073,006,328 | 3,827,845,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | Terlaksananya pengembangan sarana pertanian | 100% | 2,373,006,328 | 1,904,245,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--|----|----|------|----|--|----------|--|------|--|------------------------|---|------|----------------------|-----------------------|------|
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Kab Belu | | | Jumlah Luas Optimalisasi Lahan dan Luas Area Produksi Tanaman Pangan | 900 ha dan 14 komoditi | | | 2,373,006,328 | 1,904,245,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian | 100% | 700,000,000 | 1,923,600,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kab Belu | | | Jumlah sarana dan prasaran pertanian/perkebunan | 35 unit | | | 600,000,000 | 1,673,600,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kab Belu | | | Jumlah sarana dan prasarana pertanian | 2 unit dan 42 unit | | | 100,000,000 | 250,000,000 | |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota | 100% | | | | | 50,000,000 | 84,640,000 | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | Terlaksananya pengendalian bencana pertanian | 100% | 50,000,000 | 84,640,000 | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kab Belu | | | Jumlah kegiatan pengendalian hama/penyakit tanaman | 90 kali | | | 50,000,000 | 84,640,000 | |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | Persentase peningkatan kelas kelompok tani per tahun | 100% | | | | | 60,000,000 | 343,776,500 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian | 100% | 60,000,000 | 343,776,500 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kab Belu | | | Jumlah Peserta peningkatan kapasitas kelembagaan petani | 80 orang | | | 50,000,000 | 209,830,000 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kab Belu | | | Jumlah Gapoktan PUAP yang didampingi | 51 Gapoktan | | | 10,000,000 | 133,946,500 | |
| DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | 5,182,950,246 | 17,636,585,864 | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | 4,546,434,646 | 10,102,205,864 | |
| 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | | 3,453,030,815 | 3,993,805,864 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Terciptanya laporan kinerja yang baik | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---|-----|-----|--|----------|---|------|---------------|---------------|------|
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Atambua | | | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dok | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | 100% | 3,139,700,665 | 2,718,584,614 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | | | 3,009,700,665 | 2,589,114,614 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 11 Orang | | | 130,000,000 | 129,470,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | - | 180,000,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5 Kali | | | - | 180,000,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah | 100% | 101,388,650 | 431,610,300 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | | | 2,498,350 | 5,000,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Unit | | | 50,000,000 | 179,750,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | | 21,390,300 | 24,740,300 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu | 10 Kali | | | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Atambua | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Kali | | | 25,000,000 | 202,120,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 58,950,300 | 90,100,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 1 Paket | | | 5,150,000 | 10,300,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek | | | 46,800,000 | 46,800,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Paket | | | 7,000,300 | 33,000,000 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 142,991,200 | 563,510,950 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Paket | | | 136,491,200 | 257,889,700 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Paket | | | 1,500,000 | 69,500,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---|---|------|---|---------|--|------|-------------|---------------|------|
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 Unit | | | 5,000,000 | 236,121,250 | |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko | 100% | | | | | 15,000,000 | 150,400,000 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | Terwujudnya pengendalian dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya | 100% | 10,000,000 | 48,000,000 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Kab. Belu | | | Jumlah pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya | 4 Kali | | | 5,000,000 | 24,000,000 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) | Kab. Belu | | | Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) | 5 Kali | | | 5,000,000 | 24,000,000 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.07 | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | | | | | | Lancarnya layanan penerbitan surat keterangan asal | 100% | 5,000,000 | 102,400,000 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.07 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | 1 Paket | | | 5,000,000 | 102,400,000 | |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | Peningkatan sarana distribusi perdagangan khususnya Pasar Rakyat dan PK5 | 100% | | | | | 979,903,831 | 4,100,000,000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | 100% | 928,754,031 | 4,000,000,000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Belu | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Paket | | | 381,683,218 | 3,200,000,000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Belu | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Paket | | | 547,070,813 | 800,000,000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | Lancarnya pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan | 100% | 51,149,800 | 100,000,000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Belu | | | Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 5 Kali | | | 51,149,800 | 100,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|--|--|--|------|---|---------------------------------------|---|------|------------|---------------|------|
| 3 | 30 | 04 | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya | 100% | | | | | 10,000,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya pengendalian dan pengawasan harga barang pokok dan barang penting | 100% | 10,000,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Kab. Belu | | Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 1 Paket | | | 5,000,000 | 50,000,000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 10 Kali | | | 5,000,000 | 100,000,000 | |
| 3 | 30 | 05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | Persentase jumlah UMKM yang menjadi ekportir | 100% | | | | | 8,500,000 | 273,000,000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | Terwujudnya pengembangan ekspor | 100% | 8,500,000 | 273,000,000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 1 kali | | | 2,500,000 | 24,000,000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Luar Daerah | | Jumlah Pameran Dagang Nasional | 1 Kali | | | 2,500,000 | 150,000,000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Kab. Belu | | Jumlah Pameran Dagang Lokal | 1 Kali | | | 1,000,000 | 75,000,000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Kab. Belu | | Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 1 Kali | | | 2,500,000 | 24,000,000 | |
| 3 | 30 | 06 | | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 100% | | | | | 80,000,000 | 1,435,000,000 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | Terwujudnya standarisasi dan perlindungan konsumen | 100% | 80,000,000 | 1,435,000,000 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kab. Belu | | Jumlah alat UTTP dan perlengkapannya yang memenuhi aturan perundang undangan Jumlah sarana peralatan laboratorium standar ukur/kerja yang diadakan Jumlah sarana peralatan laboratorium standar ukur/kerja yang dikalibrasi | 2500 Unit 2 Unit/Paket 235 Unit | | | 75,000,000 | 1,350,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|-----------|-----|------|---|---------------------|---|------|--------------------|----------------------|------|
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Kab. Belu | | | Jumlah Objek Dagang yang diawasi Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen | 1000 unit 8 kali | | | 2,500,000 | 65,000,000 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 03 | Penyidikan Metrologi Legal | Kab. Belu | | | Jumlah Penyidikan Metrologi Legal | 1 Kali | | | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | 636,515,600 | 7,534,380,000 | |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | 629,015,600 | 7,490,580,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 100% | | | Terwujudnya kelompok usaha bersama dan IKM yang berkualitas | 100% | 621,515,600 | 7,490,580,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 2 Kali | | | 586,515,600 | 5,036,900,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Paket | | | 10,000,000 | 2,164,480,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Paket | | | 10,000,000 | 96,000,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kab. Belu | | | Jumlah pameran yang diikuti oleh pelaku IKM | 6 Paket | | | 10,000,000 | 116,400,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kab. Belu | | | Jumlah Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Paket | | | 5,000,000 | 76,800,000 | |
| 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | 100% | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) | | | | 7,500,000 | 43,800,000 | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | Tersedianya Data dan Informasi Industri yang menjadi kewenangan Kabupaten | 100% | 7,500,000 | 43,800,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|--|----|----|------|----|---|-------------|-----|------|--|--------------|--|------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Kab. Belu | | | Jumlah Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Paket | | | 5,000,000 | 24,600,000 | | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 02 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | Kab. Belu | | | Jumlah Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | 1 Paket | | | 2,500,000 | 19,200,000 | | |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | 45,010,478,286 | 61,042,704,720 | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | 45,010,478,286 | 61,042,704,720 | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 17,939,774,982 | 26,972,001,416 | | |
| 4 | 01 | | | | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | 1,115,586,699 | 1,577,646,840 | | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 1,048,561,266 | 1,060,671,840 | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 875,987,516 | 752,645,090 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | jumlah PNS yang dibayarkan gajinya | 14 Bulan | | | 786,799,516 | 653,457,090 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Paket | | | 89,188,000 | 99,188,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | - | 19,200,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Atambua | | | jumlah perlengkapan pakaian dinas yang dibeli | 24 set | | | - | 19,200,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 71,009,350 | 184,062,350 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | | | 1,009,350 | 1,009,350 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Unit | | | 10,000,000 | 20,713,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 48900 Lembar | | | 10,000,000 | 24,480,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Kunjungan Tamu | 10 Kali | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Luar Daerah | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Kali | | | 25,000,000 | 112,860,000 | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------------------|----|----|------|-----|--|-----------|--|------|---|---|------|---------------|---------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 13,801,900 | 17,001,900 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 10 Kali | | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang terbayar | 3 Rekening | | 10,000,000 | 13,200,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10 Jenis | | 2,001,900 | 2,001,900 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 100% | 87,762,500 | 87,762,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Paket | | 85,012,500 | 85,012,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara | 1 Paket | | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Nilai LPPD | 100% | | | | 67,025,433 | 516,975,000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | 100% | 67,025,433 | 516,975,000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Atambua | | | Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan | 2 Dokumen | | - | - | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Atambua | | | Jumlah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Paket | | - | - | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Belu | | | jumlah dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum frkasi DPRD jumlah dokumen LKPj kepala daerah jumlah dokumen LPPD & RLPPD Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional jumlah rapat koordinasi | 3 dokumen 1 dokuemn 2 dokumen 5 kegiatan 4 kali | | 67,025,433 | 516,975,000 | |
| BAGIAN HUKUM | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 1,064,421,794 | 1,535,504,104 | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 850,655,623 | 943,424,704 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|-------------|--|---|--------------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|--|
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi | 1 dok | 20,800,000 | 20,800,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | 1 dok | | | | 20,800,000 | 20,800,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 686,222,623 | 684,121,704 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayar | 14 Bulan | | | | 648,622,623 | 641,521,704 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | | | | 37,600,000 | 42,600,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 76,958,500 | 135,078,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan | 5 Unit | | | | 16,958,500 | 16,958,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 33000 Lembar | | | | 10,000,000 | 16,500,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Luar Daerah | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Kali | | | | 50,000,000 | 101,620,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 15,174,500 | 15,174,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 10 Kali | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek | | | | 10,560,000 | 10,560,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10 Jenis | | | | 1,814,500 | 1,814,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 51,500,000 | 88,250,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Paket | | | | 50,000,000 | 84,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Paket | | | | 1,500,000 | 4,250,000 | |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif | 100% | | | | | 213,766,171 | 592,079,400 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100% | 213,766,171 | 592,079,400 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Kab. Belu | | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah | 1 Paket | | | | 143766171 | 344,393,000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Belu | | Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 Paket | | | | 50,000,000 | 205,333,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------|-----|------|---|--------------|--|------|----------------------|----------------------|------|
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 1 Paket | | | 20,000,000 | 42,353,400 | |
| BAGIAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 1,007,467,063 | 1,796,245,104 | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 849,568,692 | 1,635,188,766 | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 711,795,742 | 1,494,660,357 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 628,795,742 | 644,515,636 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Honor Pengelola Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Paket | Tersedianya Honor Pengelola Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 83,000,000 | 84,660,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | - | - | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10 Kali | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100% | - | - | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 43,956,300 | 44,835,426 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 50 Jenis | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100% | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 12900 Lembar | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 6,456,300 | 6,585,426 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Makan dan Minum Tamu yang diadakan | 231 Kotak | Tersedianya Makan dan Minum Tamu yang diadakan | 100% | 2,500,000 | 2,550,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Kali | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 16,100,000 | 16,422,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 10 Kali | Terlaksananya Jasa Surat Pengiriman Menyurat | 100% | 1,500,000 | 1,530,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek | terbayar Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 9,600,000 | 9,792,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10 Jenis | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 77,716,650 | 79,270,983 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|------------------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------|-----|------|--|--------------|---|------|---------------|---------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Paket | terpeliharanya , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100% | 73,196,650 | 74,660,583 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Paket | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | 4,520,000 | 4,610,400 | |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | 157,898,371 | 161,056,338 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | | | | | 157,898,371 | 161,056,338 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | 99,119,371 | 101,101,758 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | 50,000,000 | 51,000,000 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | 8,779,000 | 8,954,580 | |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | | | | | | | 1,990,379,059 | 2,470,849,910 | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 1,990,379,059 | 2,470,849,910 | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 853,711,659 | 923,729,910 | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 754,029,059 | 756,094,510 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | | | 698,379,059 | 690,444,510 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD | 1 Paket | | | 55,650,000 | 65,650,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 40,000,000 | 107,952,800 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Unit | | | 5,000,000 | 20,806,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 14000 Lembar | | | 10,000,000 | 7,026,300 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Kali | | | 25,000,000 | 80,120,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 15,050,100 | 15,050,100 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Benda Pos Yang dibeli | 104 Lembar | | | 1,152,000 | 1,152,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Rek Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek | | | 9,600,000 | 9,600,000 | |

| (1) | | | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--------------------------|----|----|------|-----|--|-----------|-----|---|--|----------|---|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Unit | | | 1,750,000 | 1,750,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20 Jenis | | | 2,548,100 | 2,548,100 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 44,632,500 | 44,632,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Belu | | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara | 1 Paket | | | 44,632,500 | 44,632,500 | |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Prosentase capaian fasilitas pemberdayaan masyarakat | | | | | 1,136,667,400 | 1,547,120,000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 1,136,667,400 | 1,547,120,000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 1 Paket | | | 29,166,933 | 211,560,000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Belu | | | Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1 Paket | | | 1,107,500,467 | 1,335,560,000 | |
| BAGIAN ORGANISASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 1,404,065,211 | 2,383,345,911 | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 904,065,211 | 2,383,345,911 | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dok | | | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 670,525,161 | 670,525,161 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | | | 649,014,161 | 649,014,161 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Pengelola Keuangan | 12 Bulan | | | 21,511,000 | 21,511,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--------------------|----|----|------|-----|--|--------------------------|---|---|-------------|---|------|----------------------|-----------------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 104,190,500 | 128,430,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 30 Jenis | | | 10,390,500 | 10,390,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Atambua | | Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan | 7600 Lembar | | | 3,800,000 | 3,800,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | Jumlah Makan dan Minum yang diadakan | 200 Kotak | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Kali | | | 80,000,000 | 104,240,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | - | 15,550,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Unit | | | - | 15,550,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 12,588,600 | 12,588,600 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | Jumlah Benda Pos Yang dibeli | 323 Lembar | | | 3,561,000 | 3,561,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek | | | 7,200,000 | 7,200,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20 Jenis | | | 1,827,600 | 1,827,600 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 99,760,950 | 99,760,950 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara | 1 Paket | | | 98,510,950 | 98,510,950 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Paket | | | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | Meningkatnya Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 100% | | | | 500,000,000 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | | | | | Terlaksananya Penataan Organisasi | 100% | 500,000,000 | 1,439,490,700 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Atambua | | Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 Dok | | | 400,000,000 | 519,834,500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Atambua | | Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Paket | | | 300,000,000 | 430,242,600 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Belu | | Jumlah Dokumen Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dok | | | 300,000,000 | 489,413,600 | |
| BAGIAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 8,082,393,801 | 12,518,481,663 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|-----|-----|------|------|---|--------------------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | 8,082,393,801 | 12,518,481,663 | |
| | | | | 100% | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 4,436,860,625 | 4,349,385,163 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 100% | 2,885,620,625 | 2,798,145,163 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah Honor Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 1,551,240,000 | 1,551,240,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100% | 95,000,000 | 95,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Atambua | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | 95,000,000 | 95,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100% | 634,533,176 | 1,543,096,500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan | | 50,000,000 | 72,096,500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 20,000,000 | 50,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Atambua | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | Jumlah Makanan dan Minuman | | 200,000,000 | 560,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | Jumlah Rapat dan Koordinasi | | 253,533,176 | 750,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100% | 70,000,000 | 2,070,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang diadakan | | - | 2,000,000,000 |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|----------------------------------|-----|-----|--|--------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | | Jumlah Meubel yang diadakan | 1 Paket | | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan | 1 Paket | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 366,000,000 | 366,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Benda Pos Yang dibeli Jumlah Paket Pengiriman | 1500 Lembar 6 Kali | | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Rekening | 12 Rekening | | | 290,000,000 | 290,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan Kebersihan yang diadakan | 36 Jenis | | | 61,000,000 | 61,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 615,000,000 | 830,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 2 Unit | | | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara | 47 unit | | | 400,000,000 | 500,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan yang dipelihara | 24 Unit | | | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 1 Unit | | | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah rumah Jabatan yang dipelihara | 2 unit | | | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 3 Unit | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 1,815,000,000 | 3,215,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | | Jumlah Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Beserta Atribut yang diadakan | 42 Pasang | | | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan | 2 Kali | | | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|-----|---|--------------------------|-----|--|--|--|------|--------------------|----------------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Belu | | Jumlah Dialog yang dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Jumlah Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat Jumlah Tim Koordinasi | 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket | | | 1,500,000,000 | 2,900,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Atambua | | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan | 1 Paket | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 832,521,379 | 1,617,800,506 | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 602,521,379 | 1,383,200,506 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 416,507,944 | 1,193,466,803 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 393,707,944 | 403,550,642 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah Honor Pengelola Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Paket | Tersedianya Honor Pengelola Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 22,800,000 | 23,256,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 20,646,585 | 21,059,517 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10 Kali | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100% | 20,646,585 | 21,059,517 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 75,563,800 | 77,075,076 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 50 Jenis | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100% | 17,557,500 | 17,908,650 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 12900 Lembar | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 6,456,300 | 6,585,426 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | Jumlah Makan dan Minum Tamu yang diadakan | 231 Kotak | Tersedianya Makan dan Minum Tamu yang diadakan | 100% | 11,550,000 | 11,781,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Kali | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 40,000,000 | 40,800,000 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|--|-----|-----|------|-----|--|---|--|----------|---|------------|---------------|---------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 12,086,400 | 12,328,128 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 10 Kali | Terlaksananya Jasa Surat Pengiriman Menyurat | 100% | 996,000 | 1,015,920 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek | terbayar Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 9,600,000 | 9,792,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10 Jenis | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 1,490,400 | 1,520,208 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 77,716,650 | 79,270,983 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Paket | terpeliharanya , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100% | 73,196,650 | 74,660,583 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | JumlahPeralatan dan Mesin Lainnya | 1 Paket | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | 4,520,000 | 4,610,400 |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | 230,000,000 | 234,600,000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 230,000,000 | 234,600,000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Atambua | Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa | 10 Unit | Tersedianya Barang dan Jasa | 100% | 100,000,000 | 102,000,000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Atambua | Jumlah Layanan Pengadaan secara Elektronik | 1 Paket | Terlaksananya Layanan Pengadaan secara Elektronik | 100% | 100,000,000 | 102,000,000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Atambua | Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Paket | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 100% | 30,000,000 | 30,600,000 |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 1,499,462,732 | 2,128,650,133 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- -Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- -Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 1,499,462,732 | 2,128,650,133 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 100% | 902,588,702 | 517,919,183 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 14 Bulan | | | 641,588,702 | 495,119,183 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | Jumlah Pengelola Keuangan | 4 Orang | | | 261,000,000 | 22,800,000 |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|--|-----|---|---------------------------------------|---|------|-------------|-------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 10,000,000 | 50,387,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 22 Pasang | | | 10,000,000 | 21,827,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Diklat Formal | 2 Kali | | | - | 28,560,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 56,188,030 | 148,514,250 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik | 3 Jenis | | | 2,496,550 | 2,496,550 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah ATK yang disediakan | 20 Jenis | | | 10,204,180 | 13,520,400 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah barang cetakan Jumlah Jilid Jumlah penggandaan | 3 Dokumen 150 Buku 39041 Lembar | | | 15,987,300 | 15,987,300 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Makanan dan Minuman | 380 Kotak | | | 2,500,000 | 9,990,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah | 35 Kali | | | 25,000,000 | 106,520,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 25,000,000 | 120,750,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Barang yang disediakan | 8 Unit | | | 25,000,000 | 120,750,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 18,150,000 | 24,650,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Benda Pos dan Jumlah Surat yang dikirim | 1767 Lembar | | | 1,500,000 | 8,000,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Rekening Telepon | 1 Rekening | | | 11,400,000 | 11,400,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | 11 Unit | | | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor | 18 Jenis | | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 157,536,000 | 214,394,700 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 10 Unit | | | 120,000,000 | 149,394,700 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--------------------------|----|----|------|----|--|-----|--|------|---|----------|--|------|----------------|----------------|------|
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 10 Jenis | | | 1,789,950 | 1,789,950 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 43,848,000 | 43,848,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 7 Unit | | | 41,948,000 | 41,948,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 9 Unit | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 Unit | | | 400,000 | 400,000 | |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | Meningkatnya Koordinasi perekonomian dan pembangunan daerah | 100% | | | | | 221,276,276 | 221,276,276 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | Lancarnya koordinasi perekonomian daerah | | 182,801,276 | 182,801,276 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 12 Kali | | | 50,425,000 | 50,425,000 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | Jumlah pengendalian inflasi daerah | 12 Kali | | | 73,106,276 | 73,106,276 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | | | | Jumlah pengawasan dan perencanaan ekonomi | 12 Kali | | | 59,270,000 | 59,270,000 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | | | Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam | | 38,475,000 | 38,475,000 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | Jumlah pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH | 8 Kali | | | 38,475,000 | 38,475,000 | |
| SEKRETARIAT DEWAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | | | 27,070,703,304 | 34,070,703,304 | |
| 4 | 02 | 01 | | | | | | | | | | | 19,456,251,857 | 20,768,455,081 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100% | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 15,000,000 | 30,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---------------------------------------|-----|-----|---|---------------|--|------|----------------|----------------|------|
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Dokumen Yang disusun | 20 dokumen | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Dokumen Yang disusun | 20 dokumen | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Dokumen Yang disusun | 20 dokumen | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 17,583,751,857 | 16,783,473,661 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | | | 16,924,751,857 | 16,583,473,661 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD | 12 orang | | | 659,000,000 | 200,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 355,000,000 | 695,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan | 20 jenis | | | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | Jenis | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan | 1015 dokumen | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | 498177 lembar | | | 20,000,000 | 60,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat yang disediakan | 3 jenis | | | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi, Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Dos | | | 50,000,000 | 350,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | - | - | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | 6 unit | | | - | - | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah mebel yang diadakan | 4 unit | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan | Unit | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah gedung kantor | 1 unit | | | - | - | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 202,500,000 | 375,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---------------------------------------|-----|---|---|---------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|------|
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah benda pos yang dibeli | 12.210 lembar | | | 2,500,000 | 25,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Rekening | Rekening | | | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Honor PTT cleaning service Jumlah peralatan kebersihan kantor | 9 orang 30 jenis | | | 50,000,000 | 200,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 110,000,000 | 433,881,420 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Honorarius PTT pengemudi Jumlah Kendaraan Dinas | 8 orang 9 unit | | | 100,000,000 | 350,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara | Unit | | | 5,000,000 | 43,881,420 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 uit | | | 5,000,000 | 40,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100% | 100,000,000 | 203,100,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah pakaian dinas yang di adakan | 120 pasang | | | 100,000,000 | 203,100,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD | 100% | 1,090,000,000 | 2,248,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah fasilitasi fraksi dprd | Kali | | | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah fasilitasi kegiatan rapat-rapat paripurna | 12 kali | | | 500,000,000 | 922,000,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD | Jenis | | | 500,000,000 | 1,236,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | Persentase Perda yang ditetapkan | 100% | | | | 7,614,451,447 | 13,302,248,223 | |
| | | | | | | | | Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu | 100% | | | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100% | 750,000,000 | 1,250,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan | 15 perda | | | 500,000,000 | 800,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Rancangan Perda | 2 perda | | | 150,000,000 | 300,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah kegiatan Badan Kehormatan | 12 kali | | | 100,000,000 | 150,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|----|------|-----|--|---------------------------------------|-----|--|-----------|---|------|------------------------|------------------------|------|
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100% | 500,000,000 | 1,200,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah kegiatan badan anggaran | 22 kali | | | 500,000,000 | 1,200,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | Meningkatnya Kapasitas DPRD | 100% | 550,000,000 | 852,248,223 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah Bimtek yang diikuti | Kali | | | 500,000,000 | 802,248,223 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah Publikasi dan Dokumentasi | 12 kali | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100% | 3,000,000,000 | 4,400,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah kunjungan | Kali | | | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah pelaksanaan reses | Kali | | | 2,500,000,000 | 3,900,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | Terfasilitasinya Tugas DPRD | 100% | 2,814,451,447 | 5,600,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah fasilitasi Kegiatan alat kelengkapan Komsis 1,2,3 | 25 kali | | | 1,714,451,447 | 4,000,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah fasilitasi Kegiatan alat kelengkapan badan musyawarah | 15 kali | | | 350,000,000 | 600,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah fasilitasi Kegiatan Pimpinan | 20 kali | | | 750,000,000 | 1,000,000,000 | |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | 206,589,322,647 | 211,519,940,559 | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | 5,790,841,078 | 8,501,863,885 | |
| 5 | 01 | 01 | | | PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 5,677,341,078 | 8,056,297,885 | |
| 5 | 01 | 01 | | | | | | | | | | 4,647,341,078 | 4,367,587,985 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 2 dokumen | | | 5,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Atambua | | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun | 1 Dokumen | | | 5,000,000 | 62,110,500 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Atambua | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD | 1 Dokumen | | | 5,000,000 | 20,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|-------------------|-----|-----|--|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Atambua | | | Jumlah DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 5,000,000 | 20,618,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Atambua | | | Jumlah Perubahan DPA SKPD | 1 Dokumen | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Atambua, Provinsi | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 2 dokumen | | 5,000,000 | 211,638,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 4,239,027,134 | 2,968,998,985 |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 35 orang | | 3,779,027,134 | 2,492,286,985 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Atambua | | | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN | 553 dokumen | | 5,000,000 | 72,300,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 bulan | | 449,000,000 | 361,556,500 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Atsmbus | | | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun | 1 dokumen | | 2,000,000 | 10,309,500 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Atambua | | | Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan | 2 dokumen | | 2,000,000 | 13,172,500 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Atsmbus | | | Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran | 17 dokumen | | 2,000,000 | 19,373,500 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100% | 2,500,000 | 16,239,000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Atsmbus | | | Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD | 2 dokumen | | 2,500,000 | 16,239,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 5,000,000 | 131,340,000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Atsmbus | | | Tersedianya data kepegawaian | 35 Orang | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Luar Provinsi | | | Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti | 2 kali | | - | 111,340,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 113,253,344 | 404,987,600 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah komponen Instalasi listrik yang dibeli | 7 jenis | | 3,126,000 | 3,126,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah alat tulis yang disediakan | 29 jenis | | 20,000,000 | 37,652,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah buku/laporan yang dijilid dan jumlah penggandaan | 509 buku dan 70382 lembar | | 20,000,000 | 29,209,600 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 500 kotak | | 25,000,000 | 35,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-------------------------------------|-----|-----|---|---|---|------------------|--------------------|----------------------|------|
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah perjalanan dinas keluar daerah | 25 kali | | | 45,127,344 | 300,000,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor | | 52,000,000 | 113,904,900 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah benda pos yang dibeli dan Jumlah surat/paket yang dikirim | 500 lembar dan 5 kali | | | 6,500,000 | 6,500,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah rekening listrik, telepon dan air | 3 rekening | | | 35,500,000 | 58,200,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Non PNS (Tenaga Kebersihan) yang dibayar dan Jumlah peralatan / bahan kebersihan yang dibeli | 2 orang dan 17 jenis | | | 10,000,000 | 49,204,900 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor | 100% | 205,560,600 | 347,751,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Non PNS (Tenaga Sopir) yang dibayar | 13 unit (5 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2) dan 5 orang | | | 200,000,000 | 327,751,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah peralatan kerja (Laptop dan printer) yang diperbaiki | 10 unit dan 5 unit | | | 3,000,000 | 8,000,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara | 1 unit | | | 1,560,600 | 10,000,000 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (AC) | 5 unit | | | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | 550,000,000 | 2,357,594,500 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah | 2 dokumen | 400,000,000 | 1,815,642,500 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Usulan Dana DAK | 562 usulan | | | 50,000,000 | 150,832,000 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Atambua | | | Jumlah kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah | 2 kali | | | 50,000,000 | 242,725,500 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Atambua | | | Jumlah kegiatan musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 kali | | | 100,000,000 | 140,000,000 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Kecamatan, Atambua | | | Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan | 1 kali | | | 50,000,000 | 268,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|-------------------------------------|--|------|--|---|--|-------------|---------------|---------------|--|
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun | 2 dokumen | | 150,000,000 | 1,014,085,000 | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | Tersedianya dokumen hasil analisis data dan informasi | 3 dokumen% | 100,000,000 | 307,040,000 | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Atambua | | | Jumlah buku profil yang dicetak dan Jumlah buku publikasi Belu Dalam Angka yang dicetak | 125 buku dan 100 buku | | 25,000,000 | 79,070,000 | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah buku SIPD yang dicetak | 15 buku | | 75,000,000 | 227,970,000 | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | Tersedianya Dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah | 3 dokumen | 50,000,000 | 234,912,000 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Atambua dan Provinsi | | | Jumlah kegiatan evaluasi dokumen perencanaan | 4 kali | | 50,000,000 | 234,912,000 | | |
| 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | Persentase Konsistensi Dokumen perencanaan bidang pemsosbud, ekonomi dan infrastruktur | 100% | | | | | 480,000,000 | 1,331,115,400 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang PPM | 1 dokumen | 170,000,000 | 442,894,500 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dok perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan | 10 kali | | 25,000,000 | 76,360,000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Atambua | | | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 2 kali | | 25,000,000 | 36,840,000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Atambua dan Kecamatan | | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4 kali | | 25,000,000 | 50,060,000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | 10 kali | | 25,000,000 | 48,423,600 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Atambua dan provinsi | | | Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | 2 kali | | 25,000,000 | 51,923,400 | | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-------------------------------------|-----|-----|--|---------|--|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Atambua dan Kecamatan | | | Jumlah pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | 4 kali | | | 25,000,000 | 91,260,300 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5 kali | | | 20,000,000 | 88,027,200 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 1 dokumen | 160,000,000 | 438,469,900 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dilakukan | 10 kali | | | 25,000,000 | 78,701,900 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Atambua, Provinsi | | | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 2 kali | | | 25,000,000 | 58,672,500 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Atambua, dan Kecamatan | | | Jumlah monev penyusunan dok perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian | 4 kali | | | 30,000,000 | 68,680,900 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 10 kali | | | 25,000,000 | 77,471,300 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Atambua, Provinsi | | | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 2 kali | | | 25,000,000 | 77,471,800 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Atambua, dan Kecamatan | | | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 4 kali | | | 30,000,000 | 77,471,500 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | | | | | | Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur | 1 dokumen | 150,000,000 | 449,751,000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 10 kali | | | 25,000,000 | 169,436,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------|---|-----------|--|-----------|-------------|-------------|--|
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Atambua, Provinsi | | | Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | 2 kali | | | 25,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Atambua, dan Kecamatan | | | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 kali | | | 25,000,000 | 45,260,000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Atambua, Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10 kali | | | 25,000,000 | 65,055,000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah | Atambua, Provinsi | | | Jumlah asistensi penyusunan dok perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang wilayah | 3 kali | | | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah | Atambua, dan Kecamatan | | | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah | 4 kali | | | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | 113,500,000 | 445,566,000 | |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | Indeks Government Award (IGA) | kategori | | | | | 113,500,000 | 445,566,000 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan | 1 dokumen | 25,000,000 | 141,330,000 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Atambua dan Provinsi | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata | 1 dokumen | | | 25,000,000 | 141,330,000 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan | 1 dokumen | 50,000,000 | 141,628,000 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Atambua dan Provinsi | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup | 1 dokumen | | | 50,000,000 | 141,628,000 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | Tersedianya dokumen penelitian Inovasi dan Teknologi | 1 dokumen | 38,500,000 | 162,608,000 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Atambua dan Provinsi | | | Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi | 1 dokumen | | | 25,000,000 | 135,288,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|---|----|----|------|----|--|---------------------------------------|-----|------|--|----------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|------|--|
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Atambua dan Provinsi, Luar Provinsi | | | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 1 kali | | | 10,000,000 | 13,760,000 | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Atambua | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang dilakukan | 1 kali | | | 3,500,000 | 13,560,000 | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | | | 166,705,027,494 | 187,490,128,392 | | |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | | | 161,827,116,093 | 187,490,128,392 | | |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 157,557,864,593 | 182,992,092,192 | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 119,890,000 | 119,890,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Terciptanya laporan kinerja yang baik |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 5 Dokumen | | | 69,890,000 | 69,890,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | 3 Dokumen | | | | | | |
| 5 | 02 | 00 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 156,545,874,593 | 176,565,664,091 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah ASN | | | | 5,993,877,565 | 14,430,452,435 | | |
| | | | | | | | | | | 44 Orang | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Tenaga Administrasi, Tenaga Kontrak dan Desa | 21 Orang dan 69 Desa | | | 150,551,997,028 | 162,135,211,656 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 101,400,000 | 102,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal | 2 Kali | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | | Jumlah Bimbingan Teknis | 1 Kali | | | 51,400,000 | 52,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 468,750,000 | 647,470,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banqunan Kantor | Atambua | | | Jumlah komponen instalasi listrik | 5 jenis | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|--------------------------|---|------|---|----------------------|-----|----------------------|----------------------|------|
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 42 Jenis dan 30 Unit | | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah Dokumen yang digandakan | 255.000 Lembar | | 193,750,000 | 193,750,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah makanan dan minuman | 1 Paket | | 10,000,000 | 35,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Paket | | 100,000,000 | 253,720,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 36,000,000 | 5,191,753,101 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah gedung Kantor atau bangunan Lainnya | 1 unit | | 16,000,000 | 5,016,753,101 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung | 170 unit | | 20,000,000 | 175,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 60,950,000 | 70,978,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Benda Pos yang dibeli | 3500 lembar | | 10,000,000 | 20,028,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Kebutuhan Air Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Telepon/internet | 2 rekening | | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan | 18 jenis | | 17,950,000 | 17,950,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 225,000,000 | 294,337,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara | 40 unit | | 200,000,000 | 230,491,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan yang di pelihara | 81 unit | | 25,000,000 | 63,846,000 | |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | Meningkatnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) | 100% | | | | 3,457,717,000 | 3,686,501,700 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | | 2,027,521,000 | 2,118,005,700 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen KUA PPAS | 1 dokumen | | 100,000,000 | 130,097,700 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen KUA dan Dokumen PPAS | 1 Dokumen | | 130,050,000 | 130,050,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen RPA | 105 opd | | 188,850,000 | 188,850,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen DPA | 105 opd | | 188,850,000 | 188,850,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-----------|-----|-----|--|------------|-----|-----|--------------------|--------------------|------|
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen PERDA ttg APBD dan PERKADA ttg Penjabaran APBD | 2 Dokumen | | | 100,000,000 | 123,213,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen PERDA ttg Perubahan APBD dan PERKADA ttg Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | | | 106,945,000 | 106,945,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 3 Dokumen | | | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah | 1 Dokumen | | | 31,413,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat | 6 kali | | | 550,000,000 | 550,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan | 1 Dokumen | | | 31,413,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | 561,700,000 | 700,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Pencairan Dana | 10000 SP2D | | | 84,700,000 | 223,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Anggaran Kas Kabupaten | 1 Dokumen | | | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi, Asistensi dan Rekonsiliasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 kali | | | 165,000,000 | 165,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi Transaksi Non Tunai Dengan Bank | 12 kali | | | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Dokumen Pemungutan PFK | 2 Dokumen | | | 82,000,000 | 82,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Belu | | | Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas | 12 kali | | | 65,000,000 | 65,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|-----------|---|------|---|--|--|-------------|-------------|------|
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah dan PERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | 868,496,000 | 868,496,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Rekonsiliasi Dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi | 12 kali | | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen SPJ OPD yang Diverifikasi | 105 Dokumen | | 88,288,000 | 88,288,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan Pemerintah Daerah | 105 Dokumen | | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen PERDA ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan PERKADA ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 Dokumen | | 232,050,000 | 232,050,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Belu | | | Jumlah Koordinasi dan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK | 6 kali | | 120,208,000 | 120,208,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Evaluasi dan TP-TGR | 2 kali | | 157,950,000 | 157,950,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban | 12 bulan | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi | 1 Dokumen | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | Meningkatnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) | 100% | | | | 811,534,500 | 811,534,500 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | Terciptanya Cakupan Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan pengamanan aset daerah yang Akuntabel | 811,534,500 | 811,534,500 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--------------------------------|----|----|------|----|---|---------|-----|------|--|------------|--|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Atambua | | | Jumlah Dokumen Standar Harga BMD | 1 Dokumen | | | 113,194,000 | 113,194,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Atambua | | | Jumlah Dokumen KIR & KIB | 105 opd | | | 147,380,000 | 147,380,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Atambua | | | Jumlah Tanda/plang dan Sertifikat Atas BMD | 17 plang | | | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Atambua | | | Jumlah Penghapusan dan Pemusnahan BMD | 105 opd | | | 222,905,500 | 222,905,500 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Atambua | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD | 12 Dokumen | | | 47,380,000 | 47,380,000 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Atambua | | | Jumlah Laporan BMD | 105 opd | | | 80,675,000 | 80,675,000 | |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | | | 4,877,911,401 | 7,738,560,782 | |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 4,238,667,241 | 3,630,013,840 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 100% | 3,893,044,591 | 2,628,332,690 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan | 14 Bulan | | | 3,424,750,591 | 2,459,038,690 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | jumlah pejabat pengelola keuangan dan pegawai honorer | 26 OB | | | 468,294,000 | 169,294,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | - | 80,690,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | | jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 7 orang | | | - | 80,690,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan administrasi umum | | 174,622,650 | 600,888,150 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | jumlah komponen instalasi listrik | 5 jenis | | | 5,277,650 | 5,277,650 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | jumlah ATK yang tersedia | 34 jenis | | | 10,000,000 | 157,145,500 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 5 jenis | | | 131,845,000 | 131,845,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|---------|--------------------------------|-----|--|----------------------------|--|--------------------|----------------------|------|
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | jumlah makan minum yang tersedia | 1000 kotak/porsi | | 2,500,000 | 25,000,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Atambua | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | 38 kali | | 25,000,000 | 281,620,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 12,800,000 | 24,184,800 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | | jumlah meubelair yang diadakan | 4 unit | | - | 11,384,800 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan | 1 Paket | | 12,800,000 | 12,800,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 53,200,000 | 126,825,600 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah surat-surat yang terkirim dan jumlah benda pos yang dibeli | 3900 lembar | | 5,000,000 | 43,546,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, internet yang dibayar | 3 rekening | | 43,200,000 | 43,200,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | jumlah peralatan kebersihan yang disediakan | 19 jenis | | 5,000,000 | 40,079,600 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 105,000,000 | 169,092,600 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 16 unit | | 100,000,000 | 137,698,100 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | | 5,000,000 | 31,394,500 | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | Meningkatnya Pendapatan Daerah | | | | | 639,244,160 | 4,108,546,942 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | | | | | | Lancarnya Pengelolaan Pendapatan Daerah | 639,244,160 | 4,108,546,942 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Atambua | | | jumlah kegiatan evaluasi, jumlah kegiatan penggalian potesi pajak daerah, jumlah kegiatan sosialisasi | 4 kali, 10 kali dan 6 kali | | 176,694,942 | 1,466,694,942 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Atambua | | | Jumlah kegiatan pendataan dan pemutahiran data | 3 kali | | 73,223,699 | 257,365,000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Atambua | | | jumlah data realisasi dan tunggakan PAD, jumlah kegiatan rekonsiliasi dan jumlah petapersil objek PBB-P2 | 12 DOK, 12 Kali, 1 DOK | | 25,000,000 | 923,425,000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Atambua | | | Jumlah pelayanan dan konsultasi | 20 kali | | 10,000,000 | 87,756,000 | |

| (1) | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----|-----|------|-----|---|------------|--|---|--|------|----------------|----------------|------|
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Atambua | | jumlah data realisasi dan tunggakan pendapatan asli daerah, jumlah dokumen monitoring dan evaluasi, jumlah kegiatan operasi penertipan pajak daerah dan retribusi daerah, jumlah kegiatan monev pengelolaan PAD | 12 dok, 9 DOK, 2 kali, 12 kali | | 354,325,519 | 1,373,306,000 | |
| BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN | | | | | | | | |
| 5 | 03 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 31,718,528,683 | 13,153,022,890 | |
| 5 | 03 | 01 | | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 27,523,655,193 | 10,501,581,500 | |
| | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 22,500,000 | 40,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Atambua | | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 7 dokumen | | 10,000,000 | 27,500,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Atambua | | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun | 3 dokumen | | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 27,243,061,193 | 9,867,897,500 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, | | Jumlah ASN yang dibayar | 200 orang | | 27,067,061,193 | 9,670,811,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, | | Jumlah pengelola keuangan perangkat daerah dan tenaga kontrak daerah | 11 orang | | 176,000,000 | 197,086,500 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 68,849,000 | 281,349,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Atambua | | Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Atambua | | Jumlah ASN yang mendapat kartu pegawai, taspen dan kartuisteri/suami | 150 orang | | 36,349,000 | 36,349,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Atambua | | Jumlah data laporan kinerja ASN yang di input secara elektronik | 3935 orang | | 10,000,000 | 50,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|----------------------------|-----|-----|--|------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|------|
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Atambua | | | Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 4 dokumen | | | 5,000,000 | 30,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Atambua | | | Jumlah peserta diklat pegawai sesuai tugas dan fungsi | 7 orang | | | - | 70,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Atambua | | | Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian | 1 kegiatan | | | 2,500,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Atambua | | | Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan kepegawaian | 1 kegiatan | | | 5,000,000 | 35,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 52,500,000 | 138,090,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, | | | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 26 jenis | | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, | | | Jumlah barang cetakan dan jilid Jumlah penggandaan | 300 buku/dos 32576 lembar | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab. Belu, | | | Jumlah makanan dan minuman | dos | | | 2,500,000 | 13,090,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah perjalanan dinas keluar daerah | 25 kali | | | 25,000,000 | 100,000,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 9,300,000 | 9,300,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan | 2 unit | | | - | - | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | 2 unit | | | 9,300,000 | 9,300,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1 unit | | | - | - | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 18,695,000 | 18,695,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah benda pos yang dibeli Jumlah pengiriman/paket | 250 lembar 15 paket | | | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah rekening telepon dan listrik | 2 rekening | | | 12,750,000 | 12,750,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan | 11 jenis | | | 1,445,000 | 1,445,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 108,750,000 | 146,250,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 13 unit | | | 100,000,000 | 137,500,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-------------------------------------|--|-----------|-----|-----|--|------------|---|------|---------------|---------------|------|
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 21 unit | | | 5,250,000 | 5,250,000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | | | - | - | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang dipelihara | 10 unit | | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | Persentase PNS berkembang karier | 100% | | | 3,055,406,000 | 2,074,854,900 | |
| | | | | Tingkat Pelaporan Kinerja ASN | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Keterisian Jabatan | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Keterpenuhan Formasi ASN | | 100% | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100% | 551,551,100 | 701,500,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan ASN yang disusun | 1 dokumen | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Kab. Belu | | | Jumlah calon ASN yang dibutuhkan sesuai formasi | 200 orang | | | 350,051,100 | 500,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Kab. Belu | | | Jumlah ASN yang mendapat SK pensiun | 139 orang | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Kab. Belu | | | Jumlah fasilitasi kelembagaan profesi ASN | 2 kali | | | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Belu | | | Jumlah aplikasi simpeg yang dikelola | 1 unit | | | 21,500,000 | 21,500,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Kab. Belu | | | Jumlah data anggota KORPRI yang dimutakhirkan | 3935 orang | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN | 100% | 197,854,900 | 197,854,900 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kab. Belu | | | Jumlah ASN yang mendapat SK kenaikan pangkat | 750 orang | | | 97,854,900 | 97,854,900 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan pembinaan karier ASN | 6 kali | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN | 100% | 2,286,000,000 | 1,155,500,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Kab. Belu | | | Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijasah | 100 orang | | | 1,155,500,000 | 25,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kab. Belu | | | Jumlah ASN yang memenuhi syarat tugas belajar dan ijin belajar | 38 orang | | | 1,130,500,000 | 1,130,500,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Kab. Belu | | | Jumlah ASN yang memenuhi syarat mendapat penghargaan | 150 orang | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Kab. Belu | | | Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN | 20 kasus | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----------------------------------|-----|-----|------|--|--|------|--|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 5 | 04 | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase PNS berkembang kompetensinya | 100% | | | | 1,139,467,490 | 576,586,490 | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100% | 1,139,467,490 | 576,586,490 | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Provinsi | | Jumlah peserta diklat dasar bagi calon PNS daerah Jumlah peserta diklat struktural bagi ASN daerah | 150 orang | | | 1,139,467,490 | 576,586,490 | |
| BADAN PENGELOLA PERBATASAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 5 | 06 | | | PENGELOLAAN PERBATASAN | | | | | | 2,374,925,392 | 2,374,925,392 | | |
| 5 | 06 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 1,914,318,688 | 1,814,925,392 | | |
| 5 | 06 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 1,792,318,688 | 1,452,925,392 | | |
| 5 | 06 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | 19 orang | | | 1,682,318,688 | 1,272,925,392 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD | 4 orang | | | 110,000,000 | 180,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 100% | 74,000,000 | 171,500,000 | | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah Komponen Alat Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 jenis | | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan komputer yang 7 Jenis disediakan | 35 jenis | | | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Atambua | | Jumlah Peralatan dan Meubeler yang diadakan | 5 unit | | | 5,000,000 | 17,500,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Atambua | | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 25 jenis | | | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|--------------------------|-----|--|---|----------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Jumlah barang cetak dan penggandaan | 51400 lembar 25 buku | | | 15,000,000 | 30,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Atambua | | | Jumlah buku yang diilid | | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara | 1 unit | | | 25,000,000 | 80,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | - | - | |
| 5 | 06 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 5 unit | | | - | - | |
| 5 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 28,000,000 | 40,500,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah materai yang disediakan | 375 lembar | | | 1,500,000 | 4,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah rekening listrik, telepon dan air | 3 rekening | | | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki | 10 unit | | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Disediakan | 10 jenis | | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 20,000,000 | 150,000,000 | |
| 5 | 06 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara | 12 unit | | | 20,000,000 | 150,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | | | MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERBATASAN | | | | | 460,606,704 | 560,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.01 | | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | | | | | | Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | 100% | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan | 7 kali | | | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | | | | | | Terlaksananya Kewilayahan Perbatasan | 100% | 270,606,704 | 350,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan koordinasi perbatasan yang dilakukan | 7 kali | | | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan | 7 kali | | | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.02 | 03 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan pemeliharaan tanda batas | 50 kali | | | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.02 | 04 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan pemeliharaan tanda batas daerah | 100 kali | | | 50,606,704 | 70,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--------------------------------------|----|----|------|----|--|---|-----|------|--|-----------|-----|------|----------------------|----------------------|------|
| 5 | 06 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan | 7 kali | | | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.03 | | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | | | | | | | 100% | 140,000,000 | 140,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | Kab. Belu | | | Jumlah kegiatan pengendalian | 50 kali | | | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 5 | 06 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | Kab. Belu | | | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan perbatasan | 1 dokumen | | | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT | | | | | | | | | | | | | 6,626,693,142 | 6,626,693,142 | |
| 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 6,626,693,142 | 6,626,693,142 | |
| 6 | 01 | 01 | | | | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 4,548,211,550 | 4,156,693,142 | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 191,431,770 | 241,431,770 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah dokumen laporan evaluasi LKIP, LPPD. OPD yang dievaluasi, Jumlah auditor yang mengikuti bimtek, diklat | 1 dokumen | | | 191,431,770 | 241,431,770 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 4,045,279,780 | 3,233,261,372 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan | 14 Bulan | | | 3,848,279,780 | 3,023,261,372 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan | orang | | | 197,000,000 | 210,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 106,500,000 | 314,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | Lembar | | | 2,500,000 | 25,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|---|---|-------------|--|------------|--|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Kali | | | 100,000,000 | 285,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 50,000,000 | 98,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah Benda Pos Yang dibeli | Lembar | | | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Rek Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rek | | | 20,000,000 | 33,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | | | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jenis | | | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 155,000,000 | 270,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara | unit | | | 150,000,000 | 245,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara/direhabilitasi | unit | | | 5,000,000 | 25,000,000 | |
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | Presentase Capaian Target Pengawasan | 100% | | | | | 1,448,481,592 | 1,840,000,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | Terlaksananya Pengawasan Internal | 100% | 1,448,481,592 | 1,840,000,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah obyek yang diperiksa. Jumlah aparatur yang dinilai (penilaian angka kredit) | 413 obrik | | | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan | 6 LHR | | | 240,000,000 | 290,000,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah laporan hasil reviu dokumen keuangan | LHR | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah kasus pengaduan yang ditangani | pengaduan | | | 108,481,592 | 200,000,000 | |
| 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | Level Kapabilitas APIP | 100% | | | | | 630,000,000 | 630,000,000 | |
| | | | | | | | Persentase unit kerja / OPD yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK / WBBM | 100% | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | Terwujudnya Pelayanan Masyarakat tanpa adanya pungutan liar | 100% | 365,000,000 | 365,000,000 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah dokumen laporan satgas sapu bersih pungutan liar | 12 laporan | | | 365,000,000 | 365,000,000 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | Terlaksananya Pendampingan dan asistensi | 100% | 265,000,000 | 265,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|--|----|---|---|-----|------|---|-------------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|--|
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah dokumen laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi | laporan | | | 265,000,000 | 265,000,000 | | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | 32,089,641,608.00 | 31,154,276,737.92 | | |
| KECAMATAN KOTA ATAMBUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | 5,747,258,104 | 5,864,884,848 | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 4,331,258,104 | 4,420,564,848 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 3,977,279,529 | 4,059,506,701 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah gaji dan tunjangan | 14 bulan | | | 3,848,279,779 | 3,944,486,773 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah pengelola keuangan SKPD dan Tenaga Honorere | 21 orang | | | 128,999,750 | 131,579,745 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 126,577,875 | 129,109,433 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan | 25 jenis | | | 8,357,845 | 8,525,002 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah alt tulis kantor yang disediakan | 165 jenis | | | 25,000,000 | 25,500,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah dokumen cetak dan penggandaan | 1229 Lembar | | | 30,720,030 | 31,334,431 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 1673 dos | | | 12,500,000 | 12,750,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 55 kali | | | 50,000,000 | 51,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | - | - | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua | | | Jumlah pengadaan bangunan lainnya | 2 paket | | | - | - | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 112,400,700 | 114,648,714 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah benda pos yang dibeli | 1780 Lembar | | | 9,282,900 | 9,468,558 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah rekening listrik, air, dan telepon | 15 rekening | | | 57,365,500 | 58,512,810 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | | Jumlah alat/bahan kebersihan | 103 jenis | | | 45,752,300 | 46,667,346 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah tenaga honorer | 1 orang | | | | | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|---|-----|--|--------------------|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 115,000,000 | 117,300,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah kendaraan dinas Jumlah tenaga honorer | 17 unit 1 orang | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah mebel yang terpelihara | 25 unit | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan kerja yang terpelihara | 43 unit | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah geedung yng terpelihara | 6 unit | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 40,000,000 | 40,800,000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan | | Tersedianya Data Profil Kelurahan dan Kecamatan | 100 % | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah pelayanan masyarakat yang diadakan | 1 paket | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 1,361,000,000 | 1,388,220,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 190,000,000 | 193,800,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah pembangunan yang diadakan | 4 paket | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua | | Jumlah kegiatan yang diadakan | 4 paket | | | 150,000,000 | 153,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Evaluasi Kelurahan | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah kegiatan evaluasi | 7 kali | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | 1,171,000,000 | 1,194,420,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan | | Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPM DAN KADER) | 320 orang | | | 1,161,000,000 | 1,184,220,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|--|--|--|-------------------------|---|------|-------------------|--------------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 0% | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan | unit | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | unit | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 10,390,000 | 10,390,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah Benda Pos yang dibeli | 220 Lembar 191 surat | | | 2,640,000 | 2,640,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah rekening air dan Listrik | 2 Rek | | | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 3 unit | | | 750,000 | 750,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli | 10 Jenis | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 29,000,000 | 46,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 6 unit | | | 25,000,000 | 37,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 unit | | | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara | 1 Unit | | | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | % | | | | 18,412,000 | 102,926,718 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 18,412,000 | 102,926,718 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah kegiatan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa yang dilaksanakan | 39 kali | | | 8,412,000 | 32,159,718 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan berupa dokumen | 4 dokumen | | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | Jumlah Lomba Desa, Lomba Posyandu, BBGRM, HPS, kegiatan tan PKK | 6 kali | | | 5,000,000 | 50,767,000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | 3,000,000 | 15,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------|-----|---|--|--|------|--|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 3,000,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | | Jumlah RAKOR Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | 4 kali | | 3,000,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | % | | | | 3,000,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 3,000,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan | | | | | | 3,000,000 | 15,000,000 | |
| KECAMATAN TASIFETO TIMUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 1,835,150,448 | 2,034,258,490 | 1,761,616,788 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 1,736,150,448 | 1,583,339,096 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 12 Bulan | | 1,735,150,448 | 1,539,421,096 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah keuangan SKPD, jumlah tenaga kontrak | | | 1,000,000 | 43,918,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 25,500,000 | 84,366,900 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan | 10 jenis | | 1,000,000 | 2,070,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan | 10 jenis | | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | 28 Jenis | | 6,000,000 | 13,592,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah jilid Jumlah penggandaan | 170 dokumen 8250 lembar | | 5,000,000 | 6,199,900 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|--|---|-----|--|------------|---|------|-------------------|--------------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah makanan dan minuman tamu | 200 kotak | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 7 kali | | | 10,000,000 | 50,005,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 0% | 11,032,000 | 12,132,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah benda pos yang dibeli | 219 lembar | | | 1,032,000 | 1,032,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah rekening | 2 rekening | | | 10,000,000 | 11,100,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 0% | 2,000,000 | 16,278,792 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan | 2 unit | | | 2,000,000 | 16,278,792 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah gedung kantor yang diadakan | 1 unit | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 30,468,000 | 65,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara | 7 unit | | | 25,968,000 | 56,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 4 unit | | | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah gedung kantor yang direhab | 1 unit | | | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | % | | | | | 22,500,000 | 201,482,502 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 22,500,000 | 201,482,502 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Kegiatan Musdus, Musdes dan Musrenbangdes yang dilaksanakan | 72 kali | | | 7,500,000 | 72,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan | 4 dokumen | | | 7,500,000 | 50,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan | | | | | | | 7,500,000 | 79,482,502 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | | 7,500,000 | 71,159,200 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|------------------------------------|--|-----|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah rekening yang dibayarkan | 2 rek | | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan yang dibeli | jenis | | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 0% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | unit | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | unit | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | | | | | 28,473,544 | 55,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 28,473,544 | 55,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah kegiatan fasilitasi forum perencanaan pembangunan di desa | 6 desa | | 8,473,544 | 35,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah Kegiatan Movev yang dilaksanakan | 4 kali | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah Lomba Desa, Lomba Posyandu, BBGRM, Kegiatan PKK, Seni Budaya dan Keolahraagaan | kali | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah RAKOR Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | 4 kali | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | % | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan | | | Jumlah kegiatan fasilitasi | 4 kali | | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | |
|--------------------|-------------------|-----------|---|--|--|--------------------------------------|-----|--|--|--|---------------|---------------|------------|
| KECAMATAN LAMAKNEN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 1,445,247,346 | 1,535,035,547 | | |
| | | | | | | | | | | 1,423,143,146 | 1,288,863,155 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 1,351,243,346 | 1,154,861,912 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | Bulan | | 1,345,243,346 | 1,121,861,912 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Bulan | | 1,500,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah keuangan SKPD, jumlah tenaga kontrak | Orang | | 4,500,000 | 18,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 22,999,800 | 57,101,243 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan | 10 jenis | | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan | 10 jenis | | 6,499,800 | 6,499,800 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar provinsi | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | 28 Jenis | | 15,000,000 | 48,101,443 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | % | 10,900,000 | 11,900,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah benda pos yang dibeli | lembar | | 1,700,000 | 2,700,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah rekening | rekening | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | % | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan | unit | | - | - | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | | |
|--------------------------------|-----|-----|------|-----|---|--------------------------------------|--|------|---|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | Jumlah mebel yang diadakan | unit | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | unit | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | | 38,000,000 | 65,000,000 |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara | unit | | 35,000,000 | 50,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | unit | | 1,500,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara | unit | | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | % | | | | 17,104,200 | 226,172,392 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 17,104,200 | 226,172,392 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | | | | 17,104,200 | 226,172,392 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan | | | Jumlah Rakor Forkopincam | kali | | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| KECAMATAN KAKULUK MESAK | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | 2,037,231,176 | 2,231,432,834 | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | | 2,023,231,176 | 2,081,432,834 | |
| | | | | | | | 100% | | | | | | | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|---|-----|--|----------------------------|-----|--|------|---------------|---------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 1,938,731,176 | 1,842,186,414 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan | 14 bulan | | | | 1,916,231,176 | 1,782,866,414 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah pengelola keuangan OPD dan Jumlah Tenaga Kontrak | 5 orang | | | | 22,500,000 | 59,320,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah PNS yang mengikuti diklat | orang | | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 29,700,000 | 89,146,420 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 9 jenis | | | | 1,000,000 | 9,426,420 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan | 14 jenis | | | | 1,500,000 | 6,655,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan | 40 jenis | | | | 7,500,000 | 15,865,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan | 15 dokumen 12300 lembar | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah makanan dan minuman tamu | 528 kotak | | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 12 kali | | | | 10,000,000 | 40,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | | - | 35,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli | 1 unit | | | | - | 35,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | | 14,000,000 | 22,850,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | jumlah benda pos yang disediakan dan jumlah surat yang dikirim jumlah benda pos yang disediakan dan jumlah surat yang dikirim | 250 lembar 350 surat | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah rekening yang dibayar | 3 rekening | | | | 10,000,000 | 17,850,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan yang diperbaiki | 12 unit | | | | 1,500,000 | 2,500,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|---------------------------|----|----|------|-----|--|---|-----|--|--|------------------------------------|-----|------|---------------|---------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | | 100% | 40,800,000 | 92,250,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki | 10 unit | | | 34,800,000 | 57,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 3 unit | | | 1,000,000 | 5,250,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 unit | | | 2,500,000 | 20,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | Jumlah rumah dinas/rumah jabatan yang dipelihara | 1 unit | | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | | | | | 12,000,000 | 140,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 12,000,000 | 140,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 1 kegiatan | | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat | 7 kegiatan | | | 5,000,000 | 120,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 12 kali | | | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | | | | | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan | | | jumlah sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | 12 kali | | | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| KECAMATAN RAIMANUK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 1,909,369,324 | 1,375,873,646 | |

| (1) | | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|--------------------------------------|--|---|------------------|---|------|----------------------|----------------------|------|
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | 100% | | | | 1,887,142,424 | 1,309,504,376 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 1,812,369,324 | 1,192,097,876 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN | 14 Bulan | | | 1,767,369,324 | 1,131,773,876 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah keuangan SKPD, jumlah tenaga kontrak | orang | | | 45,000,000 | 60,324,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 32,602,700 | 69,736,100 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah komponen instalasi listrik | 6 jenis | | | 1,000,000 | 3,090,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah ATK yang disediakan, jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara | 40 Jenis. 1 Unit | | | 7,500,000 | 19,973,400 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah barang cetak dan penggandaan | 22009 lembar | | | 6,602,700 | 6,602,700 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 200 kotak | | | 2,500,000 | 10,070,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah perjalanan dinas keluar daerah | 4 kali | | | 15,000,000 | 30,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | % | 5,670,400 | 9,170,400 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah benda pos yang dibeli | 150 lembar | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah rekening yang dibayarkan | 2 rekening | | | 2,500,000 | 6,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 2 unit | | | 1,670,400 | 1,670,400 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 36,500,000 | 38,500,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------------------------|----|----|------|-----|--|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 6 unit | | 35,000,000 | 37,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | | Jumlah pemeliharaan peralatan mesin | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | | | | 22,226,900 | 66,369,270 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | % | | | | 22,226,900 | 66,369,270 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 10 kali | | 22,226,900 | 66,369,270 | |
| KECAMATAN LASIOLAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | 1,364,597,088 | 1,327,817,934 | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 1,344,597,088 | 1,218,817,934 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 100% | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 100% | 1,265,597,088 | 1,061,330,046 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | | 1,201,597,088 | 966,119,046 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD Jumlah Tenaga Kontrak Daerah | 6 orang | | 64,000,000 | 95,211,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 100% | 33,500,000 | 92,757,388 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 10 jenis | | 1,000,000 | 2,198,100 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | jenis | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah atk yang disediakan | 10 jenis | | 7,500,000 | 14,967,154 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Barang Cetak Jumlah Barang Penggandaan | 200 dokumen 25000 lembar | | 7,500,000 | 8,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Makanan dan Minuman Tamu | 200 kotak | | 2,500,000 | 10,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|--|-------------------------------|--|-----|---|------------|---|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah RAKOR dan Konsultasi | 7 kali | | | 15,000,000 | 57,092,134 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 0% | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 | unit | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Mebel yang diadakan | unit | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan | unit | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 7,650,000 | 9,303,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Benda Pos Yang dibeli | 250 lembar | | | 1,650,000 | 1,650,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Rekening | 3 rekening | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Peralatan/bahan Kebersihan yang dibeli | 10 jenis | | | 1,000,000 | 2,653,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 37,850,000 | 55,427,500 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara | 6 unit | | | 35,000,000 | 51,927,500 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara | 1 unit | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 3 unit | | | 1,850,000 | 2,500,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan | % | | | | | 15,000,000 | 95,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 15,000,000 | 95,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah kegiatan fasilitasi forum perencanaan pembangunan di desa | 7 desa | | | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Kegiatan Monev yang dilaksanakan | 4 dokumen | | | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah Lomba Desa, Lomba Posyandu, BBGRM, Kegiatan PKK, Seni Budaya dan Keolahraagaan | 6 kali | | | 5,000,000 | 65,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | | 5,000,000 | 14,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|------------------------|----|----|------|-----|---|-------------------------------|-----|-----|--|----------|-----|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 5,000,000 | 14,000,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu | | | Jumlah RAKOR Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | 4 kali | | 5,000,000 | 14,000,000 | |
| ATAMBUA SELATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | 5,838,819,689 | 5,958,277,664 | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 4,338,852,333 | 4,428,310,961 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 3,953,204,333 | 4,034,950,001 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | 3,823,204,333 | 3,918,784,441 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi laporan keuangan | 12 bulan | | 130,000,000 | 132,600,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 205,280,000 | 209,385,600 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | | 87,780,000 | 89,535,600 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Atambua | | | Tersedianya makanan dan minuman | 12 bulan | | 12,500,000 | 12,750,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Terwujudnya sinkronisasi program antara Pempus, Propinsi dan Pemda | 12 Bulan | | 75,000,000 | 76,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Atambua | | | Tersedianya peralatan gedung kantor | 12 bulan | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 72,300,000 | 73,746,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor | 12 Bulan | | 7,500,000 | 7,650,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Terpenuhinya kebutuhan akan air, listrik dan komunikasi | 12 Bulan | | 44,800,000 | 45,696,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Terciptanya lingkungan dan ruang kerja yang bersih | 12 Bulan | | 20,000,000 | 20,400,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|--|----------------------|-----|---|----------|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 108,068,000 | 110,229,360 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Atambua Selatan | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor | 12 Bulan | | | 78,068,000 | 79,629,360 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Atambua Selatan | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Atambua Selatan | | Meningkatnya kualitas gedung kantor | 12 Bulan | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 47,013,243 | 47,953,508 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | 47,013,243 | 47,953,508 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Atambua Selatan | | Meningkatnya keterampilan Aparat Kecamatan dan melestarikan budaya daerah | 12 Bulan | | | 47,013,243 | 47,953,508 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | - | - | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Atambua Selatan | | Terselesainya Hasil Kerja Kader Posyandu, LPM dan RT/RW | 12 Bulan | | | - | - | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 1,362,954,113 | 1,390,213,195 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 224,954,113 | 229,453,195 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Atambua Selatan | | Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan | 12 Bulan | | | 104,954,113 | 107,053,195 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Atambua Selatan | | Meningkatnya kapasitas kelompok usaha, tersedianya tenaga terlatih tanggap bencana. | 12 Bulan | | | 100,000,000 | 102,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Evaluasi Kelurahan | Kec. Atambua Selatan | | Tersedianya data profil kelurahan | 12 Bulan | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | 1,138,000,000 | 1,160,760,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Atambua Selatan | | Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPM DAN KADER) | | | | 1,138,000,000 | 1,160,760,000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 35,000,000 | 35,700,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|----------------------|----|----|------|--|----------------------|-----|------|--|----------|-----|--------------------------|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 35,000,000 | 35,700,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Atambua Selatan | | | | | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Atambua Selatan | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 55,000,000 | 56,100,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 55,000,000 | 56,100,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Atambua Selatan | | | Meningkatnya pelayanan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | 12 Bulan | | | 30,000,000 | 30,600,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Atambua Selatan | | | Meningkatnya kapasitas aparatur kelurahan | 12 Bulan | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| ATAMBUA BARAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | KECAMATAN | | | | | | | | 5,072,046,678 | 5,176,169,193 | |
| 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 3,880,756,678 | 3,961,053,393 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 100% | | | | | 3,460,119,746 | 3,532,003,722 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Atambua | | | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | | Meningkatnya kinerja ASN | 3,176,377,946 | 3,255,787,395 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Atambua | | | Terselesaikannya Pekerjaan Pengelola Keuangan | 100 % | | | 283,741,800 | 289,416,636 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang Handal | 100 % | | | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 170,781,932 | 174,197,571 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | | Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | | | 5,000,000 | 5,100,000 | |

| (1) | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|-----|------|-----|--|--------------------------|-----|-----|--|-------|------|--------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor | 100 % | | 56,127,575 | 57,250,127 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 25,000,000 | 25,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | | Tersedianya Makanan dan Minuman | 100 % | | 12,500,000 | 12,750,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | | Terwujudnya Sinkronisasi Program Antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemda | 100 % | | 72,154,357 | 73,597,444 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | | | | | | 5,000,000 | 5,100,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | | Tersedianya peralatan gedung kantor | 100 % | | 5,000,000 | 5,100,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 117,855,000 | 120,212,100 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor | 100 % | | 10,000,000 | 10,200,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Terpenuhinya Kebutuhan akan Listrik, Air dan Komunikasi | 100 % | | 67,200,000 | 68,544,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Terciptanya Lingkungan dan Ruang Kerja yang Bersih | 100 % | | 40,655,000 | 41,468,100 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 112,000,000 | 114,240,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua Barat | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor | 100 % | | 87,000,000 | 88,740,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua Barat | | | Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor | 100 % | | 5,000,000 | 5,100,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua Barat | | | Meningkatnya kualitas gedung kantor | 100 % | | 20,000,000 | 20,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | | | | | | | 15,000,000 | 15,300,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Atambua Barat | | | Tersedianya Data Hasil Monitoring dan Evaluasi | 100 % | | 15,000,000 | 15,300,000 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 60,000,000 | 61,200,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | 20,000,000 | 20,400,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Atambua Barat | | | Tersedianya Data Profil Kelurahan dan Kecamatan | 100 % | | 20,000,000 | 20,400,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | 40,000,000 | 40,800,000 |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----------------------------------|----|----|------|----|---|---|-----|-----|--|-------|-----|-----|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Atambua Barat | | | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan | 100 % | | | 40,000,000 | 40,800,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 1,051,290,000 | 1,072,315,800 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 150,000,000 | 153,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan | | | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Lingkungan Pemukiman | 100 % | | | - | - | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan | | | Meningkatnya Kapasitas Kelompok Usaha dan Meningkatnya Gizi Balita dan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga | 100 % | | | 150,000,000 | 153,000,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | 901,290,000 | 919,315,800 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan | | | Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPM DAN KADER) | | | | 901,290,000 | 919,315,800 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 35,000,000 | 35,700,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 35,000,000 | 35,700,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | 10,000,000 | 10,200,000 | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 45,000,000 | 45,900,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 45,000,000 | 45,900,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan | | | Meningkatnya Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 100 % | | | 20,000,000 | 20,400,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan | | | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kelurahan | 100 % | | | 25,000,000 | 25,500,000 | |
| KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 1,744,247,650 | 1,368,972,533 | |

| (1) | | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|-----|------|-----|--|----------------------------|--|--|--|------|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 1,734,247,650 | 1,238,248,533 | |
| | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 1,645,247,650 | 1,006,992,885 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Lamaknen Selatan | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN | 14 Bulan | | 1,623,247,650 | 988,142,885 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Lamaknen Selatan | | Jumlah pengelola Keuangan SKPD | 6 Orang | | 22,000,000 | 18,850,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 23,500,000 | 93,737,648 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Lamaknen Selatan | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 Jenis | | 1,000,000 | 6,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lamaknen Selatan | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | 3 unit | | - | 100,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Lamaknen Selatan | | Jumlah Alat tulis Kantor yang diadakan | 30 Jenis | | 5,000,000 | 14,450,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Lamaknen Selatan | | Jumlah barang cetakan Jumlah Penggandaan | 7 Dok 24000 Lembar | | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Lamaknen Selatan | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 200 Kotak | | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | Jumlah rapat dan koordinasi | 8 kali | | 10,000,000 | 53,187,648 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | % | 16,500,000 | 35,048,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lamaknen Selatan | | Jumlah benda pos yang dibeli Jumlah paket pengeiriman | 400 lembar 12 kali | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Lamaknen Selatan | | Jumlah rekening | 6 rekening | | 10,000,000 | 24,550,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Lamaknen Selatan | | Jumlah Peralatan Kebersihan yang diadakan | 22 Jenis | | 5,000,000 | 8,998,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor | 100% | 49,000,000 | 102,470,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Lamaknen Selatan | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | 6 Unit | | 43,000,000 | 82,420,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--------------------------------|----|----|------|-----|---|---------------------|-----------------------------------|------|--|-----------|-----|----------------------|----------------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Lamaknen Selatan | | | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 6 Unit | | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Lamaknen Selatan | | | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 6 Unit | | 2,500,000 | 9,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Lamaknen Selatan | | | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara | 1 Unit | | 2,500,000 | 9,550,000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | 5,000,000 | 60,724,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 5,000,000 | 60,724,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di | Lamaknen Selatan | | | Jumlah Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara Nasional Indonesia, dan Instansi | 12 Kali | | 5,000,000 | 60,724,000 | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | | | % | | | | 5,000,000 | 70,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 5,000,000 | 70,000,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Lamaknen Selatan | | | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban | 12 kali | | 5,000,000 | 70,000,000 | |
| KECAMATAN NANAET DUBESI | | | | | | | | | | | | 1,446,495,049 | 1,074,560,784 | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 100% | | | | 1,428,631,349 | 950,642,297 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | 1,304,495,049 | 761,471,597 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | | | | | | 10,294,300 | 10,294,300 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | 43,000,000.00 | 48,596,000.00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 22,850,000 | 67,838,100 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | 1,000,000 | 3,488,100 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | 4,350,000 | 4,350,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah Makanan dan Minuman Tamu | 200 Kotak | | 2,500,000 | 10,000,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|--|----|----|------|----|---|-----------------------------------|-----|-----|---|-------------------------|--|------|----------------------|----------------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi dan Luar Provinsi | | | Jumlah perjalanan Dinas ke Luar Daerah | 4 kali | | | 15,000,000 | 50,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 7,992,000 | 7,992,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah Benda Pos yang dibeli Jumlah surat yang dikirim | 220 Lembar 191 surat | | | 1,992,000 | 1,992,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah rekening air dan Listrik | 2 Rek | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 3 unit | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | | 40,000,000 | 54,450,300 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | unit | | | 40,000,000 | 54,450,300 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 12,863,700 | 114,318,487 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada | | | | | | | | 12,863,700 | 114,318,487 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | 4 kegiatan | | | 12,863,700 | 114,318,487 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum | % | | | | | | 5,000,000 | 9,600,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | | | | | | | | 5,000,000 | 9,600,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Nanaet Duabesi | | | Jumlah rakor forkopincam | 4 kali | | | 5,000,000 | 9,600,000 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | 3,424,094,558 | 3,424,094,558 | |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | 3,424,094,558 | 3,424,094,558 | |

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|-----|------|--|--|--|-----|--|----------------|---------------|---------------|------|
| 8 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. | | | | 2,546,096,027 | 2,371,918,120 | |
| | | | | | 100% | | | | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 20,000,000 | 150,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi | 12 Kali | 20,000,000 | 150,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2,286,020,227 | 1,877,037,820 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Belu | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan | 14 Bulan | 2,220,020,227 | 1,805,455,320 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Belu | | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan | 5 orang | 66,000,000 | 71,582,500 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 70,096,600 | 174,901,100 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Atambua | | Jumlah Komponen Listrik yang disediakan | 8 Jenis | 4,995,700 | 4,995,700 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Atambua | | Jumlah ATK yang disediakan | 35 Jenis | 10,000,000 | 27,304,500 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Atambua | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | lembar/dokumen | 27,600,900 | 27,600,900 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Atambua | | Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan | 1000 Kotak | 2,500,000 | 15,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi & Luar Provinsi | | Jumlah Rapat dan Koordinasi | 14 Kali | 25,000,000 | 100,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 10,000 | 10,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Atambua | | Jumlah Meubeler yang diadakan | 11 Unit | - | - | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | Jumlah Peralatan yang diadakan | 1 Unit | - | - | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Atambua | | Jumlah Gedung kantor yang di bangun | 1 Unit | 10,000 | 10,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 43,850,000 | 43,850,000 | |

| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|----|---|---|---|-------------|--|--|---|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Atambua | | | Jumlah benda pos yang di beli | 1400 Lembar | | | 6,900,000 | 6,900,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Atambua | | | Jumlah Rekening yang di bayar | 3 Rekening | | | 16,950,000 | 16,950,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Atambua | | | Jumlah peralatan yang disediakan | 12 Jenis | | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 126,119,200 | 126,119,200 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Atambua | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara | 18 Unit | | | 118,119,200 | 118,119,200 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Atambua | | | Jumlah Peralatan Kerja yang di pelihara | 12 Unit | | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Atambua | | | Jumlah Gedung Kantor yang di rehab | 1 Unit | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | prosentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan | 100% | | | | | 175,822,093 | 200,000,000 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | Terlaksananya Koordinasi Terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100% | 175,822,093 | 200,000,000 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah Pemantau Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Jumlah Peserta Kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Jumlah Peserta Pendidikan Penguatan Sikap Mental Masyarakat | 35 orang 40 orang 50 orang 50 orang | | | 175,822,093 | 200,000,000 | |
| 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | persentase etnis/ suku / agama / ormas dan LSM yang memahami pendidikan politik | 100% | | | | | 452,176,438 | 452,176,438 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|-----|----|----|------|-----|---|---|---|------|--|---|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100% | 452,176,438 | 452,176,438 | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah Anggota Tim DESK 49 orang Jumlah Parpol Penerima Dana Hibah 11 Parpol Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi 43 orang Jumlah Pemantau 36 orang Jumlah Pemantau Perkembangan Politik di Daerah 50 orang Jumlah Peserta Bimtek LPJ Parpol Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Politik Masyarakat, ASN dan | | | 452,176,438 | 452,176,438 | | |
| 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI | | prosentase penanganan konflik ormas | 100% | | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100% | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang di Verifikasi 76 Orkemas Jumlah Pemutakhiran Data Orkemas 76 Orkemas Jumlah Pengawas Orkemas 26 orang Jumlah Peserta 75 orang | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan bangsa | 100% | | | | | 75,000,000 | 150,000,000 | |

| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|----|----|------|-----|---|---|---|--|--|--|------|-----------------|-----------------|------|
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 75,000,000 | 150,000,000 | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Jumlah Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Sekretariat Jumlah Pendata Tokoh Adat Jumlah Pengendali Keamanan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh Jumlah Peserta Kegiatan | 20 orang 24 orang 24 orang 75 orang 75 orang | | | 75,000,000 | 150,000,000 | |
| 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | presentase penanganan kejadian terkait konflik sosial | 100% | | | | 75,000,000 | 150,000,000 | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100% | 75,000,000 | 150,000,000 | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Jumlah Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini daerah Jumlah Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah Pemantau Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Jumlah Pemantau Situasi | 50 orang 50 orang 12 Kali 24 Kali 24 orang 24 orang | | | 75,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 906,334,772,694 | 965,926,121,933 | |

BUPATI BELU

TAOLIN AGUSTINUS